

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, sebagaimana yang tercantum dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia menyadari bahwa akan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan. Walaupun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan dengan tujuan menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dalam konteks ini, peran Kota Pasuruan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting dalam mencapai visi nasional tersebut. Peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, menjadi sangat krusial dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Pencapaian tujuan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah, termasuk Kota Pasuruan. Oleh karena itu, RPJPN, RPJPD provinsi, hingga RPJPD kabupaten/kota membentuk satu kesatuan yang saling terkait, di mana wilayah yang lebih kecil memberikan kontribusi terhadap pencapaian pemerintah pada tingkat atasnya. Sebagai contoh, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045 menjadi landasan untuk menyusun RPJPD Kota Pasuruan. Hal ini sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur sistem perencanaan pembangunan di Indonesia, terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam tahap awal penyusunan RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045, langkah-langkah penyusunan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang RPJPD. Pendekatan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan pembangunan di masa depan serta merumuskan strategi sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Poin-poin strategis dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur juga menjadi panduan bagi Kota Pasuruan dalam menyusun RPJPD.

Selanjutnya, dalam penyusunan RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045, perkembangan isu-isu global, nasional, dan lokal menjadi perhatian. Dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi faktor pertimbangan dalam merumuskan rencana pembangunan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder lokal untuk memastikan bahwa RPJPD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Kota Pasuruan.

Tahap akhir dalam penyusunan RPJPD melibatkan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir. Kota Pasuruan telah melewati serangkaian tahapan, seperti kick-off meeting, forum perangkat daerah, forum konsultasi publik, penyamaan persepsi dengan eksekutif dan DPRD,

Konsultasi Rancangan Awal dengan Gubernur melalui Bappeda Provinsi Jawa Timur dan musrenbang. Selanjutnya adalah kesepakatan dengan DPRD, dan konsultasi dengan gubernur. Dengan demikian, RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045 menjadi instrumen strategis yang berkontribusi pada terwujudnya visi Indonesia Emas Tahun 2045 dan visi pembangunan provinsi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yakni Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -

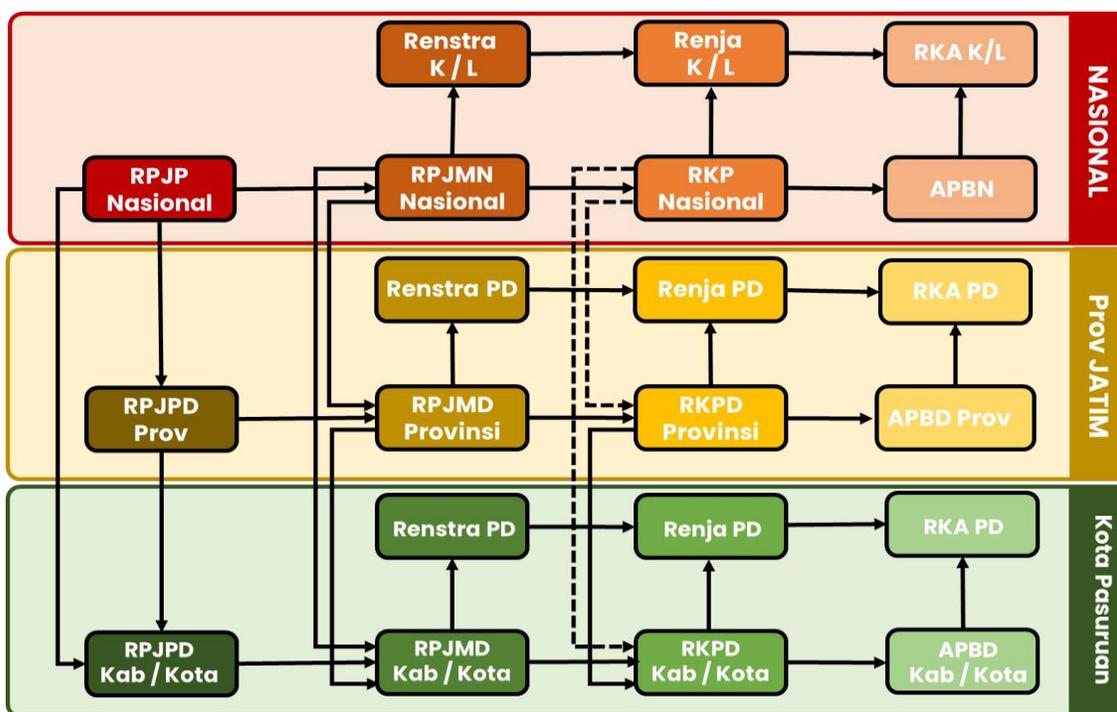
- Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memberikan panduan teknis untuk penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai panduan utama pembangunan, memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Keterhubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui alur perencanaan dan penganggaran yang terstruktur.

RPJPD berperan sebagai dokumen perencanaan berjangka waktu dua puluh tahunan yang merupakan penjabaran dari empat periode RPJMD. RPJMD, pada gilirannya, dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merinci perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Pasuruan. Interkoneksi antara dokumen Perubahan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 dengan rangkaian dokumen perencanaan lainnya dapat diobservasi melalui ilustrasi gambar yang tersedia.



Gambar I. 1 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga RPJPN menjadi pedoman bagi RPJPD Kota Pasuruan dengan melihat arah pembangunan nasional 2025-2045;
2. RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Penyelarasan terhadap RPJPD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
3. RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan RPJMD pada empat periode perencanaan jangka menengah. Dengan demikian dalam penyusunannya RPJPD Kota Pasuruan dibagi kedalam 4 arah kebijakan yakni tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045.
4. Selain dokumen-dokumen terkait seperti yang dijelaskan pada gambar di atas pada hakikatnya penyusunan RPJPD Kota Pasuruan tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya sebagai landasan seperti KLHS RPJPD Kota Pasuruan, RTRW dan lain sebagainya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 – 2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen *stakeholders* yang meliputi pemerintah, dunia usaha swasta, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kota Pasuruan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibagi menjadi 4 periodisasi RPJMD. Selain itu RPJPD Kota Pasuruan tentunya menjadi perhatian calon kepala daerah yang akan menyusun Visi dan Misi pembangunan, dimana supaya pembangunan jangka panjang dapat linear dan terpantau dengan baik, calon kepala daerah harus memperhatikan arah kebijakan RPJPD sehingga visi dan misi yang dirancang telah sesuai dengan fokus pembangunan pada periode tertentu.

Tujuan penyusunan RPJPD Kota Pasuruan adalah untuk:

1. Menetapkan visi, misi, arah pembangunan, dan sasaran pokok Kota Pasuruan untuk waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2045, dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan daerah guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan; dan
2. Memberikan kontribusi yang cukup berarti, sebagai upaya mencapai visi dan misi pembangunan nasional serta menjawab tantangan perubahan lingkungan sosial yang cukup dinamis dan tentunya mencapai target *Sustainable Development Goals*.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian dikerucutkan melalui aturan yang lebih teknis kembali melalui Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang terdiri atas 6 (enam) bab, namun sesuai perkembangannya penyusunan RPJPD disempurnakan melalui dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang ditunjukkan melalui refleksi pembangunan, gambaran kinerja penyelenggaraan urusan yang mana tahapan pada bab ini tidak bisa terlepas bab-bab setelahnya yakni penentuan isu strategis dan visi dan misi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisikan masalah dan isu strategis di Kota Pasuruan berdasarkan hasil analisis data. Analisis permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kota Pasuruan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang relevan dan efektif sesuai dengan konteks daerahnya.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan visi dan misi Kota Pasuruan selama 20 tahun ke depan yang juga dilengkapi dengan sasaran visi serta indikator sasaran visi beserta target pembangunan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi Kota Pasuruan sampai dengan Tahun 2045 serta sasaran pokok yang disertai dengan indikator dan target Kota Pasuruan hingga tahun 2045

BAB VI PENUTUP

Berisikan pedoman transisi, kaidah pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan serta penutup.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Pasuruan

2.1.1. Geografi dan Topografi Wilayah

Kota Pasuruan adalah sebuah kota yang berada di jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali yang menjadikan kota dengan luas wilayah 39,00 km² atau sekitar 0.07% luas Provinsi Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Dengan luas wilayah tersebut, Kota Pasuruan merupakan daerah terkecil kelima di Provinsi Jawa Timur yang secara astronomis terletak antara 112° 45'–112° 55' Bujur Timur dan 7° 35'–7° 45' Lintang Selatan.

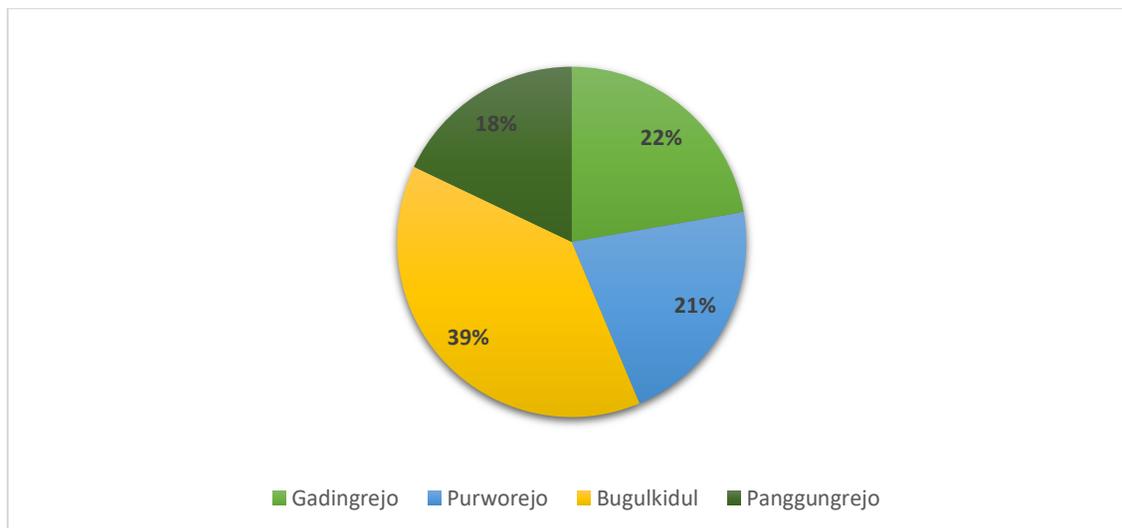


Gambar II. 1 Peta Wilayah Kota Pasuruan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2021-2041

Secara administratif, Kota Pasuruan berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan-kecamatan Kabupaten Pasuruan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kraton, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rejoso, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Pohjentrek serta di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura. Wilayah administratif Kota Pasuruan terbagi ke dalam 4 kecamatan 34 kelurahan. Semula wilayah Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo,

Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. Kecamatan Purworejo adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 8,08 Km², sedangkan Kecamatan Bugul Kidul adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 11,11 Km².



Gambar II. 2 Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Keseluruhan Kota Pasuruan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2024

Secara topografi, sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, tinggi rata-rata wilayah Kota Pasuruan yang hanya 4 m dari permukaan laut menyebabkan kota ini rawan terkena banjir di musim penghujan. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1%, yang melandai dari selatan ke utara, dimana di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat dan menyebabkan kawasan rentan banjir.

Tabel II. 1 Jumlah Kelurahan dan Topografi berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ketinggian di atas Permukaan Laut (m)
1	Purworejo	7	4
2	Bugul Kidul	6	4
3	Gadingrejo	8	4
4	Panggungrejo	13	4
	Jumlah	34	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2024

2.1.2. Geologi

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: sungai Gembong, sungai Petung dan sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan, yang berasal dari daerah vulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah bukit lipatan dan batuan endapan berkapur Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur. Dengan demikian sifat batumannya adalah intermedier sampai agak basis. Lokasi pembentukan tanah aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan lahan yang berada di sekitar muara sungai. Tanah hasil sedimentasi

tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal tambak dan mangrove. Kondisi tanah bertekstur liat, sehingga dalam keadaan basah akan mengembang dan bersifat lekat, sedangkan kalau kering mengkerut, membentuk celah yang keras. Kadar unsur Na dan Cl yang tinggi di bagian utara membuat tanah ini kurang sesuai untuk budidaya tanaman pertanian, tetapi sangat sesuai untuk budidaya tambak dan penggarapan. Tanaman utama pertanian di Kota Pasuruan adalah padi, yang biasa ditanam baik pada musim penghujan maupun kemarau. Sementara budidaya tambak lebih banyak dikembangkan di sepanjang pantai bagian timur dibanding pada bagian barat.

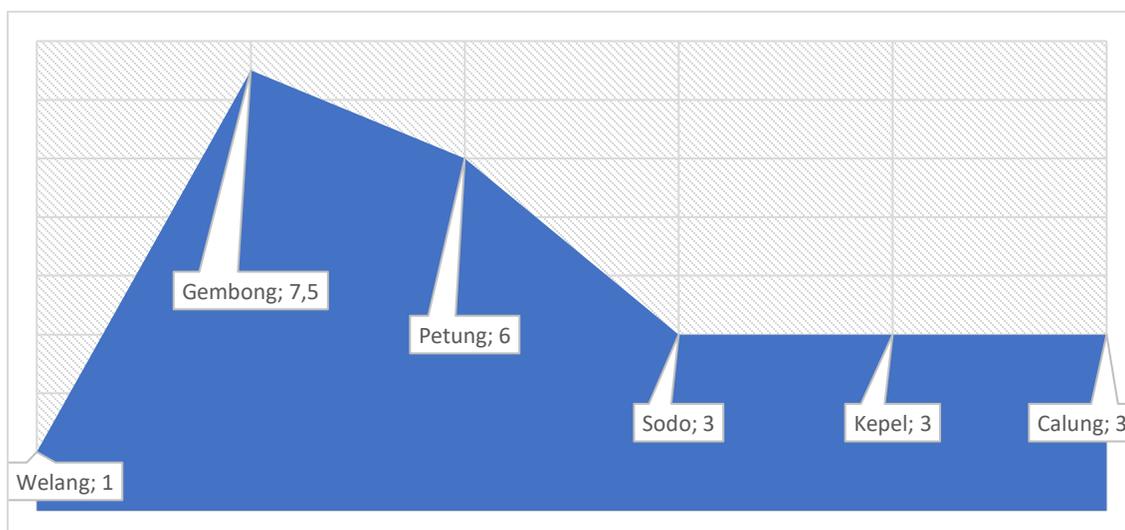
2.1.3. Klimatologi

Kota Pasuruan memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan yang berganti setiap enam bulan sekali. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei-September dan musim penghujan jatuh pada bulan Oktober-April. Iklim tropik basah yang dimiliki Kota Pasuruan dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November-Mei, angin bertiup dari arah utara laut dengan membawa banyak uap air yang menyebabkan musim penghujan di mana-mana, sedangkan pada bulan Juni-Oktober, angin bertiup dari Selatan tenggara dengan sedikit uap air yang menyebabkan musim kemarau atau kekeringan di mana-mana.

Rata-rata jumlah hari hujan tahun 2023 di Kota Pasuruan adalah 11,08 hari, dimana angka tertinggi ada di bulan Februari sebanyak 26 hari dan terendah pada bulan Oktober dengan tidak ada hari hujan. Jumlah curah hujan di tahun 2022 memberikan rata-rata pada angka 937,8 mm, dimana curah hujan tertinggi ada di bulan Agustus sebesar 8888.1 mm dan terendah di bulan Oktober dengan catatan tidak ada curah hujan.

2.1.4. Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Pasuruan hanya terdiri atas air permukaan, yakni sungai. Sebagai wilayah pesisir, wilayah Kota Pasuruan menjadi lintasan ataupun muara sungai besar yang berhulu di kabupaten tetangga. Terdapat tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, yakni: sungai Welang, sungai Petung dan sungai Gembong. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di selat Madura, berkarakter melandai, sehingga seringkali mengalami sedimentasi, terutama di saat musim hujan.



Gambar II. 3 Panjang Sungai di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2024

Mutu air tanah di Kota Pasuruan cukup baik, di mana airnya berasal dari daerah vulkanis yang kaya akan mineral dan unsur hara sehingga kondisi tanahnya relatif subur, kondisi lahan yang demikian sangat cocok dengan pengelolaan lahan pengairan teknis yang dapat diolah setiap waktu. Berhulu di Kabupaten Malang, sungai Welang melintas sepanjang 1 km di sisi barat Kota Pasuruan, tepatnya di wilayah Kelurahan Karangketug dan bermuara di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 2.2 merincikan kondisi sungai yang ada di Kota Pasuruan. Sungai Gembong merupakan sungai terpanjang yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, tepatnya 7,5 km. Sungai ini berhulu di Kabupaten Pasuruan dan melintas dari selatan ke utara, seakan-akan membelah wilayah Kota Pasuruan. Muara sungai Gembong berlokasi di perbatasan Kelurahan Mandaranrejo dengan Kelurahan Ngeemplakrejo. Dengan ukuran yang cukup lebar, muara sungai Gembong dimanfaatkan sebagai pelabuhan tradisional sejak zaman dahulu hingga saat ini. Berhulu di Kabupaten Pasuruan, sungai Petung melintas sepanjang 6 km di sisi timur Kota Pasuruan, dengan lokasi muara di perbatasan Kelurahan Kepel dengan Kelurahan Blandongan.

2.1.5. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia, setiap kegiatan makhluk hidup sangat berkaitan dengan penggunaan lahan. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan. Proses pemanfaatan lahan dan penggunaan lahan dapat merubah kondisi lingkungan biofisik yang cenderung merusak dan mempengaruhi kualitas lahan tersebut. Tata kelola penggunaan lahan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penggunaan lahan eksisting di Kota Pasuruan mencakup berbagai jenis penggunaan, termasuk permukiman, industri, pertanian lahan basah (sawah), pertanian lahan kering, kawasan konservasi, dan berbagai peruntukan lainnya. Penggunaan lahan di Kota Pasuruan didominasi oleh kawasan budidaya dengan luas 3.489,61 hektar atau 97,25% dari total wilayah. Di dalam kawasan budidaya, penggunaan

lahan terbesar adalah untuk permukiman yang mencapai 1.083,98 hektar atau 30,21% dari total wilayah.

Ruang terbuka hijau menempati 883,8 hektar atau 24,63% dari total wilayah, yang menunjukkan komitmen kota terhadap keberlanjutan lingkungan. Lahan tambak/empang mencakup 593,86 hektar atau 16,55%, dan tegalan/ladang mencakup 534,02 hektar atau 14,90%. Industri dan pergudangan menempati 132,05 hektar atau 3,68%, sedangkan fasilitas umum dan perdagangan serta jasa masing-masing menempati 51,31 hektar (1,43%) dan 51,67 hektar (1,44%).

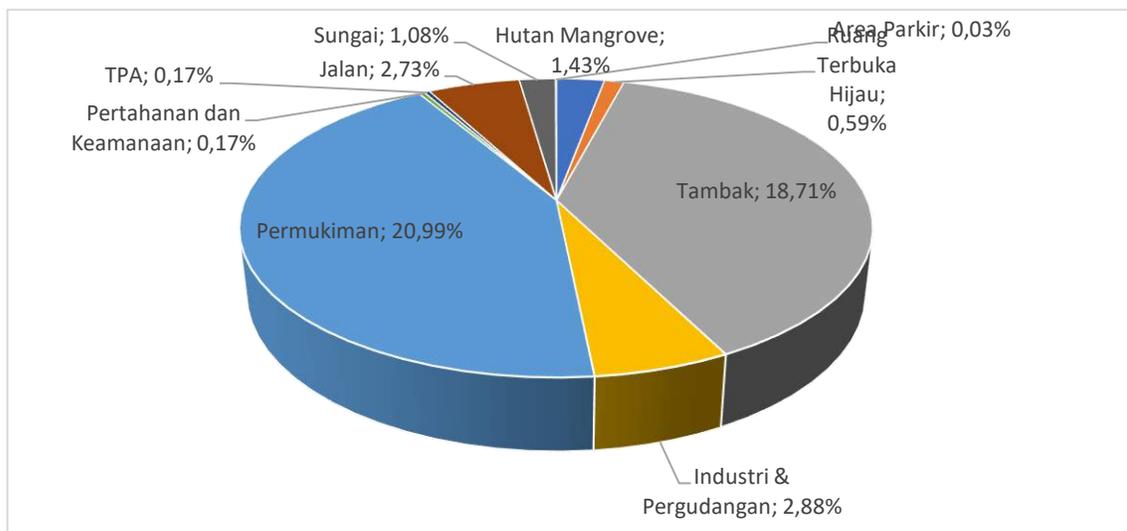
Tabel II. 2 Penggunaan Lahan di Kota Pasuruan

NO	POLA RUANG EKSISTING	LUAS (HEKTAR)	PROSENTASE
A	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Mangrove	75,75	1,94%
2	Ruang Terbuka Hijau		
a	Alun-Alun Kota Pasuruan	1,79	0,05%
b	Taman	1,55	0,04%
c	Jalur Hijau	3,4	0,09%
d	Makam	24,34	0,62%
B	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Pertanian		
a	Sawah	1.191,03	30,53%
b	Ladang	46,05	1,18%
c	Lahan Terbuka	34,08	0,87%
d	Semak Belukar	9,19	0,24%
e	Kebun	98,05	2,51%
2	Tambak	729,96	18,71%
3	Industri & Pergudangan	112,48	2,88%
4	Permukiman		
a	Permukiman	1.301,80	33,37%
b	Perdagangan dan Jasa	30,1	0,77%
c	Perkantoran	26,66	0,68%
d	Peribadatan	2,99	0,08%
e	Pendidikan	31,04	0,80%
f	Kesehatan	2,9	0,07%
g	Fasilitas Olahraga	7,93	0,20%
h	Fasilitas Transportasi	7,43	0,19%
5	Pertahanan dan Keamanan	6,61	0,17%
6	TPA	6,48	0,17%
7	Jalan	106,5	2,73%
8	Sungai	42,06	1,08%
9	Area Parkir	1,08	0,03%
	Jumlah	3901,25	100,00%

Sumber : RTRW Kota Pasuruan 2021 – 2041

Kawasan lindung, yang meliputi hutan bakau dan ruang terbuka hijau, mencakup 106,83 hektar atau 2,74% dari total wilayah, dengan hutan bakau sendiri seluas 75,75 hektar atau 1,94%. Penggunaan lahan untuk sawah mencakup 1.191,03 hektar atau 30,53% dari total wilayah, dan prasarana transportasi hanya mencakup 106,5 hektar atau 2,73%. Ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan memiliki perencanaan penggunaan lahan yang beragam dan terstruktur, dengan perhatian khusus terhadap kawasan budidaya dan ruang terbuka hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

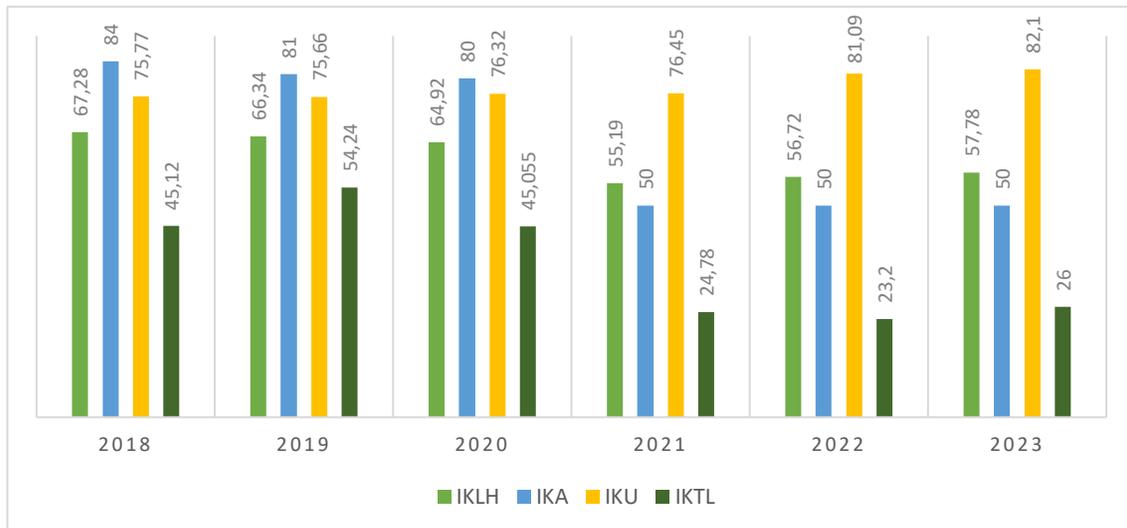
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang pada tahun 2023 terrealisasi 82,67 atau dengan luas lahan yang sesuai dengan pola ruang RTRW sebesar 3224,29 Ha dari luas kota 3900,07 Ha.



Gambar II. 4 Persentase Penggunaan Lahan Kota Pasuruan
Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2021 – 2041

Tren penggunaan lahan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan di Kota Pasuruan. Hal ini akibat adanya dinamika urbanisasi dan industrialisasi, mengalami berbagai perubahan penggunaan lahan, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan, komersial, dan industri. Penurunan luasan lahan pertanian di Kota Pasuruan berdampak pada penurunan kemampuan daerah tersebut dalam menyerap karbon, mengurangi polusi udara, dan mengelola sumber daya air secara alami. Alih fungsi lahan menjadi area perkotaan dan industri sering kali diiringi dengan peningkatan emisi polutan dan penurunan kualitas air akibat berkurangnya lahan resapan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan IKLH, terutama dalam aspek kualitas udara dan air, serta pengelolaan limbah. Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau akibat urbanisasi yang pesat juga berkontribusi pada peningkatan suhu permukaan (*urban heat island effect*) dan berkurangnya keanekaragaman hayati lokal. Studi menunjukkan bahwa kawasan perkotaan dengan tingkat vegetasi rendah cenderung memiliki kualitas lingkungan yang lebih buruk dibandingkan dengan kawasan yang mempertahankan ruang hijau yang memadai (Brindha, 2019). Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan yang tidak terencana dan tidak berkelanjutan di Kota Pasuruan dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang signifikan.

Secara tren, berikut merupakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2018-2023:



Gambar II. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik di atas ditampilkan tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan komponen-komponennya di Kota Pasuruan dari tahun 2018 hingga 2023. Indeks-indeks yang ditampilkan meliputi IKLH, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks IKLH Kota Pasuruan mengalami fluktuasi sepanjang periode tersebut. Meskipun ada peningkatan yang stabil dari 2018 (67,28) hingga 2023 (57,78), angka ini masih menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan komponen lain seperti IKA yang tetap relatif tinggi di seluruh periode. Indeks Kualitas Air (IKA) secara konsisten berada pada nilai yang tinggi, menunjukkan kualitas air yang relatif baik, mencapai puncaknya pada 2022 dengan nilai 81,09. Sebaliknya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami penurunan tajam dari 2018 (45,12) hingga 2023 (26), yang mencerminkan penurunan dalam kondisi tutupan lahan, besar akibat urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan. Indeks Kualitas Udara (IKU) relatif stabil, dengan sedikit peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, tetapi tetap pada nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan IKA dan IKLH, menunjukkan bahwa kualitas udara mungkin menjadi tantangan yang mempengaruhi lingkungan di Pasuruan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan di sektor air dan udara, penurunan signifikan dalam IKTL menjadi faktor penting yang mungkin menekan IKLH secara keseluruhan. Upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah tutupan lahan yang menurun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Pasuruan.

2.1.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

A. Daya Dukung Air

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Penentuan daya dukung air menggunakan sistem *grid* ini pada prinsipnya dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air.

1. Ketersediaan Air

Perhitungan ketersediaan air ini menggunakan data limpasan DAS dan suplai air PDAM yang bersumber dari umbulan. Adapun hasil proses perhitungan ketersediaan air di Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 3 Ketersediaan Air di Kota Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa) (Sistem Grid 150 X150 M)	Ketersediaan Air Grid (M3/Tahun)
1	Bugul Kidul	31.557	31.557	2.999.276.402,42
2	Gadingrejo	44.263	44.263	4.931.546.055,99
3	Panggungrejo	63.993	63.993	1.482.712.259,73
4	Purworejo	56.389	56.389	2.055.861.980,99
Jumlah		196.202,00	196.202,00	11.469.396.699,13

Sumber: DDDTLH Kota Pasuruan, 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah ketersediaan air di Kota Pasuruan yang tertinggi berada di Kecamatan Gadingrejo sebesar 4.931.546.055,99 m³/tahun, sedangkan ketersediaan air yang terendah berada di Kecamatan Panggungrejo sebanyak 1.482.712.259,73 m³/tahun. Ketersediaan air ini diharapkan mampu menyukupi tingkat kebutuhan air yang dibutuhkan dalam wilayah tersebut baik untuk kebutuhan kegiatan domestik maupun non domestik. Wilayah dengan ketersediaan air tinggi diharapkan juga dapat menopang wilayah sekitar terdekat yang memiliki ketersediaan air rendah atau kurang.

2. Kebutuhan Air

Kebutuhan domestik ditentukan dengan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air per kapita. Standar ini dapat ditemukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Kebutuhan air untuk pemanfaatan lahan dapat didekati dengan literatur terkait dan memanfaatkan penutupan lahan. Berikut total kebutuhan air di setiap kecamatan yang ada di Kota Pasuruan.

Tabel II. 4 Kebutuhan Air di Kota Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa) (Sistem Grid 150 X150 M)	Ketersediaan Air Grid (M3/Tahun)
1	Bugul Kidul	31.557	31.557	2.999.276.402,42
2	Gadingrejo	44.263	44.263	4.931.546.055,99
3	Panggungrejo	63.993	63.993	1.482.712.259,73
4	Purworejo	56.389	56.389	2.055.861.980,99
Jumlah		196.202,00	196.202,00	11.469.396.699,13

Sumber: DDDTLH Kota Pasuruan, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kebutuhan air domestik tertinggi berada di Kecamatan Panggungrejo sebesar 5.528.995,17 m³/tahun sedangkan kebutuhan air domestik yang paling rendah di Kecamatan Bugul Kidul sebesar 2.729.524,79 m³/tahun. Total keseluruhan kebutuhan air domestik berdasarkan hasil analisa sebesar 16.951.852,72 m³/tahun pada tahun 2023. Sedangkan berdasarkan untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan, kebutuhan air tertinggi berada

di kecamatan Bugul kidul sebanyak 5.926.524,17 m³/tahun, kemudian kebutuhan air terendah untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan berada di Kecamatan Panggungrejo sebanyak 748.042.81 m³/tahun, dengan total kebutuhan air untuk kegiatan berbasis ekonomi lahan sebanyak 13.381.999.20 m³/tahun. Secara keseluruhan kebutuhan air total di Kota Pasuruan yang tertinggi berada di Kecamatan Bugul Kidul sebanyak 8.653.048.96 m³/tahun, sedangkan kebutuhan air terendah berada di Kecamatan Panggungrejo sebanyak 6.277.037,97 m³/tahun. Total kebutuhan air keseluruhan di Kota Pasuruan berdasarkan hasil analisa sebanyak 30.333.851,92 m³/tahun.

3. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Untuk mengetahui status daya dukung daya tamping air di Kota Pasuruan dapat dilihat dari selisih antara kebutuhan dan ketersediaan air. Selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid untuk menentukan status D3T penyedia air. Kondisi status Daya Dukung dan Daya Tampung Air belum terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih rendah dibandingkan ketersediaan airnya. Kondisi ini ditandai dengan hasil perbandingan nilai kebutuhan air yang lebih rendah daripada air yang tersedia, begitupun sebaliknya. Berikut data profil daya dukung daya tamping air di Kota Pasuruan berdasarkan hasil analisa.

Tabel II. 5 Data Profil Daya Dukung Air di Kota Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa) (Sistem Grid 150 X150 M)	Ketersediaan Air Grid (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Domestik (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Total (M3/Tahun)	Ambang Batas Penduduk Grid (150x150 m)
1	Kecamatan Bugul Kidul	31.557	31.557.0	2.999.276.402,42	2.726.524.79	5.926.524,2	8.653.049,0	32.084.6
2	Kecamatan Gadingrejo	44.263	44.263.0	4.931.546.055,99	3.824.323.18	4.005.007,2	7.829.330,4	42.652.1
3	Kecamatan Panggungr ejo	63.993	63.993.0	1.482.712.259,73	5.528.995.17	748.042,8	6.277.038,0	58.880.5
4	Kecamatan Purworejo	56.389	56.389.0	2.055.861.980,99	4.872.009,58	2.702.425,0	7.574.434,6	50.692.4
Total		196.202.0	196.202.0	11.469.396.699,13	16.951.852,72	13.381.999,2	30.333.851,9	100.00

Sumber: DDDTLH Kota Pasuruan, 2023

B. Daya Dukung Pangan

1. Ketersediaan Pangan

Adapun hasil analisa pada perhitungan ketersediaan pangan Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel II. 6 Ketersediaan Pangan di Kota Pasuruan

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (jiwa) (150 X 150M)	Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan (kg/th)
1	Kecamatan Bugul Kidul	31.557	31.557	470.000,00
2	Kecamatan Gadingrejo	44.263	44.263	368.000,00

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (jiwa) (150 X 150M)	Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan (kg/th)
3	Kecamatan Panggungrejo	63.993	63.993	131.000,00
4	Kecamatan Purworejo	56.389	56.389	367.000,00
	Grand Total	196.202	196.202	1.336.000,00

Sumber: DDDTLH Kota Pasuruan, 2023

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Pasuruan tertinggi berada pada Kecamatan Bugul Kidul sebanyak 470.000 kg/tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 31.557 jiwa, sedangkan terendah berada di Kecamatan Purworejo sebanyak 131.000 kg/tahun dengan total ketersediaan keseluruhan bahan pangan di Kota Pasuruan sebanyak 1.336.000 kg/tahun.

2. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan energi bahan pangan diperoleh melalui perlindungan Angka Kebutuhan Beras (AKB) selama 1 tahun. Perhitungan ini membutuhkan data distribusi penduduk dengan system *grid* dan AKB perkapita selama satu tahun, Berikut hasil perhitungan yang telah dilakukan:

Tabel II. 7 Kebutuhan Pangan Kota Pasuruan

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (jiwa) (150 X 150M)	Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan (kg/th)
1	Kecamatan Bugul Kidul	31.557	31.557	2.188.477,95
2	Kecamatan Gadingrejo	44.263	44.263	3.069.639,05
3	Kecamatan Panggungrejo	63.993	63.993	4.437.914,55
4	Kecamatan Purworejo	56.389	56.389	3.910.577,15
	Grand Total	196.202	196.202	13.606.608,70

Sumber: DDDTLH Kota Pasuruan, 2023

Berdasarkan hasil analisa di atas menunjukkan jumlah kebutuhan pangan tertinggi berada di Kecamatan Panggungrejo sebanyak 4.437.914,55 kg/tahun diikuti dengan tingginya jumlah penduduk sebanyak 63.993 jiwa, sedangkan kebutuhan bahan pangan terendah berada di Kecamatan Bugul Kidul sebanyak 2.188.477,95 kg/tahun diikuti dengan jumlah penduduk terendah sebanyak 31.557 jiwa. Total kebutuhan bahan pangan di Kota Pasuruan secara keseluruhan adalah 13.606.608,70 kg/tahun, tinggi rendahnya kebutuhan pangan di Kota Pasuruan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di setiap Kecamatan, hal ini tentunya perlu pengaturan kebutuhan pangan agar kebutuhan bahan pangan di setiap wilayah kecamatan terpenuhi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kota Pasuruan.

3. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Berdasarkan hasil Analisa status daya dukung daya tampung pangan, Kota Pasuruan berada dalam status belum terpenuhi karena angka kebutuhan melebihi angka ketersediaan pangan. Berikut tabel status daya dukung daya tampung yang dapat di representasikan secara

visual berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kota Pasuruan.

Tabel II. 8 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Pasuruan

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Sistem Grid (jiwa) (150 X 150M)	Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan (kg/th)	Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan (kg/th)	Status
1	Kecamatan Bugul Kidul	31.557	31.557	2.188.477,95	470.000,00	Belum Terpenuhi
2	Kecamatan Gadingrejo	44.263	44.263	3.069.639,05	368.000,00	Belum Terpenuhi
3	Kecamatan Panggungrejo	63.993	63.993	4.437.914,55	131.000,00	Belum Terpenuhi
4	Kecamatan Purworejo	56.389	56.389	3.910.577,15	367.000,00	Belum Terpenuhi
	Total	196.202	196.202	13.606.608,70	1.336.000,00	Belum Terpenuhi

Sumber: DDDTLH Kota Pasuruan, 2023

Berdasarkan penjelasan tabel di atas menunjukkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kota Pasuruan masih tergolong belum terpenuhi, sehingga memerlukan pemasukan bahan pangan dari beberapa wilayah di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah ketersediaan bahan pangan sebesar 1.336.000,00 kg/tahun masih berada di bawah jumlah kebutuhan bahan pangan sebesar 13.606.608,70 kg/tahun. Ketidakseimbangan yang terjadi pada kebutuhan kecamatan tertinggi seperti Purworejo sebanyak 3.910.577,15 kg/th tidak diikuti dengan ketersediaan bahan pangan dengan ketersediaan sebanyak 367.000 kg/th. Hal ini tentunya menjadi perhatian dalam pengelolaan sumberdaya pangan di wilayah Kota Pasuruan, dalam menjaga kestabilan bahan pangan yang tersedia dan yang menjadi kebutuhan di wilayah sekitar.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Wisata

Objek wisata merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki Kota Pasuruan terdiri dari beragam jenis wisata, mulai wisata alam sampai dengan wisata budaya, antara lain: wisata sejarah, religi dan cagar budaya. obyek wisata di Kota Pasuruan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel II. 9 Potensi Wisata di Kota Pasuruan

Jenis Wisata	Obyek Wisata	Lokasi
Wisata Religi	Masjid Agung Al Anwar	Jl. Nusantara
	Makam KH. Abdul Hamid	Kelurahan Kebonsari
	Makam Mbah Slagah	Jalan Pahlawan
	Pondok Pesantren Salafiyah	Jl. Jawa Kebonsari
	Payung Madinah	Alun - Alun Kota Pasuruan
Wisata Sejarah	Makam Untung Suropati	Kecamatan Purworejo
	Gedung P3GI	Jl. Pahlawan
	Gereja St. Antinious Padova	Jl. Balai Kota
	Klenteng Tjoek Tik Koeng	Jl. Lombok
Wisata budaya dan adat tradisional	Kirab Pataka Untung Suropati	-
	Posoeroean Djaman Bijen	-
	Pasuruan Pesona Festival	-

Jenis Wisata	Obyek Wisata	Lokasi
	Petik Laut	Pelabuhan Kota Pasuruan, Panggungrejo
	Perahu Hias	Pelabuhan Kota Pasuruan
	Lomba Layang-Layang	-
Wisata alam dan sarana rekreasi	Hutan Mangrove	Pelabuhan Kota Pasuruan
	Alun alun dan Taman Jam Agung	Wilayah pusat kota dan GOR
	Taman Hayati, Taman Pekuncen dan Taman Lansia, Taman Sekargadung	Petahunan, Pekuncen dan Sekargadung
	Balai Benih Induk (Kebun Mangga)	Pohjentrek
	Wisata Kuliner	Pelabuhan Kota Pasuruan
Wisata kesenian	Barongsai	Jl. Lombok
	Tari Tradisional & Kreasi Baru	Sanggar Tari Kota Pasuruan
Wisata kerajinan	Industri Logam	Kelurahan Mayangan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Mandaran dan Kelurahan Bugul Lor
	Industri Mebel	Kelurahan Sebani, Kelurahan Gadingrejo dan Kelurahan Bukir
	Industri Batik	Kelurahan Tembokrejo
Wisata kuliner	Bipang Jangkar	Jl. Lombok
	Nasi Rawon	Jl. Kartini
	Kupang Kraton	Pasar Karangketug
	Permen Sin A	Jl. Sumatera
	Roti Matahari	Jl. Soekarno Hatta
	Bandeng Jelak	Jalak Rejo-Kelurahan Blandongan

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, 2024

Potensi obyek dan daya tarik wisata di Kota Pasuruan merupakan salah satu unggulan. Pasuruan sebagai kota bandar kuno mempunyai banyak bangunan bersejarah yang potensial dikembangkan menjadi objek wisata. Bangunan-bangunan bernilai sejarah yang hingga kini tetap lestari dan kebanyakan masih dalam bentuk aslinya, sebagian besar adalah peninggalan pemerintah Belanda. Gedung Harmoni yang terletak di Jalan Pahlawan adalah salah satunya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan ditetapkan sebagai Kota Pusaka oleh pemerintah pusat pada tahun 2016. Potensi menarik lainnya yang dimiliki Kota Pasuruan, adalah pelabuhan tradisional yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal pengangkut barang, seperti kayu dan sembako, baik dari maupun yang datang ke Kota Pasuruan. Pada saat-saat tertentu, seperti memperingati Hari Jadi Kota Pasuruan dan mensyukuri hasil tangkapan laut yang selama ini telah diperoleh, rutin dilaksanakan “Pesta Petik Laut” pada bulan Februari. Selain itu Pemerintah Kota Pasuruan menyelenggarakan “*Car Free Day*” dan “*Car Free Night*” sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk mendukung perekonomian masyarakat, utamanya pelaku UMKM dan mendukung prioritas tema pembangunan di Kota Pasuruan.

Terkait wisata dari sektor ekowisata mangrove, di pesisir sisi timur, tepatnya di Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan. Untuk kepentingan konservasi lingkungan, maka sebagian wilayah pantai di pesisir Kota Pasuruan yang membentang dari barat ke timur, ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai kawasan hutan mangrove. Konsep pembangunan ekowisata dirancang untuk menyatukan aspek wisata dengan pendidikan kelestarian lingkungan, khususnya bagi anak usia sekolah. Selain itu, keberadaan ekowisata mangrove juga mampu

mendongkrak potensi ekonomi di sekitarnya, khususnya produk olahan yang berasal dari perikanan laut dan komoditas sejenisnya.

B. Potensi Perikanan

Kawasan perikanan yang terdapat di Kota Pasuruan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan perikanan di Kota Pasuruan memiliki luas kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) Hektar terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul. Kawasan perikanan di Kota Pasuruan berupa kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya, penjelasannya dapat dilihat dibawah ini.

A. Kawasan Perikanan Tangkap

Kota Pasuruan dibatasi oleh Selat Madura. Dengan adanya Selat Madura, Kota Pasuruan memiliki potensi perikanan tangkap di wilayah utara. Kawasan perikanan tangkap, terdapat di Kelurahan Tambaan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo dan Kelurahan Kepel.

B. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya di Kota Pasuruan berupa tambak. Kawasan perikanan budidaya terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul. Kota Pasuruan memiliki rencana pelabuhan perikanan yang terdapat di Kelurahan Ngemplakrejo.

Rencana pengembangan perikanan Kota Pasuruan dilakukan antara lain melalui pembangunan tempat pelelangan ikan dan revitalisasi pasar ikan. Pembangunan tempat pelelangan ikan diharapkan akan memudahkan nelayan dalam menjual hasil tangkapannya. Sementara ini, nelayan memanfaatkan tepi muara sungai Gembong, tepatnya di sisi barat yang secara administratif masuk wilayah Kelurahan Ngemplakrejo, untuk menjual ikan tangkapannya. Kondisinya cukup sederhana dan jauh dari kata layak untuk sebuah tempat pelelangan ikan.

Pengembangan potensi perikanan di Kota Pasuruan dilakukan secara terintegrasi dengan revitalisasi Pelabuhan Kota Pasuruan. Sebagai pelabuhan tradisional, yang bergantung pada pasang surut air di muara sungai Gembong, pemanfaatan Pelabuhan Kota Pasuruan cukup terbatas. Kondisi ini diperparah dengan sedimentasi yang cukup tinggi di muara sungai, sehingga hanya kapal kecil sampai menengah yang dapat berlabuh. Pelabuhan Pasuruan menyimpan potensi sebagai alternatif transportasi barang, untuk mengurangi beban transportasi darat yang selama ini mengandalkan jalan nasional pada jalur pantai utara. Perusahaan-perusahaan di kawasan industri berikat ataupun kawasan non-berikat di Kabupaten Pasuruan, dapat memanfaatkan Pelabuhan Pasuruan sebagai jalur alternatif distribusi barangnya.

C. Potensi Ekonomi

Terkait dengan pengembangan wilayah, Pemerintah Kota menyusun peraturan zonasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, yang mendukung pengembangan Industri Kerajinan Rumah Tangga (IKRT) mebel dan logam, khususnya dari aspek penataan ruang. Keberadaan peraturan zonasi ini penting, mengingat sebagian besar IKRT

mebel dan logam di Kota Pasuruan berada di kawasan pemukiman penduduk.

Melalui peraturan zonasi, diharapkan mampu menyelaraskan peruntukan ruang bagi aktivitas industrial dengan permukiman. Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kota Pasuruan, yang masih potensial untuk dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 6 pasar tradisional di wilayah Kota Pasuruan. Rencana pengembangan pasar tradisional yang sudah ada, akan diarahkan pada peningkatan kelayakan sarana-prasarana perniagaan di dalam pasar. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kenyamanan pedagang dengan pembeli dalam bertransaksi di pasar tradisional.

Menjamurnya toko modern dalam 5 tahun terakhir, menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota, utamanya dalam hal kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Pasuruan. Dengan memperhatikan asas pemerataan akses untuk berusaha, Pemerintah Kota memberlakukan Peraturan Daerah tentang penataan toko modern dan pasar tradisional, dengan tujuan utama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional. Untuk itu sebagai bagian dari rencana pengembangan pasar tradisional, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah penataan lokasi toko modern. Penataan lokasi ini disinkronkan dengan rencana tata ruang, beserta rencana detailnya. Pengaturan dalam dokumen rencana tata ruang inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pemberian izin pendirian toko modern di Kota Pasuruan.

Dalam upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, Pemerintah Kota menyusun rencana pembangunan pasar di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Mengingat dari 6 pasar tradisional yang ada, tidak satu pun yang berlokasi di Kecamatan Bugul Kidul. Untuk memperpendek jarak jangkauan layanan pasar, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Bugul Kidul, maka Pemerintah Kota merencanakan pembangunan pasar tradisional. Permintaan kebutuhan perumahan di Kota Pasuruan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan pabrik-pabrik di Kabupaten Pasuruan, dengan sejumlah besar karyawannya, yang menjadi pasar potensial bagi perumahan-perumahan di Kota Pasuruan. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perniagaan, antara lain, menjadi faktor penarik bagi penduduk untuk tinggal di Kota Pasuruan. Sampai dengan tahun 2020, di Kota Pasuruan terdapat 69 perumahan dengan jumlah petak rumah mencapai 13.722 unit. Sebagian besar perumahan di Kota Pasuruan masuk kategori sederhana sampai menengah, dengan luas tanah mayoritas antara 70–120 m² dan luas bangunan standar antara 36–55 m².

Kota Pasuruan merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Jawa Timur yang merupakan kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di sekitarnya. Selain potensi dan daya tarik wisatanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan mengamanatkan pembagian

yang proporsional antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perencanaan pola ruang terbagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung di Kota Pasuruan meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kawasan budidaya di Kota Pasuruan terbagi menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, pesisir, pertanian, peruntukan pelayanan umum, dan peruntukan sektor informal.

Kota Pasuruan memiliki beberapa kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan strategis di Kota Pasuruan meliputi:

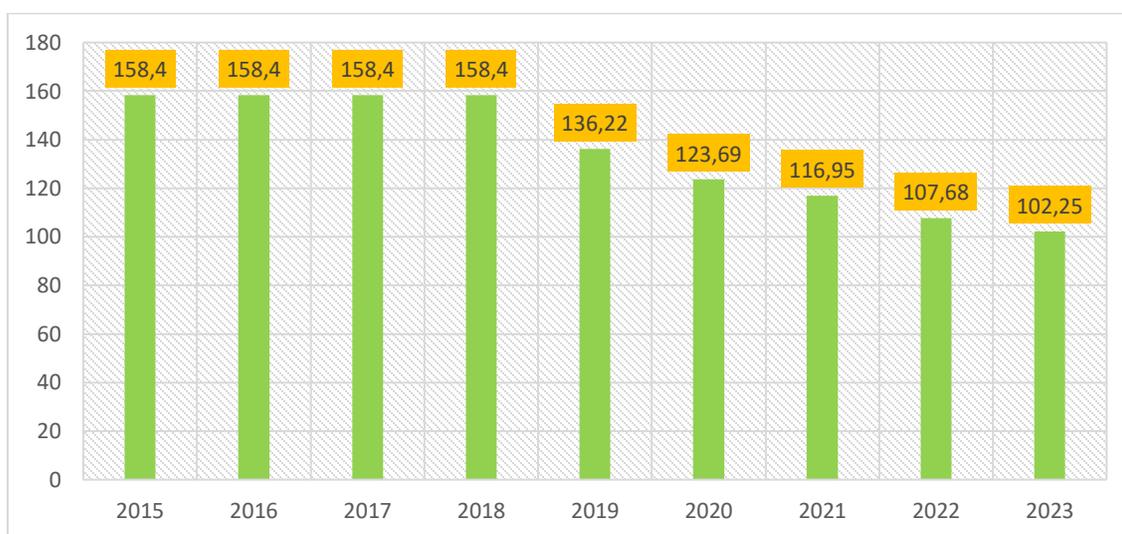
1. Kawasan strategis berdasarkan kawasan strategis provinsi meliputi pengembangan jalan tol Gempol-Pasuruan yang melewati Kelurahan Sekargadung, Tembokrejo, Wirogunan dan Pohjentrek dengan akses *interchange* di Kelurahan Pohjentrek, yang memungkinkan pengembangan Balai Benih Induk (BBI) Kebon Mangga sebagai kawasan wisata agrowisata yang terintegrasi dengan kawasan mebel bukir.
2. Kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi dan pengembangannya yang meliputi: kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan industri, yaitu daerah sekitar Bukir sebagai kawasan industri dan daerah sekitar pusat kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan Bromo - Tengger - Semeru (BTS) meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang dan Kota Probolinggo dengan fokus utama arah pengembangannya pada sektor pariwisata dan agro produksi serta agroindustri. Beberapa infrastruktur pengelolaan sumber daya air di Kawasan Bromo - Tengger - Semeru mencakup Pengendalian Banjir di Kali Kedunglarangan dan Pembangunan Tanggul di Sungai Jatiroto. Pada sisi infrastruktur air minum dan air limbah Provinsi Jawa Timur mengupayakan Penyiapan SPAM Regional Probolinggo Lumajang. Pada sisi infrastruktur Jalan, proyek yang menjadi prioritas di wilayah BTS adalah rencana Jalan Lintas Selatan. Rencana Jalan Lintas Selatan di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru melewati Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.
4. Kawasan strategis berdasarkan aspek lingkungan meliputi kawasan pelestarian alam, sempadan pantai, kawasan bakau dan sempadan sungai.
5. Kawasan strategis berdasarkan pengembangan wilayah pantai utara, yaitu kawasan sekitar rencana trase Jalan Lingkar Utara, yang meliputi Kelurahan Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel dan Blandongan.
6. Kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya meliputi kawasan cagar budaya, kawasan perkantoran dan pendidikan

2.1.8. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah area atau wilayah di mana terdapat potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana alam atau

bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kawasan rawan bencana seringkali ditentukan berdasarkan analisis ilmiah yang mempertimbangkan sejarah bencana di wilayah tersebut, kondisi geografis, iklim, geologi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi potensi bencana. Penentuan kawasan rawan bencana bertujuan untuk membantu pemerintah dan masyarakat setempat dalam perencanaan mitigasi bencana, peningkatan kewaspadaan, dan perencanaan tanggap darurat.

Risiko bencana di Kota Pasuruan direpresentasikan oleh nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan capaian sebagai berikut:



Gambar II. 6 Indeks Risiko Bencana Kota Pasuruan Tahun 2015-2023
Sumber: BNPB, 2024

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Pasuruan dari tahun 2015 hingga 2023. Pada periode 2015 hingga 2018, IRB Kota Pasuruan tetap konstan pada angka 158,4, yang menunjukkan risiko bencana yang cukup tinggi dikarenakan nilai kerentanan yang sama. Pada tahun 2019, terjadi penurunan signifikan pada IRB menjadi 136,22, diikuti dengan penurunan lebih lanjut pada tahun 2020 menjadi 123,69. Penurunan ini menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam penanganan dan mitigasi risiko bencana di Kota Pasuruan baik itu melalui peningkatan dalam infrastruktur mitigasi, kebijakan pengurangan risiko, atau program peningkatan kesadaran masyarakat.

Pada tahun 2021-2023 digunakan nilai H&V (*Hazard and Vulnerability*) perhitungan tahun 2021, yang menghasilkan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) turun hingga 116,95 dan kembali turun di tahun 2022 menjadi 107,68. Pada tahun 2023, IRB kembali turun menjadi 102,25.

Lebih lanjut, potensi risiko bencana di Kota Pasuruan juga dikaji berdasarkan potensi luas kawasan yang terdampak dan dibagi dalam tiga kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Berikut merupakan potensi luas bahaya berdasarkan jenis bencana di Kota Pasuruan:

Tabel II. 10 Potensi Luas Bahaya Bencana di Kota Pasuruan

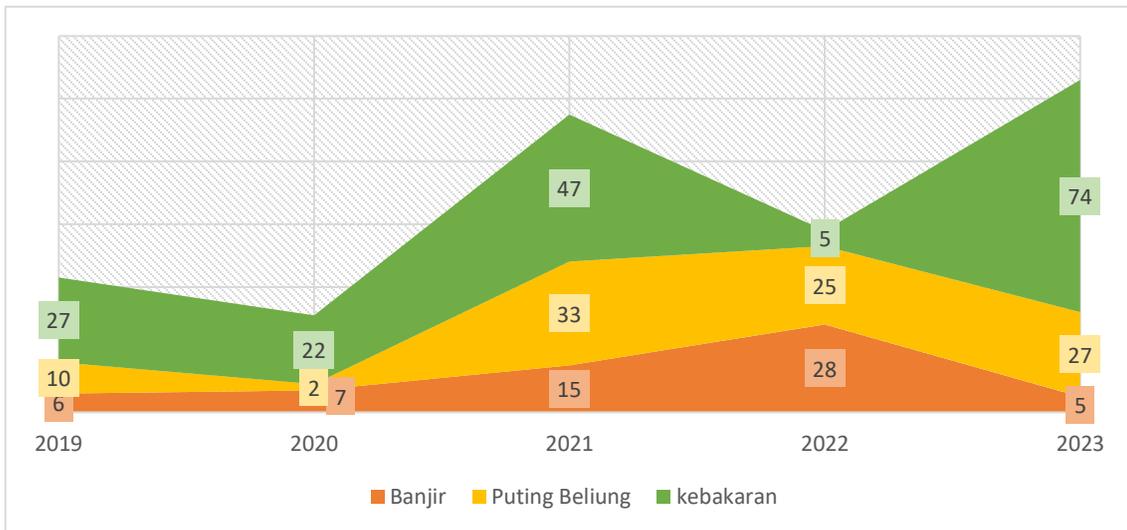
No	Jenis Bencana	Potensi Luas Bahaya			Total	Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	125	1.828	1.394	3.347	TINGGI
2	Banjir Bandang	0	2	41	43	TINGGI
3	Gempa Bumi	3.524	5	0	3.529	RENDAH
4	Tsunami	82	0	0	82	RENDAH
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	90	4	18	111	RENDAH
6	Kekeringan	0	3.529	0	3.529	SEDANG
7	Cuaca Ekstrem	0	12	3.517	3.529	TINGGI
8	Likuefaksi	0	2.202	124	2.326	SEDANG

Sumber: Dokumen KRB Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang memiliki kelas risiko Tinggi yaitu banjir, banjir bandang dan cuaca ekstrem. Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang diidentifikasi mengalami peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Dalam konteks kondisi topografi dan elevasi dari permukaan laut yang dimiliki, kehadiran sungai di Kota Pasuruan memiliki dampak positif dan negatif. Pada musim penghujan, Kota Pasuruan menjadi rentan terhadap banjir, terutama di sekitar sungai. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut memiliki bagian yang cenderung rendah, sehingga menghambat aliran air menuju laut. Daerah yang sering terdampak banjir adalah wilayah kecamatan Gadingrejo. Dengan curah hujan intensitas tinggi di atas 5-6 jam di daerah Hulu (lereng gunung Arjuno, Welirang, dan wilayah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Kecamatan Purwodadi, Purwosari, dan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan) dan curah hujan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Wonorejo dan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan serta di wilayah Kota Pasuruan dengan angin yang kencang, maka bencana banjir akan sering terjadi. Pada tahun 2023, terjadi

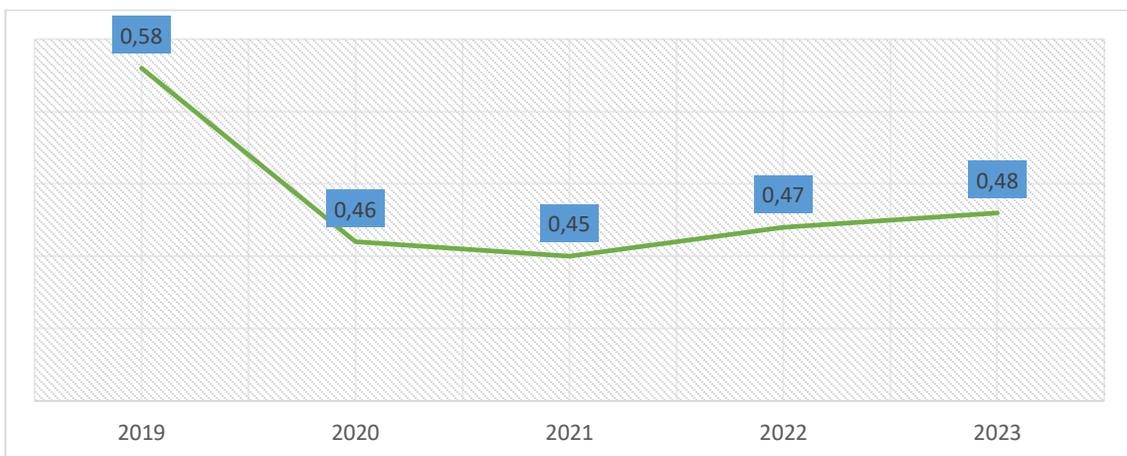
Sedangkan risiko bencana cuaca ekstrem di Kota Pasuruan sering kali menciptakan perubahan cuaca yang mendadak sehingga memicu terjadinya banjir dan angin puting beliung. Hal ini akibat posisi Kota Pasuruan yang terletak di dataran rendah dekat dengan pesisir, sehingga membuatnya rentan terhadap akumulasi air saat hujan deras terjadi. Intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat melebihi kapasitas drainase dapat menyebabkan banjir. Selain itu, perubahan suhu dan tekanan udara yang tiba-tiba akibat cuaca ekstrem dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk terbentuknya angin puting beliung. Kurangnya vegetasi dan alih fungsi lahan juga memperburuk situasi, karena tanah menjadi kurang mampu menyerap air, mempercepat aliran permukaan, dan meningkatkan risiko banjir.

Selain itu juga terdapat risiko bencana kebakaran yang sebagian besar terindikasi disebabkan karena konsleting arus pendek listrik, kompor gas, pembakaran sampah atau *human error*. Berikut merupakan grafik yang menjelaskan frekuensi terjadinya bencana banjir, angin puting beliung dan kebakaran di Kota Pasuruan:



Gambar II. 7 Jenis dan Jumlah Bencana di Kota Pasuruan Tahun 2019-2023
Sumber: BPBD Kota Pasuruan, 2024

Jumlah bencana puting beliung dan kebakaran tahun 2023 tercatat masing-masing sebesar 27 puting beliung dan 74 kebakaran, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana puting beliung berjumlah 25 dan kebakaran berjumlah 5. Sedangkan bencana banjir di tahun 2022 berjumlah 28 dan di tahun 2023 terjadi 5 bencana banjir. Dibutuhkan kesiapsiagaan dan ketanggapan masyarakat demi mengurangi kerugian materiil yang diakibatkan oleh bencana. Secara garis besar, indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu wilayah atau daerah dalam menghadapi, menanggulangi, dan pulih dari berbagai risiko bencana, termasuk bencana alam, sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD mengukur kesiapan dan ketangguhan daerah dengan mempertimbangkan infrastruktur, respons pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kondisi lingkungan. Capaian IKD di Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir direpresentasikan dalam grafik berikut:



Gambar II. 8 Indeks Ketahanan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019-2023
Sumber: BPBD Kota Pasuruan, 2024

Grafik di atas menunjukkan tren Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kota Pasuruan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IKD berada pada angka 0,58, yang kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi 0,46. Penurunan ini mencerminkan dampak awal dari pandemi COVID-19 dan faktor lain yang melemahkan

ketahanan daerah. Pada tahun 2021, indeks kembali menurun menjadi 0,45, menunjukkan ketahanan daerah yang belum sepenuhnya pulih. Namun, mulai tahun 2022, tren menunjukkan peningkatan yang bertahap, dengan indeks naik ke 0,47 dan kemudian ke 0,48 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek ketahanan baik melalui peningkatan infrastruktur, kebijakan mitigasi risiko yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan kelurahan tangguh bencana. Meskipun belum kembali ke tingkat 2019, tren yang naik dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah pemulihan yang positif.

2.1.9. Demografi

Aspek demografi diuraikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Data demografi, seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin dan struktur usia dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemahaman akan tren demografi memungkinkan adanya identifikasi tantangan seperti penuaan populasi atau urbanisasi, serta peluang seperti potensi pasar dari populasi usia produktif. Dengan demikian, aspek demografi memberikan fondasi yang kuat bagi perencanaan daerah yang responsif terhadap dinamika populasi dan kebutuhan jangka panjang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, berikut merupakan perkembangan jumlah penduduk yang dilihat berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kota Pasuruan Tahun 2005-2023:

Tabel II. 11 Kondisi Demografi Kota Pasuruan Tahun 2005-2023

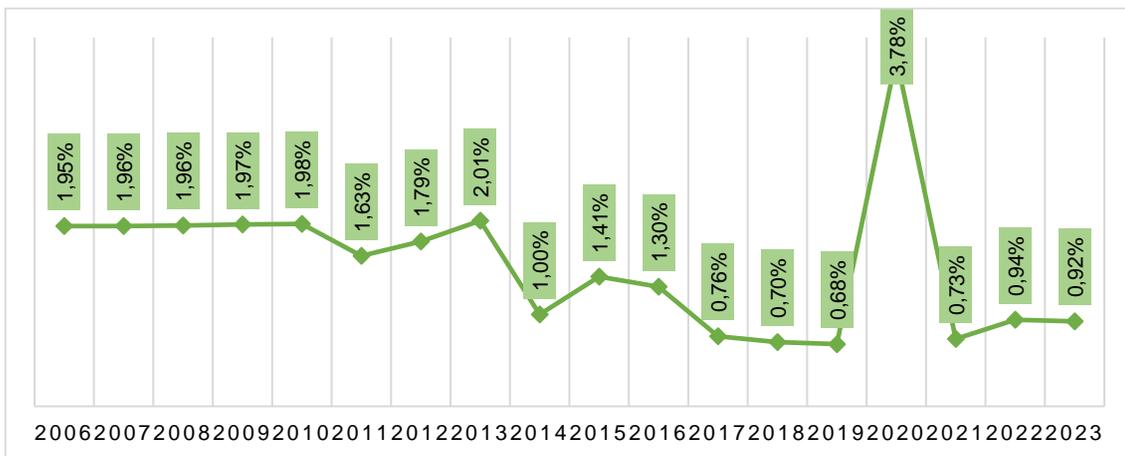
Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (%)
2005	87.551	89.770	177.321	97,53%
2006	88.500	90.677	179.177	97,60%
2007	89.459	91.594	181.053	97,67%
2008	90.429	92.520	182.949	97,74%
2009	91.409	93.455	184.864	97,81%
2010	92.393	94.412	186.805	97,86%
2011	93.222	95.192	188.414	97,93%
2012	94.219	95.972	190.191	98,17%
2013	95.010	97.275	192.285	97,67%
2014	95.817	97.512	193.329	98,26%
2015	96.598	98.217	194.815	98,35%
2016	97.183	99.019	196.202	98,15%
2017	97.995	99.701	197.696	98,29%
2018	98.680	100.398	199.078	98,29%
2019	99.403	101.019	200.422	98,40%
2020	104.046	103.960	208.006	100,08%
2021	104.788	104.740	209.528	100,05%
2022	105.753	105.744	211.497	100,01%
2023	106.709	106.741	213.450	99,97%

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tren demografi Kota Pasuruan dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan dinamika

peningkatan. Jumlah penduduk di Kota Pasuruan mengalami tren kenaikan dari 177.321 jiwa pada tahun 2005 menjadi 213.450 jiwa pada tahun 2023, hal ini mencerminkan terjadi pertumbuhan populasi akibat terciptanya kondisi tingkat kelahiran yang stabil, peningkatan harapan hidup, dan kemungkinan migrasi masuk ke kota ini. Dari segi rasio jenis kelamin yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dalam satu wilayah juga semakin seimbang, terutama setelah tahun 2021, dengan rasio mendekati 100%, mengindikasikan distribusi gender yang lebih merata. Hal ini dapat berdampak pada struktur sosial dan ekonomi kota, karena keseimbangan gender yang lebih baik cenderung mendukung partisipasi yang lebih seimbang dalam pasar tenaga kerja dan pengambilan keputusan dalam komunitas.

Secara lebih detail, berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk tahun-n dengan jumlah penduduk tahun n-1:

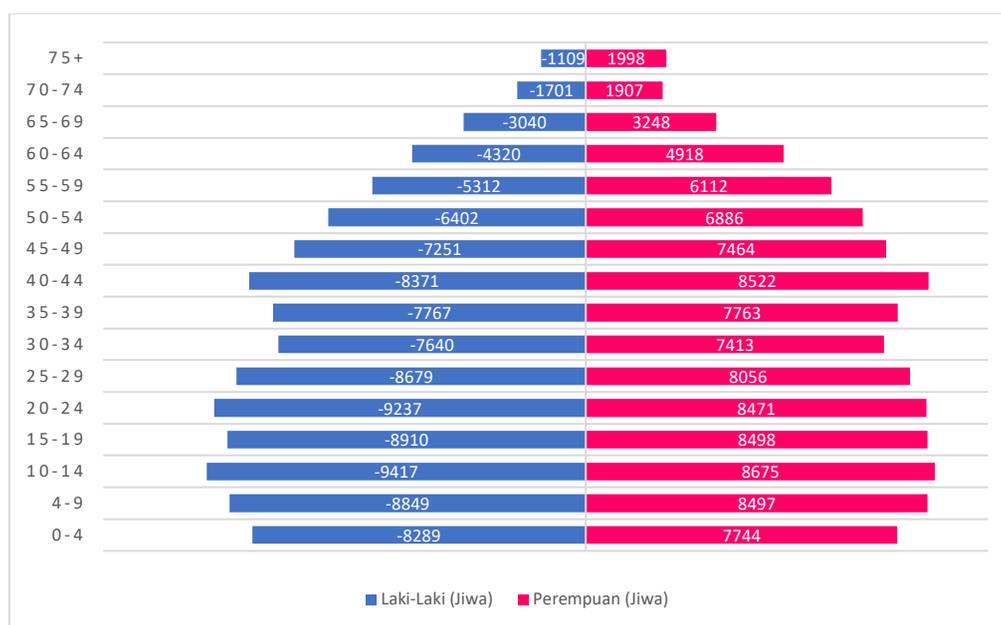


Gambar II. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2006-2023
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Grafik di atas menampilkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pasuruan dari tahun 2006 hingga 2023 yang menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada awal periode, yaitu dari tahun 2006 hingga 2010, laju pertumbuhan penduduk relatif stabil berkisar antara 1,95% hingga 1,98%. Namun, setelah tahun 2011, terjadi penurunan yang cukup drastis hingga mencapai titik terendah pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,00%. Setelah periode penurunan, laju pertumbuhan mulai menunjukkan sedikit pemulihan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan angka yang luar biasa tinggi sebesar 3,78%. Namun, setelah puncak tersebut, laju pertumbuhan kembali menurun drastis pada tahun 2021 dan kemudian stabil di sekitar 0,92% pada tahun 2022 dan 2023. Fluktuasi yang terjadi dalam laju pertumbuhan penduduk ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan mengalami dinamika demografi yang kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor di antaranya perubahan sosial, pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi.

Kondisi fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk seperti ini dapat berdampak pada perencanaan infrastruktur dan layanan publik yang dinamis akibat dengan adanya lonjakan tiba-tiba dalam populasi dapat menyebabkan tekanan pada fasilitas publik yang ada, sementara penurunan yang signifikan juga dapat mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan daya saing ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemantauan

berkelanjutan dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kebijakan pembangunan di Kota Pasuruan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan demografi yang terjadi.



Gambar II. 10 Piramida Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

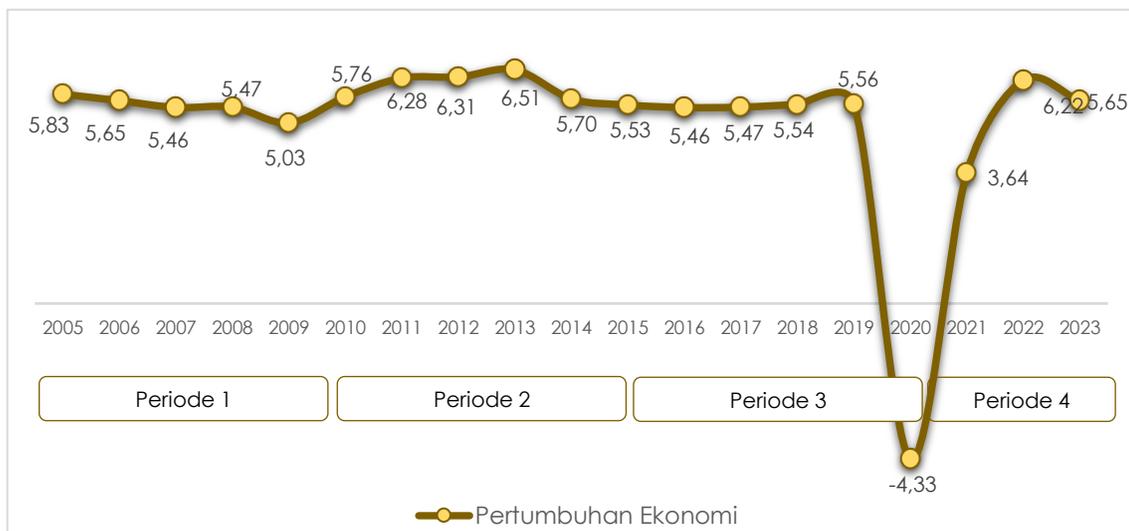
Jika dilihat dari komposisi struktur usia, penduduk Kota Pasuruan bertipe muda didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 70% dengan jumlah 147.992 penduduk dalam rentang 15-64 tahun. Sisanya sebesar 30% dan berjumlah 64.474 penduduk merupakan penduduk tidak produktif, dengan rentang usia 0-14 tahun dan 65-75 tahun. Kondisi ini menginformasikan bahwa Kota Pasuruan masih berpotensi menikmati bonus demografi, yaitu peluang sekaligus ancaman ketika proporsi penduduk usia produktif lebih mendominasi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu daerah. Ekonomi suatu daerah sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya.

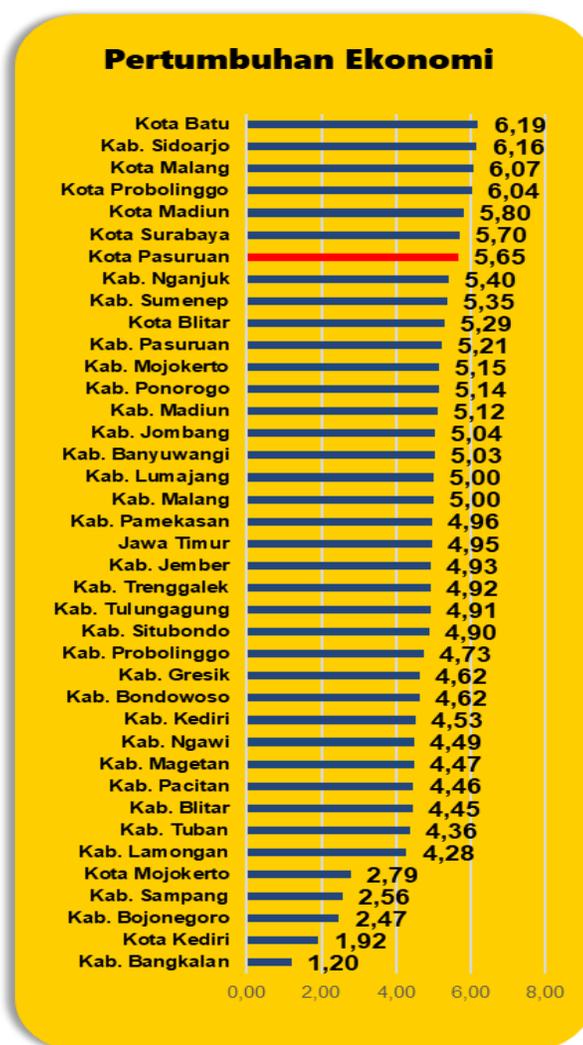


Gambar II. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2005-2023
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Capaian kinerja awal RPJPD tahun 2005 nilainya tercatat mencapai 5,83%, sedangkan pada tahun 2023 nilai pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 5,65%, terkesan tidak adanya peningkatan sama sekali atau bahkan yang terjadi justru terdapat. Namun pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilihat sedemikian rupa, peningkatan 5% ialah adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga disaat pertumbuhan ekonomi 2023 lebih kecil dari tahun 2005 bukan berarti Kota Pasuruan tidak tumbuh, namun dapat diinterpretasikan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tidak sepesat pertumbuhan ekonomi tahun 2005. Adapun rata-rata peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya mencapai 3,66%. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2005 dan 2023 cenderung stabil dan setiap tahun konsisten berada di atas 5%, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang masih mengalami masa *recovery* pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 mengurangi bahkan menghentikan aktivitas ekonomi dari berbagai sektor, sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan mengalami penurunan hingga mencapai -4,33% atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun tersebut yang mencapai -2,33%. Terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah (PDRB) dari sebagian besar sektor, dimana dari 17 sektor sebanyak 10 sektor mengalami penurunan dengan nilai penurunan terbesar pada sektor Jasa Lainnya yang mencapai -14,82% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan PDRB yang mencapai -10,32%. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan positif yang mencapai 3,64%, Kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 6,22%, dan tahun 2023 mencapai 5,65%. Adapun beberapa sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 di Kota Pasuruan diantaranya adalah : Transportasi dan Pergudangan; Jasa lainnya; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Industri Pengolahan.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,04%, artinya posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari keseluruhan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, data terbaru menunjukkan data komparasi terbaru tahun 2022. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada pada peringkat ke 6 dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, atau telah meningkat dari posisi pada tahun 2021 yang berada pada peringkat ke 21. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kota Pasuruan harus berusaha lebih maksimal untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ekonomi yang mampu mendorong meningkatnya aktivitas produksi masyarakat di tahun berikutnya, sehingga Kota Pasuruan memiliki daya saing ekonomi yang semakin kuat. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023.



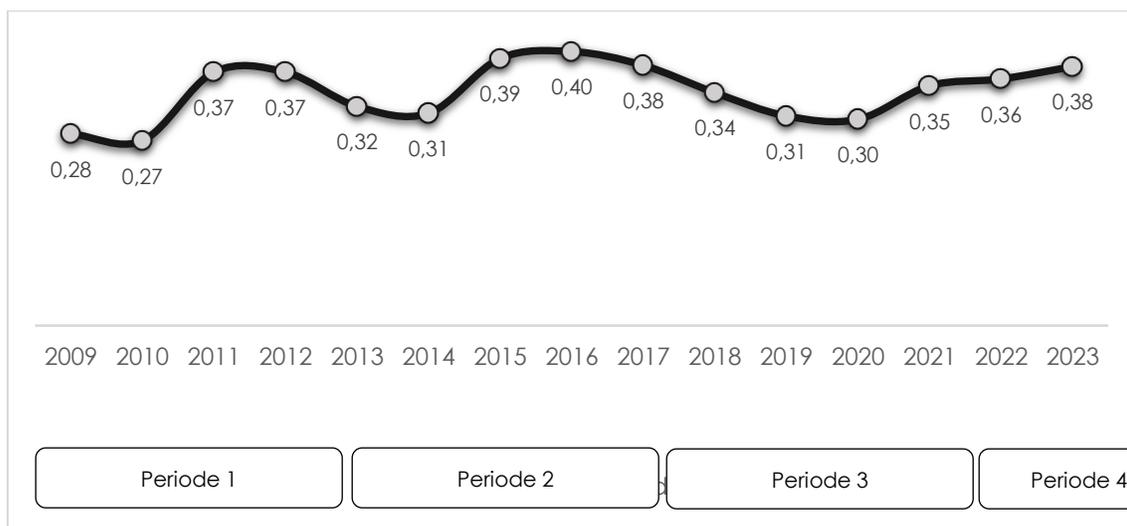
Gambar II. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Tahun 2022 dan 2023 capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mencapai 4,63 dan dari 38 Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur terdapat dua cluster yang dikategorikan yakni pertama Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah Provinsi Jawa Timur yakni di bawah 4,63. Kedua Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Jawa Timur yakni di atas 4,63. Terdapat total 16 Kabupaten /Kota yang memiliki capaian pertumbuhan ekonomi di bawah Provinsi Jawa Timur yakni Kabupaten Jember sebesar 4,53; Kabupaten Trenggalek sebesar 4,52; Kabupaten Probolinggo sebesar 4,52; Kabupaten Banyuwangi sebesar 4,43; Kabupaten Lumajang 4,43; Kabupaten Situbondo 4,39; Kabupaten Madiun 4,32; Kota Kediri 3,95; Kabupaten Magetan 3,89; Kabupaten Ponorogo 3,24; Kabupaten Ngawi 3,19; Kabupaten Sumenep 2,31; Kabupaten Bangkalan -1,12; dan Kabupaten Bojonegoro -6,16. Kota Pasuruan sendiri berada capaian pertumbuhan ekonominya berada di atas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Dari 22 Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan berada pada peringkat ke enam setelah Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kota Malang.

B. Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio

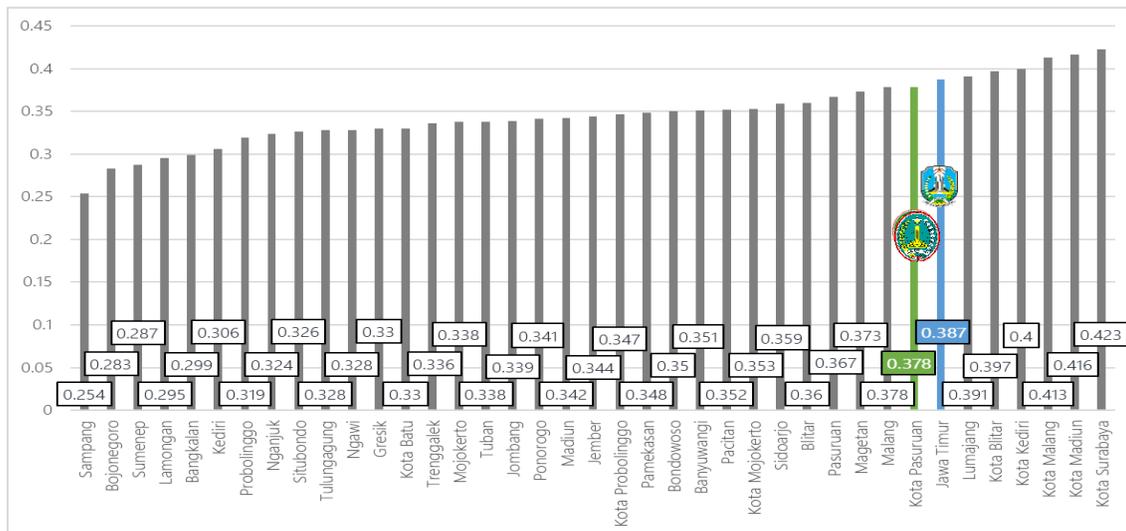
Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan Gini Rasio. Sebagai alat ukur, Gini ratio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Gambar II. 13 Ketimpangan Pendapatan di Kota Pasuruan Tahun 2009-2023
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Indikator ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Kota Pasuruan pada tahun 2009 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 1 (2009-2012), terlihat adanya peningkatan Gini Ratio dari 0,28 menjadi 0,37, yang menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan di kota tersebut. Pada periode 2 (2013-2016), meskipun sempat terjadi penurunan Gini Ratio di tahun 2013 dan 2014, namun Gini Ratio kembali meningkat hingga mencapai puncaknya pada angka 0,40 di tahun 2015 dan 2016. Periode ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan meningkat dengan signifikan. Penurunan ini mungkin mencerminkan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, program sosial yang lebih inklusif, atau upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, pada tahun 2020, Gini Ratio kembali meningkat menjadi 0,35, yang mungkin disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, di mana banyak sektor ekonomi terpuruk dan distribusi pendapatan kembali menjadi tidak merata. Pada periode 4 (2021-2023), Gini Ratio sedikit meningkat dari 0,36 di tahun 2021 menjadi 0,38 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan kembali mengalami peningkatan, meskipun tidak setinggi periode sebelumnya. Secara keseluruhan, Gini Ratio di Kota Pasuruan menunjukkan pola fluktuasi yang kompleks, dengan periode kenaikan yang signifikan diikuti oleh periode penurunan yang substansial, dan kemudian diakhiri dengan peningkatan kembali. Ini mencerminkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah isu yang terus berlanjut, dan memerlukan perhatian khusus serta kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif untuk mencapai pemerataan yang lebih baik.

Secara lebih detail, ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kota Pasuruan pada tahun 2023 masih berada di bawah nilai rasio Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian kondisi distribusi pendapatan di Kota Pasuruan termasuk dalam kategori yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur, seperti Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Surabaya yang memiliki nilai rasio gini di atas 0,387. Bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/kota) lain di Provinsi Jawa Timur ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kota Pasuruan pada tahun 2023 telah berada pada peringkat ke 31 dari 38 kabupaten/kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Jawa Timur yang mencapai 0,387, maka posisi Kota Pasuruan masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,09. Pada tahun 2023 hanya terdapat 1 kabupaten dan 5 kota yang memiliki ketimpangan pendapatan (gini rasio) berada di atas Provinsi Jawa Timur. Dalam lingkup kota hanya terdapat 3 kota yang ketimpangan pendapatan (gini rasio) nya berada dibawah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto, dimana dengan demikian bisa terlihat bahwa gini rasio pada wilayah kota cenderung lebih besar dibandingkan dengan di wilayah kabupaten. Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan (gini rasio) berdasarkan kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II. 14 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

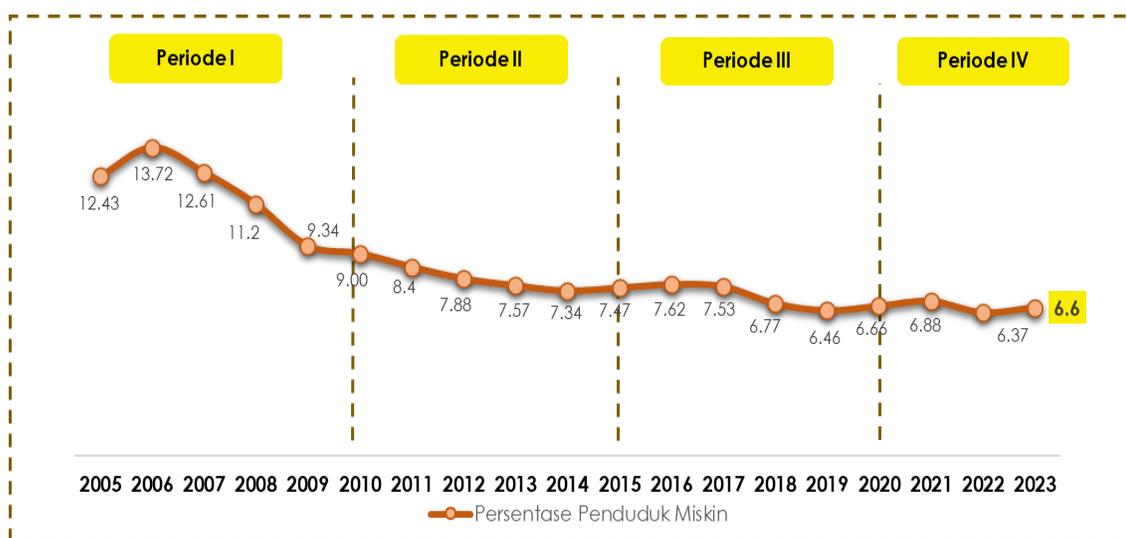
Bila melihat kondisi ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Kota Pasuruan dibandingkan dengan wilayah dengan tipologi perkotaan di Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Kota Pasuruan pada tahun 2023 berada pada urutan ke 3 dari 9 kota di Provinsi Jawa Timur, setelah Kota Batu, Kota Probolinggo, dan Kota Mojokerto, artinya ketimpangan pendapatan (gini rasio) masyarakat di Kota Pasuruan masih lebih baik dibandingkan dengan 6 kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitarnya, yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, maka dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kota Pasuruan masih lebih tinggi dari kedua wilayah tersebut, dimana masing-masing wilayah memiliki ketimpangan pendapatan (gini rasio) sebesar 0,319% untuk Kabupaten Probolinggo dan 0,367% untuk Kabupaten Pasuruan. Sehingga Pemerintah Kota Pasuruan ke depan harus terus selalu berusaha untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio) masyarakat dengan berbagai kebijakan dan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan secara merata.

C. Angka Kemiskinan

Indikator angka kemiskinan di Kota Pasuruan dalam pelaksanaan RPJPD Kota Pasuruan selama tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan adanya penurunan. Melihat pada capaian kinerja awal RPJPD tahun 2005, angka kemiskinan di Kota Pasuruan nilainya tercatat mencapai 12,43%, sedangkan hingga pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami penurunan sebesar 46,9% atau sebanyak 5,83, sehingga pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Pasuruan tercatat menjadi sebesar 6,6%. Adapun rata-rata penurunan setiap tahunnya mencapai sebesar 3,25%.

Perkembangan angka kemiskinan di Kota Pasuruan selama tahun 2005 hingga 2023 cenderung mengalami penurunan, selama rentang waktu tersebut terjadinya peningkatan angka kemiskinan hanya terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 10,38%, pada tahun 2015 dan tahun

2016 dengan peningkatan masing-masing mencapai 1,77% dan 2,01%, serta pada tahun 2020 dan 2021 dengan peningkatan masing-masing tahun mencapai 3,10% dan 3,30%. Terakhir peningkatan justru terjadi pada tahun 2023 dari 6,37% pada tahun 2022 meningkat menjadi 6,6% pada tahun 2023. Terjadinya peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlepas dari adanya dampak dari pandemi Covid-19. Semakin terbatasnya aktivitas masyarakat pada saat pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga dengan menurunnya pendapatan maka semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2005 hingga 2023 mengalami peningkatan secara bertahap, dimana pada tahun 2005 garis kemiskinan di Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 140.375,-, sedangkan pada tahun 2023 menjadi Rp. 519.512,-. Dalam perkembangan angka kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2005 hingga 2023 tercatat bahwa penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 16,61%.

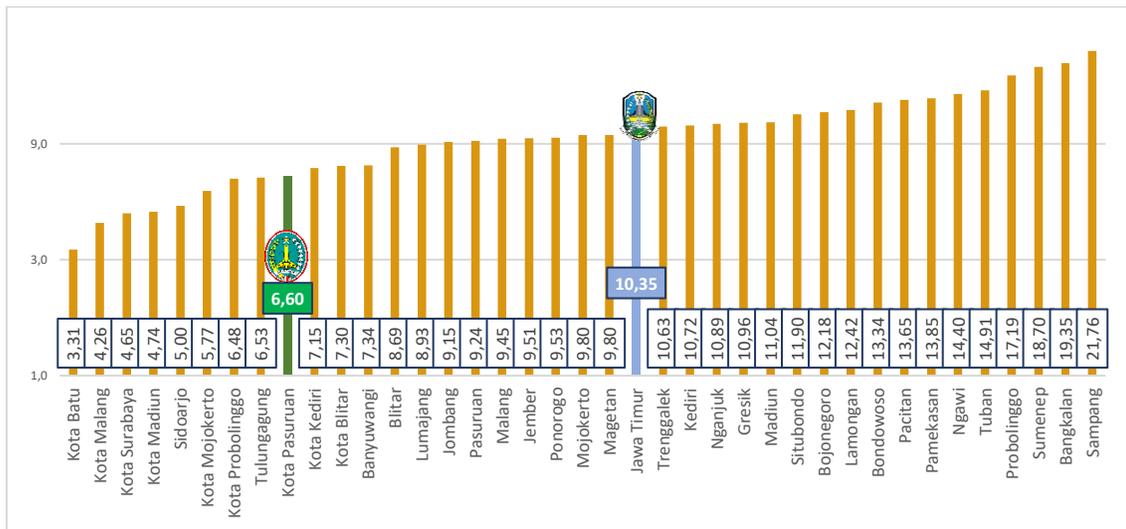


Gambar II. 15 Angka Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Posisi angka kemiskinan Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 berada pada urutan ke 7 dari 38 kabupaten/ kota dengan kemiskinan terendah. Sedangkan bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 10,35%, maka posisi Kota Pasuruan masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 3,87%, artinya angka kemiskinan di Kota Pasuruan masih jauh lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Terdapat 6 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki persentase kemiskinan di bawah Kota Pasuruan, yaitu : Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto. Untuk itu, pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kota Pasuruan perlu lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maupun program-program yang memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Pasuruan secara terintegrasi, agar persentase kemiskinan dapat semakin menurun. Bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitar Kota Pasuruan, yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo dapat terlihat bahwa angka kemiskinan Kota

Pasuruan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kedua wilayah tersebut. Bahkan posisi Kabupaten Probolinggo masih berada di atas Provinsi Jawa Timur dengan angka kemiskinan 17,19%. Untuk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dari Kota Pasuruan namun telah berada dibawah Provinsi Jawa Timur, yaitu mencapai 9,24%.



Gambar II. 16 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Posisi angka kemiskinan Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan 9 wilayah kota lainnya di Provinsi Jawa Timur dapat terlihat bahwa pada tahun 2023 Kota Pasuruan berada pada urutan ke 7 dari 9 kota lainnya, dan angka kemiskinannya masih berada dibawah Kota Kediri dan Kota Blitar. Walaupun posisi Kota Pasuruan dibandingkan dengan sebagian besar wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur berada dalam kondisi yang lebih baik, namun ke depan permasalahan kemiskinan di Kota Pasuruan masih perlu dituntaskan, mengingat hingga tahun 2020 masih terdapat 13,56 ribu Jiwa penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka memang kini belum bisa terlepas dari salah satu bagian masalah yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk Kota

Pasuruan. Berikut merupakan gambaran dari perkembangan data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan ialah sebagai berikut:



Gambar II. 17 TPT Kota Pasuruan Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Grafik yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2005 hingga 2023 cenderung memiliki capaian yang naik. Data diawali dari Tahun 2005 data menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Pasuruan mencapai 15,14% hingga perkembangannya pada tahun 2023 mampu menekan pada angka 5,64%. Meskipun cenderung memiliki tren penurunan, namun capaian saat ini dirasa belum optimal. Dimana merujuk terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya capaian terbaik Kota Pasuruan terhadap menekan pengangguran ialah justru terjadi pada tahun 2018 dimana angka pengangguran mampu menyentuh 5,50% yang mampu dipertahankan 2 tahun berturut-turut yakni pada tahun 2012 dan 2018.

Capaian tingkat pengangguran terbuka justru cenderung fluktuatif dimana adanya penurunan dan peningkatan sebagai contoh pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak Covid 19, yang meningkatkan cukup signifikan angka pengangguran dari semula mencapai 4,89% pada tahun 2019 menjadi 6,33% dan 6,23% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Namun dampak Covid-19 tentunya juga berdampak kepada seluruh kabupaten / kota khususnya di Jawa Timur, bukan hanya terjadi di Kota Pasuruan.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi dalam suatu wilayah atau komunitas. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Penilaian ini membantu mengidentifikasi area di mana perlindungan anak masih lemah dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat.

Tujuan utama dari Indeks Perlindungan Anak adalah memastikan bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Dengan mengukur dan memantau indeks ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak. Selain itu, indeks ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak yang sudah dilakukan berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Tabel II. 12 Indeks Perlindungan Anak Kota Pasuruan Tahun 2021-2022

Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus
2021	55,588	69,41	79,88	35,07	82,44
2022	50,31	90,80	80,75	45,66	79,96

Sumber: Kemen PPPA Republik Indonesia, 2024

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Pasuruan Tahun 2022 ada di angka 70,38 dan berada di atas rata-rata capaian IPA Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, terjadi tren kenaikan pada setiap dimensi IPA di Kota Pasuruan terutama pada Indeks O2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Indeks O3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dan Indeks O4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Peningkatan dalam ketiga dimensi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat Kota Pasuruan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Fokus pada penguatan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, perbaikan kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta akses terhadap pendidikan dan kegiatan budaya, menunjukkan upaya yang holistik dalam melindungi dan mendukung perkembangan anak-anak. Ini juga mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan kemungkinan besar efektif dan relevan dengan kebutuhan lokal.

B. Indeks Pembangunan Gender

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



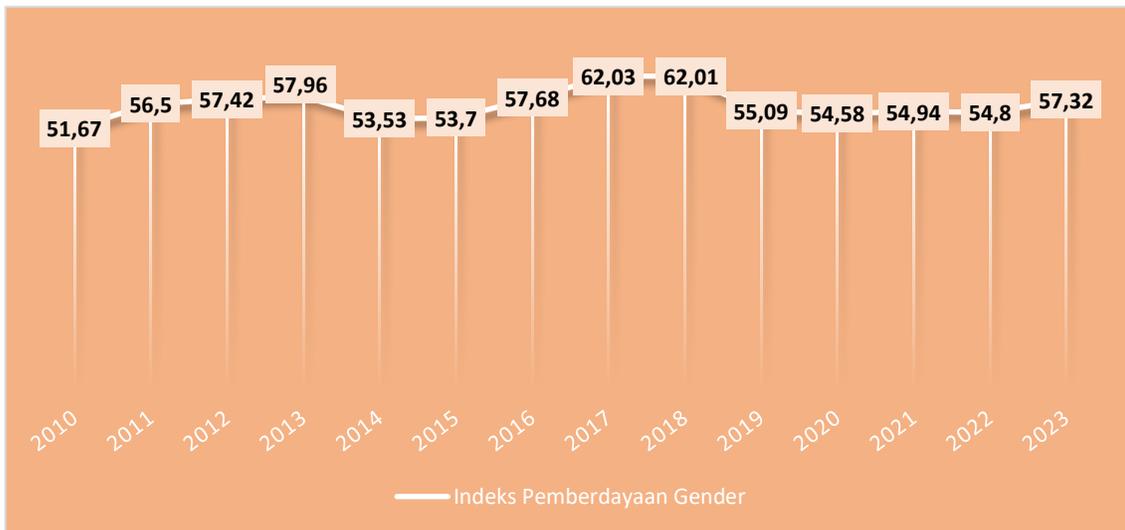
Gambar II. 18 Indeks Pembangunan Gender Kota Pasuruan Tahun 2010-2023

Sumber: DP3AKB Kota Pasuruan, 2024

Melihat data yang tertera pada grafik di atas, maka capaian Indeks Pembangunan Gender di Kota Pasuruan berangsur mengalami peningkatan. Apabila indeks tersebut besarnya 100 maka hak antara perempuan dan laki-laki di suatu daerah seimbang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Kota Pasuruan masih ada ketimpangan hak antar gender karena masih di bawah angka 100. Namun pada grafik di atas sudah mendekati ke angka 100, dibutuhkan beberapa usaha agar capaian meningkat hingga di angka 100. Tentu Pemerintah Kota Pasuruan khususnya Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan selaku leading sector dari urusan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan gender memiliki pekerjaan rumah bagaimana untuk bisa meningkatkan inklusivitas dengan memberikan dan memberdayakan perempuan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik.

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender ialah Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berikut merupakan capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pasuruan:



Gambar II. 19 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Pasuruan Tahun 2010-2023

Sumber: DP3AKB Kota Pasuruan, 2024

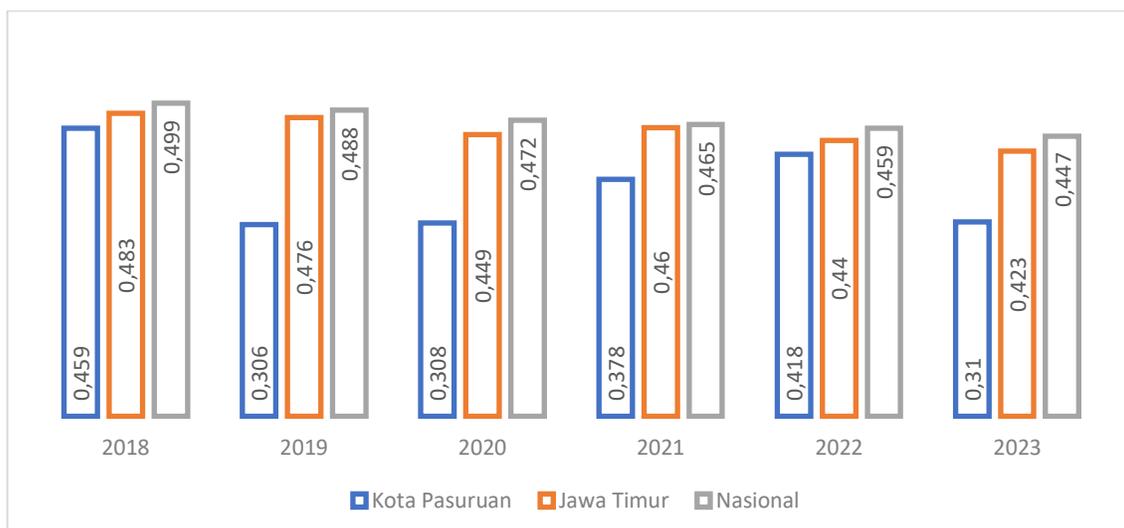
Berdasarkan pada grafik di atas maka dapat diketahui bahwa capaian dari pada indeks pemberdayaan gender di Kota Pasuruan bersifat fluktuatif. Jadi dapat dikatakan bahwa memang Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pasuruan yang terus membaik. Namun gender gap masih cukup besar, terutama pada tingkat kepemimpinan perempuan, baik di sektor swasta sektor publik, dan di sektor keuangan. Untuk itu maka tantangan paling besar adalah pada aspek sosial budaya. Ke depan, akan mendorong peningkatan pemahaman lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, media massa dan dunia usaha baik ditingkat nasional maupun daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

D. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index*) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan politik. Indeks ini mengukur perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang, serta dampak ketidaksetaraan ini terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Aspek-aspek yang dinilai meliputi kesehatan reproduksi (seperti angka kematian ibu dan kelahiran remaja), pemberdayaan (melalui pendidikan dan keterwakilan perempuan di parlemen), serta partisipasi tenaga kerja.

Tujuan dari Indeks Ketimpangan Gender adalah untuk mengidentifikasi dan memahami kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Dengan memantau indeks ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Indeks ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai

kesetaraan gender, sekaligus mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan intervensi lebih lanjut.



Gambar II. 20 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

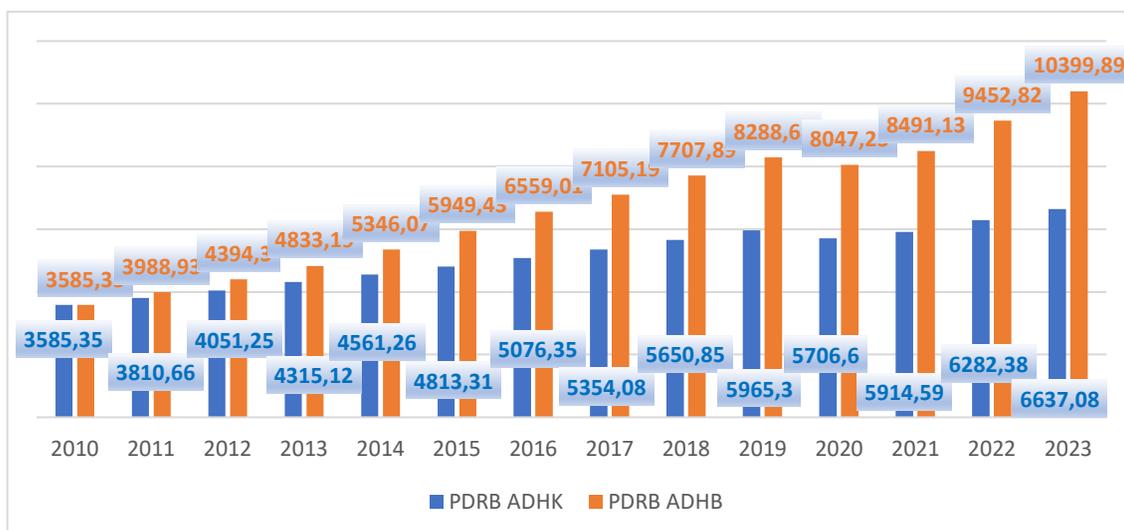
Indeks ketimpangan gender Kota Pasuruan tahun 2018-2023 memiliki capaian yang fluktuatif namun secara konsisten berada dibawah capaian Jawa Timur dan Nasional. Kondisi ini berarti bahwa Kota Pasuruan memiliki tingkat kesetaraan gender yang lebih baik, di mana perempuan dan laki-laki cenderung memiliki akses yang lebih setara terhadap berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Hal juga mencerminkan upaya atau kebijakan lokal yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan gender dan mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada metode perhitungan harga. PDRB ADHB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut, sementara PDRB ADHK dihitung berdasarkan harga tetap dari tahun dasar tertentu. Di Kota Pasuruan, PDRB dihitung dengan pendekatan produksi, yang mana nilainya ditentukan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Nilai yang didasarkan pada harga berlaku digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan struktur ekonomi yang sesungguhnya pada tahun yang bersangkutan. Di bawah ini disajikan data PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Pasuruan dari tahun 2010 hingga tahun 2023:



Gambar II. 21 Nilai PDRB ADHK dan ADHB Kota Pasuruan Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Dalam periode tahun 2010 hingga 2023, Kota Pasuruan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 2010, PDRB ADHB Kota Pasuruan tercatat sebesar 3.585,35 juta Rupiah, sedangkan PDRB ADHK berada pada level yang sama yaitu 3.585,35 juta Rupiah. Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan yang konsisten pada nilai PDRB, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pada tahun 2023, PDRB ADHB Kota Pasuruan mencapai 10.399,89 juta Rupiah, hampir tiga kali lipat dari nilai pada tahun 2010. Sementara itu, PDRB ADHK juga mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 6.637,08 juta Rupiah pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat fluktuasi harga dari tahun ke tahun, nilai produksi riil Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini mencerminkan struktur ekonomi yang berkembang dan peningkatan kapasitas produksi di berbagai sektor ekonomi di Kota Pasuruan, yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap nilai PDRB yang terus meningkat selama periode tersebut.

PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Perdagangan besar, eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor adalah sektor yang memiliki peran paling besar dalam struktur ekonomi Kota Pasuruan yakni sebesar 29,64% kemudian terdapat sektor industri pengolahan sebesar 20,15% selain itu lapangan usaha yang lain memiliki peranan di bawah 10%. Terdapat juga beberapa lapangan usaha yang tidak memiliki peranan dalam struktur ekonomi Kota Pasuruan di Tahun 2023 yakni sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 0% di tahun 2023 dan 2022. Kemudian ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,20%, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,06%, Jasa perusahaan sebesar 0,60% dan terakhir jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,86%.

Data tersebut kemudian di *breakdown* dalam capaian PDRB ADHB Kota Pasuruan sebesar 10.399.89 di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 9.452,82. Sedangkan untuk PDRB ADHK tahun 2023 sebesar 6.637,08 meningkat

dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 6.282,38. Untuk sektor lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan yakni sektor transportasi dan pergudangan yang dapat dikembangkan melihat potensinya yang cukup tinggi dan angka capaian di tahun 2023 juga mengalami peningkatan yang tinggi dalam 3 tahun terakhir sebesar 861,10 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 695,59. Berikut dibawah ini rincian PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kota Pasuruan khususnya pada lima tahun terakhir yaitu 2019-2023:

Tabel II. 13 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pasuruan Tahun 2019-2023

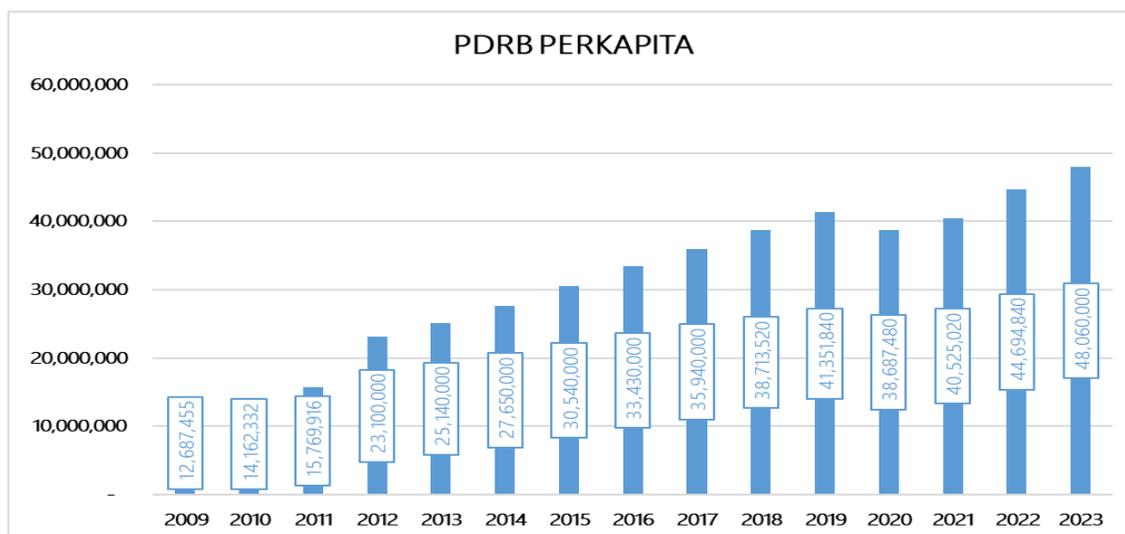
	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	177,52	198,39	193,47	213,93	228,86
B	Pertambangan dan Penggalian	2,02	1,97	2,01	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1660,7	1566,84	1670,74	1883,73	2095,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,64	5,68	5,93	6,44	6,59
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,97	18,96	19,59	19,51	20,99
F	Konstruksi	512,14	493,06	504,44	547,28	571,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2440,84	2297,26	2478,65	2807,57	3082,87
H	Transportasi dan Pergudangan	507,29	481,41	525,26	695,59	861,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464,18	425,94	451,2	505,47	558,35
J	Informasi dan Komunikasi	630,36	682,07	724,88	741,82	812,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	599,96	602,09	617,58	661,44	708,07
L	Real Estat	209,24	214,3	217,88	227,43	237,49
M,N	Jasa Perusahaan	52,57	51,2	53,84	55,77	62,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	369,2	373,06	370,46	391,66	404,39
P	Jasa Pendidikan	336,51	357,38	360,77	366,44	395,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,84	76,93	80,31	85,82	89,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	231,83	200,71	214,13	242,92	266,27
	Produk Domestik Regional Bruto	8287,82	8047,23	8491,13	9452,82	10.399,89

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

B. PDRB PER KAPITA

Indikator PDRB Per Kapita dalam pelaksanaan RPJPD Kota Pasuruan pada tahun 2009 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dimana capaian kinerja awal RPJPD tahun 2005 (dengan menggunakan data awal tahun 2009) untuk PDRB Per Kapita Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 12.687.455,00, sedangkan hingga tahun 2023 nilai PDRB Per Kapita mengalami pertumbuhan sebesar 278,8% atau mengalami peningkatan mencapai Rp. 35.372.545,00 dari tahun 2009 sehingga pada tahun 2023 nilai PDRB Per Kapita Kota Pasuruan menjadi sebesar Rp. 48.060.000,00. Adapun rata-rata pertumbuhan PDRB Per Kapita dalam setiap tahunnya mencapai sebesar 10,45%. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020, yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan semakin lemahnya aktivitas perekonomian. Pada tahun 2020 nilai PDRB Per Kapita mengalami penurunan dari Rp. 41.351.840,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 38.687.480,- atau mengalami penurunan sebesar 6,44%. Selama tahun 2009 hingga 2023, peningkatan PDRB Per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 46,48%, sedangkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2023 telah mencapai sebesar 7,53%. Semakin meningkatnya nilai PDRB Per Kapita di Kota Pasuruan dalam setiap

tahunnya menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Pasuruan juga semakin baik.

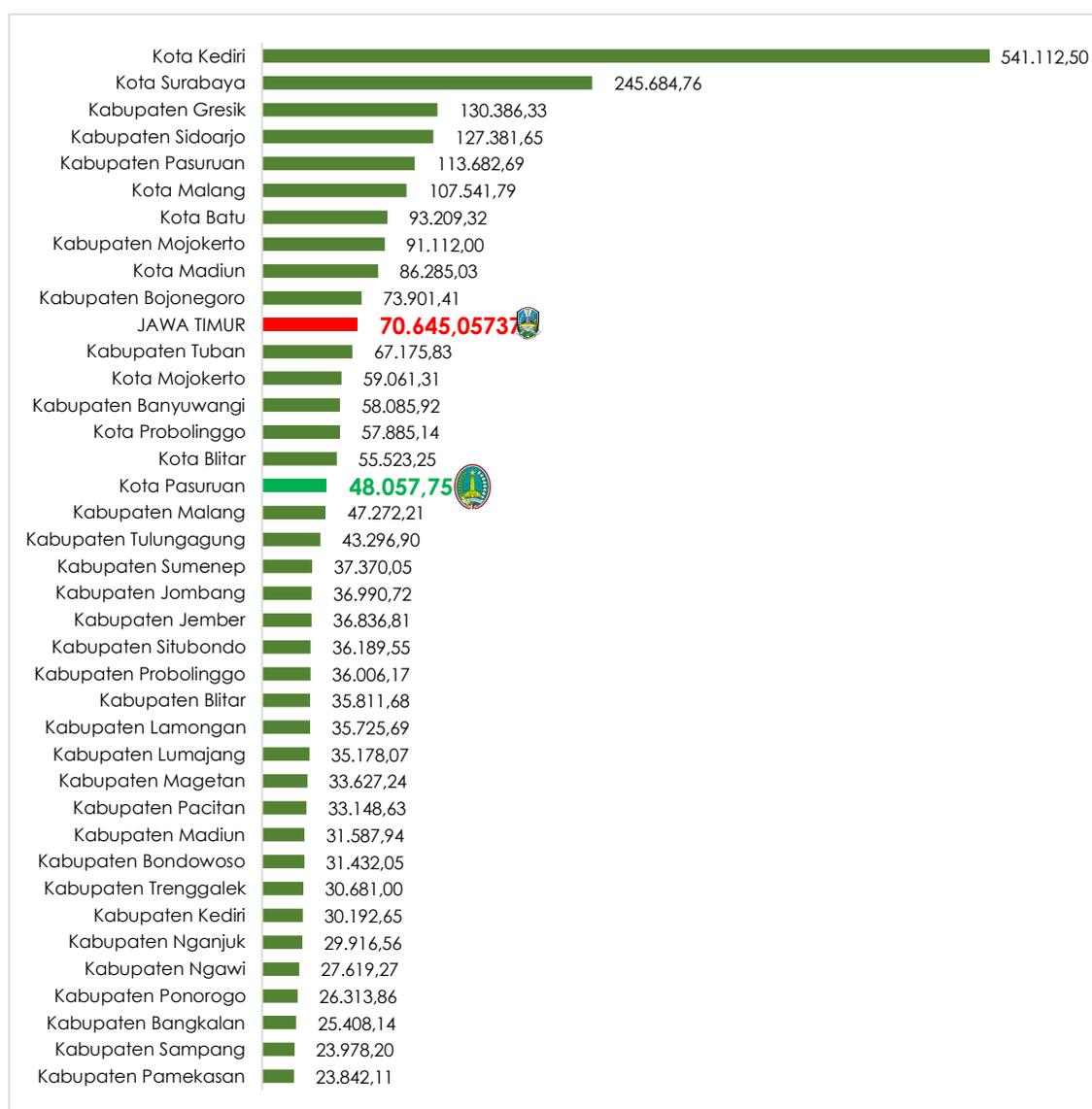


Gambar II. 22 PDRB Per Kapita Kota Pasuruan 2009-2023

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur yang mengacu terhadap data tahun 2023, posisi PDRB Per Kapita Kota Pasuruan pada tahun 2023 masih menempati peringkat ke 16 dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, serta berada pada posisi terbawah dari 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, bahkan bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur posisinya PDRB Per Kapita Kota Pasuruan masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang nilainya tercatat sebesar Rp. 70.645.057,-, artinya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Pasuruan masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Namun bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitar Kota Pasuruan, yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo dapat terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Pasuruan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo, bahkan posisi wilayah tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur. Namun bila dibandingkan dengan Kabupaten Pasuruan, maka posisi Kota Pasuruan masih jauh dibawahnya dengan nilai PDRB Per Kapita yang mencapai Rp. 113.682.690.

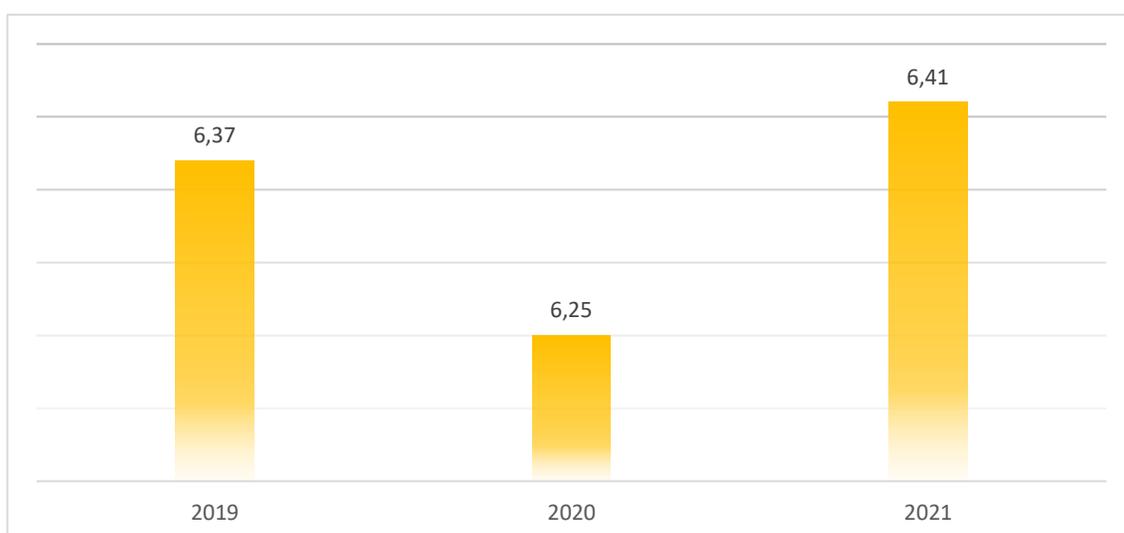
Untuk mengetahui nilai PDRB Per Kapita berdasarkan kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut (dalam Ribu Rupiah).



Gambar II. 23 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

C. INDEKS EKONOMI INKLUSIF

Indeks Ekonomi Inklusif merupakan alat pengukuran yang menilai seberapa baik suatu negara atau wilayah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja ekonomi dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan, mengidentifikasi tantangan dan peluang, mendorong kebijakan yang berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi. Indeks ini membantu pembuat kebijakan untuk memahami area yang perlu diperbaiki guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Capaian Indeks Ekonomi Inklusif di Kota Pasuruan disajikan dalam grafik berikut:



Gambar II. 24 Indeks Ekonomi Inklusif Kota Pasuruan Tahun 2019-2021
Sumber: Bappenas, 2024

Indeks Ekonomi Inklusif Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2019-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Skala 6 dalam capaian ini ada di predikat memuaskan. Meskipun demikian, adanya penurunan ini perlu dijadikan perhatian dikarenakan mengindikasikan adanya penurunan dalam beberapa aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup merata dan tidak memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyebab penurunan ini bisa terkait dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, pengangguran, akses yang kurang terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya investasi dalam infrastruktur dan modal manusia. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan mencerminkan kualitas pendidikan di suatu wilayah dan berperan penting dalam menentukan daya saing sumber daya manusia (SDM). Indeks yang lebih tinggi menunjukkan SDM yang lebih berkualitas, produktif, dan inovatif, yang mendorong peningkatan kesempatan kerja dan menarik investasi sehingga secara keseluruhan memperkuat daya saing wilayah tersebut di bidang sumber daya manusianya. Capaian Indeks Pendidikan di Kota Pasuruan dijelaskan dalam grafik berikut:



Gambar II. 25 Indeks Pendidikan Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2024

Grafik di atas menunjukkan data perkembangan Indeks Pendidikan Kota Pasuruan tahun 2010-2023. Capaian Indeks Pendidikan Kota Pasuruan secara signifikan terus mengalami peningkatan, adapun penurunan capaian yang terjadi pada tahun 2012 disebabkan oleh adanya perubahan penghitungan dari Indeks Pendidikan. Perubahan penghitungan komponen Indeks Pendidikan yang semula adalah angka melek huruf digantikan dengan harapan lama sekolah, yang dinilai mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan. Sehingga adanya perubahan ini menyebabkan penurunan level IPM jika dibandingkan dengan skor IPM dengan metode lama untuk tahun yang sama. Terlepas dari penurunan capaian yang disebabkan oleh adanya perubahan metode penghitungan, capaian Indeks Pendidikan Kota Pasuruan terus meningkat. Peningkatan bertahap ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk kebijakan pemerintah daerah yang efektif, peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Selain itu, kesadaran masyarakat Kota Pasuruan akan pentingnya pendidikan juga berkontribusi terhadap perbaikan capaian pendidikan. Hal ini selaras dengan capaian Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komposit pembentuk Indeks Pendidikan di Kota Pasuruan. Peningkatan kualitas pendidikan berdampak pada daya saing SDM di dalamnya dalam mengakses pekerjaan dan kapasitas.

B. Angka Literasi Dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang penting untuk membaca, menulis, memahami dan menggunakan informasi, serta menggunakan angka dan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi yang diterima, sedangkan numerasi melibatkan pemahaman angka dan penalaran matematika. Berikut ini adalah data mengenai kemampuan literasi dan numerasi di jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Pasuruan:

Tabel II. 14 Kemampuan Literasi dan Numerasi Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
Rata-rata Kemampuan Literasi berdasarkan asesmen Nasional					
1	Jenjang Pendidikan SD/MI	%	58,29	61,49	68.27
2	Jenjang Pendidikan SMP/MTs	%	68,35	71,74	77.73
Rata-rata Kemampuan Numerasi berdasarkan asesmen Nasional					
3	Jenjang Pendidikan SD/MI	%	38,54	44,53	50.80
4	Jenjang Pendidikan SMP/MTs	%	56,13	58,91	67.18

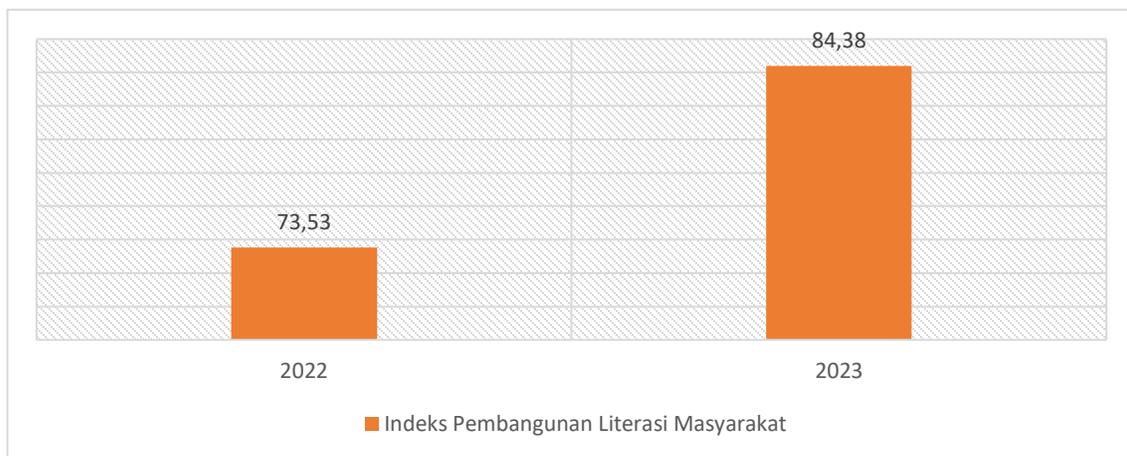
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2024

Secara keseluruhan, capaian rata-rata kemampuan literasi dan numerasi di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs berdasarkan asesmen nasional menunjukkan tren peningkatan positif dalam tiga tahun terakhir. Tingkat literasi naik dari 74,8% pada tahun 2021 menjadi 76,2% pada tahun 2022, dan mencapai 78,1% pada tahun 2023, dengan peningkatan total sebesar 3,3 poin persentase. Sementara itu, tingkat numerasi juga mengalami peningkatan dari 72,3% pada tahun 2021 menjadi 74,0% pada tahun 2022, dan terus naik hingga 75,6% pada tahun 2023, mencatat peningkatan total yang sama sebesar 3,3 poin persentase. Peningkatan pada kedua indikator ini mencerminkan adanya perbaikan yang konsisten dalam hasil pendidikan terkait literasi dan numerasi, yang merupakan hasil dari kebijakan atau intervensi pendidikan yang efektif selama periode tersebut.

Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi secara signifikan meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Ini berdampak pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di tempat kerja. SDM yang kompeten dengan keterampilan literasi dan numerasi yang baik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi, serta lebih siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan yang mengembangkan literasi dan numerasi sangat penting untuk memperkuat daya saing SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat literasi serta kemampuan masyarakat dalam memahami, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Indeks ini meliputi berbagai aspek seperti literasi membaca, literasi digital, literasi keuangan, dan kemampuan kritis dalam mengonsumsi informasi.



Gambar II. 26 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pasuruan Tahun 2022-2023

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian IPLM Kota Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, Kota Pasuruan berhasil masuk dalam tiga besar Kabupaten/Kota dengan capaian IPLM tertinggi di Jawa Timur. Kota Pasuruan mencapai nilai komposit maksimal sebesar 1,0000 pada tiga indikator komposit, yaitu Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP (UPLM5), dan Anggota Perpustakaan (UPLM7).

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Salah satu indikator penting dalam mengukur aspek daya saing sumber daya manusia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengacu pada persentase penduduk usia kerja yang secara aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi penduduk yang berkontribusi langsung dalam perekonomian, serta mencerminkan kesiapan dan keterlibatan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut ini grafik mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pasuruan:



Gambar II. 27 TPAK Kota Pasuruan Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pasuruan tahun 2010-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. Capaian TPAK terendah ada di tahun 2010 yaitu sebesar 63,29 sedangkan capaian tertinggi ada pada tahun 2021 yaitu sebesar 71,66. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal, yang pada gilirannya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah.

E. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografis penting yang memberikan gambaran mengenai beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, yaitu anak-anak dan lansia dengan jumlah penduduk usia produktif yang bekerja. Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa setiap individu dalam kelompok usia produktif harus mendukung lebih banyak orang yang tidak bekerja, yang dapat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rasio ketergantungan menjadi salah satu ukuran yang mencerminkan tekanan ekonomi terhadap penduduk usia produktif. Indikator ini tidak hanya penting untuk memahami struktur demografi wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang efektif, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja. Dengan memahami tren rasio ketergantungan di Kota Pasuruan, kita dapat mengevaluasi bagaimana struktur usia penduduk mempengaruhi potensi ekonomi daerah dan bagaimana strategi pembangunan harus disesuaikan untuk mengurangi beban ketergantungan serta memaksimalkan kontribusi penduduk usia produktif.



Gambar II. 28 Angka Ketergantungan Kota Pasuruan Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Rasio Ketergantungan di Kota Pasuruan mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010, rasio ketergantungan berada pada angka 46,15, yang merupakan titik tertinggi dalam periode yang ditunjukkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, setiap 100 penduduk usia

produktif harus menanggung sekitar 46 orang yang berada di luar usia kerja, baik itu anak-anak maupun lansia. Seiring berjalannya waktu, rasio ketergantungan ini secara bertahap menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2020, yaitu 43,11. Penurunan ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia non-produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin berkurang, yang dapat mencerminkan peningkatan dalam efisiensi penggunaan tenaga kerja dan potensi ekonomi yang lebih besar. Pada tahun 2021, rasio ketergantungan kembali meningkat menjadi 44,09 dan sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 43,57. Kenaikan pada tahun 2021 mencerminkan perubahan dalam struktur demografis atau dampak dari faktor-faktor ekonomi dan sosial tertentu. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, tren rasio ketergantungan di Kota Pasuruan menunjukkan pergerakan menuju tingkat yang lebih stabil selama beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi, karena beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IKLI memberikan gambaran yang objektif, menyeluruh, dan dapat dipercaya mengenai bagaimana masyarakat menilai pembangunan fisik serta manfaat yang dihasilkan dari infrastruktur tersebut.

Tabel II. 15 Skor Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

No.	Tahun	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
1	2022	3,53
2	2023	4,16

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan, 2024

Di Kota Pasuruan, pengukuran IKLI mulai dilakukan pada tahun 2022, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan dari 3,53 menjadi 4,16 dalam dua tahun terakhir. Skor ini masuk dalam kategori pelayanan dengan mutu Baik, yang mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam kualitas pelayanan infrastruktur. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur telah membuahkan hasil yang positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

A. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesalehan masyarakat beragama, mencakup aspek-aspek seperti kepercayaan sosial, kerjasama antarwarga, serta tingkat kriminalitas dan ketertiban umum. Daerah yang memiliki IKS tinggi biasanya menunjukkan stabilitas sosial yang lebih baik, keamanan yang lebih

terjamin, dan kualitas hidup yang lebih tinggi, yang menjadikannya daya tarik bagi para investor.

Tabel II. 16 Nilai Indeks Kesalehan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Indeks Kesalehan Sosial
1	2022	84,68
2	2023	88,47

Sumber: Diskominfo Kota Pasuruan 2023

Pada tahun 2023, nilai IKS Kota Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 3,79 poin, dari 84,68 pada tahun 2022 menjadi 88,47. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan nilai pada kelima variabel IKS dibandingkan tahun sebelumnya. Variabel yang mengalami kenaikan tertinggi adalah pada variabel Etika dan Budi Pekerti dan Variabel Relasi Antar Manusia. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 kesalehan sosial masyarakat mengalami peningkatan pada seluruh aspek kesalehan sosial.

B. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung dan menarik bagi investasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat regional. Indeks ini meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur, regulasi, ketersediaan tenaga kerja, akses pasar, dan faktor-faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing wilayah tersebut. Berdasarkan perhitungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel II. 17 IDSD Kota Pasuruan Tahun 2022-2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,41	2,30	3,57	2,31	4,00	3,53	4,71	3,23	1,61	0,39	5,00	2,30	3,11
2023	4,64	2,78	4,79	3,20	3,99	4,10	4,88	2,76	-	3,90	2,61	2,64	-

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Pada tahun 2022, Kota Pasuruan mencatat nilai IDSD sebesar 3,11, namun pada tahun 2023 skor IDSD tidak dapat diidentifikasi karena ada beberapa pilar yang belum lengkap. Secara keseluruhan, pilar yang memberikan kontribusi terbesar terhadap daya saing Kota Pasuruan adalah Pilar 11 (Dinamisme Bisnis), Pilar 1 (Institusi), dan Pilar 7 (Pasar Produk).

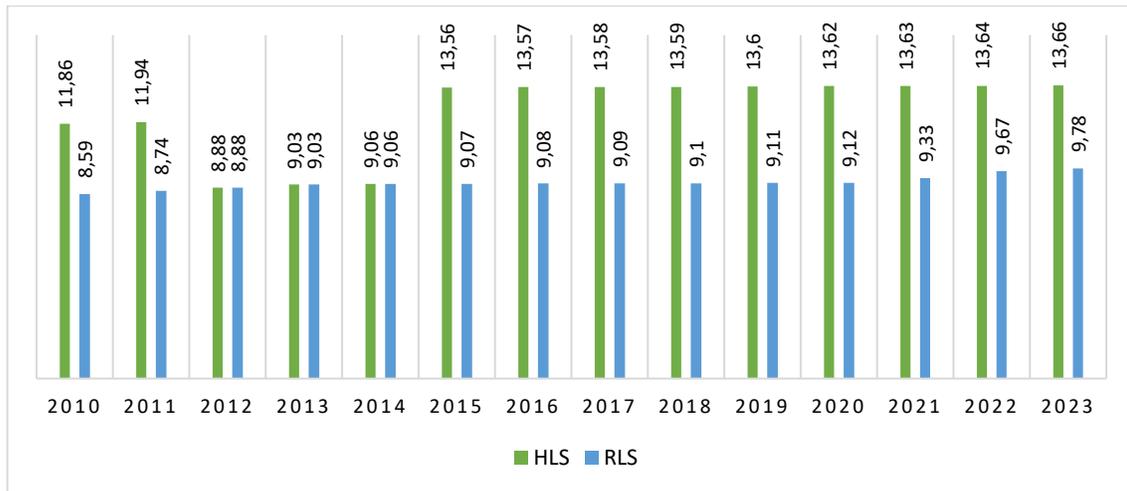
2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang diampu secara teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Kinerja urusan pendidikan di Kota

Pasuruan dalam 20 (dua puluh) tahun direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar II. 29 Capaian Indikator Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Grafik di atas menunjukkan tren capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Pasuruan dari tahun 2010 hingga 2023. Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa HLS mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 (11,86 tahun) hingga 2023 (13,66 tahun). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam harapan pendidikan masyarakat Kota Pasuruan, di mana anak-anak yang memasuki sistem pendidikan diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan akses dan peluang pendidikan yang lebih baik seiring dengan waktu, serta upaya pemerintah dan pihak terkait dalam mendorong partisipasi pendidikan. RLS juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan HLS. Pada tahun 2010, RLS berada di angka 8,59 tahun dan meningkat menjadi 9,78 tahun pada tahun 2023. Peningkatan RLS ini menandakan bahwa rata-rata lama sekolah yang diikuti oleh penduduk Kota Pasuruan semakin panjang, meskipun peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan HLS. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa meskipun harapan untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, realisasi dari lama waktu pendidikan yang ditempuh masih perlu ditingkatkan.

Kesenjangan antara HLS dan RLS menjadi poin analisis yang perlu dicermati. Sementara HLS di Kota Pasuruan terus meningkat, kesenjangan antara HLS dan RLS menunjukkan bahwa meskipun ada ekspektasi yang tinggi terhadap pendidikan, tidak semua siswa dapat mencapai tingkat pendidikan yang diharapkan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi, sosial, atau infrastruktur pendidikan yang mungkin masih perlu perbaikan. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam harapan lama sekolah, upaya yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan realisasi waktu pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Kota Pasuruan agar sejalan dengan harapan tersebut. Ini memerlukan peningkatan kualitas pendidikan, dukungan bagi siswa, serta upaya pengurangan hambatan dalam akses pendidikan.

Selain capaian indikator di atas, kinerja urusan pendidikan juga direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 18 Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kota Pasuruan

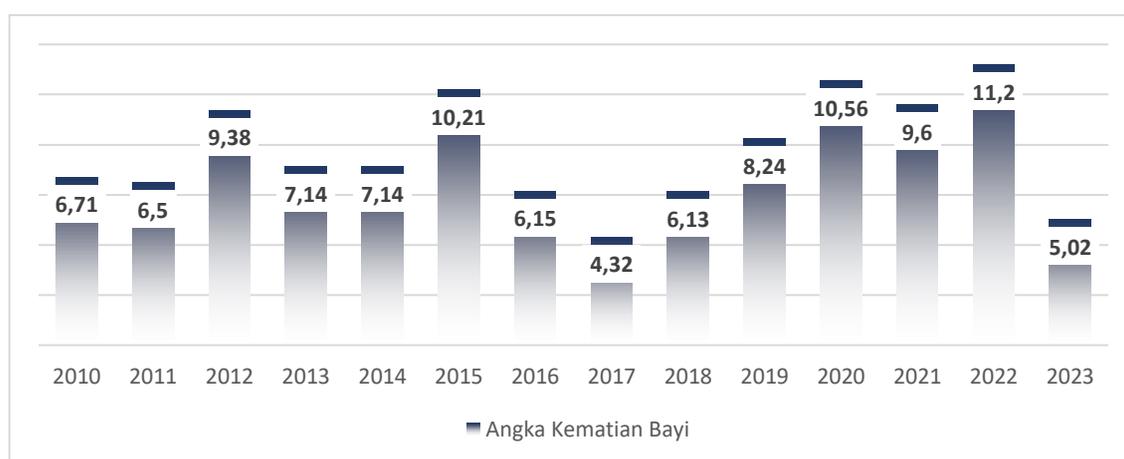
No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Persentase jumlah warga kota usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	140,76%	96,22%	96,73%
2.	Persentase warga kota usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar (SD/MI)	107,34%	97,55%	99,21%
3.	Persentase warga kota usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	0,64%	0,73%	96,46%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2024

Capaian indikator SPM bidang pendidikan Kota Pasuruan tahun 2021-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. Di tahun 2021 SPM pada jenjang satuan PAUD dan pendidikan dasar memiliki capaian di atas 100% sementara untuk jenjang pendidikan kesetaraan masih sangat rendah, hanya mencapai 0,64%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, dimana capaian SPM untuk satuan PAUD dan pendidikan dasar memiliki capaian lebih dari 95% namun untuk jenjang pendidikan kesetaraan masih sangat rendah yaitu 0,73%. Kondisi ini menggambarkan adanya keberhasilan yang signifikan dalam PAUD dan pendidikan dasar, namun masih ada tantangan besar yang harus di atasi dalam pendidikan kesetaraan untuk mencapai standar yang diharapkan. Sementara di tahun 2023 capaian SPM mulai dari satuan PAUD, Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Kesetaraan mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu 96,73% untuk satuan PAUD, 99,21% untuk jenjang pendidikan dasar, dan 96,46% untuk pendidikan kesetaraan. Meskipun capaian ini belum mencapai 100%, ada kemajuan signifikan yang menunjukkan peningkatan kualitas dan layanan di semua jenjang pendidikan tersebut. Ini mengindikasikan upaya yang berhasil dalam memperbaiki dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di Kota Pasuruan.

B. Kesehatan

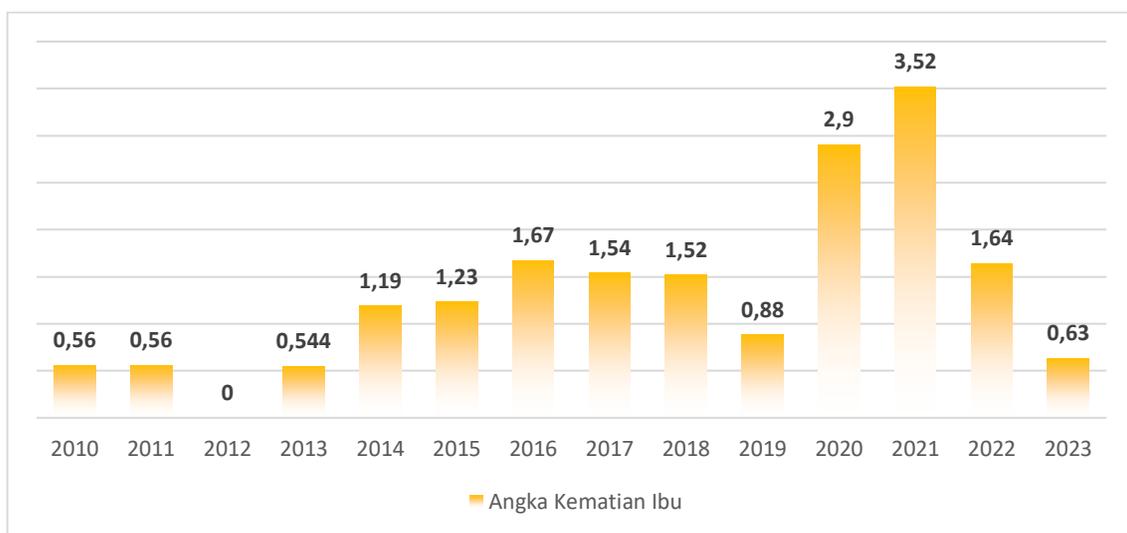
Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang diampu secara teknis oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Kinerja urusan kesehatan di Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2010-2023 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar II. 30 Angka Kematian Bayi di Kota Pasuruan Tahun 2010-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi usia di bawah 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian angka kematian bayi cukup fluktuatif, dengan capaian terendah di tahun 2017 sebesar 4,32 dan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 11,2. Angka harapan hidup selama 12 tahun ke belakang memiliki trend naik terutama sejak tahun 2017 yang merupakan tahun dengan capaian angka kematian bayi terendah. Meningkatnya angka kematian bayi disebabkan oleh beberapa faktor, kesadaran masyarakat utamanya ibu hamil secara aktif dalam perawatan maternal melalui posyandu menurun, kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan sangat penting untuk mengurangi angka kematian bayi. Berkaitan dengan hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan angka kematian ibu, berikut capaian indikator angka kematian ibu di Kota Pasuruan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023:

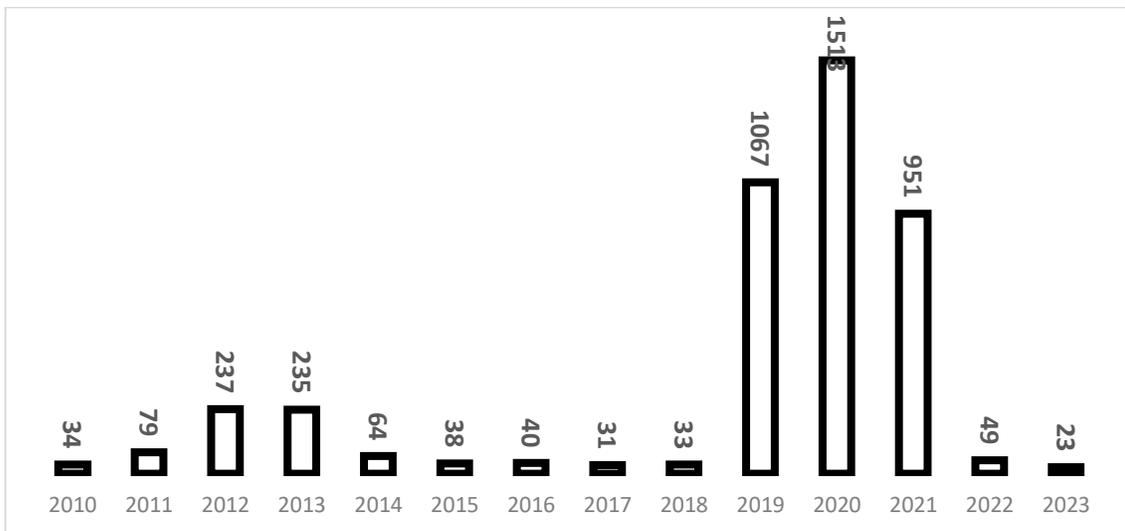


Gambar II. 31 Angka Kematian Ibu di Kota Pasuruan Tahun 2010-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2024

Angka kematian ibu (MMR) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain. Secara garis besar capaian indikator angka kematian juga memiliki tren yang meningkat, bahkan lebih tajam dari angka kematian bayi selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2018 hingga mencapai peningkatan 100% yakni dari realisasi tahun 2017 sebesar 1,54 menjadi 1,52 di tahun 2018, selanjutnya capaian kembali mengalami penurunan signifikan di tahun 2019 dikarenakan optimalisasi yang dilakukan menyusul isu besar meningkatnya angka kematian ibu di tahun sebelumnya, akan tetapi konsistensi tersebut belum sepenuhnya dilakukan mengingat bahwa capaian tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 2,9 dan kembali meningkat menjadi 3,52 di tahun 2021. Dengan melalui upaya yang cukup strategis maka tahun 2022 kembali mengalami penurunan mencapai angka 1,6 dan 2023 kembali turun menjadi 0,63.

Adapun permasalahan yang cukup menonjol terhadap naiknya angka kematian bayi dan angka kematian ibu adalah partisipasi ibu hamil serta kelompok posyandu yang seringkali mengalami inkonsistensi dalam kebersamaan perawatan maternal dan gizi yang diterapkan lewat adanya posyandu. Sumberdaya penggerak posyandu semakin sedikit yang aktif disusul laporan kehamilan yang cenderung pasif dari masyarakat sehingga perlu upaya jemput bola dalam mendata ibu hamil dan balita. Masyarakat cenderung lebih percaya terhadap budaya serta tokoh agama dan seringkali mengesampingkan pentingnya perawatan maternal melalui tenaga medis. Budaya ini ke depan perlu diwaspadai sebagai isu yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan.



Gambar II. 32 Jumlah Gizi Buruk di Kota Pasuruan Tahun 2010-2023
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2024

Jumlah gizi buruk di tahun 2023 merupakan angka yang cukup baik mengingat capaian pada 13 tahun kebelakang mengalami fluktuasi yang cukup dalam dengan rentang capaian antara 33 kejadian gizi buruk hingga mencapai 1513 kejadian di tahun 2020. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019 dengan penambahan jumlah gizi buruk dari tahun sebelumnya 1034 kejadian, pendidikan kesehatan kepada masyarakat perlu lebih diperbaiki, pola makan dan gizi yang baik menjadi modal utama dalam mewujudkan generasi yang sehat. Jumlah gizi buruk di tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat baik hingga realisasinya mencapai angka 23. Pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak baik antar perangkat daerah sesuai dengan peran masing-masing, organisasi masyarakat, dan swasta melalui pendidikan gizi, bantuan pangan masyarakat miskin, perbaikan akses dan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur penunjang lainnya. Serta meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Selain capaian indikator di atas, kinerja urusan kesehatan juga direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 19 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2023

Indikator	Satuan	2023
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95,86
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	97,04
Persentase bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,96
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	97,31

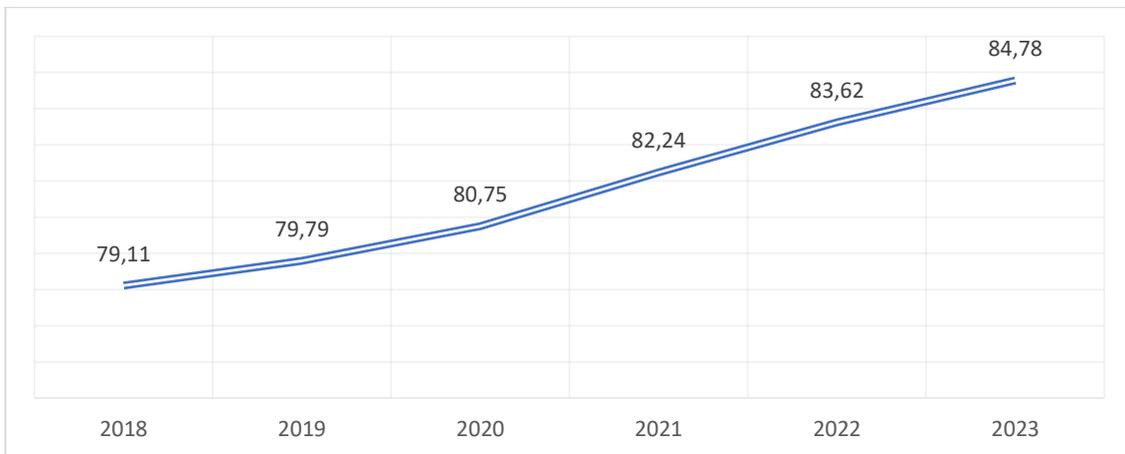
Indikator	Satuan	2023
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,58
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,88
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	79,90
Persentase penderita Hipertensi yang mendapat:an pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
Persentase OOGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100
Persentase orang denaan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pasuruan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan Kota Pasuruan dalam 20 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, drainase dan gedung pada periode pembangunan jangka panjang sebelumnya telah digiatkan karena besarnya pengaruh infrastruktur tersebut untuk mendukung pembangunan pada sektor lainnya. Berikut merupakan capaian indikator yang merepresentasikan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pasuruan:

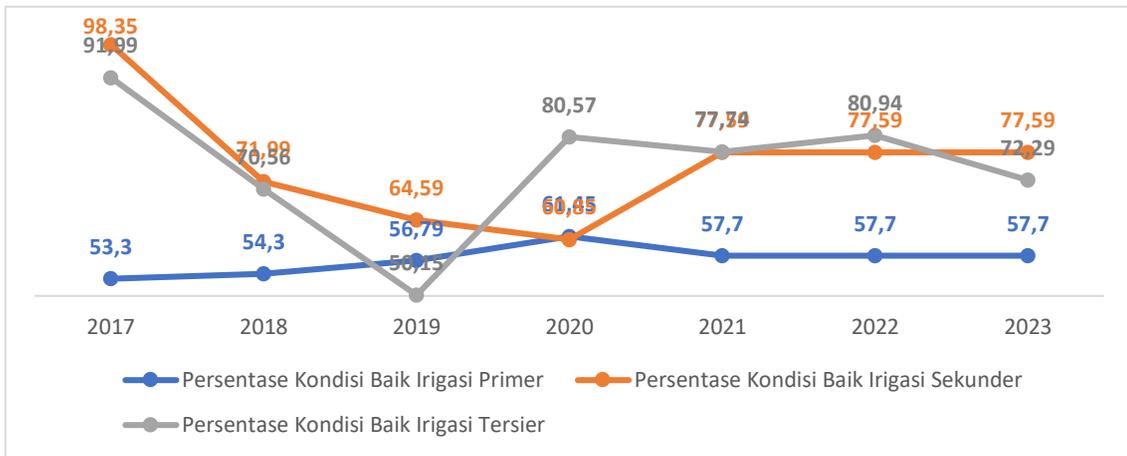
Pemerintah Kota Pasuruan mengelola jalan sepanjang 78.933 km dan 84,78% atau 66,93 km dari panjang tersebut pada tahun 2023 dalam kondisi baik. Panjang jalan yang dikelola pemerintah Kota Pasuruan secara umum tetap sehingga fokus pembangunan lebih pada perawatan dan perbaikan agar jalan tetap dalam kondisi baik. Kinerja pembangunan dalam hal ini sudah baik melihat adanya peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik. Grafik berikut ini menggambarkan kinerja tersebut:



Gambar II. 33 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2024

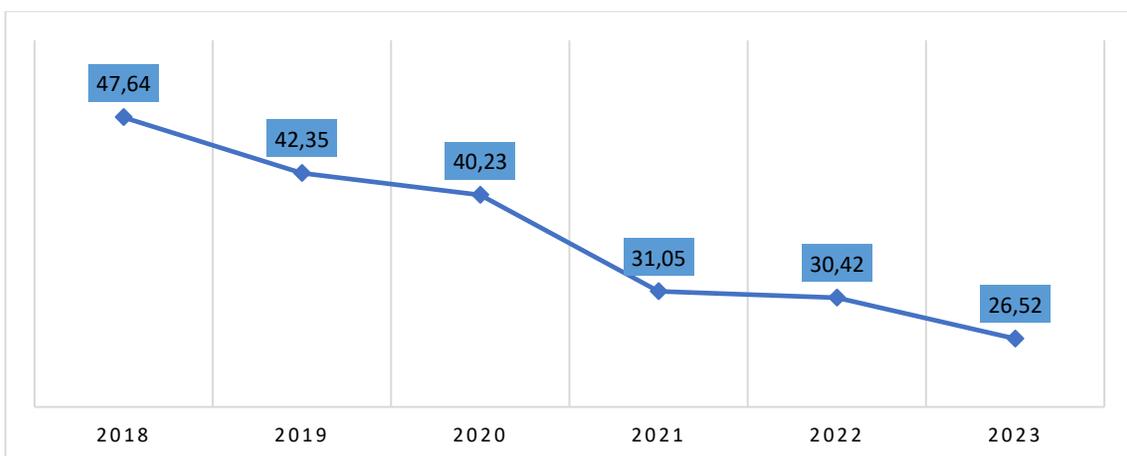
Tantangan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pasuruan ke depannya terkait dengan rencana pembangunan jalan lingkar utara. Pembangunan jalan 20 puluh tahun ke depan perlu menyikapi rencana pemerintah kota terkait pembangunan tersebut. Kondisi yang sedikit berbeda terjadi pada pembangunan irigasi, grafik di bawah ini menggambarkan kondisi irigasi primer, irigasi sekunder, dan irigasi tersier.



Gambar II. 34 Kondisi Irigasi di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2024

Secara umum, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kota Pasuruan masih cukup baik namun untuk irigasi sekunder dan tersier justru panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017. Sejak tahun 2020, kondisi jaringan irigasi cenderung stabil. Telah dilakukannya identifikasi saluran irigasi secara berkesinambungan berperan cukup penting dalam pengelolaan saluran irigasi di Kota Pasuruan walaupun kondisi lahan pertanian yang luasnya cenderung berkurang akibat alih fungsi lahan.

Luasan lahan yang terbatas untuk pembangunan di wilayah kota menjadi tantangan utama pembangunan infrastruktur ke depannya, termasuk dalam pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan konsep *Green Building* dalam bangunan publik menjadi konsep utama pembangunan gedung di Kota Pasuruan. Tantangan lainnya yang perlu diperhatikan dalam urusan ini adalah masalah banjir yang setiap tahun terjadi di beberapa wilayah Kota Pasuruan. Banjir tersebut merupakan dampak dari berbagai permasalahan lintas wilayah seperti berkurangnya resapan air di daerah hulu sungai, permasalahan sampah, dan pendangkalan sungai. Kota Pasuruan berada di daerah hilir sehingga terdampak langsung. Pada tahun 2023, luasan wilayah di Kota Pasuruan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 20 menit) adalah 26,52 ha, menurun cukup signifikan dari tahun 2022. Berikut ini luas kawasan permukiman yang tergenang di Kota Pasuruan.



Gambar II. 35 Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2024

Perlu upaya bersama untuk penanggulangan banjir di Kota Pasuruan karena tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Pasuruan saja. Integrasi semua stakeholder perlu diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan banjir agar risiko terus berkurang ke depannya. Selain capaian indikator di atas, kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 20 Capaian SPM PUPR Kota Pasuruan Tahun 2021-2023

Indikator Pencapaian SPM	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87,49%	88,24%	90,32%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,74%	89,43%	85,99%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2024

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pasuruan tahun 2021-2023 secara umum memiliki capaian yang meningkat. Peningkatan pada indikator SPM jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang mencapai 90,32% di tahun 2023 mengindikasikan bahwa sebagian besar warga Kota Pasuruan sekarang memiliki akses yang lebih baik untuk air minum bersih. Sedangkan untuk indikator SPM jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik yang fluktuatif mengindikasikan bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Pasuruan sudah baik namun masih perlu peningkatan layanan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kewenangannya meliputi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan. Ukuran keberhasilan perumahan dan kawasan permukiman dapat diidentifikasi dari rumah yang layak huni, akses air minum, sistem air limbah dan kawasan bebas kumuh perkotaan.



Gambar II. 36 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan dari gambar di atas bahwa rata rata dari tahun 2017 mengalami kenaikan, tetapi ada yang menunjukkan perlambatan pada kawasan bebas kumuh. Kawasan bebas kumuh perkotaan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2023 yang cenderung turun. Hasil dari wawancara dengan PD terkait yaitu disebabkan karena Perilaku masyarakat itu sendiri dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Pemerintah Kota Pasuruan perlu mendorong untuk bagaimana kawasan bebas kumuh meningkat. Capaian dari Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang masih rendah yaitu rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman dan rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Angka kedua indikator tersebut masih di bawah 90%, tetapi menunjukkan peningkatan setiap tahun. Masih ada beberapa permasalahan yaitu Rendahnya minat masyarakat untuk berlangganan PDAM dikarenakan pelayanan PDAM yang kurang memuaskan dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang sanitasi yang baik dan benar.

Selain capaian indikator di atas, kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga direpresentasikan oleh capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 21 Capaian SPM PUPR Kota Pasuruan Tahun 2021-2023

Indikator Pencapaian SPM	Satuan	2020	2021	2022	2023
Prosentase tercapainya pengembangan perumahan	Unit	212	172	262	-
Jumlah Dok. data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah rumah yang dilayani	-	25	43	20
Jumlah Dok. Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	0
Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dilayani	-	-	-	-
Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena		-	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2024

Pada indikator yang pertama yakni Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah rumah yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan meningkat menjadi 262 unit rumah dibandingkan dengan sebelumnya yakni hanya 172 unit rumah. Sedangkan untuk indikator Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Dari data di atas diketahui bahwa jumlah rumah yang dilayani akibat relokasi bencana bersifat flutuatif dengan capain terbesar di tahun 2022 yakni sebesar 43 unit rumah. Namun seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2023 hanya terdapat 20 rumah yang mendapat rehabilitasi dikarenakan bencana yang terjadi tidak seintens pada tahun 2022 sehingga jumlah rumah yang terlayani menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada indikator jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi hanya terdapat satu dokumen yakni hanya berada di tahun 2022 saja.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah di Kota Pasuruan yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa indikator makro yang merepresentasikan kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pasuruan, sebagaimana berikut:



Gambar II. 37 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk di Kota Pasuruan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2024

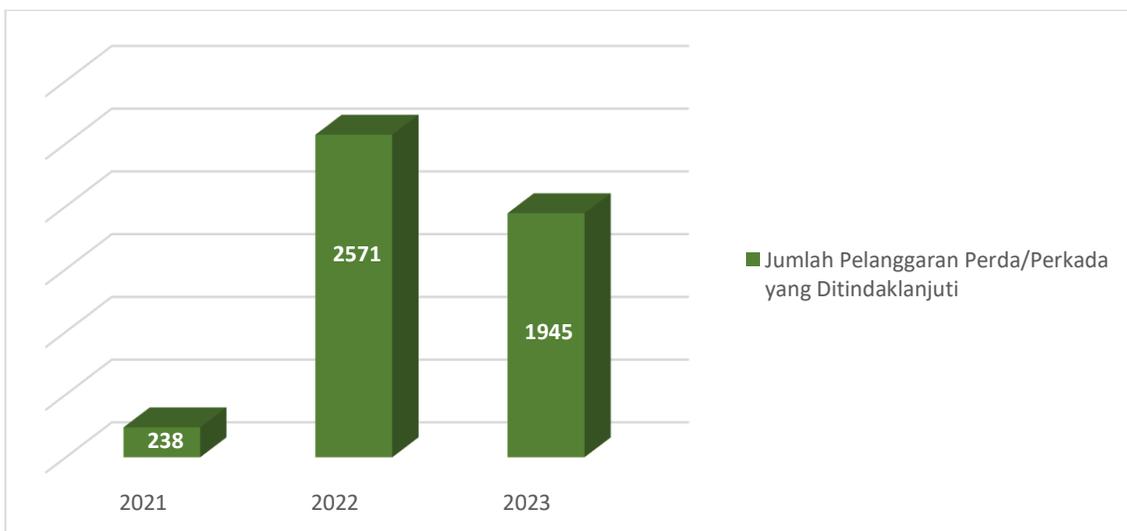
Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satuan Linmas menurut Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai salah satu bagian yang berperan dalam menjaga trantib di masyarakat Kota Pasuruan, jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk menunjukkan tren yang fluktuatif. Capaian tertinggi berada di tahun 2016 sebesar 85.17 kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 50.16 dan terus mengalami tren peningkatan hingga tahun berjalan sebesar 81.73. Tantangan yang dihadapi adalah tidak adanya regenerasi anggota satlinmas di masyarakat. Rata-rata usia anggota satlinmas sudah tua dan berdaya saing rendah.



Gambar II. 38 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Pasuruan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2024

Indikator selanjutnya adalah rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan. Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Pos ronda merupakan salah satu entitas yang menjadi pendukung pelaksanaan siskamling di desa. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan di Kota Pasuruan mengalami tren kenaikan dari 19.2 di tahun 2016 menjadi 24.66 di tahun 2023. Artinya, semakin banyak masyarakat kelurahan yang sadar untuk saling bekerja sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan secara swakarsa.



Gambar II. 39 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Ditindaklanjuti di Kota Pasuruan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2024

Indikator makro terakhir yang merepresentasikan kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pasuruan adalah jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditindaklanjuti. Keterbatasan data menyajikan tren tahun 2021-2023

menunjukkan trend fluktuatif, pada tahun 2021 pelanggaran tertangani sebesar 1002 dan pada tahun 2022 naik menjadi 2571 pelanggaran tertangani, capaian ini menurun pada tahun 2023 menjadi 1945. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa tolok ukur keberhasilan pemerintah hanya sebatas sedikitnya pelanggaran perda, namun lebih terhadap bagaimana masing-masing pelanggaran dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Data menunjukkan meskipun jumlah kasus pelanggaran mengalami peningkatan, namun tingkat penyelesaian kasus pelanggaran mencapai 100%. Artinya dari 1945 kasus pelanggaran Perda, seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik.

Selain capaian indikator di atas, kinerja urusan trantibumlinmas juga direpresentasikan oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 22 Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kota Pasuruan

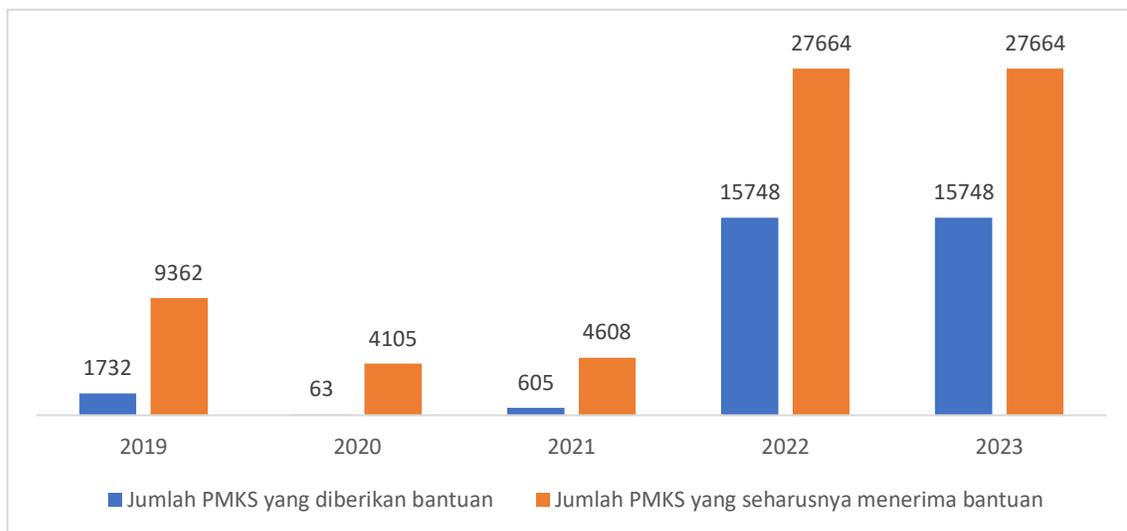
No	Uraian	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kententraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	100%	92,74%	93,33%
2	Persentase warga kota yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100%	100%	100%
3	Persentase warga kota yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
4	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	90%	100%
5	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta indikator Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian SPM pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, kecuali pada sub urusan trantibum dengan jenis layanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang belum mencapai arget pada tahun 2022-2023. Hal ini diakibatkan oleh jumlah personel Satpol PP yang masih dinilai kurang dalam melakukan Pelayanan akibat kurang didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga tidak mampu untuk melayani sesuai dengan keinginan masyarakat.

F. Sosial

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial di Kota Pasuruan. Urusan sosial merupakan urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan daerah. Berikut merupakan gambaran capaian kinerja urusan sosial Kota Pasuruan:



Gambar II. 40 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2024

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pasuruan, menunjukkan tren yang fluktuatif.

Sepanjang tahun 2019 hingga 2023 pertumbuhan PMKS yang diberikan bantuan dan yang PMKS yang seharusnya menerima bantuan mengalami fluktuasi, Pada tahun 2019 PMKS yang diberikan bantuan sebanyak 1732 dan PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 9362. Ditahun berikutnya yakni 2020, PMKS yang diberikan bantuan mengalami penurunan menjadi 63 begitupun dengan PMKS yang seharusnya menerima bantuan menurun menjadi 4105 Pada tahun 2021 PMKS yang diberikan bantuan dan PMKS yang seharusnya menerima bantuan meningkat menjadi 605 dan 4608. Kemudian di tahun 2022, jumlah PMKS yang diberikan bantuan dan PMKS yang seharusnya menerima bantuan kembali meningkat menjadi 15.748 dan 27.664. Pada tahun 2023 jumlah PMKS yang diberikan bantuan menurun menjadi 3.983 dan PMKS yang seharusnya menerima bantuan juga menurun menjadi 4.269.

Tantangan kesejahteraan masyarakat di masa depan sangat bervariasi dan kompleks, terutama dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang terus berlangsung. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah terkait ketidak validan data masyarakat yang membutuhkan sehingga berdampak pada bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pasuruan kerap merasa termarginalkan. Penyandang disabilitas seringkali merasa termarginalkan dalam masyarakat. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stereotip, diskriminasi, kurangnya aksesibilitas, dan kurangnya kesadaran tentang kebutuhan dan hak mereka.

Kota Pasuruan juga belum memiliki panti untuk tunawisma atau yang juga dikenal sebagai panti jompo, adalah fasilitas yang dirancang khusus untuk memberikan perawatan, perlindungan, dan bantuan

kepada orang lanjut usia yang tidak memiliki tempat tinggal atau yang tidak lagi dapat merawat diri sendiri dengan mandiri. Tujuan utama dari panti ini adalah untuk memberikan tempat tinggal yang aman, perawatan medis, dukungan sosial, dan kenyamanan bagi para penghuninya yang mungkin telah kehilangan tempat tinggal atau tidak lagi mampu merawat diri sendiri karena usia tua atau masalah kesehatan, sehingga sangat berperan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Selain panti untuk tunawisma, Kota Pasuruan juga belum memiliki fasilitas kesejahteraan sosial yang terakreditasi, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan atau hambatan dalam menjalankan fungsinya ke depannya.

Selain capaian indikator di atas, kinerja urusan sosial juga direpresentasikan oleh capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 23 Capaian SPM Urusan Sosial Kota Pasuruan

No	Uraian	2023
1	Jumlah Warga Kota penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
3	Jumlah Warga Kota lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabllitasi sosial diluar panti	100%
4	Jumlah Warga Kota yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar pantl	100%
5	Jumlah korban bencana skala Kota yang menerima perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2024

Dari sisi pencapaian SPM pada urusan Sosial, Kota pasuruan telah memberikan capaian yang cukup baik dan mencapai target 100%. Indikator kinerja urusan sosial Kota Pasuruan lainnya adalah terkait PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai. Hambatan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan yang tidak mendukung, seperti bencana.

2.4.2. Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kota Pasuruan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2022 tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan bertugas melakukan perencanaan ketenagakerjaan termasuk menyediakan informasi dan penyaluran lowongan pekerjaan, memberikan pelatihan bagi para pencari kerja, melindungi hak-hak pekerja serta pengawasan dan kepatuhan perusahaan. Berikut merupakan data perkembangan indikator kinerja urusan ketenagakerjaan Kota Pasuruan:



Gambar II. 41 Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2024

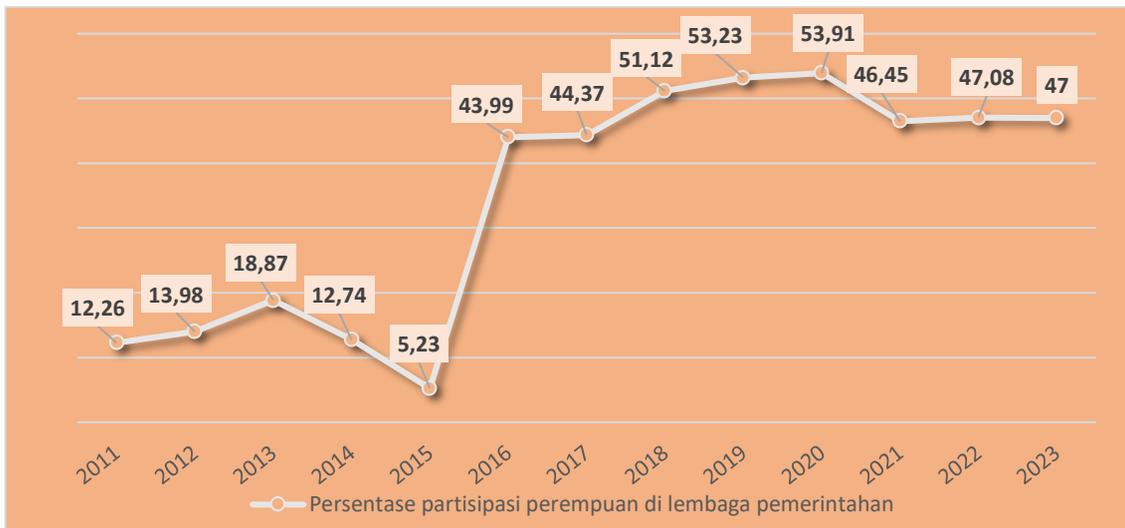
Angka sengketa dapat mencerminkan tingkat ketegangan atau konflik dalam lingkungan kerja dan dapat memberikan wawasan tentang kualitas hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kota Pasuruan selama tahun 2010-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. Namun sejak tahun 2017 hingga 2023 angka sengketa pengusaha-pekerja secara signifikan mengalami penurunan artinya hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam lingkungan kerja secara keseluruhan semakin baik. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan mekanisme yang lebih baik untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa secara efektif. Di tahun 2022 angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kota Pasuruan hanya ada 3 kasus yang mana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021, capaian ini mengalami penurunan drastis. Namun di tahun 2023 terjadi peningkatan angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun yang cukup drastis yaitu sebanyak 15 kejadian.

Adapun faktor pendukung dan penghambat pada urusan ketenagakerjaan secara umum yaitu adanya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan keterampilan. Sedangkan faktor penghambat urusan ketenagakerjaan antara lain, tingginya pengangguran terdidik (lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi), kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan membutuhkan keahlian tertentu, serta minat berwirausaha yang masih rendah karena terbatasnya modal.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam

pembangunan. Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Perlindungan Perempuan dan Anak mengampu urusan yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan capaian sebagai berikut:



Gambar II. 42 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kota Pasuruan

Sumber: DP3AKB Kota Pasuruan, 2024

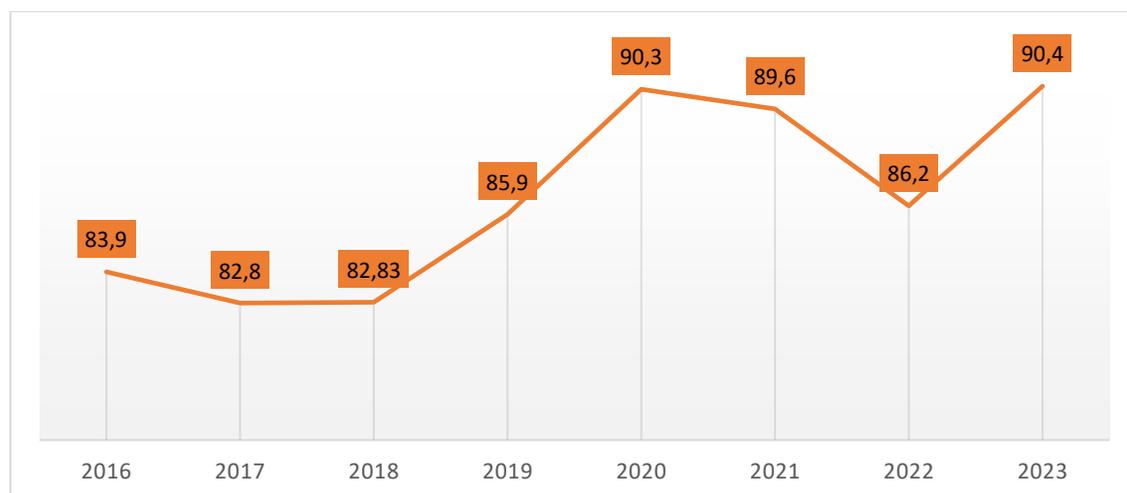
Berdasarkan pada data yang tertera di grafik di atas maka dapat kita ketahui bersama bahwa capaian persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan beranjak mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2015 dengan capaian terendah sampai di tahun 2023 dengan kenaikan yang signifikan. Sudah waktunya kapasitas perempuan sebagai subjek politik diperluas lagi, bukan semata-mata sebagai objek politik. Sesungguhnya jumlah perempuan sangat potensial, ada beberapa bentuk partisipasi perempuan yang bisa dijalankan dengan optimal sebagai bentuk partisipasi perempuan pada negara secara umum.

C. Pangan

Pemerintah Daerah Kota Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Fokus utama akan diberikan pada pemanfaatan teknologi, penguatan kerjasama multi-stakeholder, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam menghadapi tantangan urbanisasi yang pesat di Kota Pasuruan, salah satu fokus utama dalam pelayanan urusan pilihan adalah mempertahankan lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). LP2B berfungsi sebagai area yang dilindungi dan dipertahankan untuk produksi pangan masa depan. Hal ini sangat penting mengingat pertumbuhan populasi perkotaan dan urbanisasi yang cepat sering kali menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan dan industri. Mempertahankan LP2B bukan hanya penting untuk menjamin ketersediaan produksi pangan di masa depan,

tetapi juga untuk mempertahankan fungsi ekologis lahan tersebut sebagai wilayah resapan air. Wilayah resapan air ini berperan krusial dalam menjaga keseimbangan air tanah dan mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan, yang semakin terancam oleh berkurangnya area hijau akibat urbanisasi.

Pemerintah Kota Pasuruan melihat pentingnya pengembangan agroindustri di wilayah perkotaan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Pembangunan pasar agroindustri khusus di pusat kota akan disediakan sebagai ruang bagi petani dan pengusaha lokal untuk memasarkan produknya. Selain itu, pemerintah akan memperkuat infrastruktur pendukung seperti peningkatan akses jalan, penyediaan fasilitas penyimpanan dingin, serta pembangunan pusat distribusi yang berfungsi untuk mendukung logistik agroindustri secara keseluruhan. Jika melihat kondisi beberapa tahun ke depan, Urusan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan gambaran capaian urusan pangan Kota Pasuruan melalui indikator skor pola pangan harapan (PPH):

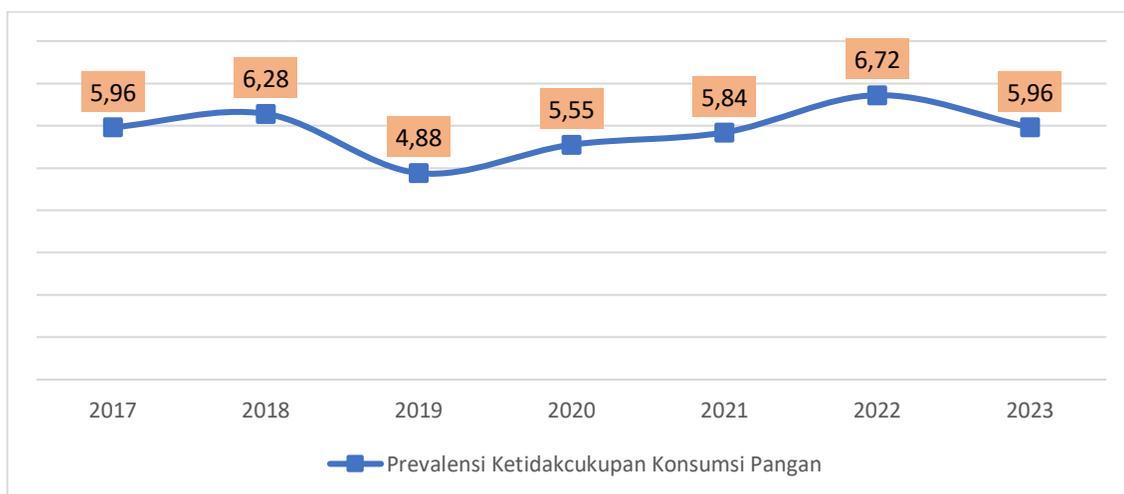


Gambar II. 43 Skor Pola Pangan Harapan Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2024

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 Skor PPH di Kota Pasuruan menunjukkan tren yang meningkat, namun pada tahun 2023, skor PPH kembali naik menjadi 90,4. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Pasuruan dalam menangani urusan pangan diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat tinggi serat seperti sayuran dan buah buahan karena lebih senang membeli makanan cepat saji melalui aplikasi online. Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga dan keterbatasan pengetahuan dari pangan dan gizi menyebabkan pada kualitas dan kuantitas produksi pangan masyarakat sebagian masih rendah, dilihat dari pola konsumsi yg belum beragam, bergizi, seimbang

dan aman. Selain itu hambatan yang masih terjadi adalah produksi pangan terutama produk pertanian belum memenuhi kebutuhan pangan daerah sehingga ketersediaan pangan tergantung dari pangan yang masuk dari luar Kota Pasuruan. Selain itu urusan pangan juga memperhatikan terkait prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang ada di Kota Pasurua berdasarakan grafik dibawah ini:



Gambar II. 44 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan analisis grafik prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Pasuruan dari tahun 2017 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan di kota ini masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat beberapa periode di mana prevalensi ketidakcukupan pangan menurun, tren keseluruhan menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan ketidakstabilan dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang layak bagi seluruh penduduk. Terutama pada tahun 2022, peningkatan prevalensi yang tajam menunjukkan adanya kerentanan yang harus segera di atasi.

Dalam 20 tahun ke depan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Pasuruan. Pertama, penting untuk memperkuat produksi pangan lokal dengan mendukung petani melalui pelatihan, subsidi, dan akses terhadap teknologi pertanian yang lebih maju, serta menjaga lahan pertanian dari konversi menjadi lahan non-pertanian. Kedua, pengembangan infrastruktur pangan, seperti jaringan distribusi yang efisien, fasilitas penyimpanan dingin, dan pasar agroindustri di perkotaan, perlu ditingkatkan untuk memastikan distribusi pangan yang lebih merata dan tepat sasaran. Ketiga, akses masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, terhadap sumber pangan bergizi harus diperkuat melalui program bantuan pangan dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang sehat.

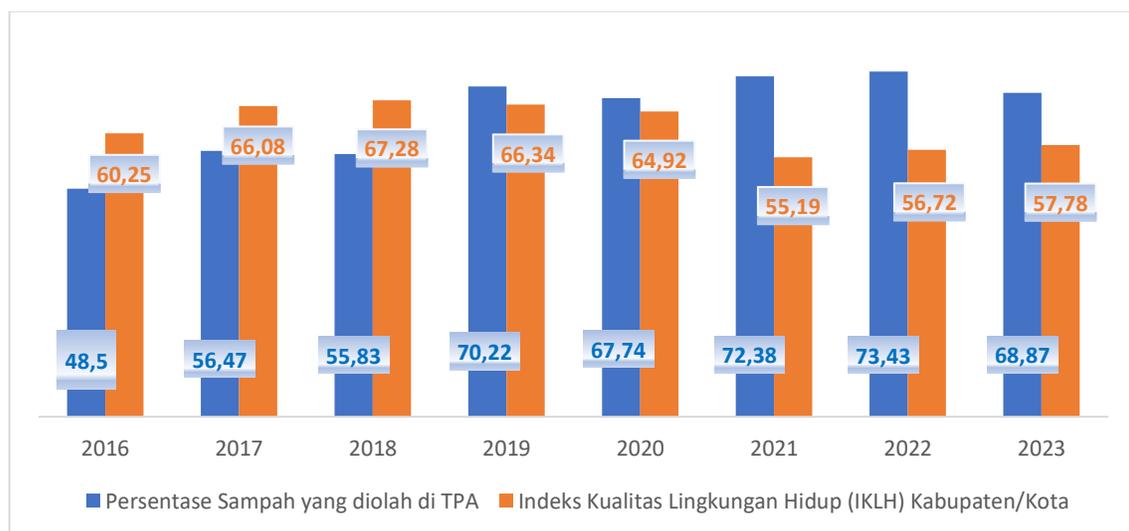
Selain itu, strategi ketahanan pangan yang tangguh dalam menghadapi situasi krisis, seperti bencana alam dan perubahan iklim, perlu disusun, termasuk pengelolaan cadangan pangan yang memadai dan pengembangan sistem peringatan dini. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil juga harus diperkuat untuk menciptakan solusi inovatif yang berkelanjutan. Dengan fokus pada langkah-langkah ini, diharapkan Kota Pasuruan dapat mencapai ketahanan pangan yang stabil, berkelanjutan,

dan inklusif dalam 20 tahun ke depan, sehingga seluruh warga kota dapat menikmati kehidupan yang sehat dan sejahtera.

D. Lingkungan Hidup

Pembangunan dalam konteks urusan lingkungan hidup adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi kita. Ini mencakup berbagai upaya, mulai dari perlindungan habitat alami hingga pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama, di mana pemerintah dan organisasi di seluruh dunia berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan kebijakan yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan urusan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Pasuruan. Hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dapat dilihat pada grafik berikut:



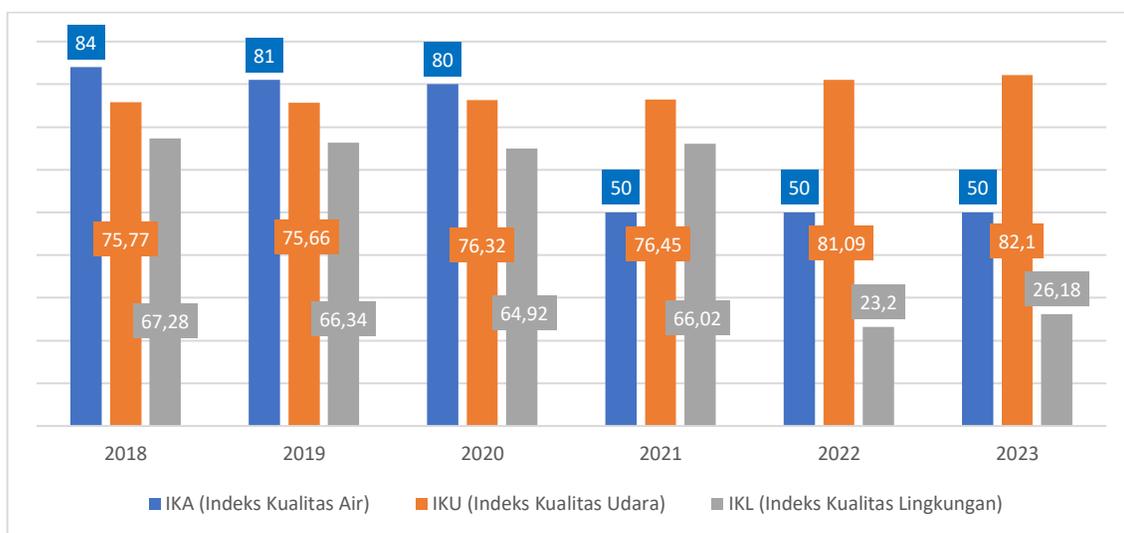
Gambar II. 45 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, 2024

Persentase sampah yang diolah di TPA sejak tahun 2016 menunjukkan tren yang meningkat, dari 48,50% menjadi 68,87% sampah yang diolah. Hal tersebut menunjukkan penanganan sampah yang masuk ke TPA semakin meningkat. Ada situasi yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah, yaitu luasan TPA sampai dengan tahun 2023 yang sudah mendekati batas umur pemakaian sehingga diperlukan solusi dengan perluasan lahan dan pemakaian teknologi pengolahan sampah di TPA. Ke depannya, perlu adanya peningkatan pengelolaan sampah dengan meningkatkan peran serta masyarakat / 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Pasuruan.

Adapun untuk indikator IKLH Kota pasuruan, menunjukkan tren yang menurun sejak tahun 2016. Selain karena adanya perubahan metode perhitungan pada tahun 2021, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahun sehingga semakin

banyak pula pembangunan di lahan hijau, serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan Guna menyikapi pembangunan lingkungan hidup ke depannya sehingga dalam tiga tahun terakhir nilai IKLH Kota Pasuruan meningkat perlahan. Untuk pembangunan ke depannya, pemerintah Kota Pasuruan perlu meningkatkan pemantauan terhadap kualitas air dan kualitas udara. Selain itu, pemerintah kota juga perlu melakukan deliniasi ulang terhadap lahan hijau milik Kota pasuruan sebagai upaya meningkatkan nilai kualitas lahan. Dalam menentukan perhitungan IKLH, terdapat komponen yang menyusun didalamnya yakni ada perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini:



Gambar II. 46 Komposit IKLH Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, 2024

Grafik yang menampilkan Indeks Kualitas Lingkungan di Kota Pasuruan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tiga indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL). Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2018, IKA mencapai nilai tertinggi sebesar 84, namun mengalami penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah 50 pada tahun 2021 dan tetap stabil pada nilai yang sama hingga 2023. Indeks Kualitas Udara (IKU) memperlihatkan tren yang relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2021, dengan sedikit peningkatan dari 75,77 menjadi 76,45. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi lonjakan signifikan pada IKU, mencapai 81,09 pada 2022 dan 82,1 pada 2023. Peningkatan ini bisa jadi merupakan hasil dari perbaikan dalam pengendalian polusi udara atau program kebersihan udara yang lebih efektif. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) mengalami penurunan tajam dari 67,28 pada tahun 2018 hingga mencapai titik terendah 23,2 pada 2022, sebelum sedikit meningkat menjadi 26,18 pada 2023. Penurunan tajam ini dapat mencerminkan degradasi lingkungan secara umum, termasuk berkurangnya area hijau, peningkatan pencemaran, atau kurangnya upaya konservasi.

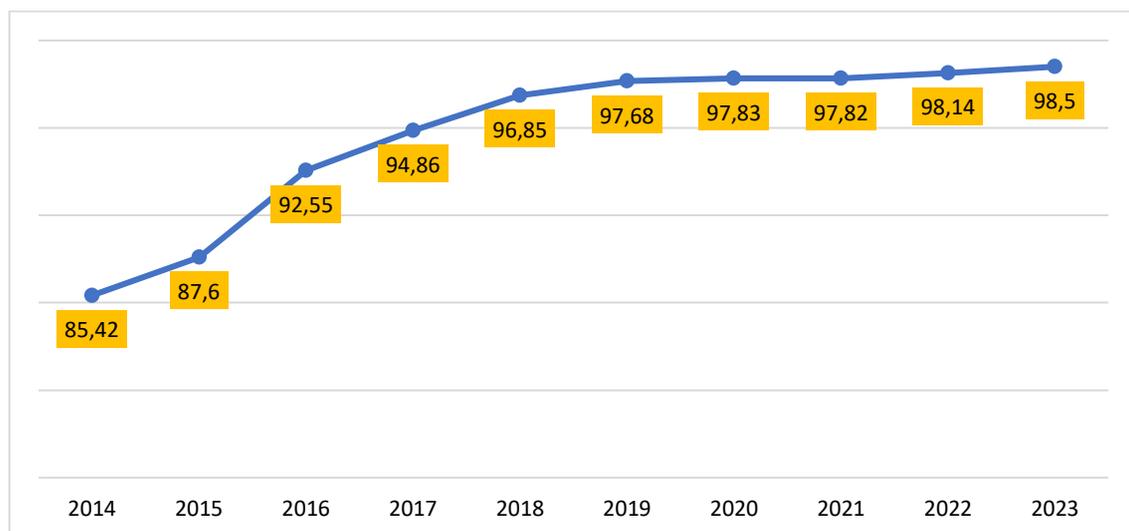
Dari analisis tersebut, kualitas lingkungan di Kota Pasuruan telah mengalami tantangan besar selama beberapa tahun terakhir, terutama

dengan penurunan signifikan pada kualitas air dan lingkungan secara keseluruhan. Meskipun kualitas udara menunjukkan perbaikan, aspek lain dari lingkungan memerlukan perhatian yang lebih serius. Dalam 20 tahun ke depan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Pasuruan. Pertama, pengelolaan sumber daya air harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kembali kualitas air, termasuk melalui pengendalian pencemaran dan peningkatan infrastruktur pengolahan air limbah.

Dapat melakukan program pemulihan lingkungan yang komprehensif, mencakup penanaman pohon, rehabilitasi lahan kritis, dan konservasi area hijau, guna meningkatkan kembali Indeks Kualitas Lingkungan yang telah menurun tajam. Penguatan regulasi lingkungan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran, terutama yang terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga sangat penting. Edukasi lingkungan kepada masyarakat harus ditingkatkan agar mereka lebih peduli dan berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, misalnya melalui program daur ulang dan pengelolaan sampah.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap masyarakat Indonesia wajib memiliki KTP karena sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. KTP mempunyai fungsi sebagai identitas diri seseorang atau tanda pengenal yang diakui secara Nasional. KTP merupakan persyaratan utama dalam banyak hal sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 tentang manfaat dan fungsi KTP yaitu sebagai perencanaan pembangunan, akses pelayanan publik, data dan statistik kependudukan, keamanan Negara, demokrasi (pemilu dan pilkada), dan dapat mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan, tindak terorisme dan pekerja ilegal, dan sebagai dasar penerbitan dokumen lain seperti Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya.



Gambar II. 47 Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pasuruan

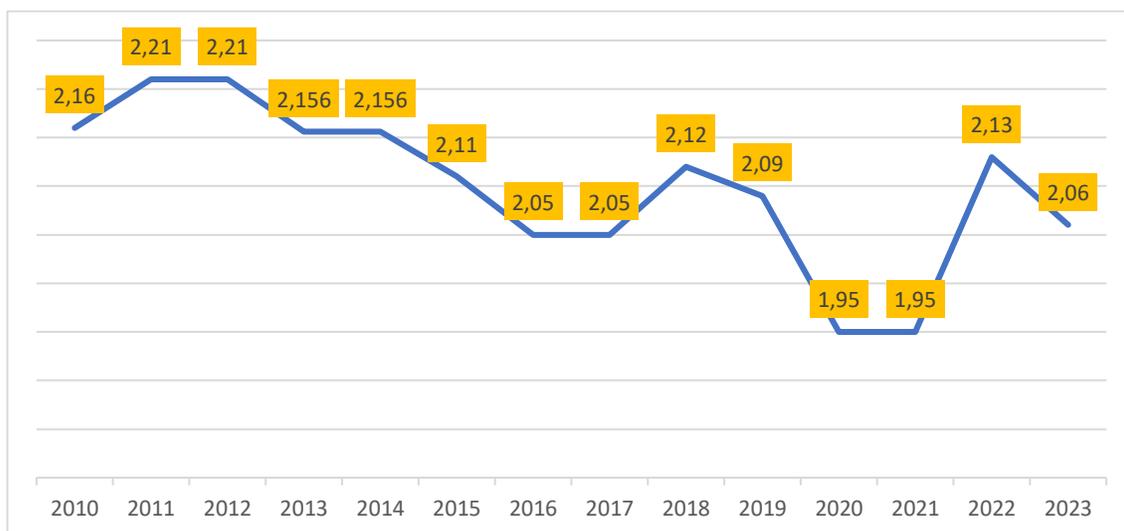
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2024

Perkembangan rasio penduduk ber-KTP juga menunjukkan angka yang semakin baik, mendekati angka 100% penduduk yang wajib

memiliki KTP. Pertumbuhan ini juga linear dengan perekaman E-KTP yang juga mengalami peningkatan setiap tahun. Tidak hanya terkait pelayanan KTP termasuk pada pengurusan KK, tetapi masih menjadi kendala yaitu pelayanan KIA. Permasalahan utama dari administrasi kependudukan dan sipil yaitu kekurangan kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan.

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Pasuruan. Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana direpresentasikan melalui terlaksananya pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera. Adapun capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar II. 48 Total Fertility Rate (TFR) Kota Pasuruan

Sumber: DP3AKB Kota Pasuruan, 2024

TFR di Kota Pasuruan tercatat sejak 2010 sampai dengan tahun 2023 memiliki capaian yang fluktuatif, dengan rata-rata capaiannya adalah 2,1. Begitu pula pada tahun 2023 TFR di Kota Pasuruan berada di angka 2,06. Hal ini berarti bahwa setiap perempuan di Kota Pasuruan rata-rata melahirkan 2 orang anak selama masa reproduksinya. Angka ini termasuk capaian ideal atau disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. TFR yang berada di bawah angka 2, maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, namun jika TFR lebih dari 2,1 maka akan terjadi pertumbuhan penduduk yang seimbang.



Gambar II. 49 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi di Kota Pasuruan

Sumber: DP3AKB Kota Pasuruan, 2024

Sedangkan apabila dilihat dari indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan tren yang fluktuatif namun sejak tahun 2018 cenderung menurun. Hanya pada tahun 2022 sebesar 16,5%, artinya meningkat 4,3% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, pada tahun 2023 tren ini mengalami penurunan menjadi 8,03%. Adapun yang mempengaruhi turunnya tingkat *unmet need* ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman individu yang meningkat terkait dengan metode kontrasepsi. Dengan tereduksinya Masyarakat tentang pengetahuan atau akses informasi yang tepat dapat menghambat individu dalam membuat keputusan yang tepat terkait dengan keluarga berencana.

Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dari perencanaan keluarga. Pendidikan yang berkualitas tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi sangat penting. Stigma terkait dengan keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi masih bisa menjadi hambatan, terutama di masyarakat yang konservatif atau tradisional. Ini dapat menghambat akses ke informasi dan layanan yang dibutuhkan. Isu-isu keagamaan dan budaya dapat mempengaruhi persepsi dan praktik keluarga berencana. Upaya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai budaya dan agama setempat adalah penting. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal. Ini mencakup penyediaan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, kampanye pendidikan yang efektif, serta perencanaan kebijakan yang bijak dan sensitif terhadap budaya dan nilai-nilai lokal.

G. Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi di Kota Pasuruan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Dinas

Perhubungan Kota Pasuruan juga bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keamanan transportasi di wilayah kota. Adapun indikator kinerja urusan perhubungan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar II. 50 Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2024

Persentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum di Kota Pasuruan selama tahun 2012-2023 secara signifikan mengalami peningkatan capaian. Pengukuran ini didasari oleh dua indikator yakni jumlah ruas jalan yang terlayani angkutan umum dibagi dengan jumlah ruas jalan yang ada di Kota Pasuruan. Peningkatan capaian terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 67,57% dari tahun sebelumnya yang hanya 45,05%. Peningkatan persentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum di Kota Pasuruan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan mobilitas berkelanjutan, mengurangi kemacetan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi capaian persentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum di Kota Pasuruan. Adapun faktor pendorongnya yaitu adanya infrastruktur jalan yang memadai dan terkoneksi dengan baik serta adanya dukungan anggaran yang memadai dari pemkot untuk pemeliharaan jalan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya rute yang efisien dan terintegrasi dapat mengurangi daya tarik layanan angkutan umum bagi masyarakat serta menghambat mobilitas.

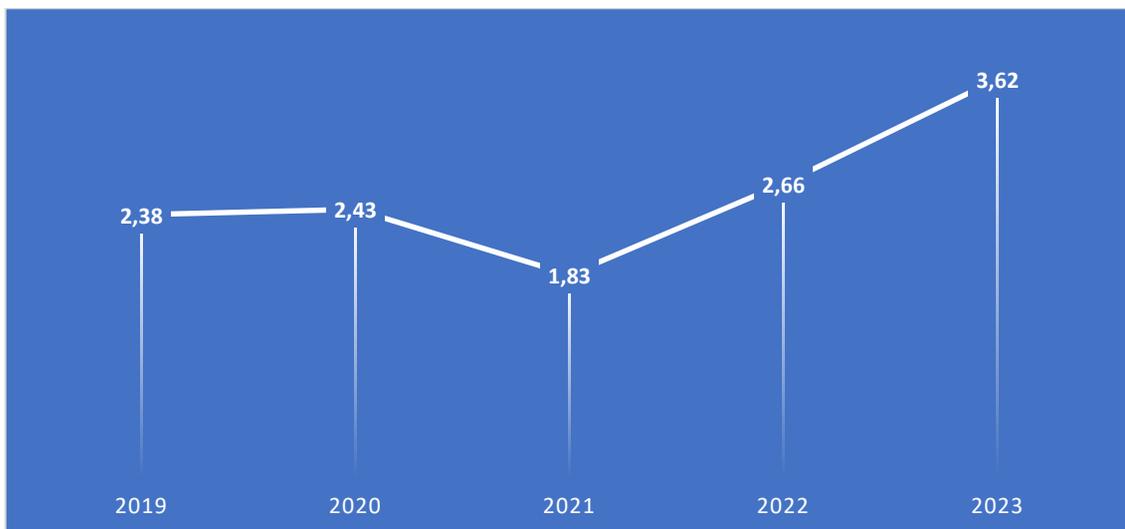
Rencana tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai upaya untuk meningkatkan persentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum adalah dengan melakukan analisis terhadap rute-rute yang ada untuk memastikan efisiensi dan efektivitas layanan. Jika diperlukan, penyempurnaan rute dapat dilakukan berdasarkan data permintaan dan mobilitas masyarakat. Secara umum, isu yang masih terus berkembang di urusan perhubungan Kota Pasuruan yaitu kurangnya pengembangan sistem informasi transportasi, serta belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

H. Komunikasi dan Informatika

Secara umum, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan. Pesan yang disampaikan atau diterima bisa berupa informasi, pemikiran, gagasan, atau pemberitahuan. Dapat dikatakan, komunikasi merupakan suatu proses upaya membangun pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, agar terjadi kesamaan pemahaman mengenai suatu hal. Sedangkan Informasi merupakan kumpulan data atau fakta yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerima informasi. Kegunaan informasi ini misalnya memberikan keterangan atau pengetahuan, atau bisa juga sebagai bahan dalam membuat suatu keputusan.

1. Indeks SPBE

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.



Gambar II. 51 Indeks SPBE Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2024

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan data di grafik di atas maka capaian Indeks SPBE di Kota Pasuruan menunjukkan rata-rata capaian yang meningkat, hanya di tahun 2021 yang mengalami penurunan. Dengan melihat capaian di atas maka capaian yang baik tersebut harus terus ditingkatkan mengingat SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan

akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2. Jumlah jaringan komunikasi (titik)

Jaringan atau *network* didefinisikan sebagai “*social structures created by communication among individuals and groups*” (struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok). Jaringan telekomunikasi atau jejaring telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan kegiatan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999.



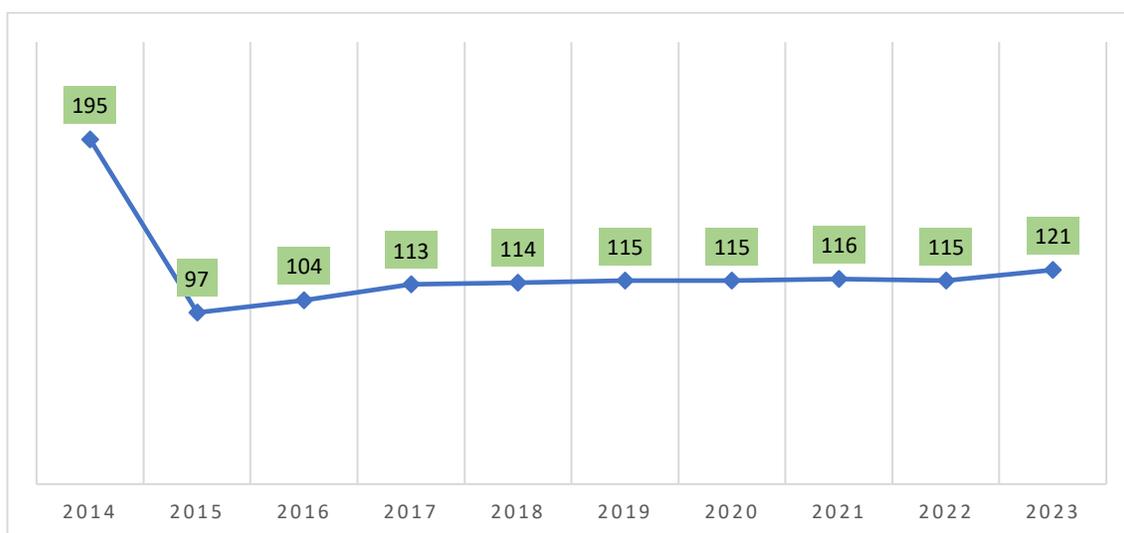
Gambar II. 52 Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2024

Jaringan telekomunikasi terdiri atas dari tiga bagian utama. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah: Perangkat transmisi, Perangkat penyambung, dan Terminal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2017 Kota Pasuruan hanya memiliki 26 jaringan telekomunikasi. Namun seiring berjalannya waktu dan dengan diiringi kemajuan teknologi maka capaian terus mengalami peningkatan hingga puncaknya di tahun 2023 yaitu mencapai 342 jaringan telekomunikasi. Mengingat pentingnya jaringan telekomunikasi dalam mendukung aktivitas pelayanan kepada Masyarakat dan juga demi mendukung terlaksanakannya aktivitas Masyarakat, maka bukan hanya jumlah yang ditambah namun juga diperlukan perawatan agar kualitas jaringan terjaga dengan baik. Sehingga juga dibutuhkan SDM yang ahli di bidang IT agar dapat menjaga dan me-maintenance jaringan telekomunikasi dengan baik.

I. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kota Pasuruan sebenarnya memiliki cukup banyak koperasi. Hingga saat ini, tercatat ada 333 unit koperasi. Di antaranya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), koperasi wanita, koperasi pegawai, dan lainnya. Namun tidak dipungkiri merosotnya perekonomian imbas pandemi, sangat berdampak pada perkembangan koperasi. Itulah kenapa banyak koperasi yang akhirnya nonaktif. Dari 333 koperasi yang ada, lebih dari separuhnya berstatus nonaktif.



Gambar II. 53 Jumlah Koperasi Aktif di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2024

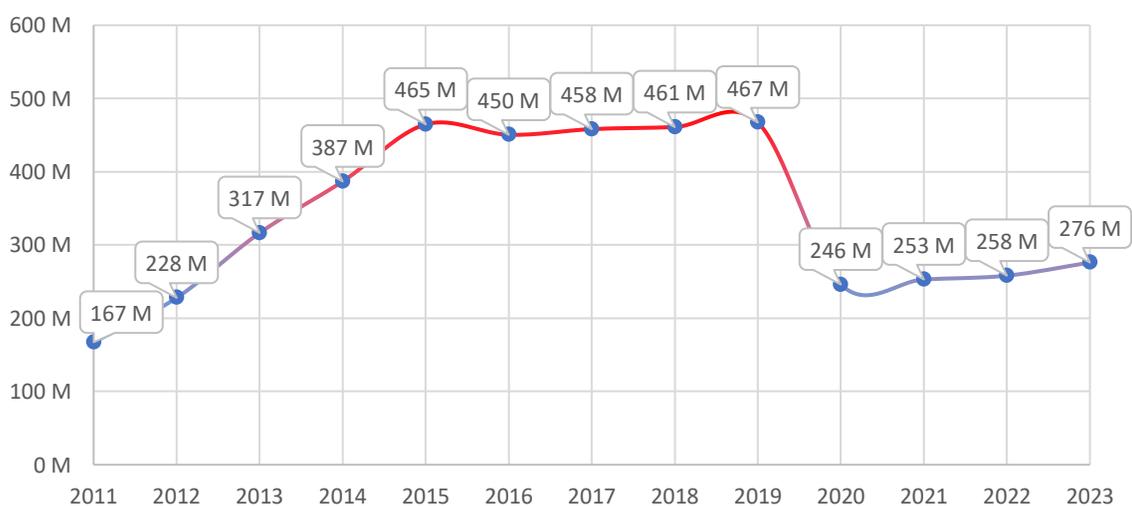
Koperasi aktif di tahun 2023 mencapai 121 dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, kurangnya pemahaman pentingnya RAT. Kedua yaitu, Revitalisasi koperasi tidak aktif terkendala keberadaan koperasi, keberadaan pengurus/pengawas dan keberadaan modal koperasi. Ketiga, kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai koperasi, manajemen yang lemah, konflik antar anggota, keterbatasan modal. Dan terakhir Manajemen koperasi yang belum profesional dan belum semua koperasi yang berkinerja baik. Namun disisi lain perkembangan usaha mikro meningkat tajam pada 2021 ke tahun 2022. Naik dari 6045 unit di tahun 2021 menjadi 9822 unit di tahun 2022. Data yang tersedia hanya tahun 2021 dan tahun 2022, dikarenakan pendataan aktif pada tahun 2021 dan 2022.

Disamping itu sudah tertuang pada undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang mengatur tentang koperasi aktif. Kewajiban koperasi sesuai UU No.25 adalah Koperasi wajib menjalankan usaha yang sesuai dengan kepentingan anggotanya. Aktivitas usaha ini harus sesuai dengan jenis koperasi dan dijalankan secara aktif untuk mencapai tujuan koperasi. Selain itu, koperasi juga wajib melaksanakan Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan forum tertinggi dalam struktur koperasi yang harus dilaksanakan setiap tahun. RAT berfungsi sebagai tempat untuk pengambilan keputusan penting, termasuk pengesahan laporan keuangan, rencana kerja, dan pemilihan pengurus. Dan yang tidak kalah penting yakni terkait pengurusan NIK sebagai identitas resmi koperasi saat ini menjadi bagian dari regulasi turunan dan prosedur administratif yang penting. NIK dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai tanda legalitas koperasi yang sah dan diakui secara hukum.

Meningkatkan daya saing usaha mikro kecil (UMK) dan wirausaha baru melalui standarisasi produk UKM serta integrasi ruang publik dengan infrastruktur aktivitas ekonomi mikro kecil merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi lokal. Standarisasi produk membantu UMK memastikan kualitas dan keamanan produk mereka, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya sertifikasi dan pemenuhan standar, produk UMK dapat bersaing di pasar modern dan internasional, sementara efisiensi produksi yang ditingkatkan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, integrasi ruang publik dengan aktivitas ekonomi mikro kecil berperan penting dalam memperluas aksesibilitas dan visibilitas produk lokal. Dengan memanfaatkan ruang publik seperti taman kota dan alun-alun untuk kegiatan ekonomi UMK, produk lokal menjadi lebih dikenal oleh masyarakat, mendukung interaksi sosial, serta memperkuat identitas lokal. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan UMK tetapi juga membantu menjaga ketahanan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Dukungan pemerintah, melalui penyediaan infrastruktur dan program pembiayaan, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi ini.

J. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal memiliki peran yang cukup besar terhadap peningkatan kondisi perekonomian daerah, dengan besarnya nilai investasi yang ditanamkan pada suatu daerah akan berdampak terhadap perluasan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah, oleh sebab itu berbagai kebijakan strategis serta promosi perlu dilakukan dalam meningkatkan daya tarik investor, dalam mengevaluasi serta menemukan permasalahan dan isu pembangunan ke depannya maka kinerja penyelenggaraan penanaman modal di Kota Pasuruan perlu dianalisa, adapun kinerja urusan penanaman modal di Kota Pasuruan dapat diukur melalui besaran jumlah nilai investasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, berikut capaian indikator jumlah nilai investasi PMA/PMDN di Kota Pasuruan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2023:



Gambar II. 54 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Kota Pasuruan

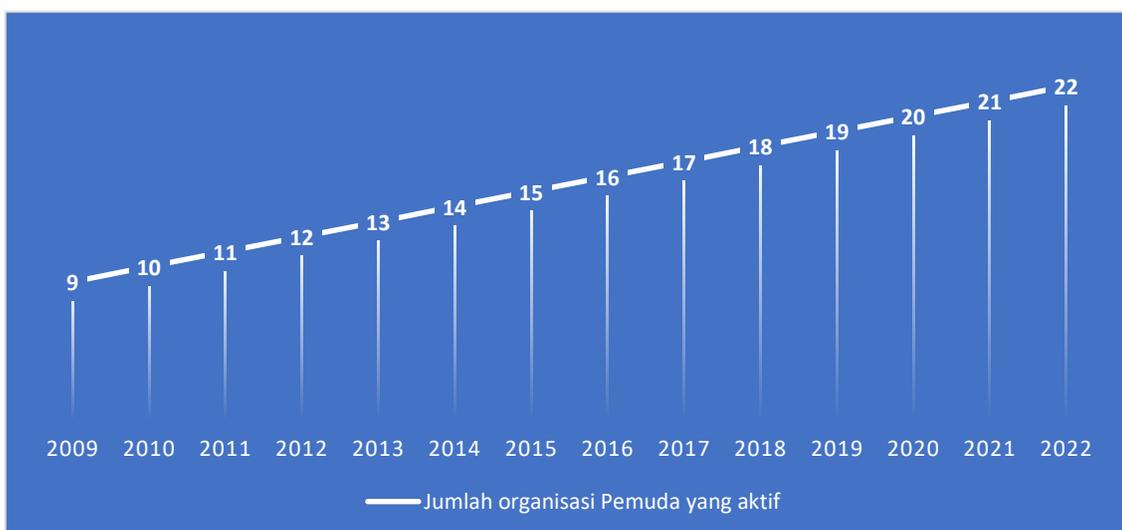
Sumber: DPMPSTSP Kota Pasuruan, 2023

Grafik di atas menunjukkan fluktuasi jumlah nilai investasi di Kota Pasuruan sejak tahun 2011 sampai tahun 2023, dimana sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren naik. Kenaikan signifikan terjadi secara konsisten dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sedangkan di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi dengan rentang capaian 450 miliar sampai dengan 467 milyar. Adapun penurunan yang signifikan terjadi di tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19. Pemulihan penanaman investasi belum sepenuhnya berhasil sehingga angka yang diperoleh sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 hanya berada pada rentang 246 miliar sampai dengan 276 miliar.

Adapun dengan adanya OSS di tahun 2018 cukup mempermudah dalam proses perizinan, OSS RBA sebagai suatu sistem atau platform yang dapat memberikan kemudahan perizinan dengan tujuan untuk menyederhanakan, mempermudah serta mempercepat proses perizinan kegiatan bisnis dan penanaman modal, adapun beberapa proses perizinan yang tercantum dalam OSS adalah perizinan pendirian bisnis, penggunaan lahan, penilaian dampak lingkungan serta syarat dan regulasi lainnya berkaitan dengan pendirian usaha dan penanaman modal dengan berbasis online. Disisi lain dengan adanya OSS peraku usaha mulai menyadari pentingnya perizinan, akan tetapi disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala dimana setelah terbitnya UU cipta kerja banyak terjadi perubahan mengenai peraturan perundang-undangan yg menyebabkan proses perizinan berusaha mengalami perubahan yang signifikan, hal ini menyebabkan pelaku usaha kebingungan terhadap proses perizinan berusaha, Proses perizinan berusaha juga masih mengalami kendala teknis sehingga membuat pelaku usaha merasa keberatan untuk memproses perizinan berusaha. Sumber informasi perijinan belum sampai ke masyarakat terutama UMKM Masyarakat Kota Pasuruan kurangnya Informasi mengenai pengetahuan tentang perizinan sehingga hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengurusan perizinan.

K. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan pemuda dan olahraga di Kota Pasuruan mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatkannya jumlah organisasi kepemudaan setiap tahunnya. Sejak tahun 2009, jumlah organisasi pemuda yang aktif sebanyak 9 organisasi dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2022.



Gambar II. 55 Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan, 2024

Pada bidang olahraga, serupa juga dengan bidang kepemudaan yang mengalami perkembangan yang cukup baik karena pembinaan yang dilakukan telah berkelanjutan. Selain itu jumlah cabang olahraga yang dibina juga semakin bertambah. Pada tahun 2018 jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 27 cabang dan jumlahnya bertambah pada tahun 2022 menjadi 37 cabang olahraga.



Gambar II. 56 Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan, 2024

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Pasuruan ke depannya memiliki peluang sekaligus tantangan terkait dengan bonus demografi. Jika dapat dioptimalkan sebagai peluang maka sumber daya manusia (pemuda) di Kota Pasuruan dapat berkontribusi positif dalam mengakselerasi pembangunan di Kota Pasuruan namun jika tidak dapat dioptimalkan maka pemuda akan menjadi tantangan hingga penghambat dalam pembangunan kota.

L. Statistik

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia, dibantu oleh para mitra pembangunan, giat mendorong produsen ilmu pengetahuan

seperti lembaga riset dan universitas untuk menggunakan kebijakan berbasis bukti sebagai satu ukuran emas dalam proses perumusan kebijakan publik. Banyak pihak sepakat bahwa perumusan kebijakan publik memang mestinya berlandaskan pada data dan informasi yang diperoleh secara empiris, ketimbang hanya mengandalkan intuisi dan prasangka. Selain dianggap lebih ilmiah, bukti yang tersaji melalui statistik dan angka juga cenderung lebih mudah diterima, karena dianggap memiliki akurasi yang lebih terukur. Watak semacam itu memang menjadi karakter utama para perencana dan pengambil kebijakan publik di Indonesia. Pemerintah Kota Pasuruan juga telah banyak menyusun statistik tidak hanya menerima dari BPS, tetapi juga telah menyelenggarakan secara mandiri. Dari capaiannya pada tahun 2023 bahwa pemerintah kota Pasuruan telah berhasil 100%, ditandai dengan cakupan ketersediaan data statistik sektoral mencapai 100%.

M. Persandian

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Persandian dinyatakan sebagai urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik). Misi utama penyelenggaraan urusan persandian yaitu keamanan informasi pemerintah daerah. Berikut merupakan indikator yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan urusan persandian di Kota Pasuruan.

Indikator pertama Persentase layanan keamanan informasi dan persandian. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 6% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 1.666,67%. Capaian ini berdasarkan layanan keamanan terhadap 41 website Perangkat Daerah. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya lisensi Firewall sebagai sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Lisensi SSL untuk melindungi privasi dan integritas data interaksi digital pengguna. Sehingga tidak terdapat pengaduan terkait keamanan informasi dari Perangkat Daerah. Selain itu, implementasi penggunaan tanda tangan digital/elektronik dalam pengendalian konten meningkat.



Gambar II. 57 Persentase layanan keamanan informasi dan persandian yang terlayani

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2024

Indikator kedua terkait persentase SDM persandian yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi persandian yang selama tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2022 capaiannya sebesar 14,29% dan mengalami peningkatan pesat pada tahun 2023 menjadi 42,86%.

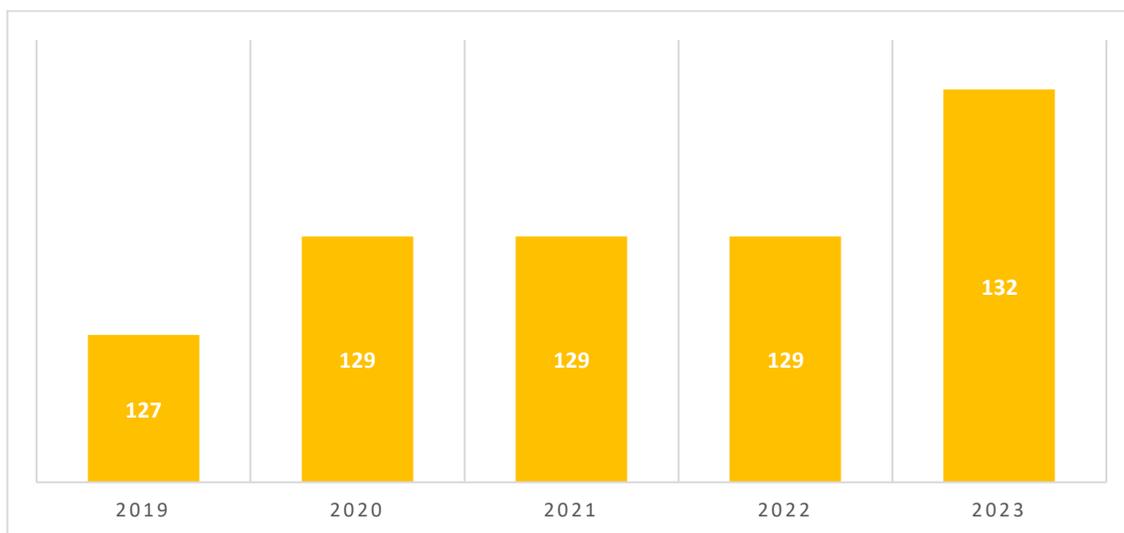
Tabel II. 24 Kinerja Persandian Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase SDM persandian yang memenuhi kualifikasi dan kompetisi-kompetisi persandian	0	0	0	14,29	42,86

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2024

N. Kebudayaan

Lestarnya nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun karakter yang tangguh dan berbudi luhur, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengembangan kebudayaan di Kota Pasuruan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya. Pada grafik berikut merincikan jumlah grup kesenian, baik yang bergiat pada bidang seni tari, teater, lukis maupun musik.



Gambar II. 58 Jumlah Grup Kesenian dan Budaya di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2024

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota membangun gedung kesenian yang cukup representatif sebagai tempat untuk mengapresiasi kreasi komunitas seni dan budaya di Kota Pasuruan. Keberadaan gedung kesenian ini diharapkan lebih menghidupkan aktivitas dan kreativitas kelompok seni, sekaligus diharapkan pula akan lebih menggairahkan kehidupan berkesenian, yang antara lain ditandai dengan semakin bertumbuhnya kelompok seni dan budaya di Kota Pasuruan. Melihat data di atas, jumlah kelompok kesenian mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023, dari 126 grup menjadi 132 grup.

O. Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pasuruan merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan

perpustakaan, kegiatan literasi, dan pengarsipan informasi di wilayah Kota Pasuruan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 22 tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan. Dalam menjalankan tugasnya pada urusan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pasuruan memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan perpustakaan, promosi literasi, dan pendidikan masyarakat terkait penggunaan perpustakaan dan peningkatan keterampilan membaca dan menulis. Jumlah perpustakaan yang dimiliki oleh Kota Pasuruan tahun 2023 dengan total 193 perpustakaan, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel II. 25 Jumlah Perpustakaan Kota Pasuruan 2023

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Jumlah perpustakaan kelurahan	34
2	Jumlah perpustakaan Sekolah Dasar (SD)	91
3	Jumlah perpustakaan SMP	40
4	Jumlah perpustakaan SMA	23
5	Perpustakaan umum	1
Total		193

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2024

Di Kota Pasuruan, terdapat total 193 perpustakaan yang tersebar di berbagai tingkatan satuan pendidikan. Perpustakaan di tingkat Sekolah Dasar (SD) mendominasi dengan jumlah 91, di tingkat SMP dan SMA masing-masing memiliki 40 dan 23 perpustakaan. Hal ini disesuaikan dengan jumlah sekolah di masing-masing tingkatan. Selain itu, hanya terdapat satu perpustakaan umum di seluruh kota, yang sangat terbatas mengingat pentingnya perpustakaan umum sebagai pusat literasi dan kegiatan masyarakat. Kinerja urusan perpustakaan lainnya dapat direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar II. 59 Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kota Pasuruan memiliki capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Pasuruan mengalami kenaikan yang drastis sebesar 28.912. Pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan yang cukup drastis jumlah pengunjung perpustakaan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kebijakan PPKM.

Di tahun 2023 jumlah pengunjung perpustakaan Kota Pasuruan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun tidak sebanyak tahun 2019.

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum Kota Pasuruan secara umum mengalami kenaikan. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2023 dengan jumlah koleksi sebanyak 33.366 buku. Jumlah pengunjung perpustakaan dan banyaknya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan mempengaruhi Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Pasuruan. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kota Pasuruan di tahun 2022 adalah sebesar 67 dan menduduki peringkat ke 3 terbesar di Jawa Timur. Sementara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Pasuruan tahun 2023 memiliki capaian sebesar 84,38.

Perpustakaan Kota Pasuruan memiliki layanan digital yang dapat diakses secara online melalui aplikasi PODI (*Pasuruan Books Of Digital*). PODI adalah sebuah platform media sosial untuk mengakses e-Bookstore & e-Pustaka, membangun jaringan/komunitas sesama pembaca, dan juga tentunya sebagai e-Reader untuk membaca eBook. PODI dapat diakses di berbagai medium perangkat mulai dari desktop dan PC berbasis situs (web-based), netbook dan tab based hybrid (tab-base application), dan mobile (smartphone-based application).

P. Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kearsipan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Bentuk arsip berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sah untuk dasar tindakan, keputusan, hingga penelitian. Sistem kearsipan penting untuk mengelola arsip yang dibuat maupun diterima, agar berkas mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Arsip harus secara tepat menggambarkan apa yang dikomunikasikan dan diputuskan atau tindakan yang dilakukan. Arsip harus dapat mendukung kebutuhan berjalannya suatu instansi yang terkait dan digunakan untuk tujuan akuntabilitas.

Berikut merupakan salah satu indikator yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan yaitu autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK:



Gambar II. 60 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK

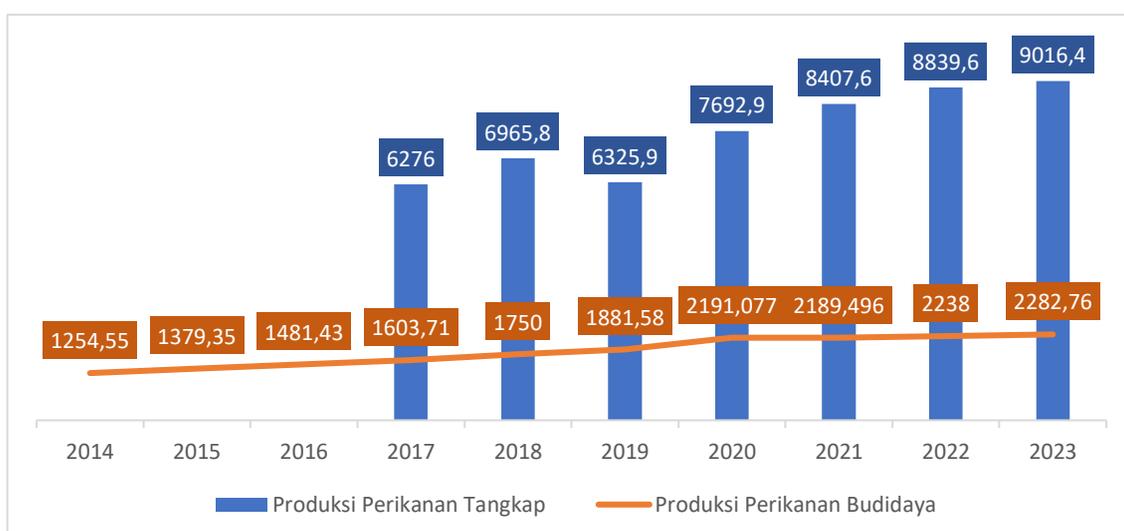
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2024

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informatika yang berdampak pada media arsip yang beralih ke media elektronik atau digital. Hal tersebut menuntut seluruh instansi baik swasta maupun pemerintah untuk lebih responsive dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan arsip elektronik. Tidak terkecuali di lingkup Kota Pasuruan, untuk menjawab tantangan tersebut maka diperlukan sebuah NSPK sebagai pedoman agar tercipta arsip elektronik yang otentik, andal, utuh dan berguna bagi kehidupan Masyarakat dan bernegara. Dapat dibuktikan dengan data di atas, capaian pada autentifikasi arsip dengan NSPK di tahun 2021 sebesar 1200 arsip. Sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan, namun capaian tersebut sudah berada di angka target, dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 3000 arsip. Secara substansi NSPK ini menjelaskan prinsip dan proses bisnis dalam mengelola arsip elektronik sehingga pada pelaksanaannya pencipta arsip dan Lembaga kearsipan dapat membuat sebuah sistem arsip elektronik yang sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Dengan hadirnya NSPK tentang pengelolaan arsip elektronik diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pencipta arsip dan Lembaga kearsipan baik pusat dan daerah dalam melaksanakan pengelolaan arsip elektronik dengan sebaik mungkin.

2.4.3. Pelayanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan Kota Pasuruan merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perikanan, pengawasan kebijakan perikanan, dan pengembangan sektor perikanan di wilayah Kota Pasuruan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 23 tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan. Tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Pasuruan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan keberlanjutan perikanan, pengawasan nelayan, promosi budidaya ikan, dan pelestarian ekosistem perairan. Adapun indikator kinerja urusan perikanan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar II. 61 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Perikanan Kota Pasuruan, 2024

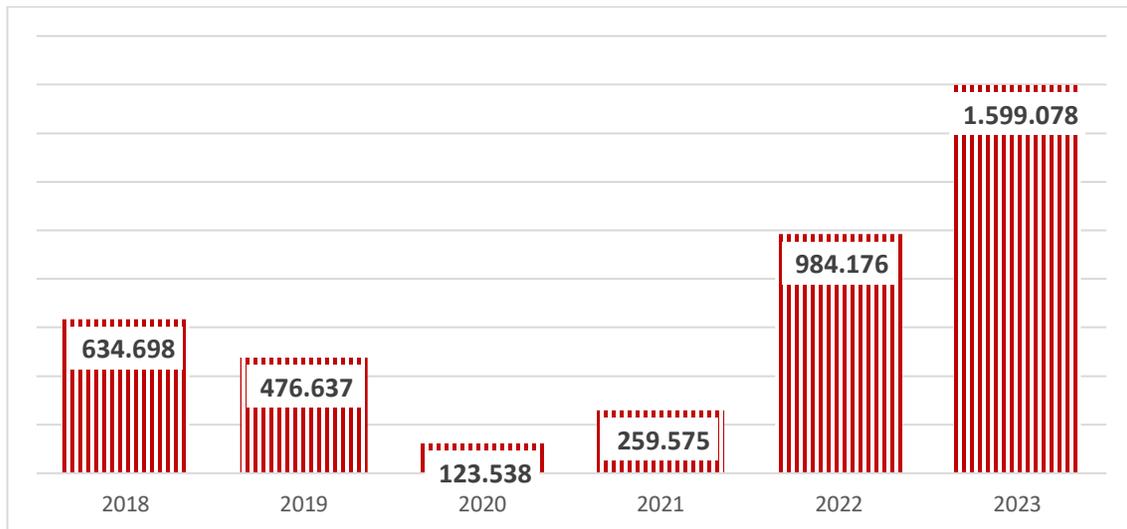
Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Kota Pasuruan secara umum memiliki capaian yang terus meningkat. Capaian produksi perikanan tangkap Kota Pasuruan mengalami penurunan pada tahun 2019 kemudian terus meningkat di tahun 2020 hingga 2023. Produksi perikanan tangkap sangat bergantung dengan kondisi perairan (*fishing ground*) dimana Kota Pasuruan telah berada di zona merah. Faktor yang mendorong produksi perikanan tangkap antara lain adanya penenggelaman rumah ikan yang membantu memulihkan SDI laut, adanya penanaman dan penyulaman mangrove, peningkatan kapasitas nelayan dalam hal usaha penangkapan.

Sedangkan produksi perikanan budidaya Kota Pasuruan memiliki capaian yang lebih stabil dibandingkan perikanan tangkap. Namun produksi perikanan budidaya di Kota Pasuruan masih jauh dibawah perikanan tangkap, hal ini dikarenakan semakin banyaknya lahan tambak yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan tidak produktif karena irigasi. Adapun yang menjadi faktor pendorong produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Kota Pasuruan adalah adanya peningkatan teknologi budidaya dengan kolam terpal bundar. Pada perikanan tangkap, adanya penenggelaman rumah ikan yang membantu memulihkan sumber daya laut, adanya penanaman dan penyulaman mangrove, serta peningkatan kapasitas nelayan dalam hal usaha penangkapan. Rencana tindak lanjut dari Dinas Perikanan Kota Pasuruan untuk urusan perikanan yaitu dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam usaha penangkapan ikan.

B. Pariwisata

Daerah administratif kota dengan luasan geografis yang lebih kecil dari kabupaten menyebabkan potensi alam yang dapat dioptimalkan tidak terlalu banyak sehingga kawasan perkotaan lebih didominasi daya tarik terhadap objek wisata belanja, kuliner, tata kota serta event pariwisata. Dalam hal ini Kota Pasuruan juga memiliki potensi wisata religi yang cukup menarik wisatawan domestik untuk berkunjung dan berwisata di Kota Pasuruan, disisi lain dengan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah sekitar Kota Pasuruan yakni Kabupaten

Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo secara tidak langsung juga dapat mempromosikan Wisata di Kota Pasuruan dimana para wisatawan seringkali mencari destinasi pendukung dalam perjalanannya. Kinerja penyelenggaraan wisata di Kota Pasuruan dapat diketahui melalui indikator angka kunjungan wisatawan, berikut capaian indikator angka kunjungan wisatawan di Kota Pasuruan:



Gambar II. 62 Angka Kunjungan Wisata di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan, 2024

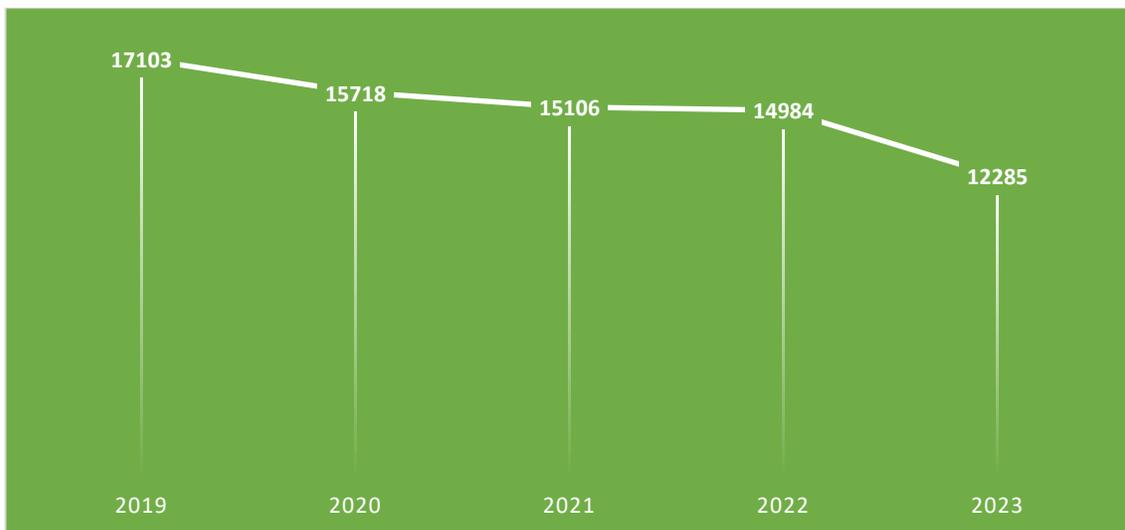
Berdasarkan capaian grafik di atas, angka kunjungan wisatawan di Kota Pasuruan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, pemerintah pusat, daerah hingga desa memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan potensi penularan virus covid-19. Sehingga seluruh destinasi wisata ditutup dan tidak beroperasi hingga hampir satu tahun sehingga di tahun 2021 juga belum dapat sepenuhnya pulih, tidak beroperasinya destinasi wisata serta pembatasan kegiatan masyarakat dalam rentang waktu yang cukup lama mengakibatkan efek jenuh yang cukup tinggi sehingga angka kunjungan di tahun 2022 mengalami lonjakan yang sangat tinggi hingga mencapai 984.176 kunjungan begitu pula di tahun 2023 hingga mencapai angka 1.599.078.

Pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Pasuruan masih memiliki banyak permasalahan, kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan promosi pariwisata belum dikembangkan secara optimal. Disisi lain daya tarik wisata di Kota Pasuruan cukup minim dan hanya bertumpu pada daya tarik utama yakni wisata religi sehingga dengan adanya pengembangan tata kota dan desain alun-alun yang berada di satu lokasi dengan Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan dan Makam KH.Abdul Hamid cukup memberikan daya tarik lebih. Melihat pola ketertarikan masyarakat utamanya wisatawan dalam negeri cenderung akan memiliki ketertarikan pada wisata yang baru ataupun viral pada media sosial sehingga nilai kebaruan harus senantiasa ada agar dapat menarik wisatawan, hal ini juga perlu direncanakan dengan baik bagaimana kebaruan yang diupayakan pada setiap periodenya berdampak efektif pada daya tarik wisata. Dari segi akomodasi dan transportasi juga belum terkoneksi dan terintegrasi di wilayah destinasi Kota Pasuruan. Sehingga permasalahan

tersebut hendaknya dapat selesaikan untuk perencanaan ke depan serta menjawab tantangan pengembangan sektor pariwisata di Kota Pasuruan.

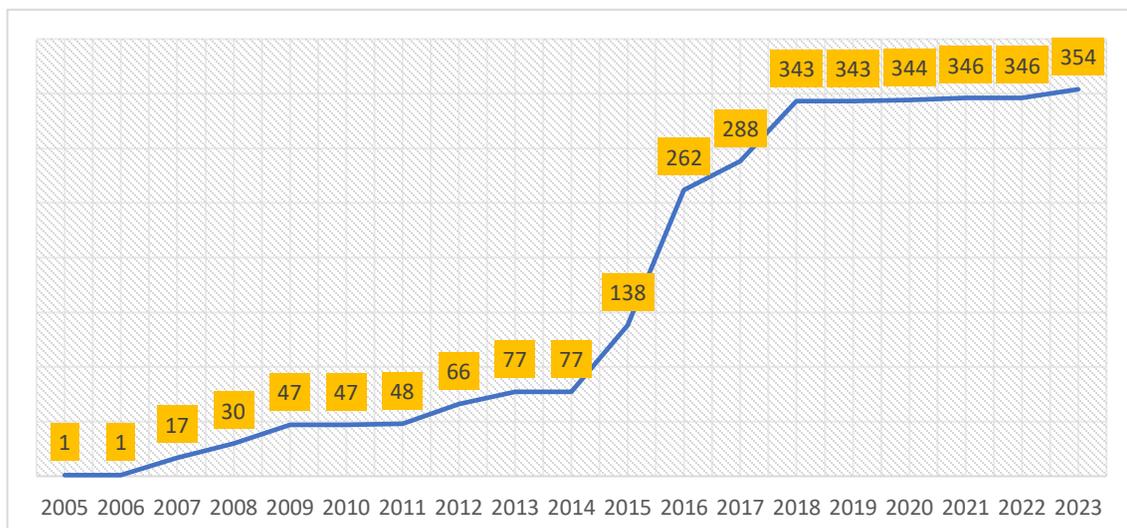
C. Pertanian

Urusan Pertanian di Kota Pasuruan memiliki peran yang sangat penting mengingat sektor pertanian yang luas dan beragam. Pertanian telah lama menjadi tulang punggung ekonomi, memberikan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk dan berkontribusi pada ketahanan pangan. Padi adalah makanan pokok di Kota Pasuruan, dan menjaga swasembada beras menjadi prioritas utama. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk memastikan pasokan beras dan bahan makanan lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Hanya saja, dengan melihat produktivitas sejak tahun 2019, produktivitasnya justru menurun, yang semula pada tahun 2019 sebanyak 17.103 ton menjadi 12.285 ton.



Gambar II. 63 Produksi Padi (Ton) di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2024

Produksi komoditas padi yang terus menurun tersebut berbanding terbalik dengan yang sarana dan prasarana pertanian yang sudah disiapkan.



Gambar II. 64 Jumlah Sarana Prasarana Pertanian yang Diberikan di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa mulai tahun 2015 jumlah sarana dan prasarana pertanian sudah diberikan selalu bertambah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan pertanian terjadi karena semakin berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan.

D. Peternakan

Urusan peternakan merupakan salah satu urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk Kota Pasuruan. Penyelenggaraan urusan peternakan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan untuk meningkatkan sektor peternakan, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan memastikan bahwa peternakan berkontribusi positif terhadap ekonomi. Peternakan termasuk salah satu aspek yang berkontribusi pada PDRB Sub Sektor Pertanian di Kota Pasuruan. Untuk selanjutnya, kinerja penyelenggaraan urusan peternakan di Kota Pasuruan dapat dilihat dari capaian hasil produksi peternakan yang terdiri atas produk daging, susu dan telur.

Tabel II. 26 Hasil Produksi Peternakan di Kota Pasuruan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi Potong	425	457	454	226	151
2	Sapi Perah	20	20	18	7	2
3	Kerbau	-	-	-	-	-
4	Kuda	42	36	30	30	4
5	Kambing	3,142	3,191	3,232	1,854	788
6	Domba	669	736	753	653	599
7	Ayam Kampung	53,925	50,185	51,400	52,125	5,208
8	Ayam Petelur	2,380	2,000	805	750	854
9	Ayam Pedaging	35,600	16,000	16,000	16,000	160
10	Itik	22,200	16,300	15,000	15,250	4,403
11	Entok	675	1,000	1,300	1350	875
12	Kelinci	92	75	20	20	19
13	telur (kg)	143,711	150,359	157,559	156,000	181,048
14	Susu (liter)	24,333	24,333	33,246	18,337	8,640
15	Daging sapi (ton)	667,927	603,386	781,018	728,000	522,125

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2024

Capaian hasil produksi peternakan di Kota Pasuruan dalam rentang tahun 2019-2023 menunjukkan tren cenderung menurun baik produk maupun komoditi. Produk yang mengalami peningkatan hanya telur dari 143.711 kg pada Tahun 2019 menjadi 181.048 kg di Tahun 2023. Produk telur ini banyak didatangkan dari luar Kota Pasuruan seperti Kabupaten Malang, sedangkan produksi Kota Pasuruan sendiri masih belum bisa mencukupi. Pertumbuhan yang lambat pada hasil produksi peternakan dilatarbelakangi oleh serangan penyakit bagi hewan ternak. Pada tahun 2022, serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyebabkan ternak kehilangan nafsu makan sehingga pertumbuhannya terganggu, bobot badannya turun, produksi susunya berkurang sehingga merugikan peternak dan menurunkan produktivitas hasil produksi baik susu maupun daging.

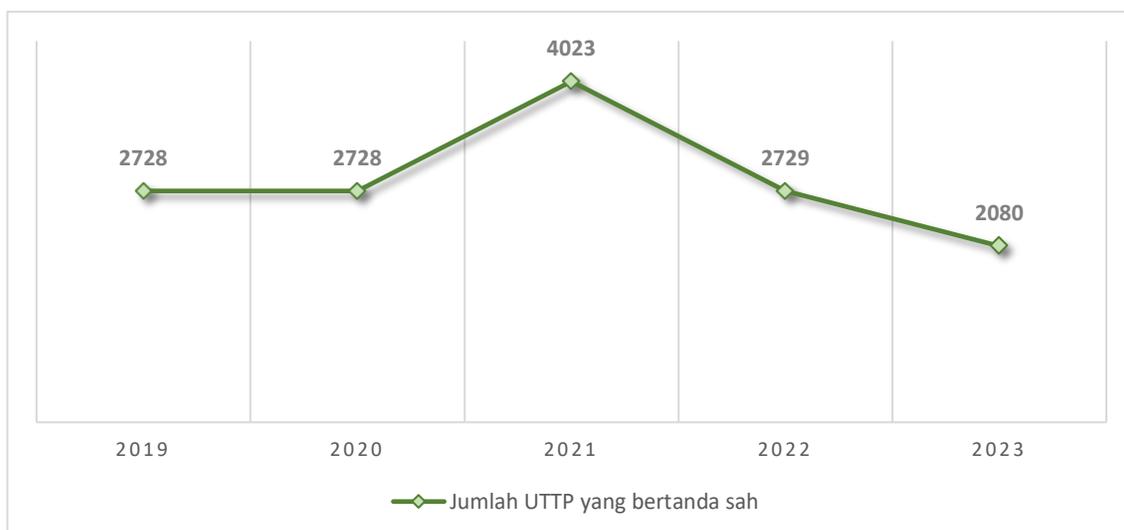
Tantangan ke depan bagi penyelenggaraan urusan peternakan di Kota Pasuruan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas peternak kota untuk mampu memenuhi ketersediaan pangan dari sisi protein hewani. Peningkatan produktivitas ini harus diikuti jaminan kualitas dan sesuai dengan standar keamanan yang ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal). Pengembangan sektor peternakan akan terbatas pada sumber daya baik itu pelaku peternak dan permodalan. Di Indonesia secara umum, permodalan masih menjadi kendala, terutama bagi pelaku usaha ternak di bidang pembibitan. Lembaga bantuan modal termasuk perbankan belum signifikan mendukung pelaksanaan usaha di dalam *breeding* tersebut.

E. Perdagangan

Badan Pusat Statistik menulis dalam laman resminya, perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan di Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam UU ini menyebutkan bahwa peranan pengertian perdagangan adalah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengampuh beberapa indikator yang berkaitan dengan urusan perdagangan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah UTTP yang bertanda sah

UTTP merupakan akronim dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. Perizinan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan suatu persetujuan terhadap prototipe UTTP asal impor atau produksi dalam negeri yang menyatakan UTTP tersebut telah memenuhi Syarat Teknis yang ditetapkan, sehingga dapat diimpor atau dibuat/dirakit di wilayah Republik Indonesia. Izin Tipe UTTP diperuntukkan bagi UTTP asal impor sedangkan Izin Tanda Pabrik diperuntukkan bagi UTTP produksi dalam negeri.

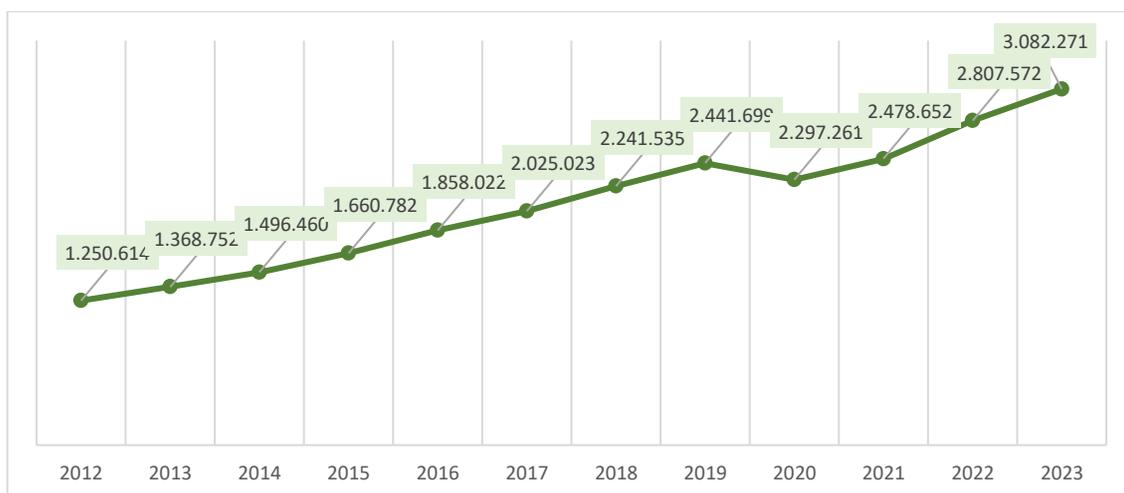


Gambar II. 65 Jumlah UTTP yang Bertanda Sah di Kota Pasuruan
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2024

Ketersediaan UTTP sangat mendukung dalam berjalannya proses perdagangan tak terkecuali di Kota Pasuruan. Mengingat bahwa pentingnya kehadiran UTTP, bahwa harus adanya izin dalam pengaplikasiannya. Hal tersebut dikarenakan jika UTTP yang bertanda sah akan semakin teruji keabsahannya dan memiliki izin yang resmi. Berdasarkan data di atas, maka dari tahun 2019 jumlah UTTP di Kota Pasuruan berangsur memiliki capaian rata-rata naik. Walaupun pada tahun 2022 jumlah UTTP mengalami penurunan yang signifikan. Serta pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali hingga pada 2080. Dibutuhkan perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang sehingga nantinya akan ditetapkan “bertanda sah”.

2. Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tak terkecuali di daerah-daerah.



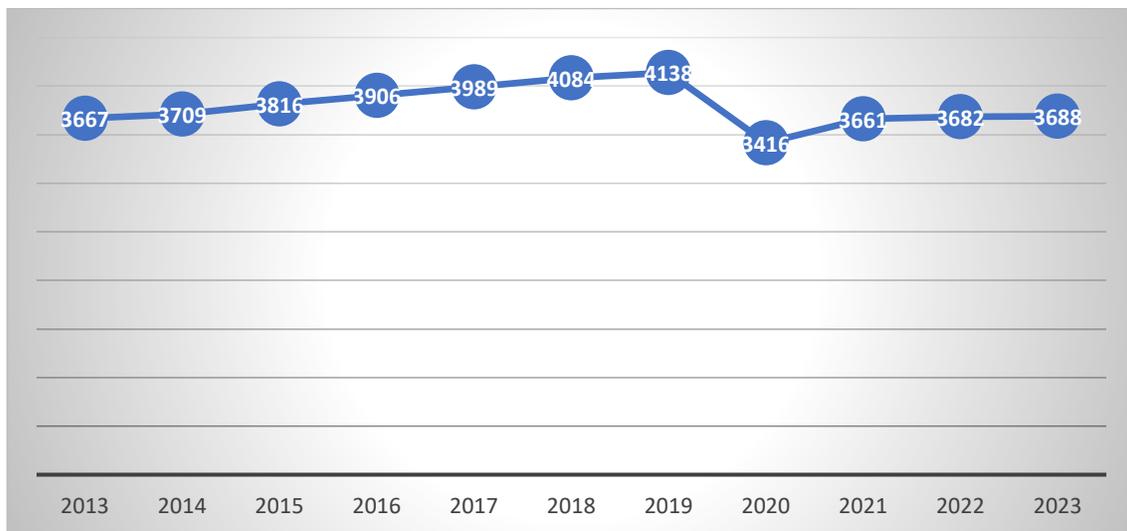
Gambar II. 66 Nilai PDRB Sektor Perdagangan di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2023

Dalam konteks perekonomian suatu daerah, maka salah satu wacana yang menonjol ialah tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam konteks perekonomian suatu daerah karena dapat menjadi salah satu ukuran pertumbuhan atau pencapaian perekonomian daerah tersebut. Salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah ialah perdagangan. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah capaian dari PDRB sektor perdagangan di Kota Pasuruan, yang menunjukkan capaian tren yang positif. Hal tersebut dikarenakan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 capaian memiliki rata-rata peningkatan pada setiap tahunnya. Namun terlihat bahwa di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemic covid-19 yang melanda Indonesia tak terkecuali di Kota Pasuruan maka juga mempengaruhi di sektor perdagangan. Terhambatnya proses ekspor dan impor sehingga perdagangan sepi dan mengalami penurunan.

F. Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian di Kota Pasuruan diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peranan Perindustrian sangat penting dalam membangun sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Adapun kinerja dalam urusan perindustrian di Kota Pasuruan dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:



Gambar II. 67 Jumlah Industri di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2024

Pertumbuhan jumlah industri memiliki banyak dampak penting bagi perekonomian suatu daerah dan masyarakat secara umum. Dengan jumlah industri yang meningkat, dapat mendukung penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi sampai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Pertumbuhan jumlah industri di Kota Pasuruan tercatat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 4.138 industri, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3.416 industri, ini merupakan jumlah terendah selama 10 tahun terakhir. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 di Indonesia sehingga beberapa industri, terutama yang tidak dianggap esensial, menghentikan produksi mereka sepenuhnya selama lockdown dan pembatasan sosial. Ini berdampak pada jumlah industri di Kota Pasuruan menurun. Namun setelah tahun 2020 kembali mengalami kenaikan hasil di setiap tahunnya. Khususnya di tahun 2023 jumlah industri ini mulai meningkat mencapai 3.688 industri.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pasuruan dalam mengampu urusan perindustrian adalah kurangnya sarana dan juga prasarana untuk kebutuhan produksi industri seperti mesin dan sarana promosi produk. Selain itu ketersediaan tenaga yang terampil masih kurang untuk pengembangan industri kecil menengah komoditi kerajinan. Terdapat keterbatasan anggaran atau biaya untuk kepengurusan legalitas bahan baku kayu bagi industri kecil menengah mebel berupa pelayanan dan SPLV. Untuk mendukung perkembangan perindustrian di Kota Pasuruan, pemerintah telah membangun kawasan industri namun aksesnya belum memadai.

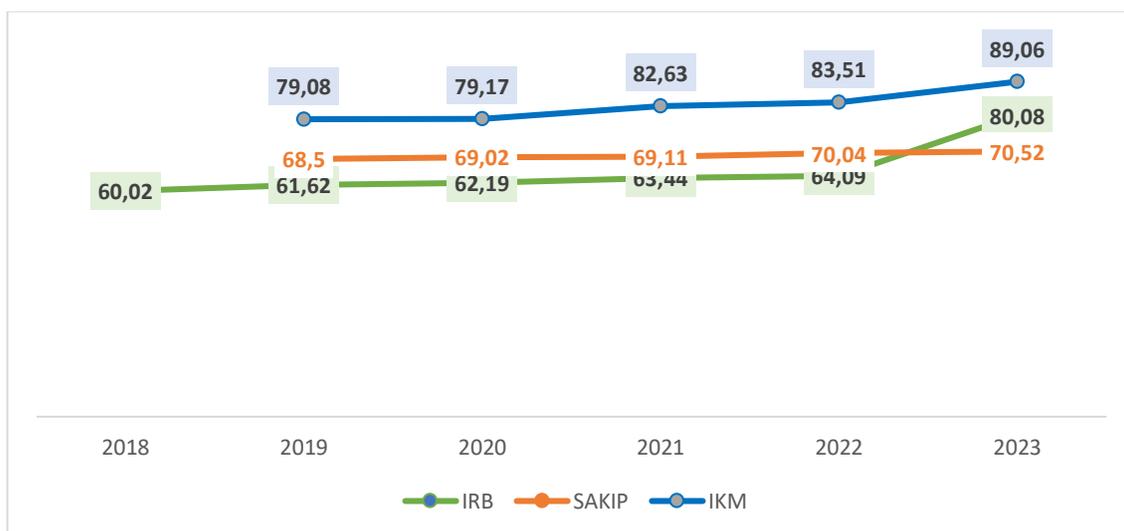
Perindustrian di masa depan akan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, karena perubahan dalam teknologi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Migrasi menuju digitalisasi dan otomatisasi akan terus memengaruhi cara industri beroperasi. Perusahaan harus mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan komputasi awan untuk tetap bersaing. Tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan dan berpindah ke produksi yang lebih berkelanjutan akan menjadi semakin penting. Industri akan dihadapkan pada regulasi yang lebih ketat dan tuntutan konsumen untuk produk dan proses yang ramah lingkungan. Selain itu perubahan dalam teknologi dan tuntutan baru dalam pekerjaan akan memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Industri harus menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan serta menyesuaikan model kerja mereka dengan perkembangan dalam pekerjaan berbasis teknologi.

2.4.4. Unsur Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan perlu ditunjang melalui fasilitasi serta integrasi dalam berbagai aktivitas yang dijalankan berdasarkan masing-masing fungsi urusan di seluruh perangkat daerah. Terkait dengan beberapa sistem serta prosedur teknis maupun administratif seringkali memberikan efek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dan prosedural perlu secara berkala dilakukan evaluasi serta pengembangan guna menjawab permasalahan yang ada. Namun disisi lain sumber daya aparatur belum cukup adaptif terhadap perubahan yang ada, perkembangan sistem dan aturan terkait pengadaan barang dan jasa memperlambat proses dimana proses adaptasi itu sendiri belum cukup optimal akan tetapi muncul perubahan-perubahan baru yang juga membutuhkan proses adaptasi. Penentuan skala prioritas yang dilakukan oleh pejabat pemegang kekuasaan belum dapat secara tepat sehingga efisiensi anggaran yang seharusnya dapat dioptimalkan pada aspek yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum cukup

dikembangkan. Berikut adalah realisasi tiga indikator yang melekat dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan di sekretariat daerah Kota Pasuruan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:



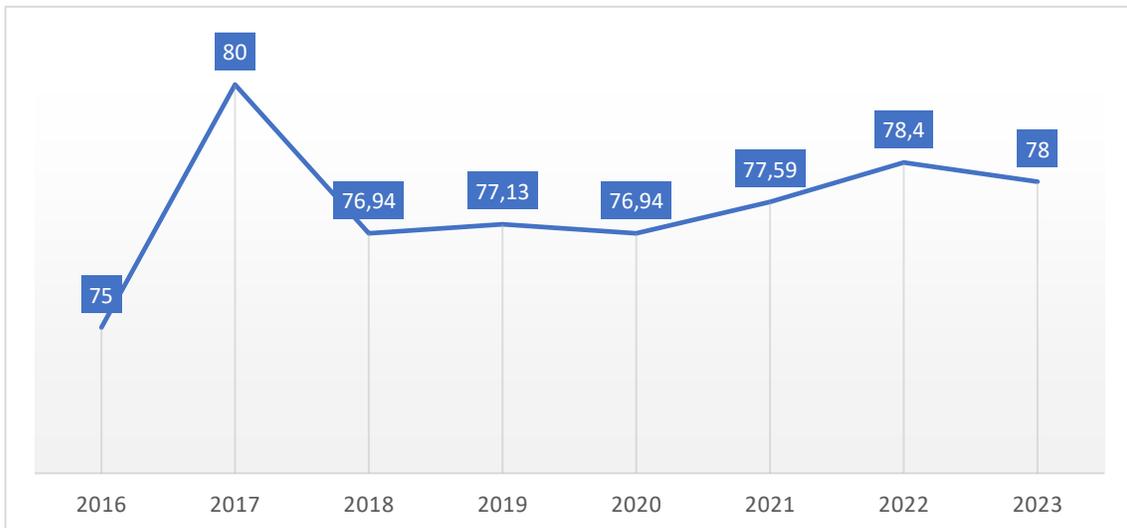
Gambar II. 68 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik di atas capaian indikator indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Pasuruan memiliki trend naik, di mana angka yang didapatkan dalam setiap tahunnya meningkat secara konsisten. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam mengungkit capaian ketiga indikator tersebut secara signifikan adalah penetapan produk hukum yang seringkali terlambat dikarenakan proses fasilitasi vertikal membutuhkan waktu yang cukup lama, kurangnya komitmen bersama dan kerjasama seluruh perangkat daerah dalam memenuhi pelaporan RB, pelaporan SAKIP dan peningkatan pelayanan masyarakat, kualitas data rendah dan capaian rendah, belum banyak data yang terpenuhi, penggunaan layanan oleh masyarakat tidak dipahami secara menyeluruh, kurangnya sarana prasarana untuk disabilitas, serta belum efektifnya penyelenggaraan evaluasi di seluruh perangkat daerah.

B. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan (Setwan) memiliki peran penting dalam memfasilitasi Anggota DPRD dalam berkinerja untuk masyarakat. Setwan membantu dalam proses administrasi hingga teknis dalam perencanaan hingga pengesahan peraturan di daerah. Oleh karena itu, kepuasan anggota dewan menjadi indikator utama dalam melihat kinerja Setda. Grafik berikut menggambarkan kepuasan anggota DPRD Kota Pasuruan atas Sekretariat Dewan.

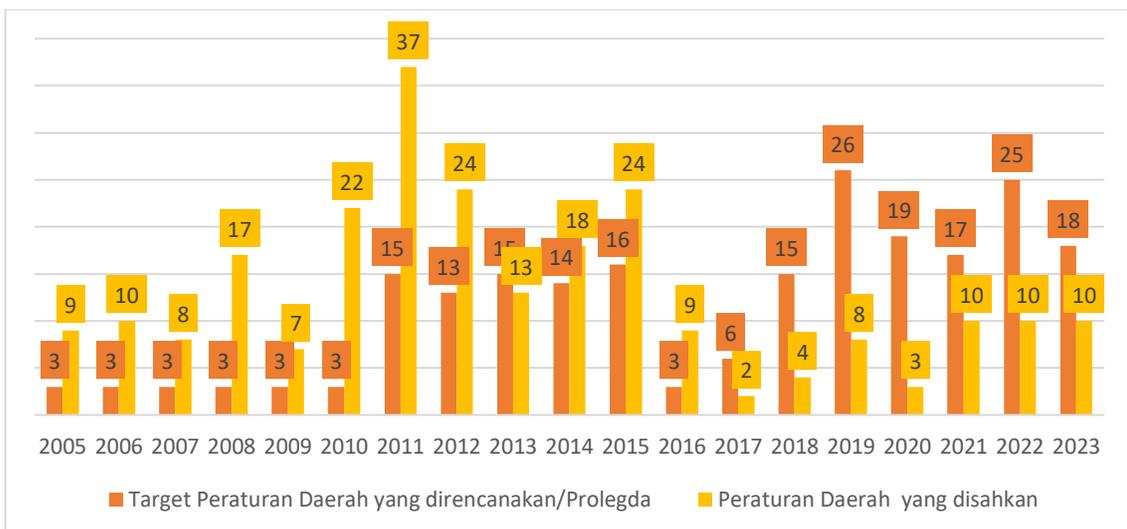


Gambar II. 69 Persentase Anggota DPRD yang Puas akan Pelayanan Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, 2024

Grafik di atas telah menggambarkan adanya peningkatan kepuasan anggota DPRD Kota Pasuruan sejak tahun 2016 hingga 2023. Kepuasan tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 80% namun kemudian menurun menjadi 76,94% pada tahun 2018 dan mengalami fluktuatif hingga tahun 2023. Kendala yang sering terjadi adalah belum sinkronnya jadwal pembahasan Perda dengan jadwal aktivitas Anggota DPRD. Selain itu juga karena adanya proses harmonisasi produk hukum dengan Kemenkumham yang memerlukan waktu yang tidak dapat diprediksi.

Output dari fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan adalah pengesahan Peraturan Daerah yang mengatur berbagai aspek di daerah. Akan tetapi, kinerja Sekretariat Dewan tidak dapat menjadi faktor utama output tersebut dapat terealisasi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti situasi politik dan tingkat urgensifitas dari sebuah Raperda. Grafik berikut menggambarkan perbandingan jumlah Raperda yang masuk Prolegda dan jumlah Perda yang disahkan di Kota Pasuruan sejak tahun 2005.



Gambar II. 70 Prolegda dan Perda yang Disahkan di Kota Pasuruan

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Pasuruan, 2024

Sebelum tahun 2017 jumlah Perda yang disahkan banyak yang melebihi target yang direncanakan dalam Prolegda namun kemudian pada tahun 2017 hingga 2023 jumlah Perda yang disahkan selalu di bawah target Prolegda. Situasi tersebut terjadi karena proses yang semakin komprehensif di provinsi dan Kemenkumham. Sebagaimana yang diatur pada:

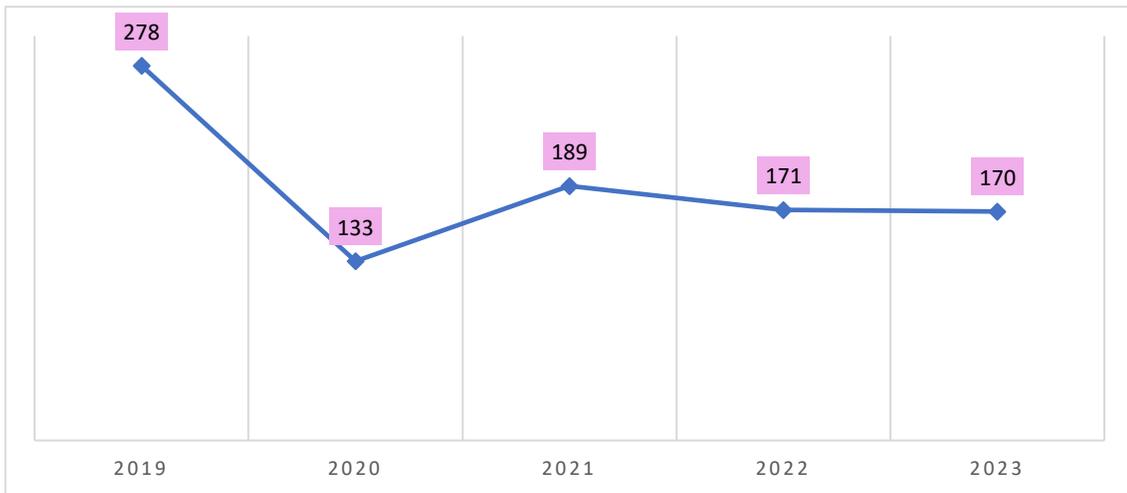
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini mengatur secara lebih rinci tentang tata cara penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Perda di tingkat daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perda.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Pembahasan Peraturan Daerah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Peraturan ini mengatur prosedur evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkumham terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah.

2.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Dalam perspektif pembangunan daerah, tahap-tahap dalam proses kebijakan publik diwujudkan dalam tahapan perencanaan program/kegiatan, implementasi program/kegiatan, dan evaluasi program/kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses kebijakan publik.

Paling tidak terdapat dua tahapan dalam proses yang kadang ditemui kendala dan permasalahan yakni: pertama, bagaimana tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam program kegiatan. Kedua, kendala dan permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dengan implementasinya. Kendala dan permasalahan tersebut di atas tidak terlepas dari bagaimana proses kebijakan publik dirumuskan dengan keterlibatan banyak pihak sesuai dengan kapasitas dan kepentingan masing-masing pihak.



Gambar II. 71 Jumlah Program RKP Tahun Berkenaan di Kota Pasuruan
Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Program RKP kota Pasuruan semakin ramping, karena penyederhanaan program dikarenakan proses dari pemerintah pusat untuk merampingkan program perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2019 dengan terbit permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2020 pemerintah daerah mengimplementasikan regulasi tersebut sehingga ada perubahan yang mendasar yang ditetapkan pada program yang diakomodir. Ke depan diharapkan peningkatan kualitas SDM dalam menyusun perencanaan daerah. Di era ini, perlu didorong kebijakan berorientasi pada *evidence based*, maka sangat penting desain program berdasarkan unsur kelitbangan.



Gambar II. 72 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kota Pasuruan
Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Pemanfaatan hasil kelitbangan semakin membaik. Pada tahun 2023 pemanfaatan mencapai 81,48% artinya bahwa hasil litbang digunakan untuk perumusan kebijakan. Partisipasi Perangkat daerah juga dalam menyampaikan ide dan inovasi untuk dikembangkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Tetapi ada beberapa yang menjadi masalah yaitu pertama, hasil litbang Rencana penyusunan dokumen kelitbangan sudah ada akan tetapi dalam penyusunannya seringkali belum dapat terealisasi dikarenakan banyak hal, salah satunya ketidak

sesuaian dengan dokumen perencanaan lain, salah satunya RTRW. Kedua, Masih belum terdapat SDM yang memenuhi kualifikasi Peneliti baik di Litbang maupun di OPD lain.

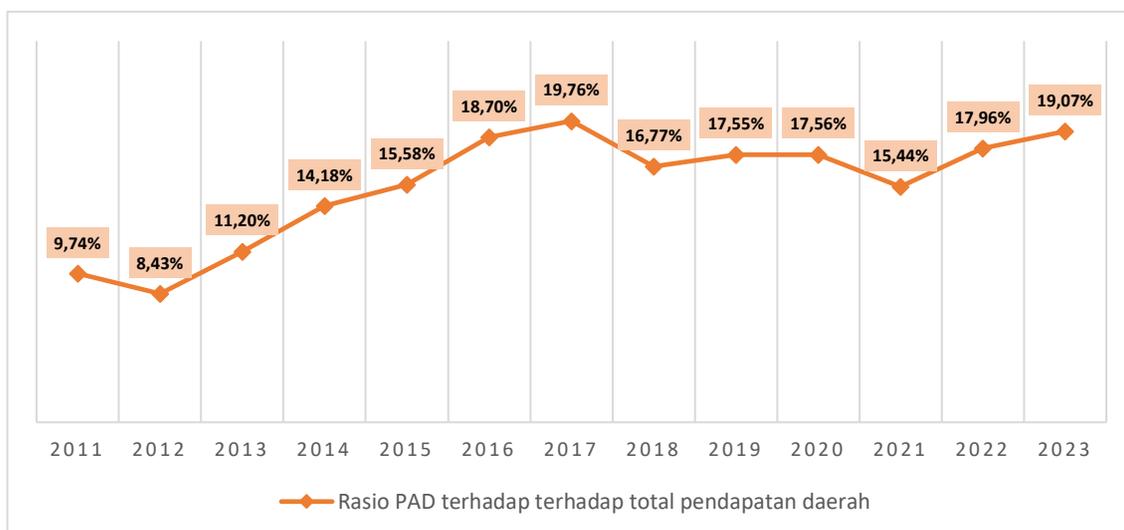
B. Keuangan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan keuangan di Kota Pasuruan direpresentasikan oleh capaian beberapa indikator berikut, pertama terkait rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.



Gambar II. 73 Rata-Rata Pertumbuhan PAD Kota Pasuruan
Sumber: BAPENDA Kota Pasuruan, 2024

Dalam rentang tahun 2012-2023, pertumbuhan PAD Kota Pasuruan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2012, pertumbuhan PAD ada di angka -6.53 dan dalam satu dekade naik menjadi 26.74 di tahun 2022, namun capaian ini turun drastis di tahun 2023 menjadi 9,71. Dalam tiga tahun terakhir (periode IV), pertumbuhan PAD semakin lemah dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor perekonomian. Selain itu, faktor kurangnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat Wajib Pajak (WP)/wajib retribusi yang enggan membayar pajak/retribusi sehingga terjadi penunggakan dan beberapa wajib pajak restoran tidak bisa membayar pajak karena sepi pengunjung. Selain itu faktor kurangnya dukungan lintas PD dalam optimalisasi PAD serta layanan berbasis digital belum optimal.

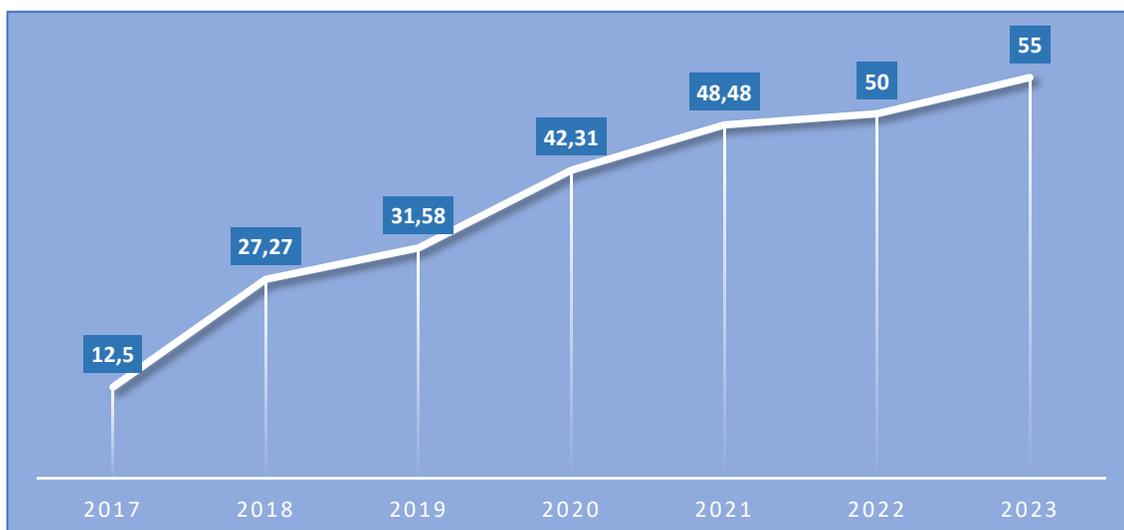


Gambar II. 74 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Pasuruan
Sumber: BAPENDA Kota Pasuruan, 2024

Indikator kedua yaitu Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Rasio PAD Kota Pasuruan terhadap total pendapatan daerah dalam rentang tahun 2011-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung naik. Capaian di tahun 2011 sebesar 9.74% dan meningkat menjadi 19.07% di tahun berjalan. Capaian rasio tersebut masuk kategori daerah dengan kemampuan keuangan rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif.

C. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development* (R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Bisa dikatakan hulu dari perencanaan pembangunan adalah hasil penelitian. Artinya, perencanaan yang berkualitas hanya dapat terwujud bila dilandasi oleh hasil penelitian yang berkualitas pula. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan bahwa peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas - tugasnya dalam urusan penelitian dan pengembangan, Bappelitbangda Kota Pasuruan dapat diukur dari salah satu indikatornya yaitu sebagai berikut:



Gambar II. 75 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kota Pasuruan
Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2023

Berdasarkan pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan capaian pada indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan bisa dikatakan bahwa adanya tren capaian positif. Namun, perlu adanya evaluasi kembali dikarenakan masih rendahnya capaian. Tahun 2020 memiliki capaian 42,31%, hal itu artinya belum mencapai separuh penelitian dan pengembangan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Namun pada tahun 2023 telah mencapai 55% penelitian yang dimanfaatkan dalam hasil Kelitbangan di Kota Pasuruan. Capaian tersebut telah mencapai separuh lebih, namun masih harus ditingkatkan. Mengingat bahwa Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor Pembangunan dalam daerah tersebut.

2.4.6. Unsur Pengawas

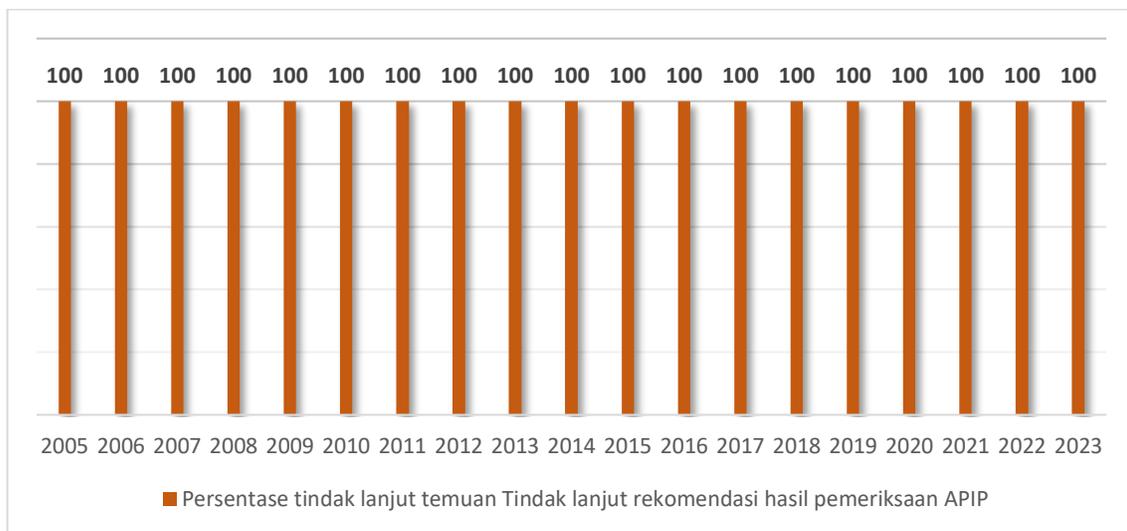
A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Desa telah mencantumkan klausul tentang peran dan tugas kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah.

1. Persentase tindak lanjut temuan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. APIP berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit. Hal ini dinyatakan dalam standar audit kinerja yang menyatakan bahwa auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi.



Gambar II. 76 Persentase Tindak Lanjut Temuan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP
Sumber: Inspektorat Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan pada gambar grafik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh temuan yang ada di Kota Pasuruan telah dilakukan tindak lanjut secara keseluruhan. Hal tersebut membuktikan bahwa komitmen dari Inspektorat selaku leading sektor dalam indicator ini telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan. Inspektorat telah melakukan tugasnya dengan cara memberikan solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi meliputi penyelesaian tindak lanjut jangka panjang, penerapan sanksi yang tegas, penguatan peran pihak-pihak yang terlibat, dan menyusun SOP tindak lanjut.

2. Opini BPK

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tabel II. 27 Capaian Opini BPK Kota Pasuruan

Nama Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	WD P	WT P	WT P	WD P	WD P	WT P	WT P	WT P	WT P					

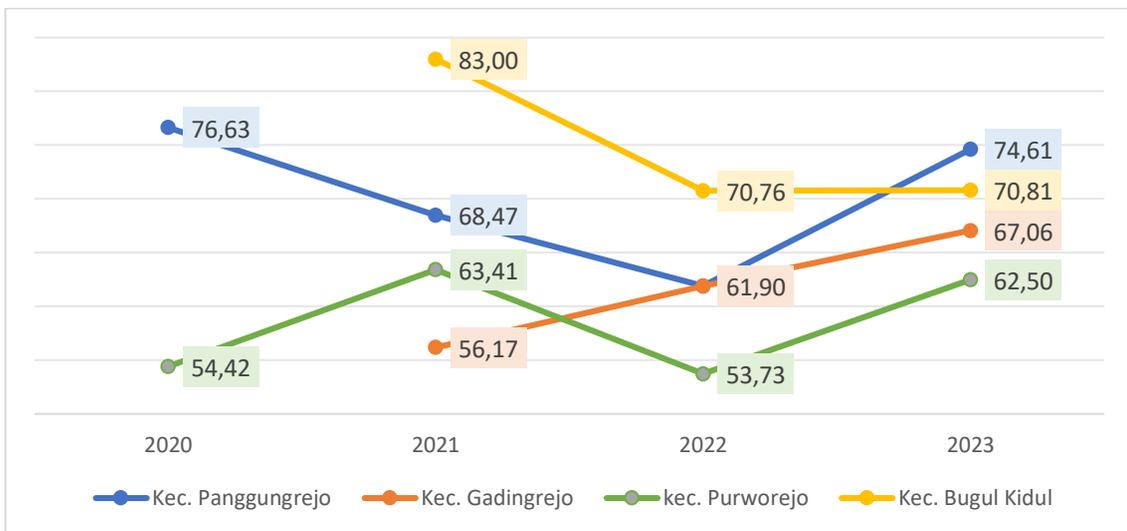
Sumber: Inspektorat Kota Pasuruan, 2024

Dalam data yang ada pada tabel di atas maka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni 2020, 2021 dan 2023 kategori yang dicapai oleh Kota Pasuruan yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal tersebut merupakan capaian yang baik, Kota Pasuruan telah menggunakan prinsip pelaksanaan akuntansi dengan baik. Diharapkan untuk ke depannya Kota Pasuruan mampu berkomitmen untuk mempertahankan capaiannya hingga periode berikutnya.

2.4.7. Unsur Kewilayahan

A. Fungsi Koordinasi dan Kewilayahan Kecamatan

Kecamatan sebagai tingkatan administratif dalam sistem pemerintahan memiliki fungsi kewilayahan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Terdapat empat kecamatan di Kota Pasuruan yakni Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul.

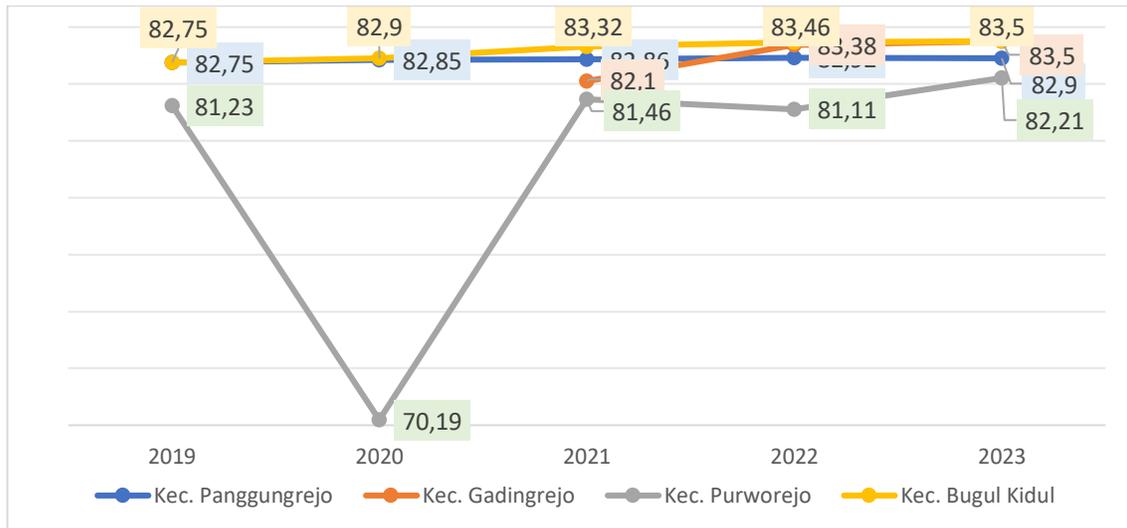


Gambar II. 77 Nilai Tata Kelola Pemerintah Kecamatan di Kota Pasuruan

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik di atas capaian indikator nilai tata kelola pemerintahan kecamatan di Kota Pasuruan menunjukkan capaian yang fluktuatif, adapun capaian indikator nilai tata kelola pemerintahan yang memiliki trend meningkat adalah di Kecamatan Gadingrejo, sedangkan tiga kecamatan lainnya memiliki trend yang cenderung menurun yakni Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul. Terkait dengan indikator yang mengukur capaian kinerja

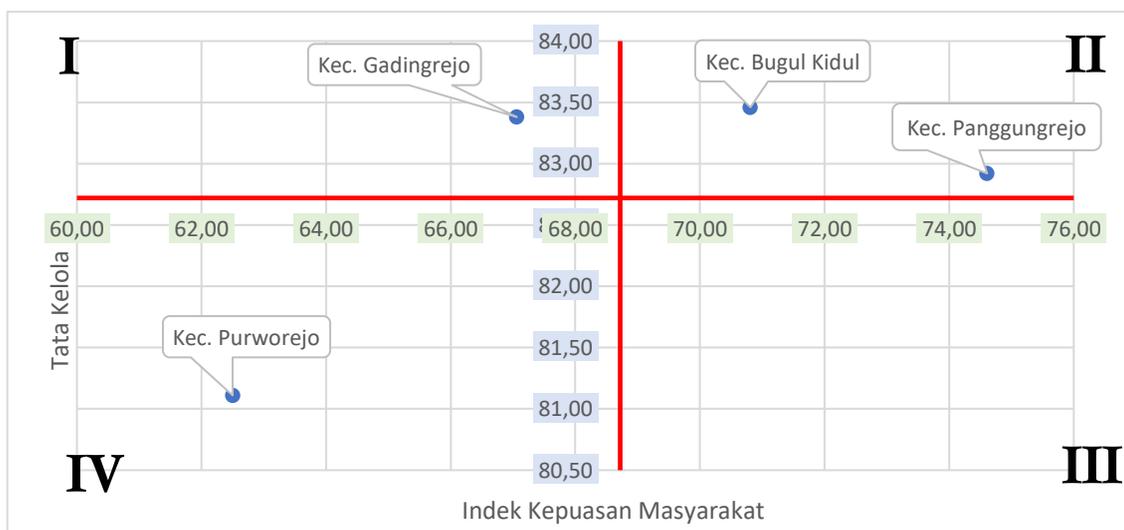
pelayanan kecamatan di Kota Pasuruan dapat dibaca melalui grafik berikut:



Gambar II. 78 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kota Pasuruan
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Capaian indikator IKM Kecamatan di Kota Pasuruan rata-rata memiliki rentang angka 82 sampai dengan 83,5. Kecamatan dengan capaian yang cukup stabil berada di atas kecamatan lainnya adalah kecamatan Bugul Kidul dengan trend capaian yang meningkat secara konsisten sejak tahun 2019 dengan capaian 82,75 hingga di tahun 2023 mencapai angka 83,50. Adapun Kecamatan Gadingrejo hanya memiliki capaian IKM pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, pada tahun 2021 capaian IKM Kecamatan Gadingrejo sebesar 82,10 sedangkan di tahun 2022 meningkat hingga angka 83,38 dan pada tahun 2023 kembali meningkat hingga 83,50. Kecamatan Panggungrejo memiliki capaian indikator dengan trend yang juga meningkat sejak tahun 2019 dengan capaian 82,75 hingga di tahun 2023 mencapai angka 82,90. Grafik capaian yang sangat fluktuatif terjadi di kecamatan Purworejo, dimana di tahun 2020 capaian IKM mengalami penurunan signifikan dari angka 81,23 menjadi 70,19 akan tetapi meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 81,46 dan di tahun 2022 menjadi 81,11 sedangkan tahun 2023 meningkat hingga 82,21.

Kedua capaian indikator di atas selanjutnya dapat diperbandingkan melalui gambar kuadran dengan titik tengah adalah hasil rata-rata capaian kedua indikator di Kecamatan di Kota Pasuruan, berikut hasil kuadran capaian indikator nilai tata kelola pemerintahan dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan di Kota Pasuruan pada tahun 2023:



Gambar II. 79 Kuadran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kota Pasuruan

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Grafik di atas dibagi menjadi 4 kuadran dimana masing-masing kuadran memiliki penilaian tersendiri, sebagaimana berikut:

Tabel II. 28 Cluster Permasalahan Menurut Kecamatan di Kota Pasuruan

Cluster Permasalahan	Kecamatan Panggungrejo	Kecamatan Gadingrejo	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Bugul Kidul
Ketentraman dan Ketertiban	Banyaknya gerobak PKL di trotoar di pinggir jalan sehingga mengganggu pejalan kaki.	Penyalahgunaan kost-kostan sebagai peredaran narkoba		Pencurian sepeda motor, Obat Terlarang
	Maraknya parkir liar yang mengganggu pengguna jalan.	Anak-anak punk		Banjir
		Balapan liar		
Pemberdayaan Masyarakat	Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di kelurahan			Stunting (gizi buruk) 10%
	Belum terbentuknya pokmas di kelurahan			layak anak masih belum 100% (bullying, perundungan, eksploitasi, pekerja anak)
Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Belum optimalnya pelayanan kependudukan melalui aplikasi yang terintegrasi			-
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengisian Survey Kepuasan Elektronik			
Sarana dan Prasarana	Ketidakpuasan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan, akibat karena seringkali			Kemiskinan (RTLH), ODF

Cluster Permasalahan	Kecamatan Panggungrejo	Kecamatan Gadingrejo	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Bugul Kidul
	aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan.			
	Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun.			Bansos belum tepat sasaran
	Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan			

Sumber: Kecamatan Kota Pasuruan, 2024

2.4.8. Unsur Pemerintahan Umum

A. Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesbangpol di Kota Pasuruan adalah bagian integral dari tugas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan sosial, serta kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, Kesbangpol memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat, dan elemen-elemen sosial lainnya. Salah satu peran utamanya adalah mempromosikan kerukunan dan harmoni sosial di tengah-tengah keragaman budaya, suku, dan agama.

Salah satu tugas utama Urusan Kesbangpol adalah memantau dan mengatasi potensi konflik sosial serta meminimalkan ketegangan politik di tingkat daerah. Ini melibatkan pemantauan terhadap perkembangan politik dan sosial, serta intervensi proaktif dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Kesbangpol juga berperan dalam memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agar dapat mencapai kesepakatan dan konsensus yang memajukan kepentingan bersama.

Selain itu, Urusan Kesbangpol di Kota Pasuruan juga mengelola program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk program-program pembinaan karakter, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat. Dengan cara ini, Kesbangpol berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Kesbangpol juga terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan aspek politik di daerah, termasuk pemilihan umum dan pemerintahan lokal. Kesbangpol memastikan bahwa proses politik berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, mereka berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan pentingnya berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Beberapa isu yang masih menjadi perhatian pada pelaksanaan urusan kesbangpol di Kota Pasuruan sebagai berikut (1) Belum optimalnya tingkat koordinasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban; (2) Gejolak yang terjadi pada masyarakat Kota

Pasuruan akibat dari tahun 2024 yang merupakan tahun politik dimana tahun tersebut diadakan PEMILU serentak se- Indonesia.; (3) Angka kriminalitas dan unjuk rasa/demonstrasi yang masih terjadi; dan (4) Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang Ideologi Pancasila.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Tahapan pembahasan evaluasi pencapaian RPJMD Kota Pasuruan antara periode 2005-2025 perlu dilakukan dikarenakan RPJPD Kota Pasuruan berbentuk kualitatif. RPJPD dengan bentuk kualitatif tidak memiliki sasaran pokok yang disertai indikator yang dapat diukur (*measurable*) serta target sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan capaian RPJPD, untuk itu sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/Sj tentang Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 maka untuk dapat memperoleh gambaran pencapaian target kinerja RPJPD setiap periodenya diperlukan analisis tingkat ketercapaian RPJMD masing-masing periode. Sehingga gambaran atau tolok ukur pencapaian kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dapat disimpulkan melalui pembahasan dalam sub bab ini.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah perodesasi RPJMD untuk beberapa daerah, yang mana satu diantaranya ialah Kota Pasuruan tidak 100% sama dengan perodesasi tahapan RPJPD seperti yang telah dijelaskan. Sebagai contoh perodesasi atau tahapan pertama RPJPD adalah tahun 2005-2010 sedangkan RPJMD Kota Pasuruan tahun 2006-2010, periodisasi atau tahapan kedua RPJPD adalah tahun 2011-2015 sedangkan RPJMD Kota Pasuruan tahap kedua tahun 2010-2015, perodesasi atau tahapan RPJPD tahapan ketiga adalah tahun 2015-2020 sedangkan RPJMD Kota Pasuruan tahapan ketiga tahun 2016-2021, terakhir tahapan keempat RPJPD adalah tahun 2021-2024 sedangkan RPJMD Kota Pasuruan tahapan terakhir yang sekarang *on going* adalah tahun 2021-2026. Terjadinya perbedaan perodesasi RPJPD dengan RPJMD dirasa wajar, dikarenakan umur atau tahun RPJMD selalu mengikuti tahun dilantiknya kepala daerah, yang mana dengan format Pilkada yang lama, tidak dilakukan serentak dan beriringan dengan perodesasi RPJPD. Ke depannya dengan adanya Pilkada serentak maka perodesasi RPJPD 2025-2045 nantinya akan sama dengan tahun perencanaan jangka menengahnya atau RPJMD.

Setidaknya dalam dokumen evaluasi RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 terdapat setidaknya 8 rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 ialah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang belum selesai dan meningkatkan aksesibilitas kota. Fokus pada pembangunan jalan raya, jaringan transportasi, sistem air bersih dan sanitasi, serta pengembangan infrastruktur telekomunikasi
2. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku usaha lokal, termasuk pengembangan industri kreatif, sektor mikro, kecil, dan menengah, serta pemanfaatan teknologi digital.

3. Mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan, inklusi sosial, dan pengentasan ketimpangan. Melalui program pemberdayaan ekonomi, akses layanan dasar, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperluas akses, meningkatkan kualitas guru dan fasilitas sekolah, serta memperkuat pendidikan kejuruan dan vokasional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Memperkuat kerjasama antara industri dan institusi pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.
5. Melakukan upaya konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Mengembangkan kebijakan perlindungan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau.
6. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Memperkuat peran kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
7. Meningkatkan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana dengan memperkuat sistem peringatan dini, mitigasi bencana, dan rencana tanggap darurat. Melakukan pemetaan risiko bencana, pelatihan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana.
8. Mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengembangan smart city dan e-government untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pengelolaan data, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2.5.1. Evaluasi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2006 – 2010

Dengan memperhatikan analisis potensi, faktor-faktor strategis serta perspektif ke depan, maka Visi Kota Pasuruan dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Pasuruan Sebagai Kota Perdagangan, Industri, Dan Jasa Berlandaskan Pada Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, Berbudi Luhur, Dan Sejahtera Lahir Batin Yang Didukung Dengan Suasana Dan Kondisi Yang Damai, Demokratis, Sadar Hukum Dan Lingkungan, Memiliki Etos Kerja Yang Tinggi Serta Berdisiplin”

Sebagai upaya untuk mencapai Misi Kota Pasuruan Tahun 2006-2010, berikut diuraikan misi serta sasaran Kota Pasuruan Tahun 2006-2010:

- Misi 1 Mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang bertanggung jawab serta berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan tentram;

Sasaran: Meningkatnya kualitas penerapan prinsip - prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- Misi 2 Mewujudkan dan melaksanakan otonomi daerah yang dilandasi oleh pembangunan Kota Pasuruan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya alam, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*clean government* dan *good governance*);

Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan Kota Pasuruan;

- Misi 3 Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan tegaknya supremasi hukum;

Sasaran: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta kependudukan;

- Misi 4 Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kota Pasuruan, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, memiliki etos kerja, berdaya saing, dan berwawasan ramah lingkungan;

Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat lapisan bawah dan masyarakat pesisir;

- Misi 5 Mewujudkan pengelolaan potensi dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah;

Sasaran: Meningkatnya efektivitas penggalan potensi dan penggunaan sumber daya Kota Pasuruan; Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

- Misi 6 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat lapisan bawah;

Sasaran: Berkembangnya sektor perdagangan, industri dan jasa unggulan Kota Pasuruan

- Misi 7 Mewujudkan masyarakat Kota Pasuruan sebagai manusia taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berwawasan luas, luwes, terbuka, berakhlak, toleran, rukun dan damai dalam nuansa kebhinekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan;

Periodesasi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2006-2010 secara umum tidak dapat dikatakan ideal. Hal tersebut dikarenakan RPJMD yang mana seharusnya disertai dengan tujuan dan sasaran serta indikator dan target sebagai tolok ukur keberhasilannya, tidak terdapat

pada periode RPJMD ini di Kota Pasuruan. Artinya adalah pada pembahasan sub bab ini yang mana seharusnya fokus terhadap capaian kinerja Kota Pasuruan yang dihitung melalui target akhir periode RPJMD (Tahun 2010) terhadap realisasi pada tahun yang sama tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dilakukan dikarenakan diidentifikasi tingkat ketercapaian kinerja Kota Pasuruan pada perodesasi RPJMD Tahun 2006-2010 tidak dapat dilakukan. Terlepas dari itu, kuantifikasi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2006-2010 yang bersifat kualitatif tetap dilakukan, meskipun berdasarkan hasil telaah pada periode ini sangat minim ketersediaan data kinerja yang tentunya representative terhadap misi dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan tahun 2006-2010. Berikut diuraikan telaah kuantifikasi kinerja Kota Pasuruan dalam periode RPJMD tahun 2006-2010:

Tabel II. 29 Kuantifikasi Kinerja Kota Pasuruan dalam periode RPJMD Tahun 2006-2010

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator
PERIODESASI : 2006-2010		
Visi : Terwujudnya kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri, dan Jasa berlandaskan pada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, dan sejahtera lahir batin yang didukung dengan suasana dan kondisi yang damai, demokratis, sadar hukum dan lingkungan, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.		
1. Mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang bertanggung jawab serta berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan tentram.	Meningkatnya kualitas penerapan prinsip - prinsip <i>Good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
		Nilai SAKIP
		Opini BPK Terhadap LKPD
		Level Maturitas SPIP
		Indeks Profesionalisme Aparatur
		Indeks SPBE
		Nilai IKM
2. Mewujudkan dan melaksanakan otonomi daerah yang dilandasi oleh pembangunan Kota Pasuruan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya alam, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (clean government dan good governance).	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan Kota Pasuruan	Pertumbuhan Ekonomi
		Indeks Gini
		Tingkat Kemiskinan
		Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri
		Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan
		Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa
		Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan
		Indeks keparahan kemiskinan
Indeks kedalaman kemiskinan		
3. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta kependudukan	Indeks Pembangunan Manusia

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator
PERIODESASI : 2006-2010		
kepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan tegaknya supremasi hukum.		Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Harapan Hidup Pengeluaran Perkapita Indeks Pembangunan Gender
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kota Pasuruan, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, memiliki etos kerja, berdaya saing, dan berwawasan ramah lingkungan.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat lapisan bawah dan masyarakat pesisir	Gini Rasio Angka Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase PSKS PDRB Perkapita Rasio PAD terhadap Pendapatan
5. Mewujudkan pengelolaan potensi dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Skor Penilai Adipura Kualitas Udara di perkotaan Kualitas Air Sungai Rasio Produksi Sampah Tertangani
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat lapisan bawah.	Berkembangnya sektor perdagangan, industri dan jasa unggulan Kota Pasuruan	Jumlah Industri Kecil Jumlah Pelaku Usaha Kecil
7. Mewujudkan masyarakat Kota Pasuruan sebagai manusia taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berwawasan luas, luwes, terbuka, berakhlak, toleran, rukun dan damai dalam nuansa kebhinekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan	Kejadian Perselisihan antar umat beragama Kejadian Kerusuhan berlatar belakang politik Kejadian Kerusuhan berlatar belakang SARA Angka Kriminalitas Narkoba

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Upaya mengkuantifikasikan RPJMD Kota Pasuruan yang bersifat kualitatif di atas dilakukan dengan mencoba untuk mendaratkan indikator sesuai dengan bunyi uraian sasaran dilakukan supaya kinerja capaian Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2006-2009 dapat diukur lebih baik. Berikut merupakan gambaran detail kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2006-2009 sebagai berikut:

Tabel II. 30 Detail Kinerja Kota Pasuruan dalam periode RPJMD Tahun 2006-2010

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2010)	Realisasi Akhir Periode (2010)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2006-2010						
Visi : Terwujudnya kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri, dan Jasa berlandaskan pada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, dan sejahtera lahir batin yang didukung dengan suasana dan kondisi yang damai, demokratis, sadar hukum dan lingkungan, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.						
1. Mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang bertanggung jawab serta berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan tentram.	Meningkatnya kualitas penerapan prinsip - prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK Terhadap LKPD	WDP	WTP	WDP	50%
2. Mewujudkan dan melaksanakan otonomi daerah yang dilandasi oleh pembangunan Kota Pasuruan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya alam, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (clean government dan good governance).	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan Kota Pasuruan	Pertumbuhan Ekonomi	5,65	5,77	5,76	99,83%
		Indeks Gini	0,29	0,31	0,27	100,00%
		Tingkat Kemiskinan	13,71	9,71	9	100,00%
		Kontribusi Perdagangan, hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi	34,99	36,12	35,48	98,23%
		Kontribusi Industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	18,52	18,92	16,49	87,16%
3. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan tegaknya supremasi hukum.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta kependudukan	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	72,38	69,69	96,28%
		Indeks Pendidikan	82,71	83,91	83,94	100,00%
		Angka Melek Huruf	95,6	96,6	96,41	99,80%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,54	8,74	8,85	100,00%
		Indeks Kesehatan	0,711	0,715	0,713	99,72%
		Angka Harapan Hidup	66,2	66,4	66,37	99,95%
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi Kota Pasuruan, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, memiliki etos kerja, berdaya saing, dan berwawasan ramah lingkungan.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat lapisan bawah dan masyarakat pesisir	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13,52	7	7,23	100,00%
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,9	5,3	5,15	97,17%
		Kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan	4,65	4,08	4,03	98,77%

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2010)	Realisasi Akhir Periode (2010)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2006-2010						
		dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi				
		Nilai produksi perikanan	8.328.722.000,00	9.994.466.400,00	9.479.330.000,00	94,85%
		Produksi Perikanan	1284,01	1540,81	1432,8	92,99%
		Produksi tanaman padi	210.200,70	252.240,84	213.857,50	84,78%
5. Mewujudkan pengelolaan potensi dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Skor Penilaian Adipura	62,5	71,88	72,59	100,00%
		Kualitas udara diperkotaan	baik	baik	baik	100%
		Kualitas air sungai	tercemar ringan	tercemar ringan	tercemar ringan	100%
		Rasio produksi sampah yang tertangani	89,72%	93,72%	91,59%	97,73%
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat lapisan bawah.	Berkembangnya sektor perdagangan, industri dan jasa unggulan Kota Pasuruan	Jumlah industri kecil	3.378,00	4.053,00	3.473,00	85,69%
		Jumlah pelaku usaha kecil	873	960	889	92,60%
7. Mewujudkan masyarakat Kota Pasuruan sebagai manusia taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berwawasan luas, luwes, terbuka, berakhlak, toleran, rukun dan damai dalam nuansa kebhinekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan	Kejadian Perselisihan antar umat beragama	0	0	0	100%
		Kejadian Kerusuhan berlatar belakang politik	0	0	0	100%
		Kejadian Kerusuhan berlatar belakang SARA	0	0	0	100%
		Angka Kriminalitas Narkoba	9	7	81	8,64%
		Angka Kriminalitas Non Narkoba dan Non Perjudian	472	450	561	80,21%
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2005-2010						91,88%
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

2.5.2. Evaluasi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2010-2015

Visi dan Misi Kota Pasuruan periode 2010-2015 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota terpilih selama masa bakti tahun 2010-2015 serta bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan 2005-2025. Dengan memperhatikan analisis potensi, faktor-faktor strategis serta perspektif ke depan, maka Visi Kota Pasuruan dirumuskan sebagai berikut:

**“KOTA PASURUAN SEBAGAI KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
JASA YANG DILANDASI IMAN DAN TAQWA MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2010–2015 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah:

Misi 1 Meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan;

Misi pertama pembangunan Kota Pasuruan pada tahun 2010-2015 berfokus pada layanan sektor pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Tujuan ini memiliki sasaran pembangunan terhadap meningkatnya proporsi penduduk usia sekolah yang menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Misi 2 Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

Misi kedua pembangunan Kota Pasuruan pada tahun 2010-2015 berfokus pada peningkatan layanan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama ibu dan anak. Tujuan ini memiliki sasaran pembangunan terhadap meningkatnya Angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kota Pasuruan.

Misi 3 Menciptakan kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif

Misi ketiga pembangunan Kota Pasuruan pada tahun 2010-2015 ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja, melalui penguatan peran *tradable sectors* yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional. Tujuan ini memiliki sasaran pembangunan terhadap meningkatnya proporsi angkatan kerja mencari kerja yang mendapatkan pekerjaan, dan disertai dengan penurunan proporsi penduduk miskin.

Misi 4 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak

Misi keempat pembangunan Kota Pasuruan pada tahun 2010-2015 berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dan indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan. Tujuan ini memiliki dua sasaran pembangunan yaitu:

- a. Meningkatnya indeks pembangunan manusia dan menurunnya proporsi penduduk miskin
- b. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, yang bertumpu pada *tradable* sectors

Misi 5 Menyediakan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar, serta tata ruang/ lingkungan yang nyaman

Misi kelima pembangunan Kota Pasuruan pada tahun 2010-2015 berfokus pada peningkatan infrastruktur kota dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang layak untuk mendukung pembangunan.
- b. Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang mendukung terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup, bagi pembangunan berkelanjutan.
- c. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur secara layak
- d. Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau yang menunjang perbaikan status lingkungan hidup

Misi 6 Mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik

Misi keenam pembangunan Kota Pasuruan pada tahun 2010-2015 berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Kota Pasuruan dalam pelayanan publik, yang mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan. Tujuan ini memiliki sasaran pembangunan terhadap meningkatnya proporsi SKPD yang memiliki dan mengaplikasikan standar pelayanan minimal (SPM), *standart operating procedure* (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP)..

Misi 7 Meningkatkan kualitas iman dan taqwa

Misi ketujuh pembangunan Kota Pasuruan pada tahun 2010-2015 memiliki tujuan pembangunan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam suasana kehidupan yang demokratis serta meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini memiliki sasaran pembangunan terhadap meningkatnya kualitas harmonisasi sosial masyarakat.

Sama halnya dengan periode sebelumnya, persoalan utama pada periode RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 ialah pada periode ini RPJMD bersifat kualitatif dan tanpa adanya interpretasi indikator dan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan RPJMD. Periodesasi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 secara umum tidak dapat dikatakan ideal. Artinya adalah pada pembahasan sub bab ini yang mana seharusnya fokus terhadap capaian kinerja Kota Pasuruan yang dihitung melalui target akhir periode RPJMD (Tahun 2015) terhadap realisasi pada tahun yang sama tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dilakukan dikarenakan diidentifikasi tingkat ketercapaian kinerja Kota Pasuruan pada periodesasi RPJMD Tahun 2010-2015 tidak dapat dilakukan. Terlepas dari itu, kuantifikasi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2010-2015 yang bersifat kualitatif tetap dilakukan, meskipun berdasarkan hasil

telaah pada periode ini sangat minim ketersediaan data kinerja yang tentunya *representative* terhadap misi dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan tahun 2010-2015.

Berikut diuraikan telaah kuantifikasi kinerja Kota Pasuruan dalam periode RPJMD tahun 2010-2015.

Tabel II. 31 Kuantifikasi Kinerja Kota Pasuruan dalam periode RPJMD Tahun 2010-2015

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator
Periodesasi : 2010-2015		
Visi : Kota Pasuruan sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang dilandasi Iman dan Taqwa menuju Masyarakat Sejahtera		
Misi 1: Meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan	Tujuan 1: Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah	Indeks pendidikan
	Sasaran 1: Meningkatnya proporsi penduduk usia sekolah yang menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah	APK jenjang pendidikan PAUD
		APM jenjang pendidikan SD + paket A
		APM jenjang pendidikan SMP + paket B
		Rata-rata lama sekolah
		Harapan lama sekolah
Misi 2: Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Tujuan 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama ibu dan anak	Indeks Kesehatan
	Sasaran 1: Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Kota Pasuruan	Angka Harapan Hidup
Misi 3: Menciptakan kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif	Tujuan 1: Meningkatkan kesempatan kerja, melalui penguatan peran tradable sectors yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Sasaran 1: Meningkatnya proporsi angkatan kerja mencari kerja yang mendapatkan pekerjaan, dan disertai dengan penurunan proporsi penduduk miskin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Misi 4: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dan indeks	Indeks Pembangunan Manusia

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator
Periodesasi : 2010-2015		
	pembangunan manusia di Kota Pasuruan	
	Sasaran 1: Meningkatnya indeks pembangunan manusia dan menurunnya proporsi penduduk miskin	Angka Kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan
	Sasaran 2: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, yang bertumpu pada <i>tradable sectors</i>	Pertumbuhan Ekonomi Gini Rasio
Misi 5: Menyediakan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar, serta tata ruang/ lingkungan yang nyaman	Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang layak untuk mendukung pembangunan	Rasio kecukupan infrastruktur
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur secara layak	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap
		Cakupan layanan air bersih
		Persentase kawasan kumuh
Tujuan 2: Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang mendukung terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup, bagi pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	
Sasaran 2: Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau yang menunjang perbaikan status lingkungan hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau	
Misi 6: Mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik;	Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah kota Pasuruan dalam pelayanan publik, yang mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 1: Meningkatnya proporsi SKPD yang memiliki dan mengaplikasikan standar pelayanan minimal (SPM), standard operating procedure (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP	Predikat SAKIP kota
		Maturitas SPIP
		Indeks Profesionalisme Aparatur
	Opini BPK atas LKD	
	Indeks kepuasan masyarakat	
Misi 7: Meningkatkan kualitas iman dan taqwa.	Tujuan 1: Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam suasana kehidupan yang demokratis	Indeks Stabilitas
		Indeks Toleransi

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator
Periodesasi : 2010-2015		
	Tujuan 2: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Modal Sosial
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas harmonisasi sosial masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik di masyarakat

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Upaya mengkuantifikasikan RPJMD Kota Pasuruan yang bersifat kualitatif di atas dengan mencoba untuk mendaratkan indikator sesuai dengan bunyi uraian sasaran mengalami kendala bahwa minimnya ketersediaan data pada periode yang bersangkutan. Periodesasi pertama RPJMD Kota Pasuruan tidak dapat diidentifikasi predikat ketercapaiannya serta interpretasi predikat capaiannya.

Tabel II. 32 Detail Kinerja Kota Pasuruan dalam periode RPJMD Tahun 2010-2015

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2009)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2015)	Realisasi Akhir Periode (2015)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2010-2015						
Visi : Kota Pasuruan sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang dilandasi Iman dan Taqwa menuju Masyarakat Sejahtera						
Misi 1: Meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan	Tujuan 1: Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah	Indeks pendidikan	83.94	86.2	85.12	98.75%
	Sasaran 1: Meningkatnya proporsi penduduk usia sekolah yang menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata lama sekolah	8.96	9.03	9.1	100.00%
		Angka partisipasi sekolah dasar	97.34	116.25	99.53	85.62%
		Rasio ketersediaan sekolah dasar	342	260	250	96.15%
		Rasio murid/guru sekolah dasar	16%	15%	18%	100.00%
		Angka partisipasi sekolah menengah	97.34	70	98.18	100.00%
		Rasio ketersediaan sekolah menengah	376	358	342	95.53%
		Rasio murid/guru sekolah menengah	13%	14%	14%	100.00%
Misi 2: Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Tujuan 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama ibu dan anak	Rasio Posyandu	14.29	14.38	16.84	100.00%
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	23.38	11.04	24.89	100.00%
		Rasio rumah sakit	0.053	0.06	0.05	83.33%
		Rasio dokter umum	28.16	35	26.18	74.80%
		Rasio tenaga kesehatan	10.86	15	15.26	100.00%
	Sasaran 1: Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Kota Pasuruan	Angka Harapan Hidup	66.37	69.76	70.84	100.00%
Misi 3: Menciptakan kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif	Tujuan 1: Meningkatkan kesempatan kerja, melalui penguatan peran tradable sectors yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional	Rasio Penduduk yang bekerja	95.08	92.01	93.91	100.00%

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2009)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2015)	Realisasi Akhir Periode (2015)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2010-2015						
	Sasaran 1: Meningkatnya proporsi angkatan kerja mencari kerja yang mendapatkan pekerjaan, dan disertai dengan penurunan proporsi penduduk miskin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.29	66.45	67.24	100.00%
Misi 4: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dan indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia	69.69	75.7	73.78	97.46%
	Sasaran 1: Meningkatnya indeks pembangunan manusia dan menurunnya proporsi penduduk miskin	Rasio penduduk miskin	8.4	7.45	7.52	99.07%
	Sasaran 2: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, yang bertumpu pada tradable sectors	Pertumbuhan Ekonomi	5.76	6.71	5.93	88.38%
		Laju Inflasi PDRB	5.66	5.31	5.5	96.55%
Misi 5: Menyediakan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar, serta tata ruang/ lingkungan yang nyaman	Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang layak untuk mendukung pembangunan	Kesesuaian tata ruang RT RW	Kurang	Baik	Baik	100.00%
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur secara layak	Kualitas fasilitas publik	Kurang	Baik	Baik	100.00%
		Proporsi jalan dalam kondisi baik	71.56	97.8	63.58	65.01%
		Proporsi jembatan dalam kondisi baik	88.12	93.14	93.12	99.98%
		Rasio kawasan kumuh	3.27	4.25	10.25	100.00%
		Kondisi drainase kondisi lancar	83.74	92.92	84.69	91.14%
		Rasio rumah tinggal bersanitasi	73.28	71.82	86.87	100.00%
		Tujuan 2: Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang mendukung terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup, bagi pembangunan berkelanjutan	Skor penilaian Adipura	74.05	74.89	75.15
	Sasaran 2: Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau yang menunjang perbaikan status lingkungan hidup	Proporsi penanganan sampah	78.45	85.15	63.01	74.00%
		Proporsi ruang terbuka hijau	20.02	22.97	20.07	87.37%

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2009)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2015)	Realisasi Akhir Periode (2015)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2010-2015						
Misi 6: Mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik;	Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah kota Pasuruan dalam pelayanan publik, yang mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan	Opini BPK atas LKD	WDP	WDP	WDP	100.00%
Misi 7: Meningkatkan kualitas iman dan taqwa.	Tujuan 1: Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam suasana kehidupan yang demokratis	Rasio Pol PP	4.07	10	4.58	45.80%
		Rasio Petugas Linmas	40.07	34	44.8	100.00%
	Tujuan 2: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	1.98	2	2.09	95.69%
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas harmonisasi sosial masyarakat	Jumlah demonstrasi	9	8	8	100.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2010-2015						93.56%
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

2.5.3. Evaluasi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

Periode perencanaan pembangunan 2016–2021 ini, dalam perspektif tahapan pembangunan 5 tahunan, di RPJPD Kota Pasuruan 2005–2025 memasuki tahap 5 tahun ke-3, sebagai rangkaian untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, yakni: terwujudnya Kota Pasuruan sebagai kota perniagaan menuju masyarakat madani dan sejahtera. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-3 ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari tahap pertama dan kedua, yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pendayagunaan kapasitas sarana dan prasarana, serta fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing daerah.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kota Pasuruan, sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Pasuruan 2005–2025, berbagai keberhasilan dan permasalahan pembangunan periode 2010–2015 yang signifikan, isu-isu strategis dalam 5 tahun ke depan, 2016–2021, sekaligus untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kota Pasuruan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2016–2021, yakni:

**“KOTA PASURUAN LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA
SAING DENGAN PERDAGANGAN, JASA DAN INDUSTRI”**

Untuk mewujudkan Visi Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2016–2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan layanan kualitas pendidikan, yang mengarah pada pendidikan yang berkeadilan bagi semua warga. Peningkatan layanan kualitas pendidikan dicapai melalui penekanan pada fokus berikut:

- 1) Pembebasan biaya pendidikan pada berbagai jenjang,
- 2) Pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama laboratorium dan perpustakaan; serta
- 4) Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.

Tujuan dari Misi ini adalah “Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter”. Dengan tiga sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas

2) Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau dan

3) Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Misi 2 Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi kesehatan ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yang mengarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut:

1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan puskesmas pembantu bagi penduduk;

2) Penambahan jam layanan kesehatan puskesmas, yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai;

3) Peningkatan kualitas sdm tenaga medis dan kesehatan, khususnya di puskesmas dan jaringannya;

4) Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga miskin;

5) Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan sinergitas posyandu, pos pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan bina keluarga balita (BKB) di setiap kelurahan; serta

6) Peningkatan kinerja manajemen dan layanan RSUD dr. Soedarsono.

Dalam mewujudkan terealisasinya misi tersebut maka terdapat tujuan yang ada didalamnya yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat”. Serta memiliki beberapa sasaran diantaranya yaitu:

1) Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak

2) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

3) Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan Kesehatan

4) Menurunnya tingkat pengangguran

Misi 3 Menciptakan Kesempatan Kerja dan Kualitas Iklim usaha yang Produktif

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui sisi peningkatan ketenagakerjaan dan iklim usaha, yang mengarah pada peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha dicapai melalui penekanan pada fokus berikut:

1) pemerataan kesempatan memperoleh pelatihan ketenagakerjaan bagi pengangguran,

- 2) mengembangkan jejaring kerja untuk pemagangan dan penempatan kerja;
- 3) mengembangkan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru; serta
- 4) meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru.

Dalam mengimplementasikan visi ketiga dari periode RPJD di tahun berlaku tersebut maka ditetapkan suatu tujuan “Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap kehidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi”. Dan juga dijabarkan menjadi beberapa sasaran yaitu diantaranya:

- 1) Menurunnya tingkat pengangguran
- 2) Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
- 3) Menurunnya angka kemiskinan
- 4) Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 5) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan
- 6) Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
- 7) Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga
- 8) Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan

Misi 4 Meningkatkan Pengembangan Perdagangan Jasa dan Industri untuk

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi ekonomi ditempuh melalui penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri untuk mendukung pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), secara mandiri dan berdaya saing. Peran ini utamanya diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang bergerak di sektor-sektor ekonomi utama. Penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri dicapai melalui penekanan pada fokus berikut:

- 1) percepatan pemecahan masalah pasokan bahan baku kayu yang dihadapi oleh IKM mebel,
- 2) peningkatan upaya fasilitasi standarisasi produk IKM, terutama produk mebel dan logam,
- 3) peningkatan kelayakan sarana dan prasarana pasar tradisional; serta
- 4) penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

Tujuan dari penjabaran misi ke-4 ini adalah “Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif”. Dan juga dijabarkan melalui beberapa sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian
- 2) Meningkatnya kinerja perdagangan
- 3) Meningkatnya upaya perlindungan konsumen
- 4) Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga
- 5) Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan
- 6) Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)
- 7) Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat
- 8) Meningkatnya penyerapan pangan

Misi 5 Meningkatkan Infrastruktur Kota, Sarana dan Prasarana dasar serta Pemanfaatan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan

Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat secara Layak ditempuh melalui sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan, kualitas dan perbaikan infrastruktur akibat bencana dan penataan ruang yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut:

- 1) pemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik,
- 2) percepatan penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara,
- 3) peningkatan cakupan layanan sanitasi, persampahan dan pemakaman,
- 4) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, antara lain melalui: pembangunan ekowisata mangrove, dan taman pendidikan;
- 5) peningkatan proporsi dan kualitas ruang terbuka hijau; serta
- 6) peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan.

Tujuan dari misi tersebut adalah “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. Melalui tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa sasaran- sasaran diantaranya yaitu:

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan drainase
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak
- 3) Meningkatnya upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
- 5) Meningkatnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan

Misi 6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang Baik

Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi birokrasi dan pelayanan publik, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

Untuk dapat mencapai target di dalam misi ke- 6 tersebut, maka diperlukan tujuan dari penjabaran tujuan “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan” dan adanya beberapa sasaran yang menunjang terlaksananya tujuan yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Misi 7 Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa, Berbudaya yang diliputi Harmoni Sosial dan Kesalehan Sosial

Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan, yang mengarah pada terbangunnya kohesi sosial. Kohesi sosial adalah kondisi kehidupan bermasyarakat yang rukun agawe guyub'dengan modal sosial (*social capital*), antara lain terejawantah sebagai nilai-nilai kearifan lokal, yang menjadi perekatnya. Misi ini mendukung perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi kohesi sosial, mengingat tanpa kerukunan (*harmoni sosial*) dan keguyuban (*kesalehan sosial*), mustahil pembangunan dapat terlaksana.

Dalam pencapaian misi dari Periode RPJMD periode 2016- 2021 khususnya pada misi ke- tujuh ini maka adanya tujuan yaitu “Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat”. Dengan tujuan tersebut maka dijabarkan menjadi beberapa sasaran yaitu diantaranya:

- 1) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- 2) Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib
- 3) Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan

- 5) Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja Evaluasi Kota Pasuruan tahun 2016-2021 beserta interpretasinya:

Tabel II. 33 Detail Kinerja Kota Pasuruan dalam Periode RPJMD Tahun 2016-2021

	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Realisasi Akhir Periode (2021)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2016-2021						
Visi : Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri						
Misi 1 : Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau	Tujuan 1 : Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Indeks pendidikan	85.12	71.73	69	97,18%
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	APK jenjang pendidikan PAUD	81.09	84.56	98.91	100.00%
		APM jenjang pendidikan SD + paket A	109.95	100	96.86	96.86%
		APM jenjang pendidikan SMP + paket B	77.93	89.32	78.53	87.92%
		Rata-rata lama sekolah	9.1	12	9.33	77.75%
		Harapan lama sekolah	N/A	13.67	13.63	99.71%
		Nilai rata-rata ujian jenjang pendidikan SD	N/A	7.2	N/A	N/A
		Nilai rata-rata ujian jenjang pendidikan SMP	N/A	8	N/A	N/A
Misi 2 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	69.85	81.79	N/A	N/A
	Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	66.6	72.25	71.6	99.10%
Misi 3 : Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha	Tingkat pengangguran terbuka	6.07	5.71	6.23	91.65%
	Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67.81	67.78	71.66	100.00%
Misi 4 : Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak	Tujuan 4 : Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial	Pertumbuhan Ekonomi	5.93	6.07	3.64	59.97%
		Indeks Gini	0.3	0.31	0.35	88.57%
		Tingkat Kemiskinan	7.52	7.37	6.88	100.00%

	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Realisasi Akhir Periode (2021)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2016-2021						
	Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	-0.047	12.09	3.00	24.81%
		Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	-0.285	11.78	3.00	25.47
		Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	0	13.58	2,43	17,92
		Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	-2.22	9.49	-2,48	-26,13
	Sasaran 2 : Menurunnya kemiskinan	Indeks keparahan kemiskinan	0.26	0.21	0.27	77.78%
		Indeks kedalaman kemiskinan	1.17	1.21	1.15	100.00%
Misi 5 : Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Tujuan 5 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Rasio kecukupan infrastruktur	N/A	70.83	N/A	
		Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	N/A	88.83	71.8
		Cakupan layanan air bersih	N/A	100	87.49	87.49%
		Cakupan layanan sanitasi	86.87	100	88.74	88.74%
Misi 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Tujuan 6 : Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Persentase Ruang Terbuka Hijau	22.97	24.22	25	100.00%
		Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	77.01	62.19	80.76%
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	54.67	67.3	68.38	100.00%
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat SAKIP kota	CC	A	B	30%
		Maturitas SPIP	N/A	4	2	50.00%
		Opini BPK atas LKD	WDP	WTP	WTP	100%

	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2015)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Realisasi Akhir Periode (2021)	Capaian Kinerja RPJMD
Periodesasi : 2016-2021						
		Indeks kepuasan masyarakat	N/A	80.06	79.17	98.89%
	Sasaran 3 : Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	N/A	17.2	13.11	76.22%
Misi 7 : Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial	Tujuan 7 : Mengembangkan aktualisasi nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Modal Sosial	N/A	54.38	N/A	N/A
	Sasaran 1 : Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik di masyarakat	N/A	2.5	N/A	N/A
	Sasaran 2 : Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	N/A	69.17	96	138,79%
		Persentase bangunan dan cagar budaya yang lestari	N/A	13.24	61,54	464,80%
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2016-2021						86.13%
Predikat Kinerja						Tinggi

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

2.5.4. Evaluasi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Pasuruan yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Pasuruan, maka Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yakni:

PASURUAN KOTA MADINAH
“MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA”

Berikut merupakan poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:



Gambar II. 80 Poin-Poin Visi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan visi dari RPJMD kota tersebut, terdapat beberapa misi yang mendukung visi didalamnya, yaitu:

1. Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan;

Sebagai upaya untuk mencapai misi 1, maka terdapat tujuan dan sasaran pembangunan yaitu untuk tujuannya adalah Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal, didukung dengan sasaran untuk mencapai tujuan

tersebut adalah Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:

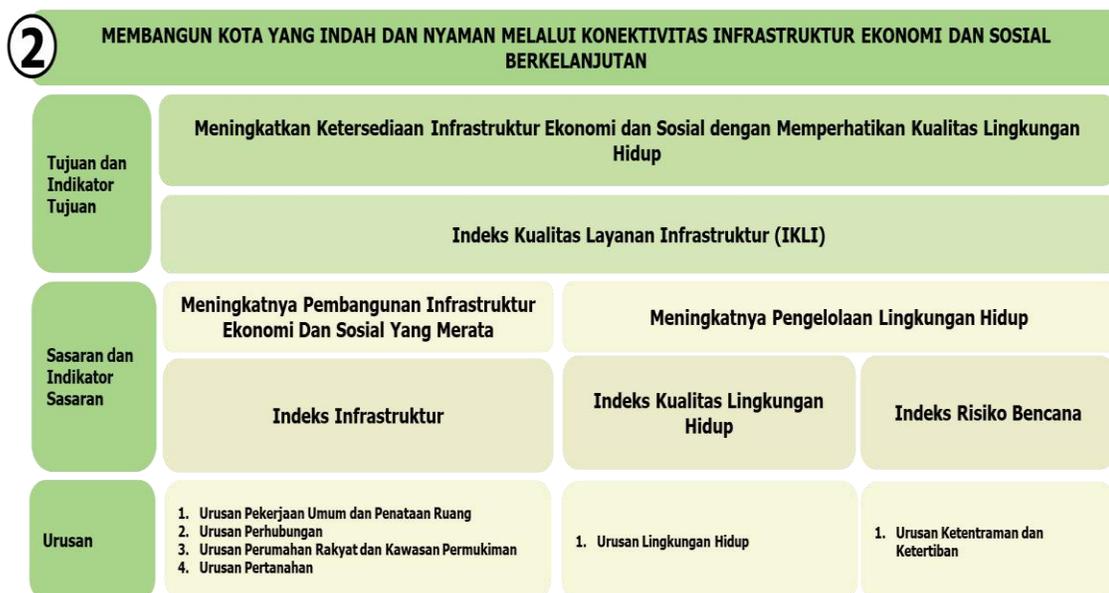


Gambar II. 81 Cascading Misi 1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

2. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan;

Sebagai upaya untuk mewujudkan misi 2 ini, terdapat tujuan dan sasaran untuk mencapainya. Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup. Didalam tujuan ini terdapat dua sasaran yang mendukung dalam pencapaian tujuannya, yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata dan Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar II. 82 Cascading Misi 2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
 Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata;

Pada misi 3 ini, terdapat tujuan yang mendukung pencapaian misi ini. Terdapat dua tujuan yang di dalam misi ini yaitu yang pertama Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran yang mendukung tujuan ini adalah Meningkatkan Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan, Meningkatkan Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Meningkatkan Daya Beli Masyarakat, dan Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan. Sedangkan tujuan kedua yang mendukung misi ini adalah mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis dengan didukung oleh sasarnya yaitu Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat, Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama, serta Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar II. 83 Cascading Misi 3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

4. Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif.

Pada misi ke 4 ini, didukung oleh tujuan yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan di dalam misi ini memiliki sasaran yang mendukung tercapainya tujuan yang lalu misi ke-4 ini juga akan tercapai, yang sasaran tersebut antara lain yaitu Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional dan Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar II. 84 Cascading Misi 4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Visi dan Misi Kota Pasuruan pada periode tersebut yang telah diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran, serta ditentukan indikator dan targetnya, sehingga capaian atau keberhasilan visi dan misi dapat direpresentasikan. Berikut merupakan uraian detail kinerja RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel II. 34 Detail Kinerja Kota Pasuruan dalam Periode RPJMD Tahun 2021-2026

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD (Akhir Periode 2026)
Periodesasi : 2021-2026						
Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Gini Rasio	0.3	0.3	0.36	83.33%
		Angka Kemiskinan	6.66	4.8	6.37	75.35%
		Pertumbuhan Ekonomi	-4.33	5.6	6.22	100.00%
	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.33	5.1	6.18	63.27%
		Persentase PPKS	34.05	33.76	56,93	59.30%
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	PDRB Perkapita	38,108.00	49,990.50	44,694.84	89.41%
		Rasio PAD terhadap Pendapatan	18%	25	17.7	70.80%
Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	3.95	3.53	89.37%
		Indeks Infrastruktur	N/A	76.95	78.06	100.00%
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.92	62.53	56.72	90.71%
		Indeks Risiko Bencana	129.28	107.92	108.09	99.84%
	Indeks Pembangunan Manusia	75.28	77.26	76.54	99.07%	
Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.62	13.69	13.64	99.63%
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9.12	9.18	9.67	100.00%
	Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	79	81.5	71.96	88.29%
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	13,281.00	15,190.00	13,803.00	90.87%

Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Akhir Periode (2022)	Capaian Kinerja RPJMD (Akhir Periode 2026)
	Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	96.18	96.24	96.74	100.00%
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	80.06	84.68	100.00%
	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Stabilitas	N/A	80.25	86.16	100.00%
	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi	N/A	81.25	85.28	100.00%
	Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	N/A	78.7	83.35	100.00%
Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif	Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62.19	70.25	64.09	91.23%
	Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	Nilai SAKIP	B	A	BB	80.00%
		Opini BPK Terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	100.00%
		Level Maturitas SPIP	2	4	2	50.00%
		Indeks Profesionalisme Aparatur	51	61.5	52.95	86.10%
	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Indeks SPBE	2.43	3.25	2.66	81.85%
Nilai IKM		79.17	85.71	86.4	100.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2021-2026						89.97%
Predikat Kinerja						Tinggi

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Gambaran terkait kinerja Kota Pasuruan pada periode RPJPD Tahun 2005-2025 yang diambil dari interpretasi indikator kinerja masing-masing 4 tahapan RPJMD Kota Pasuruan.

RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
RPJMD 2006-2010	91.88%	Sangat Tinggi
RPJMD 2011-2015	93.56%	Sangat Tinggi
RPJMD 2016-2021	86.13%	Tinggi
RPJMD 2021-2026	89,97%	Tinggi
Rata-Rata	90.89%	
Predikat		Tinggi

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pasuruan 2025-2045

Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan dasar yang kuat, dan hal ini dapat dicapai melalui penyusunan rencana berdasarkan data dan informasi terkini yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks ini, informasi demografis memegang peranan krusial karena manusia menjadi subjek dan objek utama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, data demografi, termasuk jumlah penduduk dan informasi terkait, seharusnya dianggap sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan. Data ini mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang status pembangunan yang telah terjadi, serta menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan merumuskan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Tidak hanya sebatas jumlah penduduk, faktor-faktor demografis seperti distribusi usia penduduk, angka ketergantungan, sex ratio, dan kepadatan penduduk juga harus diperhitungkan. Informasi ini memainkan peran penting dalam merancang perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi perkembangan wilayah. Selanjutnya, data demografis dapat diperluas melalui proyeksi penduduk hingga 20 tahun ke depan, menjadi dasar pertimbangan untuk perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dengan demikian, pendekatan komprehensif terhadap data demografis adalah kunci untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. Berikut merupakan gambaran proyeksi penduduk 20 tahun ke depan yang disajikan berdasarkan kelompok umur pada tahun yang bersangkutan.

Tabel II. 35 Proyeksi Penduduk Kota Pasuruan Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Group of Ages	Proyeksi				
	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	17.310	17.380	17.410	17.504	17.834
5-9	18.140	17.640	17.710	17.739	17.837
10-14	17.480	18.440	17.950	18.000	18.033
15-19	16.840	17.630	18.590	18.094	18.152
20-24	17.030	17.040	17.840	18.821	18.315
25-29	17.310	17.550	17.570	18.400	19.401
30-34	17.420	17.900	18.140	18.152	19.014
35-39	16.870	17.700	18.180	18.431	18.449
40-44	16.500	16.960	17.810	18.283	18.537
45-49	15.500	16.450	16.920	17.765	18.244
50-54	13.390	15.320	16.260	16.740	17.577
55-59	11.880	13.010	14.910	15.842	16.320

Group of Ages	Proyeksi				
	2025	2030	2035	2040	2045
60-64	10.210	11.270	12.370	14.204	15.096
65-69	7.550	9.380	10.390	11.443	13.148
70-74	5.060	6.560	8.220	9.151	10.111
75+	3.860	6.240	9.030	12.157	14.816
Total	222.350	236.470	249.300	260.726	270.884

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

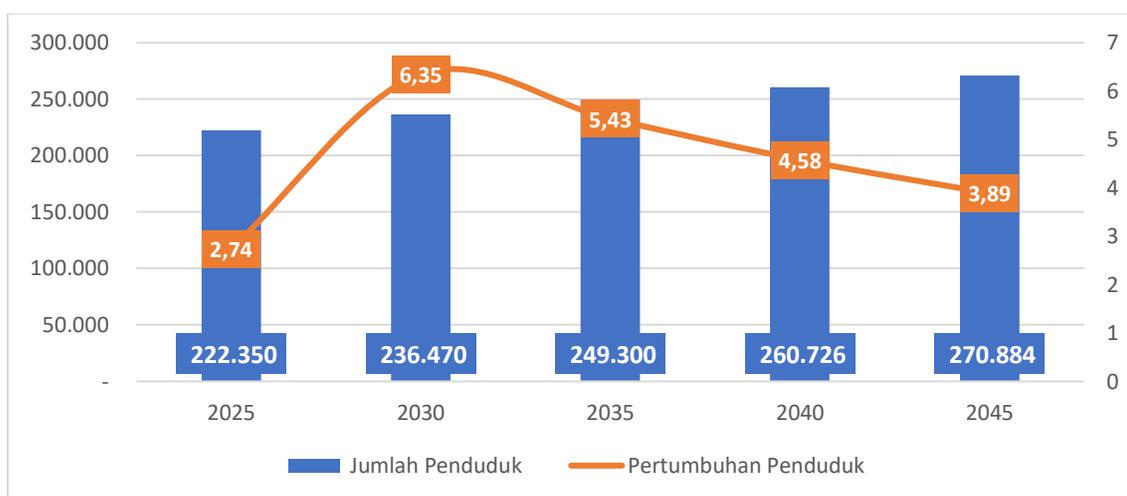
Jumlah penduduk Kota Pasuruan adalah sebesar 216 ribu jiwa pada tahun 2023. Jumlah penduduk tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga 20 tahun ke depan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk berbasis skenario tren pada tabel di atas, diperkirakan jumlah penduduk di Kota Pasuruan pada akhir periode RPJPD (2045) mencapai angka 270 ribu jiwa, yang berarti selama 20 tahun ke depan Kota Pasuruan akan mengalami pertambahan penduduk sebesar 53 ribu jiwa.

Tabel II. 36 Proyeksi Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Komponen	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk						
Laki-Laki	108,280	111,150	118,380	125,050	129,674	136,420
Perempuan	108,150	111,200	118,090	124,250	131,052	134,464
Total	216,430	222,350	236,470	249,300	260,726	270,884
Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki Terhadap Perempuan (%)	1.00	1.00	1.00	1.01	0,99	1.01
Kepadatan Penduduk (jiwa / km ²)	5.549	5.701	6.063	6.392	6.685	6.945
Komposisi Penduduk (%)						
0-14 Tahun	24.25%	23.80%	22.61%	21.29%	20.42%	19.83%
15-64 Tahun	69.09%	68.79%	68.01%	67.63%	67.02%	66.12%
65 + Tahun	6.66%	7.41%	9.38%	11.09%	12.56%	14.06%
Angka Ketergantungan (%)	44.74%	45.37%	47.03%	47.87%	49,21%	51.24%

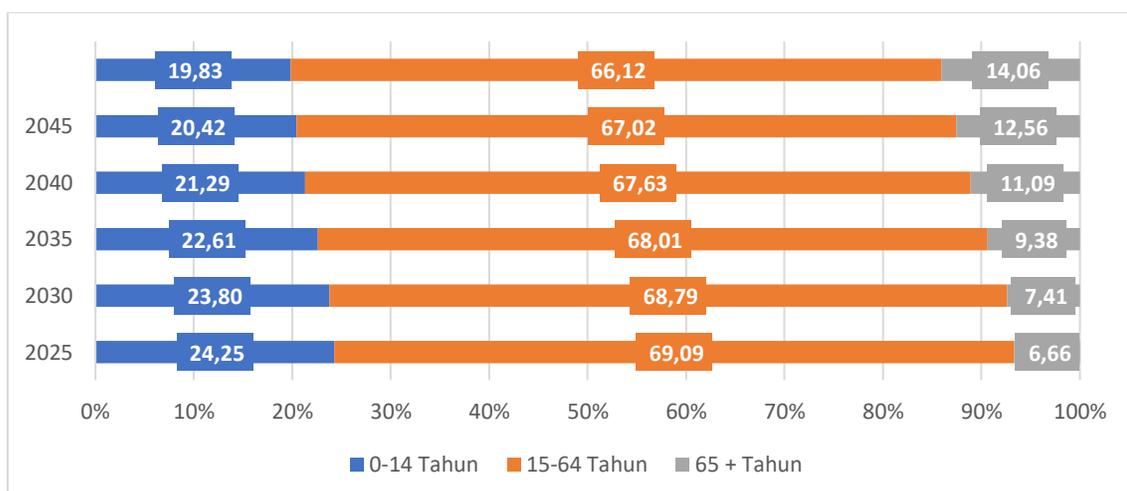
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan tabel ringkasan kondisi demografi hasil proyeksi penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 270 ribu jiwa yang terdiri atas 136 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 134 ribu jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Pasuruan diproyeksikan naik pada 2025 dan akan terus naik hingga tahun 2045. Pada tahun 2045 diproyeksikan tingkat kepadatan penduduk Kota Pasuruan sebesar 6,948 jiwa per km persegi. Jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan yang diperkirakan tumbuh sebesar 53 ribu jiwa dalam 20 tahun.



Gambar II. 85 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025-2045 per 5 (Lima) Tahun
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kota Pasuruan diproyeksikan terus mengalami tren penurunan dimana semula pada tahun 2023 penduduk usia 0-14 tahun mencapai 24,25%, diperkirakan mengalami penurunan hingga tahun 2045 pada angka 19,83%. Tren penurunan juga berada pada kelompok penduduk usia 15-64 tahun yang semula pada tahun 2023 mencapai 69,09% turun perlahan hingga tahun 2045 menjadi 66,12%. Di sisi lain, terdapat peningkatan proporsi penduduk usia 65 tahun keatas, yang sebelumnya sebesar 6,66% meningkat pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 14,06%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persentase penduduk usia produktif diprediksi akan menurun sebanyak 2,97% yang mana secara langsung meningkatkan angka non produktif pada level yang sama. Hal yang menjadi perhatian lagi ialah dengan meningkatnya jumlah lansia di usia 65+ tahun maka perlu diperhatikan pula mandat mencapai kesejahteraan sosial terutama untuk lansia yang sudah tidak lagi produktif. Jaminan sosial yang merata dan pola pikir masyarakat untuk dapat mandiri dihari tua harus menjadi perhatian sejak dini, sehingga isu ke depannya lansia tidak dianggap menjadi beban dan tidak ada lagi lansia yang terlantar.



Gambar II. 86 Proyeksi Proporsi Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Umur Tahun 2025-2045
BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Rasio ketergantungan Kota Pasuruan pada tahun 2023 sebesar 44,74% dan diproyeksikan akan meningkat hingga tahun 2045 mencapai 51,24%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2045 diprediksi setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 49 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengimplikasikan beban yang semakin besar terhadap penduduk usia produktif karena semakin banyak penduduk usia non produktif yang ditanggung. Kondisi tersebut menjadi catatan khusus agar penduduk usia produktif mampu memanfaatkan momentum peluang berkontribusi pada pembangunan dan tingginya penduduk usia non produktif dapat diakomodasi dalam program-program kesejahteraan sosial. Selain itu momentum bonus demografi diperkirakan hingga tahun 2035 merupakan momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik. Terakhir ialah rasio jenis kelamin penduduk Kota Pasuruan saat ini mencapai 100% penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Artinya terdapat sekitar 100 laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rasio tersebut di proyeksi akan mengalami peningkatan hingga tahun 2045 mencapai 101% dimana artinya ialah penambahan jumlah penduduk laki-laki diperkirakan melebihi jumlah penduduk perempuan. Sehingga pada tahun 2045 diperkirakan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin diperkirakan akan sedikit lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

2.6.2. Kebutuhan Sarana Prasarana Kota Pasuruan 2025-2045

Dalam upaya menyusun dokumen RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045 perlu dikembangkan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota. Perhitungan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dari strategi ini karena proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dapat membantu pemerintah daerah dalam memahami tren pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Dengan mengetahui jumlah penduduk yang tinggal di Kota Pasuruan dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah dapat merancang infrastruktur yang memadai, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, hunian dan utilitas lainnya. Adapun penghitungan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana di Kota Pasuruan tahun 2025-2045 dilakukan dengan membandingkan proyeksi jumlah penduduk dengan cakupan pelayanan berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia.

A. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan terhadap jumlah penduduk di Kota Pasuruan dalam dokumen RPJPD tahun 2025-2045 merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak langsung pada kualitas hidup dan perkembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Dengan menghitung proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan, pemerintah Kota Pasuruan dapat memastikan bahwa fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah cukup untuk memenuhi kebutuhan

penduduk yang terus bertambah. Terus bertambahnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan penambahan fasilitas pendidikan agar tidak terjadi over kapasitas yang dapat mengurangi kualitas pendidikan dan menghambat perkembangan anak-anak serta remaja di Kota Pasuruan.

Proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan proyeksi dapat membantu memastikan kesetaraan akses pendidikan di seluruh wilayah kota. Dengan mengetahui distribusi penduduk, perencana daerah dapat menentukan lokasi-lokasi strategis untuk pembangunan fasilitas pendidikan baru, sehingga semua anak di Kota Pasuruan memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan berkualitas. Kesetaraan akses ini penting untuk menghindari ketimpangan pendidikan yang dapat menyebabkan perbedaan sosial dan ekonomi di masa depan. Adapun perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan terhadap jumlah penduduk Kota Pasuruan tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II. 37 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	212.403	222.350	236.470	249.300	260.726	270.884
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	-	42	43	42	43	43
- SD/MI	34	33	33	33	33	34
- SMP/MTs	25	32	34	35	36	37
- SMA/MA/SMK	23	32	34	35	36	37

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan perhitungan proyeksi di atas menunjukkan bahwa kebutuhan prasarana pendidikan terhadap jumlah penduduk di Kota Pasuruan untuk tahun 2025-2045 terus bertambah seiring dengan terus bertambahnya proyeksi jumlah penduduk di Kota Pasuruan. Data kondisi eksisting prasarana pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar di Kota Pasuruan saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan penduduk kelompok usia 0-14 tahun sehingga tidak perlu dilakukan penambahan fasilitas. Adapun kondisi eksisting jumlah SD/MI di Kota Pasuruan yang saat ini terdapat kelebihan 1 gedung sekolah dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan di masa mendatang maka perlu dilakukan pengoptimalan dan pemeliharaan gedung agar tetap layak digunakan dalam jangka waktu yang panjang tanpa memerlukan gedung baru dalam waktu dekat. Gedung SD/MI yang saat ini berlebih juga dapat difungsikan untuk keperluan lain seperti kegiatan belajar masyarakat, pusat pelatihan maupun lembaga pendidikan non-formal. Penyesuaian terhadap zonasi sekolah agar distribusi murid lebih merata bisa sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan murid maupun sekolah favorit yang kelebihan kapasitas. Sementara untuk kondisi eksisting prasarana pendidikan di tingkat Sekolah Menengah (SMP dan SMA/SMK) masih belum mampu memenuhi proyeksi kebutuhan sehingga perlu dilakukan penambahan fasilitas pendidikan di jenjang SMP dan SMA/SMK. Dengan menghitung proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan diharapkan semua masyarakat memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas sehingga akan mendorong perkembangan masyarakat yang cerdas, sejahtera dan berkelanjutan.

B. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Dalam penyusunan dokumen RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045 menghitung proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk adalah kunci untuk memastikan layanan kesehatan yang efisien dan berkelanjutan. Proyeksi ini memungkinkan pemerintah kota untuk memprediksi dan merespons kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, tidak hanya jumlah fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan, tetapi juga jenis layanan yang disediakan. Menghitung proyeksi ini membantu kota Pasuruan memastikan bahwa sistem kesehatannya siap melayani berbagai kebutuhan warganya.

Proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan yang akurat membantu kota Pasuruan menghindari kelebihan beban pada sistem kesehatan, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan dan keterlambatan dalam penanganan medis. Dengan perencanaan yang tepat berdasarkan proyeksi, pemerintah dapat merencanakan penambahan fasilitas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan merekrut tenaga medis yang diperlukan untuk menjaga kualitas layanan. Proyeksi ini juga memungkinkan kota untuk mengembangkan strategi darurat dan rencana kontingensi yang kuat, sehingga sistem kesehatan dapat tetap tangguh dalam menghadapi perubahan atau krisis yang tak terduga, seperti pandemi atau bencana alam. Adapun perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk Kota Pasuruan tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II. 38 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	212.403	222.350	236.470	249.300	260.726	270.884
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	2	1	1	1	1	1
Puskesmas	8	2	2	2	2	2
Puskesmas Pembantu	29	7	8	8	9	9
BKIA	-	7	8	8	9	9
Praktek Dokter	-	44	47	50	51	54
Apotek	-	7	8	8	9	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2024

.Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi di atas, proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan pada setiap layanan kesehatan berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Kondisi eksisting prasarana kesehatan yang ada di Kota Pasuruan saat ini sudah melebihi proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan yang dibutuhkan sehingga tidak terlalu memerlukan penambahan fasilitas. Kondisi eksisting jumlah rumah sakit di Kota Pasuruan saat ini terdapat 2 rumah sakit dengan tipe C dan D yang tersebar di 2 kecamatan yang berbeda. Sehingga meski proyeksi kebutuhan rumah sakit di Kota Pasuruan hingga tahun 2045 hanya membutuhkan 1 rumah sakit namun keberadaan fasilitas yang ada saat ini sudah cukup ideal untuk dapat mengoptimalkan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kondisi eksisting

puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada di Kota Pasuruan saat ini tersebar di 4 kecamatan dengan rasio persebaran 1-3 puskesmas dalam 1 kecamatan menyesuaikan luas wilayah masing-masing kecamatan. Sementara jumlah puskesmas pembantu (pustu) yang ada saat ini yaitu 29 pustu yang tersebar di 34 kelurahan dengan rasio persebaran 1 pustu melayani 1-2 kelurahan. Adapun data kondisi eksisting layanan kesehatan BKIA dan Apotek yang ada Kota Pasuruan saat ini tidak tersedia sehingga belum dapat disimpulkan. Agar prasarana kesehatan yang sudah ada saat ini dapat bermanfaat secara maksimal maka diperlukan pemantauan terhadap faskes yang ada saat ini secara berkala. Pemerintah Kota Pasuruan perlu memastikan bahwa proyeksi prasarana kesehatan ini selalu sesuai dengan perkembangan demografis, tren kesehatan, dan kebutuhan masyarakat sehingga perencanaan dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efektif.

C. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Menghitung proyeksi timbulan sampah terhadap jumlah penduduk dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah bagi kota Pasuruan adalah langkah penting untuk mengelola masalah limbah dan menjaga kebersihan lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, timbulan sampah cenderung meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat mengakibatkan masalah serius, seperti penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan masyarakat. Proyeksi yang akurat memungkinkan pemerintah kota untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan akhir yang sesuai. Ini juga membantu dalam menentukan kebutuhan infrastruktur, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan sistem pengolahan limbah lainnya.

Dengan proyeksi yang tepat, kota dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi timbulan sampah, seperti kampanye daur ulang, program pengurangan penggunaan plastik, atau promosi gaya hidup ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Ketersediaan sarana dan prasarana sampah sangat dibutuhkan dalam penanganan sampah di daerah. Jumlah penduduk, timbulan sampah, dan sarana prasarana persampahan secara bersama-sama saling mempengaruhi. Jika penduduk bertambah maka timbulan sampah bertambah sehingga sarana dan prasarana persampahan juga bertambah. Dengan demikian, menghitung proyeksi timbulan sampah merupakan bagian integral dalam mewujudkan kota Pasuruan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Adapun perhitungan proyeksi timbulan sampah terhadap jumlah penduduk dan proyeksi kebutuhan sarana prasarana persampahan Kota Pasuruan tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II. 39 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	216.430	222.350	236.470	249.300	260.726	270.884
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)	52,51	54,97	58,46	61,63	64,45	66,96

Proyeksi Jumlah Kebutuhan: TPA/TPST	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---

Sumber: DLHKP Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan hasil proyeksi timbunan sampah terhadap jumlah penduduk yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 Kota Pasuruan tahun 2025-2045 terjadi peningkatan jumlah timbunan sampah (m³/hari). Adapun standar timbunan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga per orang per hari yaitu sebanyak 2 liter namun timbunan sampah di Kota Pasuruan saat ini mencapai 0,7 kg/orang/hari. Sementara itu, kapasitas 1 TPA/TPST di Kota Pasuruan pada tahun 2023 mencapai 106 ton perhari.

D. Proyeksi Kebutuhan Hunian Terhadap Jumlah Penduduk

Rumah, hunian atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dalam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan atas hunian di daerah dapat diproyeksikan dengan melihat jumlah penduduknya. Kebutuhan atas hunian tersebut paralel dengan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka kebutuhan hunian juga meningkat.

Tabel II. 40 Proyeksi Kebutuhan Hunian Kota Pasuruan 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	216,430	222,350	236,470	249,300	260.726	270,884
Proyeksi Kebutuhan Hunian	54108	55588	59118	62325	65181	67721

Sumber: DPRKP Kota Pasuruan, 2024

Kota Pasuruan pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 216.430 jiwa. Jika diproyeksikan hingga tahun 2045, jumlah penduduk Kota Pasuruan mencapai 270.884 jiwa. Dengan asumsi 1 kepala keluarga terdapat 4 anggota keluarga maka diproyeksikan jumlah kebutuhan hunian mencapai 67.721 unit pada tahun 2045. Jumlah tersebut terus bertambah sejak tahun 2023 karena jumlah penduduk yang terus bertambah.

Tantangan ke depannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Terlebih sebagai wilayah perkotaan, luas lahan sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu untuk membuat kebijakan yang mengarahkan pembangunan hunian yang bertingkat.

E. Proyeksi Kebutuhan Air Terhadap Jumlah Penduduk

Air bersih menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan. Keberlangsungan dari kehidupan sangat tergantung pada ketersediaan air. Kondisi tersebut kemudian menjadikan ketersediaan air menjadi variabel utama yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Ketersediaan air di daerah dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik geografisnya sehingga tidak sedikit daerah yang tergantung pada sumber air yang berada di luar wilayah administratifnya. Akan tetapi, kondisi tersebut ditindaklanjuti melalui pengelolaan bersama atau kolaborasi antar wilayah yang dikoordinasikan melalui Unit Pelaksana Teknis atau Balai Pengelolaan. Kota Pasuruan menjadi satu daerah di

Jawa Timur yang memiliki karakteristik seperti itu. Oleh karena itu, memproyeksikan kebutuhan air menjadi langkah strategis untuk merencanakan pembangunan 20 tahun ke depan.

Tabel II. 41 Proyeksi Kebutuhan Air Kota Pasuruan 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	216,430	222,350	236,470	249,300	260.726	270,884
Proyeksi Kebutuhan Air (m ³ / tahun)	9.479.634	9.738.930	10.357.386	10.919.340	11.419.798	11.864.719

Sumber:DPRKP Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan proyeksi, kebutuhan air bersih terus bertambah setiap tahunnya sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan air pada 2025 mencapai 9.479.634 m³/tahun kemudian terus meningkat proyeksinya hingga tahun 2045 yang mencapai 11.864.719 m³/tahun. Akan tetapi, ketersediaan air cenderung menurun karena berbagai pengaruh seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

F. Proyeksi Kebutuhan Listrik Terhadap Jumlah Penduduk

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk energi. Pembangunan di dunia telah menarahkan pembangunan yang ramah lingkungan sehingga penggunaan energi ramah lingkungan menjadi strategi utamanya. Energi listrik menjadi energi utama yang menjadi proksi atas penerapan strategi tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan energi listrik di masa depan akan semakin bertambah dan diikuti juga dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut. Adapun Kebutuhan listrik di Kota Pasuruan berdasarkan hasil proyeksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 42 Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)

Uraian	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	216,430	222,350	236,470	249,300	260.726	270,884
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	48697	50029	53206	56093	58663	60949

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan asumsi setiap rumah membutuhkan daya 900 VA dan setiap rumah merupakan 1 KK dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang maka diproyeksikan kebutuhan listrik di Kota Pasuruan pada tahun 2045 mencapai 60.949 KVA. Jumlah tersebut merupakan jumlah standar minimum yang berarti sangat mungkin kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut karena akan semakin banyaknya penggunaan alat-alat elektronik dan mesin-mesin terotomasi yang membutuhkan energi listrik untuk beroperasi.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Nasional

Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merumuskan Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 Misi transformasi Indonesia, dimana visi misi ini ditetapkan dengan salah satunya mempertimbangkan isu pembangunan wilayah dimana isu kesenjangan menjadi isu utama terkait dengan kewilayahan. Dalam menanggapi isu tersebut pemerintah menetapkan koridor pembangunan selama 20 tahun ke depan sehingga masing-masing wilayah dapat fokus terhadap pembangunannya dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang ada, berikut arah pembangunan kewilayahan amat pemerintah melalui RPJPN 2025-2045:



Gambar II. 87 Arah Pembangunan Wilayah Nasional
Sumber: RPJPN 2025-2045

Berdasarkan arah pembangunan wilayah di atas, Pulau Sumatera akan difokuskan sebagai Koridor industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia, Pulau Jawa akan difokuskan terhadap koridor industri berbasis inovasi, riset dan teknologi, Pulau Kalimantan akan berfokus pada koridor superhub ekonomi nusantara, Pulau Sulawesi akan berfokus pada koridor penunjang ekonomi IKN dan industri berbasis SDA, Pulau Bali-Nusa dan sekitarnya akan berfokus pada koridor superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara, Kepulauan Maluku akan berfokus pada koridor hub ekonomi biru timur, Pulau Papua akan berfokus pada koridor industri kimia dasar dan agro. Arah pembangunan wilayah tersebut selanjutnya diturunkan pada kebijakan umum kewilayahan meliputi Tata ruang dan pertanahan, Urbanisasi dan Perkotaan, Perdesaan dan daerah afirmasi, Konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi, informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana dasar dan Desentralisasi.



Gambar II. 88 Arah Pembangunan Pulau Jawa
Sumber: RPJPN 2025-2045

Berdasarkan letak geografis serta letak administratif maka Kota Pasuruan merupakan bagian dari Pulau Jawa, berdasarkan arah kebijakan perencanaan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 maka arah kebijakan Pulau Jawa akan difokuskan ke dalam koridor ekonomi industri berbasis inovasi dan IPTEK, berikut arah kebijakan Pulau Jawa:

1. Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;
2. Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis industri ramah lingkungan, kawasan strategis pariwisata; kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan, dan kawasan strategis perkotaan;
3. Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;
4. Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;

5. Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

2.7.2. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Daerah Provinsi

Arah pengembangan pusat pertumbuhan dan kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur telah diseluaikan terhadap arahan nasional. Adapun Pengembangan pusat pertumbuhan dan kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur adalah “Mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.” kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, dan peningkatan jaringan prasarana lainnya.
4. Peningkatan jaringan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.
5. Penguatan Peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan Kawasan agropolitan, Kawasan Industri dan gugusan Kawasan pegunungan.
6. Pemaduserasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dan kelautan di sebagai bentuk nilai tambah sinergitas antar wilayah ruang darat dan ruang laut di Provinsi Jawa Timur.
7. Percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
8. Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian geodiversity, biodiversitas, culture diversity dan pembangunan berkelanjutan Serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
9. Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung daya tampung lingkungannya.

10. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
11. Pemaduserasian ruang darat, ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
12. Perwujudan Kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP- 3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah pada Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru, Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura melalui pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah. Pengintegrasian konektivitas antar 7 koridor pengembangan wilayah yang meliputi:

1. Koridor Metropolitan Surabaya – Malang Raya;
2. Koridor Kota Besar, Menengah dan Kecil di Wilayah tengah/antar pegunungan (Smart Village Valley);
3. Koridor Industri Maritim di Pantura sampai dengan Madura;
5. Koridor/Klaster Migas dan Kondensat di Pantai Utara Pulau Jawa (Tuban – Gresik);
6. Koridor Industri Agro di wilayah Perbatasan/Utara;
7. Koridor Wisata Pesisir/Pantai (Coastal Tourism) di Wilayah Pansela (Pacitan – Banyuwangi);
8. Koridor penghubung antar Kawasan dan Kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura.



Gambar II. 89 Peta Persebaran Pusat kegiatan Provinsi Jawa Timur

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Kota Pasuruan merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur. PKW merupakan kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Adapun Pengembangan pusat kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut. Potensi strategis pusat kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan komoditas unggulan berbasis pertanian, perhutanan, dan perikanan yang menjadi hulu Agropolitan dan Minapolitan antara lain pada Selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Tuban-Bojonegoro dan Pulau Madura.
2. Pengembangan sentra produksi dengan outlet pengumpul dan distribusi komoditas unggulan berupa pasar agribisnis yang menjadi input industri Agro.
3. Pengembangan daya Tarik wisata di Kawasan Bromo – Tengger – Semeru dan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Selingkar Wilis dengan konsep ekowisata. Selanjutnya di wilayah-wilayah perkotaan perlu mengadopsi pengembangan pariwisata antara lain melalui penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conférences, and Exhibitions (MICE).
4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global pada pusat aglomerasi Madiun, Kediri, dan Jember.
5. Pengembangan Sentra Industri Maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan Ekonomi Biru.
6. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.
7. Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).
9. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
10. Pengembangan Kawasan Geopark (Taman Bumi) guna mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi serta memperkuat pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pilar konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
11. Optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien melalui pedoman praktik klinis rumah sakit yang standar serta pelaksanaan sistem rujukan berbasis kompetensi.

2.7.3. Arah Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Daerah Kota Pasuruan

Perencanaan tata ruang menetapkan beberapa poin penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan. RTRW

menetapkan beberapa level dalam pengembangan pusat pertumbuhan, berdasarkan dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Perda 10 tahun 2023 tentang RTRW Prov. Jatim, Kota Pasuruan menjadi salah satu pusat pertumbuhan dimana Kota Pasuruan berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dimana PKW sendiri merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di sekitarnya.

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Terdapat beberapa jenis kriteria kawasan strategis pengembangan wilayah di Kota Pasuruan yakni sebagai berikut:

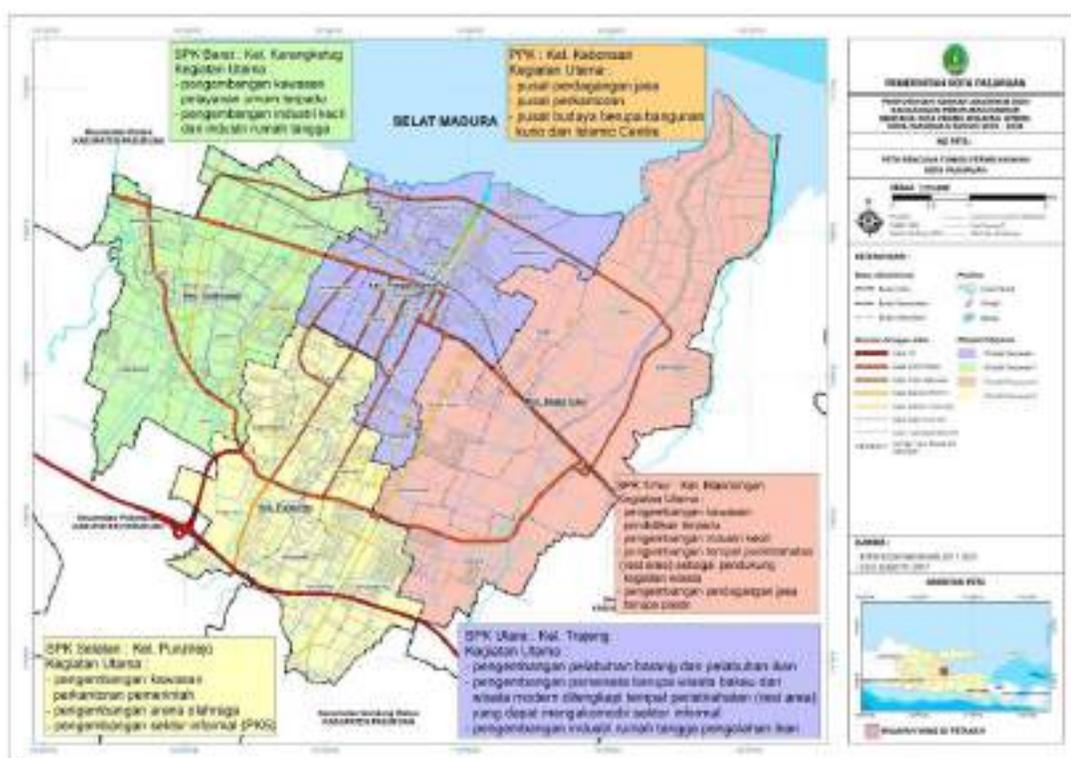
1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan peruntukkan industri baru terdapat di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo dan Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul. Nilai strategis kawasan peruntukkan industri baru. Dan juga terdapat Kawasan peruntukkan industri logam terdapat di Ngemplakrejo. Nilai strategis kawasan peruntukkan industri logam

2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

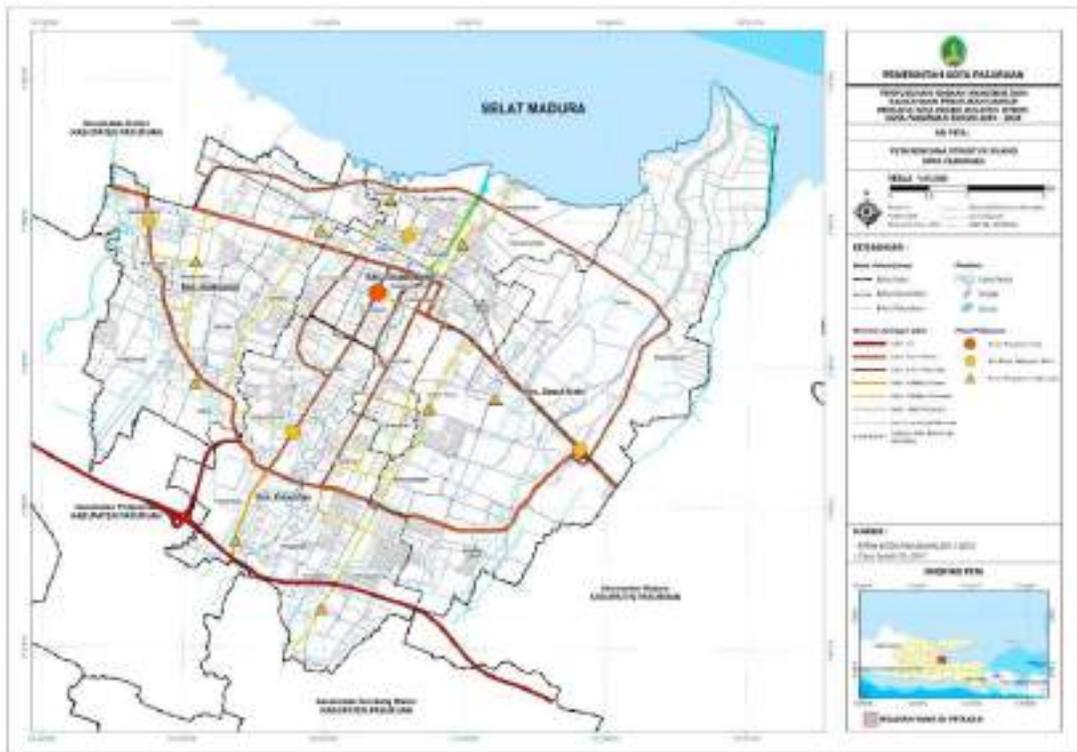
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan yang didalamnya berlokasi artefak yang memiliki potensi untuk mengkonservasi nilai-nilai sosial budaya, lebih tepatnya yang berkenaan dengan sejarah dan kearifan lokal Kota Pasuruan. Mengingat potensi yang dimilikinya, maka keberadaan artefak-artefak tersebut perlu dijaga kelestariaanya; yang antara lain dilaksanakan melalui penetapan lokasi (artefak) sebagai kawasan strategis sosial budaya. Kawasan cagar budaya yang ada di Kota Pasuruan merupakan tempat sekitar bangunan bernilai budaya tinggi berupa bangunan kolonial peninggalan Belanda ataupun tempat yang memiliki nilai historis tersendiri.

Selain itu pada lingkup kota juga terdapat pembagian wilayah yang berperan dalam pengembangan pusat pertumbuhan diantaranya Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PPK Kota Pasuruan berada di Kecamatan Panggungrejo, sedangkan SPK dibagi menjadi 4 yakni SPK Barat, SPK Selatan, SPK Utara dan SPK Timur. Sedangkan PPK berada di Kelurahan Kebonsari. Berikut lebih terperinci peta Rencana Fungsi Perwilayahan di Kota Pasuruan :



Gambar II. 90 Peta Rencana Fungsi Perwilayahan Kota Pasuruan
Sumber: RTRW Kota Pasuruan tahun 2021-2041

Kota Pasuruan memiliki 1 PPK dan 4 SPK dimana PPK terletak di Kelurahan Kebonsari sebagai pusat perdagangan jasa, pusat perkantoran, pusat budaya berupa bangunan kuno dan islamic centre. SPK Timur terletak di Kelurahan Blandongan dimana menjadi pusat pengembangan kawasan pendidikan terpadu, pengembangan industri kecil, pengembangan tempat peristirahatan (rest area) pendukung kegiatan wisata dan sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa berupa pasar. Pada sisi utara terdapat SPK Kelurahan Trajeng dimana wilayah ini ditujukan sebagai pusat pengembangan pelabuhan barang dan pelabuhan ikan, pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan (rest area) yang dapat mengakomodir sektor informal dan pengembangan industri rumah tangga pengelolaan ikan. Pada wilayah selatan terdapat SPK Kelurahan Purutrejo dimana wilayah ini berfokus sebagai wilayah pengembangan kawasan perkantoran pemerintah, pengembangan arena olahraga dan pengembangan sektor informal (PK5). Sedangkan pada sisi barat terdapat SPK Kelurahan Karangketug yang memiliki kegiatan utama sebagai pengembangan kawasan pelayanan umum terpadu dan kawasan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga.



Gambar II. 91 Peta Struktur Ruang Kota Pasuruan
Sumber: RTRW Kota Pasuruan tahun 2021-2041

Peta diatas menggambarkan Peta Struktur Ruang Kota Pasuruan dimana beberapa penjelasan ringkas mengenai peta struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota : Pusat Pelayanan Kota Pasuruan terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, dengan kegiatan utama Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pasuruan, antara lain:
 - a. Pusat pemerintahan skala kota;
 - b. Pusat perdagangan jasa skala kota;
 - c. Pusat peribadatan skala kota;
 - d. Pusat wisata kota; dan
 - e. Pusat kawasan pendidikan keagamaan.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Utara : Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Utara Kota Pasuruan adalah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo yang melayani 7 kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tamba'an;
- b. Kelurahan Mandaranrejo;
- c. Kelurahan Panggungrejo;
- d. Kelurahan Bugul lor;
- f. Kelurahan Tapa'an;
- g. Kelurahan Mayangan; dan
- h. Kelurahan Ngemplakrejo.

Adapun kegiatan utama Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Utara, antara lain:

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala kota;
 - b. Pusat wisata kota; dan
 - c. Pusat industri pengolahan.
3. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Barat: Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Barat Kota Pasuruan adalah Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo yang melayani 8 kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Gadingrejo;
 - b. Kelurahan Karangketug;
 - c. Kelurahan Randusari;
 - d. Kelurahan Petahunan;
 - e. Kelurahan Sebani;
 - f. Kelurahan Gentong;
 - g. Kelurahan Krapyakrejo; dan
 - h. Kelurahan Bukir.

Adapun kegiatan utama pada Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Barat, antara lain:

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala sub kota;
 - b. Pusat industri;
 - c. Pusat peribadatan;
 - d. Pusat transportasi skala kota; dan
 - e. Pusat kesehatan.
4. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Timur : Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Timur Kota Pasuruan adalah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul yang melayani 5 kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Kepel;
 - b. Kelurahan Bugul Kidul;
 - c. Kelurahan Krampyangan;
 - d. Kelurahan Bakalan; dan
 - f. Kelurahan Blandongan.

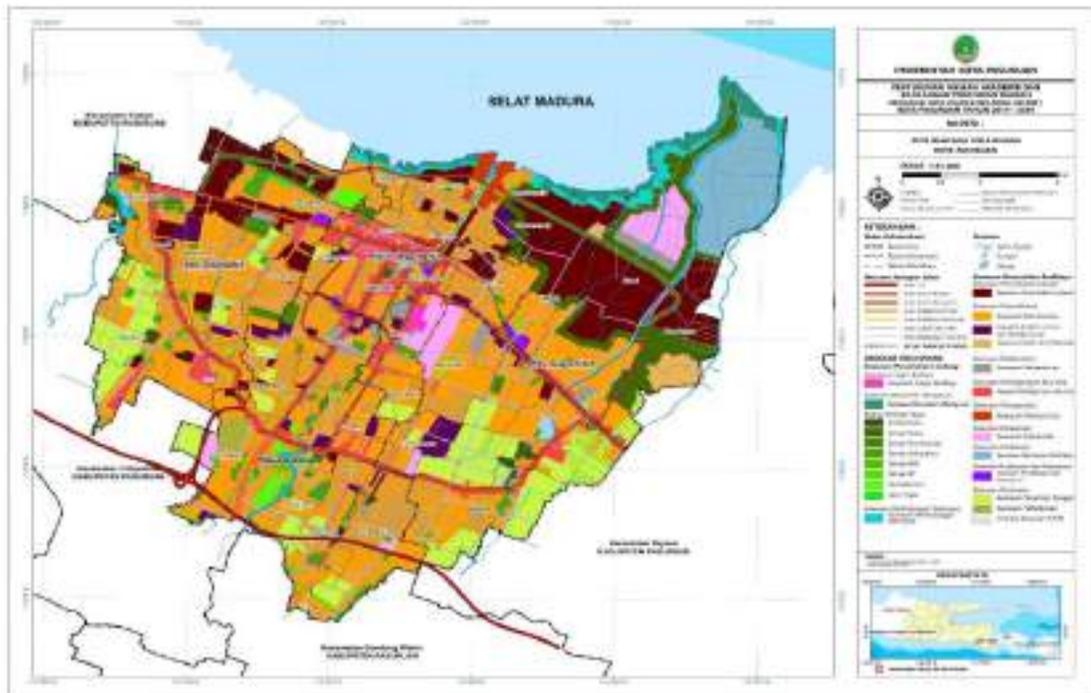
Adapun kegiatan utama pada Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Timur, antara lain:

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala kota;
 - b. Pusat wisata;
 - c. Pusat pendidikan;
 - d. Pusat perkantoran skala kota; dan
 - e. Pusat transportasi regional.
5. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Selatan : Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Selatan Kota Pasuruan adalah Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo yang melayani 6 kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Sekargadung;
 - b. Kelurahan Kebonagung;
 - c. Kelurahan Pohjentrek;
 - d. Kelurahan Purutreja;
 - b. Kelurahan Wirogunan;
 - c. Kelurahan Tembokreja.

Adapun kegiatan utama pada Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) bagian Selatan, antara lain:

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - b. Pusat pendidikan skala regional.
6. Terkait dengan PPL dan beberapa poin yang lebih mendetail bisa dilihat pada peta struktur ruang maupun dokumen RTRW Kota Pasuruan 2021-2041.

Selanjutnya dalam RTRW Kota Pasuruan juga terdapat Rencana Pola Ruang yakni rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota. Dalam Rencana pola ruang terdapat penjelasan mengenai Kawasan Utama yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya selain itu juga terdapat kawasan bertampalan. Kawasan lindung kota adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sedangkan Bertampalan atau Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Pasuruan meliputi kawasan rawan bencana banjir dan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Berikut peta Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan 2021-2041:



Gambar II. 92 Peta Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan
 Sumber: RTRW Kota Pasuruan tahun 2021-2041

Adapun penjelasan secara ringkas mengenai peta tersebut dapat dilihat pada tabel kawasan utama dan kawasan bertampalan di Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel II. 43 Kawasan Utama dan Kawasan Bertampalan di Kota Pasuruan

No	Kawasan		
A	Kawasan Utama		
1	Kawasan Lindung	1) Kawasan Perlindungan Setempat	-
		2) Ruang Terbuka Hijau	a) Rimba Kota
			b) Taman Kota
			c) Taman Kecamatan
			d) Taman Kelurahan
e) Taman RW			
f) Taman RT			
g) Pemakaman			
h) Jalur Hijau			
		3) Kawasan Cagar Budaya	-
		4) Kawasan Ekosistem Mangrove	-
2	Kawasan Budidaya	1) Badan Jalan	-
		2) Kawasan Pertanian	a) Kawasan Tanaman Pangan
			b) Kawasan Perkebunan
		3) Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Tangkap
			Kawasan Perikanan Budidaya
		4) Kawasan Peruntukkan Industri	-
		5) Kawasan Pariwisata	-
6) Kawasan Permukiman	a) Kawasan Perumahan		
	b) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial		
	c) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau		
	d) Tempat evakuasi bencana		
		e) Kawasan infrastruktur perkotaan	
		f) Kawasan Sumber Daya Air	
		7) Kawasan Perdagangan dan Jasa	-

No	Kawasan		
		8) Kawasan Perkantoran	-
		9) Kawasan transportasi	-
		10) Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-
B	Kawasan Bertampalan		
		1) Kawasan Sempadan	-
		2) Kawasan Cagar Budaya	
		3) Kawasan Rawan Bencana	a) Kawasan Rawan Bencana Banjir b) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim c) Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi
		4) KP2B	-

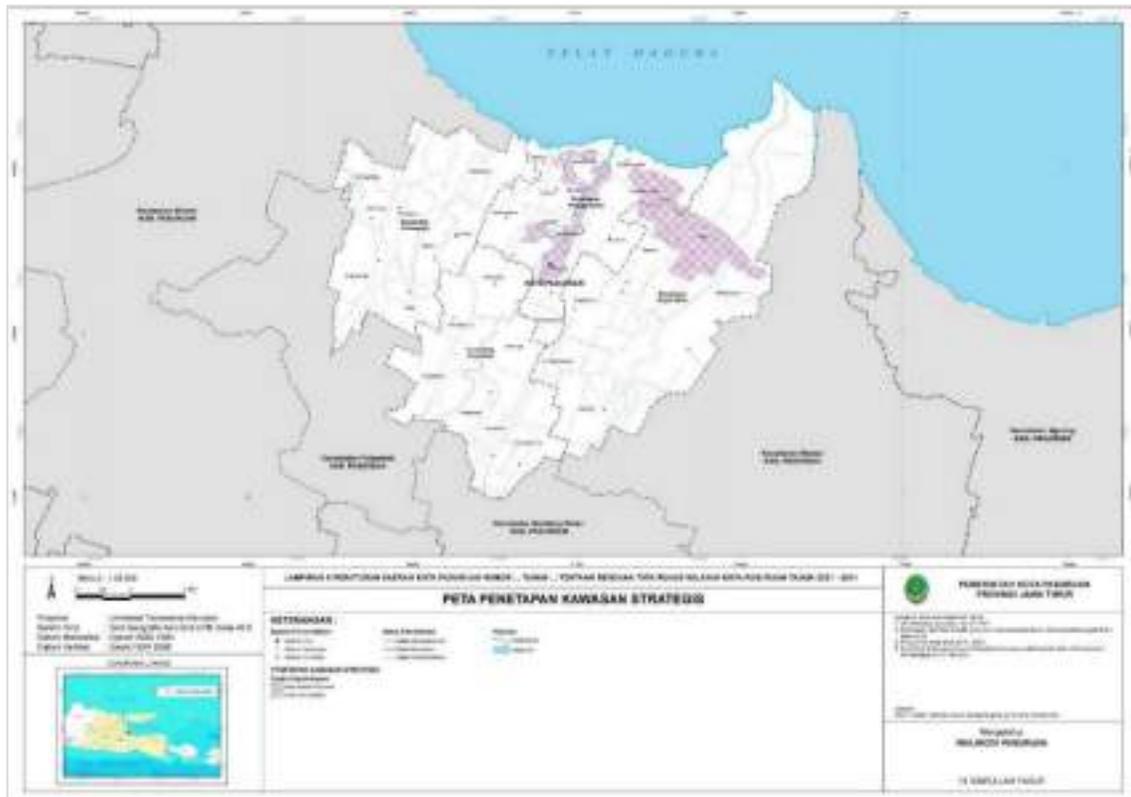
Sumber: Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021

Rencana Tata Ruang Wilayah juga mengatur mengenai penetapan kawasan strategis kota sebagai bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Adapun arahan terhadap kawasan strategis Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Baru, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukkan industri baru dikembangkan dengan menggunakan akses Jalan Lingkar Utara yang terhubung dengan pelabuhan dan jalan arteri primer;
 - b. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru dilengkapi dengan sarana prasarana industri termasuk perumahan, sarana pelayanan umum dan ruang terbuka hijau;
 - c. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru ditunjang dengan pengelolaan limbah secara mandiri; dan
 - d. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru dikelilingin oleh jalur hijau.
- 2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Logam, meliputi:
 - a. kawasan peruntukkan industri logam pada sentra-sentra industri yang telah ada;
 - b. kawasan peruntukkan industri logam dikembangkan menyatu dengan permukiman sehingga diperlukan penataan kawasan;
 - c. kawasan peruntukkan industri logam dilengkapi dengan pengelolaan limbah komunal; dan
 - d. perlu penyediaan ruang terbuka hijau yang menyatu dengan perumahan sebagai sentra industri logam.
- 3) Pengembangan Kawasan Komplek Kota Lama, meliputi:
 - a. Penetapan kawasan komplek kota lama sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai sebagai kota pusaka;

- b. Mengkonservasi dan memelihara bangunan yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya;
 - c. Pengembangan atau pembangunan baru harus menyesuaikan dengan tipe bangunan bersejarah yang berdekatan;
 - d. Menjadikan kawasan kota lama sebagai bagian dari wisata kota; dan
 - e. Pengembangan kota lama dilengkapi dengan kuliner center.
- 4) Pengembangan kawasan religi, meliputi:
- a. Menjadi kompleks kawasan religi sebagai kawasan konservasi;
 - b. Didukung oleh prasarana pendukung berupa area parkir dan transportasi lokal;
 - c. Ditunjang oleh jalur pejalan kaki maupun pengguna becak wisata antara parkir wisata dan kompleks wisata religi; dan
 - d. Ditunjang oleh perdagangan jasa dan souvenir shop.

Untuk mengetahui lebih jelas kawasan strategis dapat dilihat melalui dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2021-2042 atau peta kawasan strategis berikut:



Gambar II. 93 Peta Kawasan Strategis Kota Pasuruan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan tahun 2021-2041

Adapun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat Indikasi Program yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 44 Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A.	Perwujudan Struktur Ruang																							
1.	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan																							
	a. Pusat Pelayanan Kota																							
	• Pusat Pemerintahan skala kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas PUPR																				
	• Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	• Pusat peribadatan skala kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas PUPR																				
	• Pusat wisata kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga																				
	• Pusat kawasan pendidikan keagamaan	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				
	b. Sub pusat Pelayanan Kota																							
	b.1 Sub pusat Pelayanan Kota Utara																							
	• Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Trajeng	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	• Pusat wisata kota	Kelurahan Trajeng	APBD Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				
	• Pusat industri pengolahan	Kelurahan Trajeng	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	b.2 Sub pusat Pelayanan Kota Barat																							
	• Pusat perdagangan dan jasa skala sub kota	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	• Pusat industri	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	• Pusat Peribadatan	Kelurahan Karangketug	APBD	Dinas PUPR																				
	• Pusat transportasi skala kota	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Perhubungan																				
	• Pusat Kesehatan	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Kesehatan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kelurahan Bakalan, Kelurahan Pohjentrek dan Kelurahan Tembokrejo																						
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi																							
	2.1 Sistem Jaringan Jalan																							
	2.1.1 Jalan Umum																							
	1. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	1. ruas jalan Ahmad Yani; 2. ruas jalan Soekarno Hatta; 3. ruas jalan D.I. Panjaitan; 4. ruas jalan Letjen Suprpto; 5. ruas jalan Veteran; 6. ruas jalan Ir. Juanda; 7. ruas jalan Gatot Subroto; 8. ruas jalan Urip Sumoharjo; 9. ruas jalan Untung Suropati; 10. ruas jalan DR. -	APBN	Kementerian PUPR																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	penumpang kereta api		(BUMN)																					
	2.5 Sistem Jaringan Transportasi Laut																							
	1. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kelurahan Panggungrejo	APBN	Kementerian Perhubungan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Kelurahan Ngemplakrejo	- APBN - APBD Kota	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perikanan Kota																				
3	Perwujudan Sistem Jaringan Energi																							
	3.1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																							
	• Pengembangan Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa gas	Seluruh wilayah kota	APBN (PN Gas dan BUMN)	- Kementerian ESDM - PN Gas																				
	3.2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																							
	3.2.1 Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung																							
	- Pengembangan SUTT	Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Sekargadung	APBD Provinsi	Dinas ESDM																				
	- Pengembangan SUTM dan SUTR	seluruh Kota Pasuruan	APBD Kota	- Dinas PUPR - PT.PLN																				
4	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi																							
	1. Pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan <i>fiber optic</i> dan <i>microcell</i> , kabel dan non kabel (serat optik)	seluruh Kota Pasuruan	- APBN (BUMN) - Swasta	Swasta																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2. Pengembangan jaringan bergerak terestrial	Kelurahan Pekuncen	Swasta	Swasta																				
	3. Pengembangan jaringan bergerak seluler	seluruh Kota Pasuruan	- APBN (BUMN) - Swasta	Swasta																				
	4. Pengembangan jaringan bergerak satelit	Kelurahan Blandongan	Swasta	Swasta																				
5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air																							
	5.1. Prasarana Sumber Daya Air																							
	5.1.1 Mempertahankan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi																							
	a. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Karangketug; • Kelurahan Panggungrejo; • Kelurahan Ngemplakrejo; • Kelurahan Mandaranrejo; • Kelurahan Mayangan; • Kelurahan Bangilan; 																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kandang sapi; • Kelurahan Kebonsari • Kecamatan Panggungrejo; • Kelurahan Petamanan; 																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Purworejo; • Kelurahan Purutreja; • Kelurahan Kebonagung; • Kelurahan Pohjentrek; • Kelurahan Wirogunan; • Kelurahan Kepel; • Kelurahan Blandongan; dan • Kelurahan Bakalan. 																						
	b. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Karangketug; • Kelurahan Petahunan; • Kelurahan Krapyakreja; • Kelurahan Gadingreja; • Kelurahan Bukir; • Kelurahan Gentong; • Kelurahan Sebani; • Kelurahan Kebonagung; • Kelurahan Pohjentrek; • Kelurahan Purutreja; • Kelurahan Purworejo; • Kelurahan Tembokreja; • Kelurahan Sekargadung; • Kelurahan Krampyangan; 	APBD Provinsi	Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bugul Kidul; • Kelurahan Kepel; dan • Kelurahan Tapaan 																						
	c. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gadingrejo; • Kelurahan Bukir; • Kelurahan Krapyakrejo; • Kelurahan Seban; • Kelurahan Gentong; • Kelurahan Randusari; • Kelurahan Petahunan; 	APBD Kota	Dinas PU Pengairan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Karangketug; • Kelurahan Tamba'an; • Kelurahan Karanganyar; • Kelurahan Petamanan; • Kelurahan Kebonsari; • Kelurahan Trajeng; • Kelurahan Ngemplakrejo; • Kelurahan Sekargadung; • Kelurahan Purworejo; • Kelurahan Kebonagung; • Kelurahan Pohjentrek; • Kelurahan Wirogunan; 																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	5.1.3 Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air (DAM Bintangan)	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	Dinas PUPR																				
6	Perwujudan Infrastruktur Perkotaan																							
	6.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																							
	1. Peningkatan SPAM Regional	Kota Pasuruan	- APBD Provinsi	- Dinas PU Sumber Daya Air																				
	2. Peningkatan Pelayanan air	Seluruh Kota	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - PDAM - Swasta																				
	3. Pengembangan sumur pompa	Seluruh Kecamatan	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Swasta																				
	4. Pemeliharaan terminal air	Kelurahan Bangilan, Kelurahan Purworejo dan Kelurahan Pohjentrek.	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - PDAM - Swasta																				
	6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																							
	1. Pengembangan Sistem pembuangan air limbah non domestik	Kelurahan Kelurahan Purutreja, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo dan	APBD Kota	Dinas PUPR																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kelurahan Ngemplakrejo																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																				
					I					II					III					IV					
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	2. Pengembangan Sistem pembuangan air limbah domestik	1. IPAL Purworejo di Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Pohjentrek; 2. IPAL Gadingrejo di Kelurahan Randusari; 3. IPAL Bugul Kidul di Kelurahan Krampyangan dan Kelurahan Bakalan; 4. IPAL Panggungrejo di Kelurahan Bugul Lor; 5. Pengolahan Lindi di Tempat Pengolahan Akhir Blandongan; dan 6. IPLT di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PUPR - Dinas PUPR																					
	6.3. Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Purutrejo	APBD Kota	Dinas PUPR																					
	penyimpanan dan pengumpulan	Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Purutrejo	-	APBD Kota	Dinas PUPR																				
	6.4. Sistem jaringan persampahan																								
	6. Pengembangan TPS	1. Kelurahan Ngemplakrejo; 2. Kelurahan Kandang sapi; 3. Kelurahan Bangilan; 4. Kelurahan Panggungrejo; 5. Kelurahan Kebonsari; 6. Kelurahan Tambaan; 7. Kelurahan Trajeng;																							

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		8. Kelurahan Pekuncen; 9. Kelurahan Purworejo; 10. Kelurahan Pohjentrek; 11. Kelurahan Sekargadung; 12. Kelurahan Wirogunan; 13. Kelurahan Tembokrejo;																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		14. Kelurahan Kebonagung; 15. Kelurahan Purutreja; 16. Kelurahan Kepel; 17. Kelurahan Tapaan; 18. Kelurahan Blandongan; 19. Kelurahan Bakalan; 20. Kelurahan Bugul Kidul; 21. Kelurahan Bukir; 22. Kelurahan Gadingreja; 23. Kelurahan Karangketug; 24. Kelurahan Krapyakreja; 25. Kelurahan Petahunan; dan 26. Kelurahan Gentong																						
	7. Pengembangan TPS3R	1. Kelurahan Karanganyar; 2. Kelurahan Bugul Lor; 3. Kelurahan Tembokrejo; 4. Kelurahan Purutreja; 5. Kelurahan Blandongan; 6. Kelurahan	APBD Kota	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Krampyangan; 7. Kelurahan Karangketug; 8. Kelurahan Seban; 9. Kelurahan Randusari; dan 10. Kelurahan Bukir.																						
	8. Pengembangan TPA Regional	Kota Pasuruan	APBD Provinsi	Dinas PUPR																				
	9. Perluasan TPA	Kelurahan Blandongan	APBN	Kementerian PUPR																				
	10. Pengembangan Bio Energy di TPA	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
	6.5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana																							
	1. Jalur evakuasi bencana																							
	a. Pengembangan Jalur evakuasi bencana banjir	1. Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Hasyim Asyari - Jalan	APBD Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Patiunus - Jalan Sultan Agung; 2. Jalan Untung Suropati - Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo – Jalan Sultan Agung; 3. Jalan Pahlawan - Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo - Jalan Sultan Agung; 4. Jalan Pattimura - Jalan Patiunus – Jalan Sultan Agung;																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		5. Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Wachid hasyim – Jalan Panglima Sudirman; 6. Jalan Gatot Subroto – Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Panglima Sudirman; 7. Jalan Gajah Mada – jalan Panglima Sudirman																						
	b. Pengembangan Jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi	Jalan Lingkar Utara																						
	2. Pengembangan Ruang evakuasi sementara	1. Kantor kelurahan dan kantor kecamatan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo, dan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo; dan 2. Gedung olahraga dan	APBD Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		lapangan terbuka di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo																						
	6.6. Sistem Drainase																							
	1. Normalisasi saluran primer	1. Sungai Gembong; 2. Sungai Petung; dan 3. Sungai Welang	APBD Kota	Dinas PUPR																				
	2. Pembangunan dan normalisasi saluran sekunder	Seluruh Kecamatan kota	APBD Kota	Dinas PUPR																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	3. Pembangunan dan pengembangan saluran drainase tersier	seluruh Kota Pasuruan	APBD Kota	Dinas PUPR																				
	6.6. Sistem Jaringan Pejalan Kaki																							
	1. Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum	1. Jalan Ahmad Yani; 2. Jalan Soekarno-Hatta; 3. Jalan D.I Panjaitan; 4. Jalan Veteran; 5. Jalan Ir. Juanda; 6. Jalan Gatot Subroto; 7. Jalan Urip Sumoharjo; 8. Jalan Untung Suropati; 9. Jalan Dr. Setiabudi; 10. Jalan Sulawesi; 11. Jalan KH. Wachid Hasyim Utara; 12. Jalan Panglima Sudirman; 13. Jalan Pahlawan; 14. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;	APBD Kota	Dinas PUPR																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		15. Jalan Balaikota; 16. Jalan Alun-Alun; 17. Jalan WR. Supratman; 18. Jalan Slagah; 19. Jalan Hayam Wuruk; 20. Jalan Airlangga; 21. Jalan Gajah Mada;																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	dengan memindahkan PKL pada kawasan culinary center	pecinan Klenteng, Komplek Mall Poncol, <i>Water Torren</i> ,																						

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Depan Terminal Wisata, Jalan Veteran, Depan SD Kandang sapi																						
B	Perwujudan Pola Ruang																							
1	Perwujudan Kawasan Lindung																							
	1.1 Kawasan perlindungan setempat																							
	1.1.1 Pengendalian alih fungsi dengan penetapan Sempadan Pantai	Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Kepel, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Tambaan	- APBD Provinsi - APBD Kota	- Dinas Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan																				
	1.1.2. Pengendalian alih fungsi dengan penetapan Sempadan Sungai																							
	a. Penetapan sungai bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai		- APBD Kota	- Dinas PUPR																				
	b. Penetapan sungai tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Kepel, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Tembokrejo, dan	- APBD Kota	- Dinas PUPR																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	meter)	Kelurahan Wirogunan																						
	1.1.2. Kajian Risiko Bencana & Rencana Penanggulangan Bencana	Kota Pasuruan	APBD Kota	Bappelitbangda																				
	1.2 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau																							
	1.2.1 Pengembangan Rimba Kota	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Sekargadung	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
	1.2.2 Pengembangan Taman Kota	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Tapa'an, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Sekargadung		Pertamanan																				
	1.2.3 Pengembangan Taman Kecamatan	seluruh kecamatan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
	1.2.4 Pengembangan Taman Kelurahan	seluruh kelurahan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
	1.2.5		APBD Kota	Dinas Lingkungan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pengembangan Taman RW	seluruh kecamatan		Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
	1.2.6 Pengembangan Taman RT	seluruh kelurahan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
	1.2.7 Penyediaan Pemakaman	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Sebani, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Tambaan, Kelurahan Kebonagung,	- APBD Kota - Kas Kelurahan	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Kelurahan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Wirogunan																						
	1.2.8 Pengembangan Jalur Hijau	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyanan, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Sebani, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Karanganyar, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Trajeng, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Wirogunan																						
	1.2.9 Penyiapan Lahan Untuk Pengembangan RTH	Seluruh Wilayah Kota	- APBD Kota	- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan - Bappeda - PUPR																				
	1.2.10 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Peruntukkan Industri baru sebesar 20%																							
	a. Penyediaan RTH Kawasan Peruntukkan Industri baru seluas 21,5 Ha	Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Kepel, dan Kelurahan Blandongan	- Swasta - APBD Kota	- Swasta - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				- Dinas Perindustrian																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				dan Perdagangan																				
	b. Penyediaan RTH Kawasan Peruntukkan Industri baru seluas 21,5 Ha	Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Kepel, dan Kelurahan Blandongan	Swasta APBD Kota	Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	c. Penyediaan RTH Kawasan Peruntukkan Industri baru seluas 21,5 Ha	Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Kepel, dan Kelurahan Blandongan	- Swasta - APBD Kota	- Swasta - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	d. Penyediaan RTH Kawasan Peruntukkan Industri baru seluas 21,5 Ha	Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Kepel, dan Kelurahan Blandongan	- Swasta - APBD Kota	- Swasta - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	1.2.11 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Pariwisata Baru sebesar 45%																							
	a. Penyediaan RTH di kawasan pariwisata baru seluas 7,5 Ha	Kelurahan Kepel	- Swasta - APBD Kota	- Swasta - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				
	b. Penyediaan RTH kawasan pariwisata baru seluas 7,5 Ha	Kelurahan Kepel	- Swasta - APBD Kota	- Swasta - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				
	c. Penyediaan RTH kawasan pariwisata	Kelurahan Kepel	- Swasta	- Swasta																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	baru seluas 7,5 Ha		APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				
	d. Penyediaan RTH kawasan pariwisata baru seluas 7,5 Ha	Kelurahan Kepel	Swasta APBD Kota	Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				
	1.2.12 Penyediaan RTH Publik 30% di Kawasan Perumahan Baru sebesar 30%																							
	a. Penyediaan RTH di di Kawasan Perumahan Baru seluas 12 Ha	Seluruh Kota Pasuruan	Swasta APBD Kota	Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Olahraga																				
	b. Penyediaan RTH di Kawasan Perumahan Baru seluas 12 Ha	Seluruh Kota Pasuruan	Swasta APBD Kota	Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				
	c. Penyediaan RTH di Kawasan Perumahan Baru seluas 12 Ha	Seluruh Kota Pasuruan	Swasta APBD Kota	Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	d. Penyediaan RTH di Kawasan Perumahan Baru seluas 12 Ha	Seluruh Kota Pasuruan	Swasta APBD Kota	Swasta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				
	1.3.13 Kawasan bukan peruntukan RTH yang memiliki fungsi RTH (Kawasan Perlindungan Setempat dan Ekosistem Mangrove)	Seluruh Kota	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
	1.4 Kawasan Cagar Budaya																							
	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	Seluruh Kota	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				
	1.5 Kawasan Ekosistem Mangrove																							

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Perlindungan mangrove	Kelurahan Trajeng, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Pekuncen	APBD Kota	Dinas Perikanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan																				
2	Perwujudan Kawasan Budidaya																							
	2.1 Kawasan Pertanian																							
	2.1.1 Kawasan tanaman pangan																							
	1. Mempertahankan kawasan tanaman pangan	Kelurahan Bakalan; Kelurahan Blandongan; Kelurahan Bugul Kidul; Kelurahan Kepel; Kelurahan Krampyangan; Kelurahan Gadingrejo; Kelurahan Gentong; Kelurahan Karangketug; Kelurahan Krapyakrejo; Kelurahan Petahunan; Kelurahan Randusari; Kelurahan Seban; Kelurahan Karanganyar; Kelurahan Petamanan;	APBD Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas PUPR Masyarakat																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kelurahan Purworejo dan Kelurahan Tembokrejo																						
	2.4 Kawasan Pariwisata																							
	1. Pemeliharaan dan peningkatan	Seluruh kota	- APBD Kota	- Dinas Pariwisata,																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	wisata yang sudah ada		- Swasta	Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas PUPR - Swasta																				
	2. Pengembangan kawasan wisata buatan	Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Pohjentrek dan Kelurahan Sekargadung	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas PUPR - Swasta																				
	2.5 Kawasan Permukiman																							
	2.5.1 Kawasan Perumahan																							
	1. Pengembangan Kawasan Perumahan	seluruh Kota Pasuruan	- Swasta - Masyarakat - APBN - APBD Kota	- Swasta - Masyarakat - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Permukiman																				
	2. Perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh	1. Kelurahan Gadingrejo; 2. Kelurahan Tamba'an; 3. Kelurahan Ngemplakrejo; 4. Kelurahan Panggungrejo; 5. Kelurahan Trajeng; 6. Kelurahan Mayangan; 7. Kelurahan Mandaranrejo; 8. Kelurahan Bugul Kidul; 9. Kelurahan Kandang sapi; 10. Kelurahan Bangilan; dan 11. Kelurahan Kebonsari.	- APBD Kota - Swasta - Masyarakat	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Swasta - Masyarakat																				
	2.5.2 Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan	- APBD Kota	- Dinas Pendidikan																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Tapaan, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Sebani, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purutreja; Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sekargadung dan Kelurahan Tembokrejo	Swasta	Dinas Kesehatan Dinas PUPR Swasta																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2.5.3 Pengembangan Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kandang sapi, Kelurahan Mandaranrejo	APBD	Dinas Lingkungan Hidup																				
	2.6 Kawasan Perdagangan dan Jasa																							
	1. Pengembangan Pasar Tradisional	Pasar Gadingrejo; Pasar Kebonagung; Pasar Karangketug; Pasar Besar Pasuruan; Pasar di Kecamatan Bugul Kidul; Pasar di Blandongan.	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	2. Pengembangan pasar khusus	Pasar mebel bukir; Pasar loak; dan Pasar hobi.	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	3. revitalisasi Pasar Poncol sebagai perdagangan jasa skala kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Swasta																				
	4. pengembangan perdagangan skala regional dan kota	Koridor Jalan Soekarno- Hatta dan Jalan Wachid Hasyim	Swasta Masyarakat	Swasta Masyarakat																				
	5. pengembangan perdagangan skala BWP dan lingkungan	Jalan Panglima Sudirman, Jalan Veteran, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Kartini,	APBD Kota Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Swasta																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan																						
	2. Kawasan peruntukan industri logam	Kelurahan Ngemplakrejo	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
	1.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya																							
	1. Kawasan Kompleks Kota Lama	Kompleks Pelabuhan – Jalan Balaikota – Jalan Pahlawan	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PUPR Dinas Pariwisata,																				

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
					I					II					III					IV				
					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Pemuda dan Olahraga																				
	2. Kawasan religi	Masjid Al-Anwar Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PUPR Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga																				

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Permasalahan Pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut merupakan identifikasi permasalahan berdasarkan gambaran umum kondisi daerah:

3.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- Pemulihan ekonomi di Kota Pasuruan lebih lambat setelah mengalami kontraksi saat pandemi.
- Adanya volatilitas yang tinggi menjadi indikasi adanya ketergantungan pada sektor-sektor tertentu atau kurangnya diversifikasi ekonomi sehingga lebih rentan terhadap guncangan ekonomi.
- Terjadi tren peningkatan ketimpangan pendapatan yang berkelanjutan sehingga berpotensi memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan dan akses yang tidak merata terhadap layanan dasar.
- Ketidakseimbangan antara perbandingan pertumbuhan pencari kerja dan ketersediaan kesempatan kerja

2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

- Belum optimalnya tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di Kota Pasuruan

3.1.2. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

- Masih terdapat 2 (dua) sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Pertambangan dan Penggalian; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Distorsi pada sektor Pertambangan dan Penggalian disebabkan banyak faktor di antaranya keterbatasan lahan yang tersedia untuk ekstraksi garam di Kota Pasuruan, ditambah ketergantungan pada cuaca, harga garam di pasaran masih banyak yang dikendalikan oleh para tengkulak, ditambah kebutuhan garam untuk rumah tangga dan industri di Kota Pasuruan banyak yang didatangkan dari luar wilayah, seperti Madura bahkan luar negeri seperti India dan Australia.

- Nilai PDRB per Kapita Kota Pasuruan berada di tingkat terendah dibandingkan seluruh kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

- Belum merata dan optimalnya kemampuan literasi dan numerasi terutama di tingkat pendidikan dasar

3.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

- Minimnya tenaga kependidikan terutama di SD sehingga melibatkan guru sebagai tenaga administrasi
- Masih adanya ketidakselarasan kebijakan antara di daerah dengan Pemerintah Pusat

2. Kesehatan

- Terjadi tren peningkatan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu
- Masih terdapat masyarakat yang lebih percaya terhadap tenaga non medis dan seringkali mengesampingkan pentingnya perawatan maternal melalui tenaga medis.
- Masih rendahnya kesadaran orang tua akan pola asuh dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan balita
- Masih munculnya kasus stunting baru
- Masih tingginya kasus Tuberkolosis

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pembangunan Jalan Lingkar Utara yang belum tuntas
- Masih kurangnya penanganan dampak banjir tahunan
- Masih terjadinya alih fungsi lahan untuk kebutuhan pembangunan wilayah
- Belum diterapkannya konsep Green Building dalam bangunan publik
- Penurunan kualitas irigasi sekunder dan tersier
- Perlu pengoptimalan penanganan banjir mengingat berkurangnya resapan air di daerah hulu sungai, permasalahan sampah, dan pendangkalan sungai serta dampak langsung terhadap Kota Pasuruan sebagai daerah hilir.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Rendahnya pemahaman masyarakat terkait Rumah Layak Huni
- Keterbatasan ketersediaan air baku untuk layanan air bersih
- Masih rendahnya akses sanitasi aman
- Belum optimalnya layanan pengolahan air limbah domestik
- Rendahnya kesadaran menjaga lingkungan permukiman

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - Belum adanya rumah singgah ketertiban dan keamanan
 - Hukuman terhadap penegakan Perda masih belum memberikan efek jera
6. Sosial
 - Belum optimalnya validitas data sehingga bantuan tidak tepat sasaran
 - Tingkat kemiskinan belum konsisten turun
 - Kesenjangan pendapatan masih relatif tinggi
 - Rendahnya akses lapangan kerja dan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas
 - Lembaga kesejahteraan sosial anak belum seluruhnya terakreditasi
7. Tenaga Kerja
 - Tingginya pengangguran terdidik (Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi)
 - Kualifikasi tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan penyedia lapangan pekerjaan
 - Minat berwirausaha masih rendah karena terbatasnya modal
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Masih Banyak Kejadian Kekerasan Perempuan dan anak yang belum dilaporkan
 - Masih rendahnya pemberdayaan perempuan
9. Pangan
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat tinggi serat
 - Kurangnya minat masyarakat dalam memilih makanan substitusi pengganti beras
 - Kualitas dan kuantitas produksi pangan masyarakat sebagian masih rendah, bisa dilihat dari pola konsumsi yg belum beragam, bergizi, seimbang dan aman, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga, keterbatasan pengetahuan dari pangan dan gizi
10. Lingkungan Hidup
 - Terjadi tren penurunan pada kualitas air dan tutupan lahan
 - Minimnya luasan area yang dapat dikembangkan untuk RTH
 - Tingginya tingkat konsumsi diiringi dengan penggunaan barang sekali pakai
 - Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menyebabkan penumpukan sampah di TPA
11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi

12. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan KB aktif
 - Masih adanya perkawinan anak
 - Berkembangnya isu-isu keagamaan dan budaya dapat memengaruhi persepsi dan praktik keluarga berencana
13. Perhubungan
 - Kurangnya pengembangan sistem informasi transportasi
 - Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
 - Belum optimalnya penataan dan pengelolaan parkir tepi jalan
 - Transportasi publik belum terintegrasi
 - Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana transportasi air
14. Komunikasi dan Informatika
 - Belum diimplementasikannya secara penuh arsitektur SPBE.
 - Minimnya peralatan dan sarana keamanan jaringan dan data
15. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - Manajemen koperasi yang kurang berkualitas
 - Minimnya data usaha mikro yang berkualitas
 - Minimnya diversifikasi jenis usaha koperasi
16. Penanaman Modal
 - Belum terfasilitasinya sarana prasarana pendukung potensi investasi
17. Kepemudaan dan Olahraga
 - Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung olahraga prestasi
18. Statistik
 - Terkendalanya proses manajemen data yang masih sekedar pengumpulan data, tetapi belum sampai dengan memberikan analisis dari data tersebut
 - Proses updating data oleh sebagian OPD belum secara real time
 - Konsistensi data pada Satu Data Indonesia masih kurang
19. Persandian
 - Keterbatasan SDM yang menguasai persandian
 - Ancaman kejahatan siber dan kebocoran data
20. Kebudayaan
 - Penetapan cagar budaya masih minim

- Cagar Budaya masih dimiliki perorangan/pribadi sehingga sulit untuk dikembangkan
 - Kesadaran masyarakat akan keberadaan cagar budaya yang masih rendah
21. Perpustakaan
- Kurang efektifnya Pembangunan Literasi Masyarakat
 - Belum terpenuhinya standarisasi penyediaan koleksi bahan bacaan
22. Kearsipan
- Masih rendahnya OPD yang Mengelola Arsip sesuai dengan Tata Kelola Kearsipan dengan baik
 - Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi kearsipan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
23. Kelautan dan Perikanan
- Maraknya alih fungsi lahan tambak menjadi pemukiman
 - Rendahnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan
24. Pariwisata
- Kurangnya pengembangan infrastruktur digital sebagai sarana promosi wisata
 - Minimnya diversifikasi atraksi pariwisata serta pengembangan atraksi wisata berkelanjutan
 - Kurangnya pelatihan dan peningkatan kualitas bagi SDM pelayanan pariwisata
 - Penguatan koneksi/integrasi/transportasi antar pariwisata belum optimal
 - Kurangnya minat investor dalam menanamkan modal di bidang pariwisata.
25. Pertanian
- Penurunan produksi pertanian
 - Pengendalian hama dan penyakit tanaman belum optimal
 - Ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik
 - Lahan pertanian berkurang
26. Peternakan
- Terbatasnya ketersediaan hijauan pakan
 - Ketersediaan pangan asal hewan yang belum sepenuhnya ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
 - Kondisi RPH yang belum modern dan higienis
 - Kapasitas pemotongan yang tidak memadai
 - Pengelolaan limbah tidak optimal.

27. Perdagangan

- Sarana dan prasarana perdagangan belum memenuhi SNI
- Berkembangnya toko swalayan tanpa ada batasan regulasi
- Belum adanya peraturan daerah yang mengatur kontribusi pasar modern terhadap produk lokal
- Belum optimalnya penataan PKL

28. Perindustrian

- Kawasan industri yang belum didukung akses dengan baik
- Minimnya ketersediaan SDM yang terampil di Kota Pasuruan
- Minimnya pembinaan dan mentoring industri kecil oleh pemerintah dan industri dengan skala lebih besar
- Produk yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan pasar

29. Sekretariat Daerah

- Minimnya kerjasama antar daerah
- Ketidaksiapan adaptasi atas perubahan regulasi dan indikator penilaian

30. Sekretariat Dewan

- Terlalu panjangnya alur panjang proses pengesahan Perda termasuk perlunya Harmonisasi Kemenkumham
- Minimnya SDM Penyusun produk hukum

31. Perencanaan

- Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
- Minimnya tingkat partisipasi SKPD dan masyarakat dalam forum penyampaian aspirasi pembangunan

32. Keuangan

- Kurangnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat Wajib Pajak (WP)/ wajib retribusi yang enggan membayar pajak/retribusi sehingga terjadi penunggakan
- Rasio PAD terhadap pendapatan masih rendah
- Manajemen pengelolaan aset belum optimal

33. Kepegawaian

- Nilai indeks profesionalisme ASN belum maksimal

34. Penelitian dan Pengembangan

- Masih belum terdapat SDM yang memenuhi kualifikasi Peneliti baik di Litbang maupun di OPD lain
- Masih terdapat hasil penelitian dan pengembangan yang belum termanfaatkan

35. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Masih rentan terjadi penyelewengan sistem pengendalian internal pada perangkat daerah

- Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah
- Dari segi kuantitas, permintaan revidi dari perangkat daerah cukup tinggi, akan tetapi seringkali belum memenuhi standar risiko untuk dapat di revidi
- Masih rendahnya kualitas SDM Inspektorat dari segi kualitas maupun kuantitas.

36. Fungsi Koordinasi dan Kewilayahan Kecamatan

- Belum adanya SOP yang jelas dari Perangkat Daerah Teknis Pemberi Pelayanan
- Kebijakan terkait alokasi dana kelurahan yang masih perlu ditingkatkan

37. Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait trantibum
- Fungsi pencegahan belum optimal
- Tingkat pemahaman masyarakat mengenai Ideologi Pancasila yang masih kurang
- Optimalisasi pendidikan politik untuk pemula

3.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Dalam menentukan isu strategis RPJPD, harus disesuaikan dengan kondisi 20 tahun ke depan. Dalam menentukan pembobotan isu – isu pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

3.2.1. Isu Global

Isu Merujuk pada permasalahan atau hal-hal yang dianggap penting dan memerlukan perhatian dalam konteks pembangunan daerah. Isu-isu ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Isu-isu ini menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Menunjukkan bahwa isu-isu yang dibahas tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terkait dengan dinamika global. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa banyak isu pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan aspek-aspek global untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyusunan RPJPD, pemahaman terhadap isu-isu global membantu pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika lingkungan global.

Beberapa isu global yang seringkali menjadi perhatian dalam RPJPD antara lain adalah perubahan iklim, ketahanan pangan, migrasi, teknologi, dan ekonomi global. Dengan mempertimbangkan isu-isu global ini, diharapkan RPJPD dapat menjadi instrumen yang lebih komprehensif dan relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Berikut merupakan rangkuman isu global yang diidentifikasi oleh Bappenas sehingga pemerintah daerah perlu mengantisipasi prediksi isu global maupun dapat merumuskan peluang yang didorong dengan melihat isu global ke depan.



Gambar III. 1 Isu Global dalam Perencanaan Pembangunan
Sumber: Bappenas, 2022

3.2.2. Isu Strategis Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Selain perhatian terhadap isu strategis global, sebagai upaya menyempurnakan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 bisa terlepas tahapan penyusunannya dengan perhatian terhadap isu strategis pemerintah di atasnya khususnya isu strategis jangka panjang nasional. Isu strategis jangka panjang nasional merupakan gambaran apa saja yang menjadi prioritas nasional dalam pembangunan 20 tahun ke depan. Implikasi terhadap Kota Pasuruan ialah, dikarenakan Kota Pasuruan bagian dari Negara Indonesia, sedikit banyak dalam penyusunan RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045 tidak dapat dilepaskan dari perhatian atau prioritas utama dari pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan, secara tidak langsung meskipun Kota Pasuruan hanya merupakan bagian kecil dari kota administratif di Provinsi Jawa Timur, namun sedikit banyak pasti memiliki kontribusi terhadap agregat pencapaian kinerja pemerintah pusat. Memerhatikan RPJPN Tahun 2025-2045, berikut diuraikan isu strategis nasional tahun 2025-2045.

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat, disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah

2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN), sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah, terjadinya pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata, disebabkan oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan serta belum optimalnya inovasi dan akses pasar internasional.
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut, potensi ekonomi laut belum dapat secara optimal dimanfaatkan untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.
6. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi, UMKM dan Koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja akan tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah.
7. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, penggunaan energi fosil yang masih tinggi namun selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan
9. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata
10. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, Tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.
11. Tata kelola pemerintahan belum optimal, Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan

tidak efektif karena Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.

12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah, Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
13. Demokratisasi Belum Optimal, Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
14. Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi, masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

3.2.3. Isu Strategis Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Sama halnya dengan pemetaan isu strategis jangka panjang nasional Kota Pasuruan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur tentunya tidak akan dapat terlepas dari isu strategis Provinsi Jawa Timur 20 tahun ke depan. Sehingga, berikut merupakan gambaran uraian isu strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045:

1. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal,
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan dan Pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Serta tantangan perubahan iklim.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Menitik beratkan upaya dalam meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

3.2.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pasuruan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mendefinisikan “Kebijakan” adalah arah atau tindakan yang

diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan. sedangkan, “Rencana” adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk tata ruang wilayah beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, dan RPJM Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan Rencana dan/atau program.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 17 goals yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting, karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.



Gambar III. 2 Integrasi TPB/SDGs dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2034

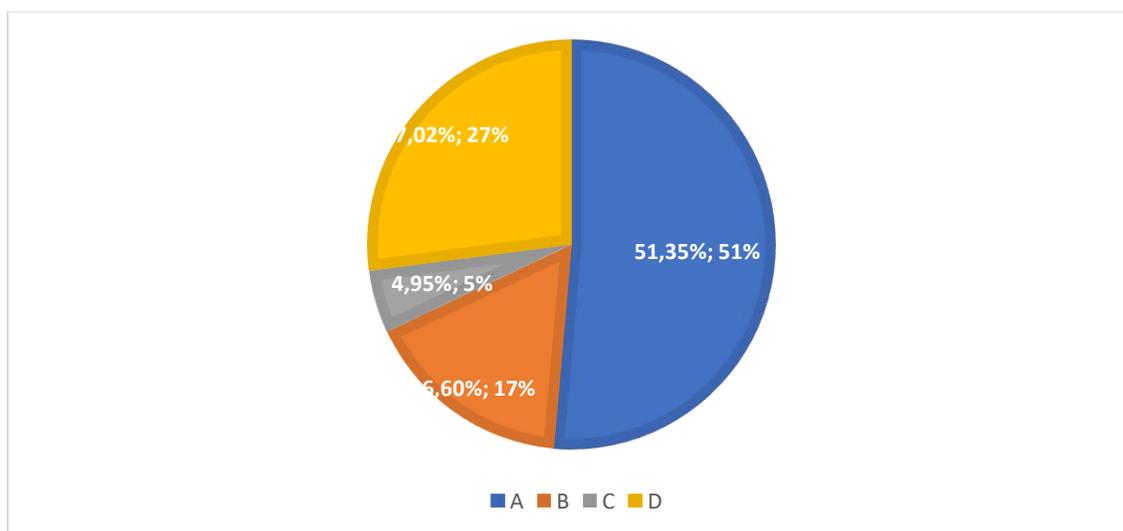
Hasil dari penyelenggaraan KLHS untuk RPJPD adalah Laporan KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Daerah untuk dijadikan sebagai informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KLHS RPJMD dan RPJPD 2022-2045 yang mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, kategori penilaian capaian Indikator TPB dibagi menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Kode Kategori	Nama Kategori
A	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
B	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional
C	Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
D	Indikator TPB yang tidak/belum ada data

Gambar III. 3 Kategori Penilaian Capaian Indikator TPB
Sumber: Permendagri Nomor 7 Tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB Kota Pasuruan, diperoleh rekapitulasi hasil capaian indikator berdasarkan 4 (empat) kategori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Adapun rekapitulasi capaian TPB Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar III. 4 Persentase Indikator Capaian TPB Kota Pasuruan
Sumber: KLHS RPJPD Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik capaian tersebut diperoleh data bahwa total untuk capaian indikator Kota Pasuruan adalah 222 indikator dengan dibagi menjadi 4 kategori capaian yaitu indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 114 indikator dengan persentase sebesar 51,35%, kemudian indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 37 indikator dengan persentase 16,67%. Sedangkan untuk indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebesar 11 indikator atau 4,95% dan indikator yang tidak ada data sebanyak 60 indikator dengan persentase sebesar 27,02%.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi dan skenario tersebut maka dirumuskan rekomendasi agar indikator-indikator yang masih memerlukan upaya tambahan dapat mencapai target sesuai dengan tahun yang diharapkan. Berikut merupakan beberapa indikator-

indikator yang termasuk di dalam kategori membutuhkan Upaya Tambahan:

Tabel III. 1 Indikator yang Membutuhkan Upaya Tambahan

No Indikator	Indikator
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B.
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
5.6.1.(b)	Pengertian dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB
8.1.1.(a)	PDB per kapita (ADHB)
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.

Sumber: KLHS RPJPD Kota Pasuruan, 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 34 indikator yang masih belum mencapai target dan memerlukan upaya tambahan. Dari indikator tersebut kemudian akan dirumuskan rekomendasi sesuai dengan kelompok isu strategis yang melingkupi indikator-indikator yang belum tercapai tersebut. Dari beberapa indikator yang termasuk di dalam tabel di atas akan dirumuskan alternatif skenario dengan harapan bahwa capaian indikator di atas akan lebih baik.

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa

depan. Isu-isu strategis mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani. Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah bidang perumahan yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

Dari penjelasan di atas, sudah selayaknya dalam menyusun dokumen kajian seperti KLHS dan dokumen perencanaan seperti Kota Pasuruan juga memiliki beberapa isu strategis. Dari kedua dokumen tersebut disandingkan dan dilinieritaskan dengan tabel yang tersajikan di bawah ini:

Tabel III. 2 Linieritas Isu Strategis KLHS dan Isu Strategis RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJPD
Akses air bersih, sanitasi dan sampah yang berkelanjutan	Penguatan Kota Pasuruan sebagai kota jasa dan perdagangan
Indeks kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Infrastruktur terintegrasi dalam mewujudkan Pasuruan kota jasa dan perdagangan
Pengentasan stunting dan pemerataan akses serta layanan kesehatan	Upaya kesehatan preventif, promosi pola hidup sehat serta layanan kesehatan berkualitas Efektivitas jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat
Perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan serta pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan	Masyarakat berbudaya dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal
Tata kelola pemerintahan	Layanan publik prima berbasis optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Peningkatan pendapatan asli daerah	Optimalisasi daya tarik investasi Kemandirian Fiskal Daerah
Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Inklusifitas dan peningkatan kualitas pendidikan Kontribusi dan daya saing seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan
Pemerataan akses dan kualitas ketahanan pangan	Ketahanan pangan dan lingkungan hidup dalam menghadapi ancaman perubahan iklim

Sumber: KLHS RPJPD Kota Pasuruan, 2024

3.2.5. Isu Strategis

Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Berikut merupakan hasil pembobotan isu strategis Kota Pasuruan yang telah melewati beberapa tahapan penyusunan isu strategis.

1. Upaya Kesehatan Promotif, Preventif dan Peningkatan Pola Hidup Sehat serta Layanan Kesehatan Berkualitas

Isu ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif, seperti kampanye pola hidup sehat, deteksi dini penyakit, serta pencegahan penyebaran penyakit. Selain itu, pentingnya layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan merata menjadi prioritas utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban penyakit kronis yang ke depannya menjadi ancaman yang nyata serta pengendalian penyakit menular yang harapannya dapat meningkatkan angka harapan hidup di Kota Pasuruan.

2. Infrastruktur terintegrasi dalam mewujudkan Pasuruan kota jasa dan perdagangan

Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi menjadi kunci dalam mendukung transformasi Kota Pasuruan menjadi kota jasa dan perdagangan yang kompetitif. Infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas umum, akan mempercepat arus barang dan jasa, meningkatkan efisiensi bisnis, dan menarik lebih banyak investasi ke kota ini. Pengembangan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan tata ruang. Selain itu Kota Pasuruan yang berada diantara wilayah strategis di kawasan megapolitan Kota Malang dan Kota Surabaya harapannya dapat mengoptimalkan peluang tersebut guna pengembangan Kota Pasuruan sebagai kota jasa dan perdagangan. Tidak hanya itu infrastruktur yang menjadi poin paling penting ialah infrastruktur layanan dasar diantaranya akses air bersih, sanitasi dan sampah yang berkelanjutan yang menjadi tantangan 20 tahun ke depan.

3. Inklusifitas dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi fondasi penting bagi kemajuan Kota Pasuruan. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, Kota Pasuruan dapat membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang relevan dan pelatihan guru yang berkesinambungan menjadi strategi utama dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global, dimana hal yang sangat realistis dan harus kita perhatikan bersama bahwa persaingan antara SDM tidak hanya sebatas persaingan intra SDM di Kota Pasuruan saja. Bahkan SDM ke depannya akan ditantang pula dengan kemajuan teknologi dimana jika tidak terampil maka perannya akan sangat mudah digantikan dengan komputer atau robotik.

4. Efektivitas Jaminan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Isu ini menekankan pentingnya jaminan sosial yang efektif dan inklusif bagi seluruh penduduk Kota Pasuruan. Program jaminan sosial yang dikelola dengan baik akan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, dan kaum miskin. Dengan demikian, jaminan sosial menjadi alat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat masyarakat. Selain itu ketepatan sasaran jaminan sosial menjadi tantangan ke depannya dimana hal yang perlu dipastikan ialah jaminan sosial didapatkan oleh keluarga atau orang yang tepat.

5. Kontribusi dan Daya Saing Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Pembangunan

Kota Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Upaya ini mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan. Daya saing masyarakat yang tinggi

akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan Pasuruan lebih tangguh dalam menghadapi persaingan regional dan global. Selain itu nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal lainnya harus dipertahankan dan dikuatkan sebagai identitas masyarakat Kota Pasuruan.

6. Masyarakat Berbudaya dan Penguatan Nilai Nilai Kearifan Lokal

Penguatan budaya lokal dan nilai-nilai kearifan menjadi landasan penting dalam pembangunan Kota Pasuruan. Masyarakat yang memahami dan menghargai budayanya akan lebih solid dan memiliki identitas yang kuat. Selain itu, pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal juga dapat menjadi daya tarik wisata budaya, yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian kota. Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya perlu dilakukan secara terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya. Dengan kearifan dan budaya lokal yang dijunjung tinggi, maka harapannya akan tercipta ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan sosial masyarakat Kota Pasuruan. Masyarakat dapat guyub rukun serta masyarakat akan menjadi *balancing* dan *controlling* dalam menjaga kondusifitas lingkungan sosial, yang mana ke depannya tentunya Kota Pasuruan akan menjadi kota yang kondusif, tenang, ramah anak, serta ramah gender tanpa adanya diskriminasi atau bahkan kekerasan terhadap perempuan.

7. Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim

Ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan menjadi isu strategis dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Kota Pasuruan perlu mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memperhatikan praktik pertanian ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Selain itu, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan kota, untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

8. Penguatan Kota Pasuruan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan

Penguatan peran Kota Pasuruan sebagai pusat jasa dan perdagangan menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya saing kota. Ini melibatkan pengembangan kluster industri, peningkatan kualitas layanan, penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, serta pengembangan pariwisata minat khusus seperti iconic payung madinah kota pasuruan dan wisata religi. Dengan mengoptimalkan potensi ini, Kota Pasuruan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha maupun wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota.

9. Optimalisasi Daya Tarik Investasi

Kota Pasuruan harus terus mengoptimalkan daya tarik investasi dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, menyederhanakan birokrasi, dan menyediakan insentif bagi investor. Dengan adanya kemudahan dalam berinvestasi, diharapkan semakin banyak modal yang masuk, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan

ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10. Kemandirian Fiskal Daerah

Peningkatan kemandirian fiskal merupakan upaya penting bagi Kota Pasuruan untuk memperkuat otonomi daerahnya. Dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih baik dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, kota ini dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Kemandirian fiskal juga memungkinkan Kota Pasuruan untuk lebih fleksibel dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

11. Layanan Publik Prima Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam era digital, optimalisasi teknologi informasi menjadi kunci untuk memberikan layanan publik yang prima. Kota Pasuruan berkomitmen untuk mengembangkan sistem layanan yang berbasis teknologi, yang memungkinkan akses yang lebih cepat, efisien, dan transparan bagi seluruh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung integrasi data dan sistem yang lebih baik antarinstansi, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan penerapan teknologi yang tepat, layanan publik di Kota Pasuruan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Berikut merupakan gambaran keselarasan isu strategis jangka panjang Kota Pasuruan serta linieritasnya terhadap isu jangka panjang Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025-2045, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 3 Linieritas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Isu Nasional	Isu Provinsi Jawa Timur	Isu Kota Pasuruan
Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal	Upaya Kesehatan Promotif, Preventif dan Peningkatan Pola Hidup Sehat serta Layanan Kesehatan Berkualitas
		Inklusifitas dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal	Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar	Efektivitas Jaminan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi		
Tata kelola pemerintahan belum optimal	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas	Masyarakat Berbudaya dan Penguatan Nilai Nilai Kearifan Lokal
		Kemandirian Fiskal Daerah

Isu Nasional	Isu Provinsi Jawa Timur	Isu Kota Pasuruan	
	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Layanan Publik Prima Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
Kepastian dan penegakan hukum masih lemah			
Demokratisasi belum optimal			
Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	Kontribusi dan Daya Saing Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Pembangunan	
Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah			
Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata		Penguatan Kota Pasuruan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan	
Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut		Optimalisasi Daya Tarik Investasi	
Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi			
Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas			
Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas			Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim
	Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan		

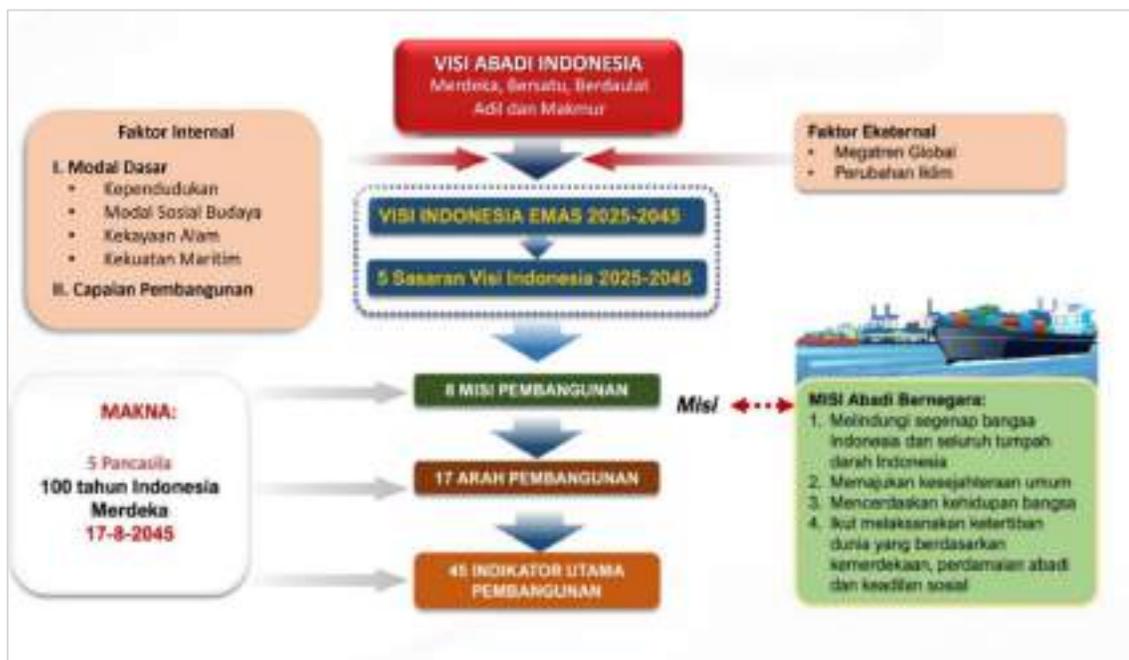
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Kota Pasuruan dengan Visi Misi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan telaah terhadap cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2045. Serta telaah misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Secara detail, penjabaran Visi dan Misi Pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

4.1.1. Telaah Visi RPJPN Tahun 2025-2045

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.



Gambar IV. 1 Kerangka Konseptual Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian

pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission. Berkaitan dengan keselarasan antara visi dan sasaran visi nasional akan dibahas pada sub bab Visi RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 disertai juga dengan keselarasan terhadap Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045.

4.1.2. Telaah Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Rumusan Visi dan Misi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merupakan rujukan penting dalam perumusan Visi dan Misi RPJPD daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.

Pada Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Berikut merupakan 5 sasaran visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional
4. Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat
5. Penurunan emisi GKR menuju *net zero emission*

Berkaitan dengan keselarasan antara visi dan sasaran visi Provinsi Jawa Timur akan dibahas pada sub bab Visi RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 disertai juga dengan keselarasan terhadap Visi RPJPD 2025-2045.

4.1.3. Visi RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Secara esensial, visi merupakan ungkapan atau konsepsi ideal tentang kondisi yang diinginkan di masa depan. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan, visi menggambarkan aspirasi atau keadaan ideal yang diinginkan dan diusahakan untuk dicapai hingga tahun 2045. Lebih dari sekedar harapan, visi untuk Kota Pasuruan pada tahun 2045 harus diupayakan dan menjadi bentuk komitmen dari semua pihak terkait di kota tersebut, terutama Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Oleh karena itu, penetapan visi Kota Pasuruan melibatkan pertimbangan yang mendalam, termasuk

isu-isu strategis yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RPJPD sebagaimana disebutkan sebelumnya, serta melibatkan diskusi kelompok fokus lintas pemangku kepentingan, termasuk elemen masyarakat.

Penetapan visi juga mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Keselarasan antara dokumen-dokumen perencanaan secara vertikal dianggap sebagai suatu prasyarat mutlak. Dengan memperhitungkan berbagai kondisi dan menanggapi tantangan yang dihadapi hingga tahun 2045, maka Visi Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 adalah:

KOTA PASURUAN MAJU, HARMONI, DAN BERKELANJUTAN

Visi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 merupakan sebuah gambaran yang menjadi cita-cita luhur bersama masyarakat Kota Pasuruan yang mana sekaligus menegaskan identitas Kota Pasuruan. Pada prinsipnya dengan ditetapkannya Visi Kota Pasuruan Maju, Harmoni, dan Berkelanjutan diharapkan 20 tahun ke depan akan diarahkan kepada optimalisasi Kota Pasuruan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan.

Secara umum merujuk dan mengacu terhadap Visi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 terdapat tiga *keyword* penting yakni Maju, Harmoni, dan Berkelanjutan. Maju dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 ialah dimana ekonomi mengalami penggeliatan secara merata. Selain itu konteks maju ialah birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan yang berkembang pesat, khususnya berkaitan terhadap layanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti *robotic*, *Internet of things*, pemanfaatan *big data* dan *AI*, serta yang tidak kalah pentingnya ialah kapasitas fiskal Kota Pasuruan mampu mengantarkan Kota Pasuruan menjadi kota yang semakin mandiri yang berkontribusi besar terhadap pembangunan regional. Dengan posisi strategis berada di antara kawasan megapolitan Surabaya-Malang harapannya Kota Pasuruan dapat melaju pesat. Maju juga dapat dikontekskan dalam membangun manusianya, dengan tipologi yang diperkirakan pada tahun 2045 wilayah perkotaan proporsinya mencapai 60% dan desa 40% maka Kota Pasuruan akan berpotensi mengalami arus urbanisasi tinggi khususnya usia produktif. Masyarakat Kota Pasuruan harus dibangun dan mampu untuk bersaing. Tidak hanya persaingan antar manusia bahkan persaingan antara manusia dengan teknologi.

Pembangunan ekonomi tanpa diimbangi dengan masyarakat yang harmoni, justru akan memunculkan berbagai problematik Kota Pasuruan. Masyarakat harus ditingkatkan kesejahteraannya serta ditanamkan kearifan lokal dan budaya sehingga tumbuhnya ekonomi dan pembangunan kota tidak akan meninggalkan degradasi moral. Potensi konflik harus ditekan, memangkas ketimpangan dan menuntaskan kemiskinan ekstrem merupakan sebuah keharusan. Selain itu seluruh elemen pembangunan baik SDM, ekonomi dan masyarakatnya harus memegang teguh konteks berkelanjutan. Dalam hal ini berkelanjutan juga dikhususkan dalam konteks pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Berikut merupakan keselarasan visi serta poin-poin visi jangka panjang Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 terhadap visi Nasional dan Provinsi Jawa Timur:



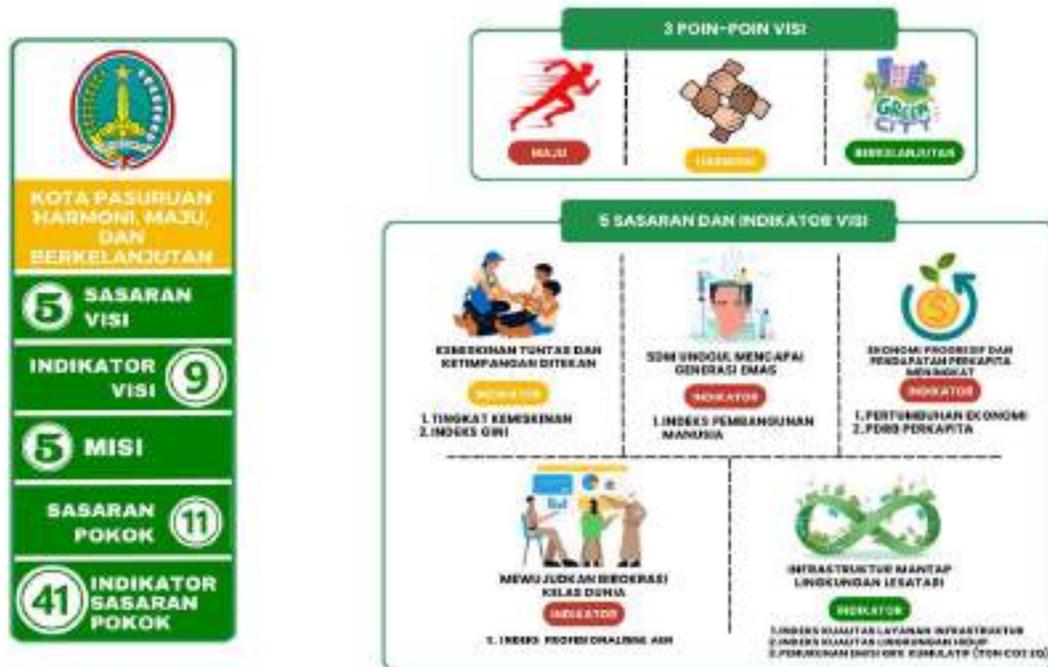
Gambar IV. 2 Keselarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Gambaran di atas menunjukkan bahwa terdapat dua hal kesamaan diantara ketiga misi tersebut yakni melingkupi maju dan berkelanjutan. Sedangkan masing-masing dari visi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Pasuruan diwarnai dengan kekhasan masing-masing visi yakni “Berdaulat” yang tertuang pada visi nasional, “Berakhlak dan Mendunia” yang tertuang pada visi Provinsi Jawa Timur, dan “Harmoni” yang tertuang pada visi Kota Pasuruan. Berdasarkan uraian di atas maka untuk memastikan ketercapaian pokok-pokok visi RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 maka ditetapkanlah 5 sasaran visi sebagai representasi tolak ukur keberhasilan pencapaian daerah dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang. Lima sasaran Visi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Sumber Daya Manusia Unggul Mencapai Generasi Emas
2. Kemiskinan Tuntas dan Ketimpangan Ditekan
3. Ekonomi Progresif dan Pendapatan Per Kapita Meningkat
4. Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia
5. Infrastruktur Mantap Lingkungan Lestari

Berikut merupakan ilustrasi dan visualisasi 3 pokok-pokok visi dan linieritasnya terhadap 5 sasaran visi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:



Gambar IV. 3 Visi, Sasaran Visi dan Misi RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045

Sasaran Visi pertama, SDM Unggul Mencapai Generasi Emas digambarkan bahwa cita-cita besar Kota Pasuruan pada tahun 2045 Kota Pasuruan dipenuhi oleh generasi emas, generasi produktif yang tidak hanya berdasarkan usianya saja, melainkan juga produktivitas serta kontribusinya terhadap pembangunan. Representasi dari SDM terbangun dengan generasi emas ialah melalui Indeks Modal Manusia yang mana fokus terhadap membangun manusia merujuk kepada pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi utama pembangunan manusia.

Sasaran Visi kedua, Kemiskinan Tuntas dan Ketimpangan Ditekan Kesejahteraan sosial khususnya penuntasan kemiskinan dijadikan prioritas Kota Pasuruan untuk dituntaskan, yang diharapkan dalam jangka panjang perencanaan Kota Pasuruan 2025-2045 dapat dituntaskan. Fokus kesejahteraan sosial tidak hanya terhadap kemiskinan, melainkan juga fokus dalam memangkas kesenjangan antar kelas pendapatan. Kedua fokus tersebut direpresentasikan melalui indikator tingkat kemiskinan dan indeks gini.

Sasaran Visi ketiga, Ekonomi Progresif Pendapatan Perkapita Meningkatkan artinya Kota Pasuruan harus mampu memanfaatkan *opportunitasnya* yang berada di wilayah antara kawasan megapolitan Malang dan Surabaya. Kota Pasuruan yang fokus terhadap perdagangan dan jasa dan sangat identik menjadi wisata religi memiliki keunikan dan alasan tersendiri untuk dikunjungi. Sehingga representasi dari progresifnya ekonomi ialah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Sasaran Visi keempat, Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan untuk dapat menjawab seluruh tuntutan layanan masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan reformasi birokrasi sehingga birokrasi yang saat ini bertransformasi menjadi birokrasi yang agile dan adaptif. Sehingga indikator kinerja sebagai representatif dari sasaran tersebut ialah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran Visi kelima, Infrastruktur Mantap Lingkungan Hidup Lestari menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan yang mana dengan tipologi perkotaan dan letaknya yang cukup strategis berada di antara 2 kota megapolitan yaitu Kota Malang dan Kota Surabaya tentunya tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan yang mantap, melainkan titik tekannya justru pada kelestarian lingkungan yang menjadi poin utama. Degradasi lingkungan saat ini sangat mengkhawatirkan hingga berdampak pada perubahan iklim yang menjadi ancaman nyata untuk manusia. Sehingga Kota Pasuruan harus memiliki *effort* yang lebih bila untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari, seimbang antara pembangunan pada sisi ekonomi dan infrastrukturnya.

Sebagai upaya memastikan bahwa sasaran visi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 linear dan mendukung ketercapaian sasaran visi Provinsi Jawa Timur dan RPJPN Tahun 2025-2045. Berikut merupakan linieritas sasaran visi Kota Pasuruan terhadap sasaran visi Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Tabel IV. 1 Linieritas Sasaran Visi Kota Pasuruan Terhadap Sasaran Visi Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Sasaran Visi RPJPN 2025-2045	Indikator	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045	Indikator	Sasaran Visi RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045	Indikator
Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju	GNI Per Capita (USD)	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	Ekonomi Progresif dan Pendapatan Perkapita Meningkat	Pertumbuhan Ekonomi
	Kontribusi PDB Maritim		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)		PDRB Perkapita
	Kontribusi PDB Manufaktur		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat kemiskinan	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	Kemiskinan Tuntas dan Ketimpangan Ditekan	Tingkat Kemiskinan
	Rasio Gini		Rasio gini (Indeks)		Indeks Gini
	Kontribusi PDRB KTI		Kontribusi PDRB Provinsi		
Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Index	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia	Indeks Reformasi Birokrasi
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	SDM Unggul Mencapai Generasi Emas	Indeks Pembangunan Manusia
Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Penurunan emisi GKR menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	Infrastruktur Mantap Lingkungan Lestari	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
					Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan uraian di atas guna memastikan visi tercapai serta sasaran visi dapat terkawal dan termonitor dengan baik dalam kurun waktu dua puluh tahun, maka ditetapkan target yang dibagi berdasarkan periodisasi RPJPD Kota Pasuruan sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Target Sasaran Visi berdasarkan Periodesasi RPJPD Kota Pasuruan

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Target	
				Baseline	Target
				2025	2045
KOTA PASURUAN MAJU, HARMONI DAN BERKELANJUTAN	SDM Unggul Mencapai Generasi Emas	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	77.17	86.22
	Kemiskinan Tuntas dan Ketimpangan Ditekan	Tingkat Kemiskinan	%	5,99 - 5,44 *	0,45 - 0,13 *
		Indeks Gini	Skor	0.32	0.3
	Ekonomi Progresif dan Pendapatan Perkapita Meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.5	7.55
		PDRB Perkapita	Rp	55,162,150.00	154,483,244.00
	Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia	Indeks Profesionalisme ASN	Predikat	59,05	61,50
	Infrastruktur Mantap Lingkungan Lestari	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Skor	4.25	4,85
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	%		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,01	63,59

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

4.2. Misi Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Sebagai upaya mewujudkan visi Kota Pasuruan Maju, Harmoni dan Berkelanjutan ditempuh melalui 5 misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2025-2045.

Misi Pertama yakni Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter, Pada dasarnya, kemajuan dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan akan diperkuat oleh dukungan secara keseluruhan dari masyarakat Kota Pasuruan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan asalkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka telah mencapai tingkat kesiapan dan daya saing yang memadai. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama Kota Pasuruan adalah meningkatkan kualitas SDM agar dapat bersaing secara efektif.

Fokus pada peningkatan daya saing menjadi penting mengingat gambaran masa depan beberapa tahun ke depan, di mana persaingan tidak lagi terbatas pada tingkat individu manusia. Dengan perkembangan teknologi, pesaing utama bagi SDM bukan hanya sesama manusia, melainkan juga teknologi informasi. Oleh karena itu, misi Kota Pasuruan melibatkan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM

dengan memperhatikan aspek daya saing, baik dalam keterampilan tradisional maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat di Kota Pasuruan akan lebih siap menghadapi tantangan global dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Kedua adalah Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Dalam konteks ini, pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Pasuruan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki daya dan budaya yang kuat dalam mendukung tingkat kesejahteraan yang optimal.

Aspek "Masyarakat Berdaya" menggambarkan upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Peningkatan keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap peluang ekonomi akan menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan Kota Pasuruan.

Sementara itu, aspek "Masyarakat Berbudaya" menekankan pada pentingnya memelihara dan mengembangkan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, serta toleransi di antara beragam lapisan masyarakat. Melalui pemeliharaan budaya lokal, Kota Pasuruan dapat membangun identitas yang kuat dan keberagaman yang harmonis.

Dengan menciptakan masyarakat yang berdaya dan berbudaya, Kota Pasuruan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang menyeluruh, di mana setiap warga dapat menikmati kondisi kehidupan yang layak, adil, dan seimbang. Dalam rentang waktu 2025-2045, pembangunan ini diarahkan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan jangka panjang, dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang mungkin muncul di masa depan.

Misi Ketiga Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Transformasi ekonomi berdaya saing menandakan komitmen Kota Pasuruan untuk menempatkan pembangunan ekonomi ke dalam sebuah perubahan yang cukup fundamental dalam periode perencanaan jangka panjang, menjadi pusat ekonomi yang dinamis dan berdaya saing tinggi.

Kota Pasuruan yang merupakan kota kecil dengan tipologi masyarakat perkotaan tentunya tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sehingga arah transformasi ekonomi diarahkan terhadap optimalisasi Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan dan jasa.

Misi Keempat Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima, "Birokrasi Adaptif" mengacu pada komitmen Pemerintah Kota Pasuruan untuk menghadirkan sistem birokrasi yang responsif dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Fokus utama adalah memastikan bahwa struktur birokrasi dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Pentingnya "Mewujudkan Layanan Publik Prima" menandakan upaya Pemerintah Kota Pasuruan untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Misi ini mencakup peningkatan kualitas layanan melalui penerapan

teknologi informasi, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.

Misi Kelima Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, Pembangunan infrastruktur yang efisien dan terintegrasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

"Berkelanjutan" menjadi kata kunci dalam pencapaian tujuan ini, di mana infrastruktur yang dibangun harus memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam akan menjadi fokus utama. Dengan pendekatan berkelanjutan, Kota Pasuruan berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Pada akhirnya, tujuan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Pasuruan adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, dan menjaga kelestarian alam. Infrastruktur dan lingkungan hidup ditempatkan pada wilayah landasan transformasi dimana infrastruktur dan lingkungan hidup menjadi pondasi seluruh transformasi Kota Pasuruan. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan *mindstreaming* untuk seluruh lini dan seluruh aspek. Infrastruktur tidak lagi menjadi *goals* utama pembangunan namun menjadi landasan pembangunan.

Selama periode 2025-2045, Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui inovasi, pelatihan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi terkini. Adapun dalam upaya mewujudkan layanan publik prima, pemerintah akan secara terus-menerus memperbaiki prosedur, mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan publik.

Dengan mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota Pasuruan bertujuan menciptakan lingkungan administratif yang dinamis, tanggap, dan bersih korupsi yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan dampak positif pada pembangunan Kota Pasuruan secara keseluruhan.

Berikut merupakan konstruksi Visi, Misi, dan Sasaran Pokok Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:



Gambar IV. 4 Kontruksi Visi, Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Gambaran tersebut menegaskan bahwa Kota Pasuruan Maju, Harmoni, dan Berkelanjutan memiliki landasan strategis yang terdiri dari lima misi kunci yang meliputi beragam aspek pembangunan. Misi-misi ini terbagi menjadi transformasi Kota Pasuruan yang menitikberatkan SDM berdaya saing dan berkarakter, kesejahteraan sosial, ekonomi berdaya saing, serta birokrasi adaptif. Selain itu, terdapat satu misi tambahan yang menjadi dasar transformasi, yaitu misi kelima yang berkaitan dengan infrastruktur, konektivitas, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan memegang peranan krusial dalam mendukung pencapaian empat misi lainnya. Kedua aspek ini diposisikan sebagai penopang utama pembangunan, bukan sekadar tujuan akhir. Infrastruktur yang berkelanjutan sebagai alat untuk mencapai sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, kesejahteraan masyarakat yang merata, ekonomi berdaya saing, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Sementara itu, nilai-nilai filosofis seperti merata dan berkeadilan, berkesinambungan, serta berkelanjutan menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan lima misi tersebut. Keseluruhan nilai-nilai ini menjadi pedoman yang mengarahkan pembangunan Kota Pasuruan menuju masa depan yang lebih baik antara tahun 2025 hingga 2045. Meskipun tidak selalu terukur secara kuantitatif dan memiliki arah kebijakan yang konkret, nilai-nilai ini menjadi panduan dalam upaya mencapai visi Kota Pasuruan yang harmoni, maju, dan berkelanjutan.

Sebagai upaya memastikan linieritas pencapaian misi RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045, berikut merupakan linieritas misi Nasional, Provinsi Jawa Timur, serta Kota Pasuruan.

Tabel IV. 3 Linieritas Misi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Agenda	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045	Misi RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045
Transformasi Indonesia	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
	Transformasi Tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Transformasi Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima
	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas	Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Pembangunan Sarana dan Prasarana yang
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas & Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Kota Pasuruan 2025-2045

Sebagai bagian dari usaha untuk menjamin pencapaian cita-cita Kota Pasuruan pada tahun 2045, perencanaan jangka panjang Kota Pasuruan, yang mencakup periode 20 tahun, menjadi krusial untuk diarahkan dan dipastikan dengan langkah-langkah konkret. Tanpa arahan yang jelas, cita-cita besar Kota Pasuruan mungkin sulit tercapai, terutama karena semakin panjangnya perencanaan dapat meningkatkan tingkat ketidakpastian. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan membutuhkan pencapaian *milestone* perencanaan yang merinci langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memastikan tercapainya cita-cita pada tahun 2045.

Berlandaskan Permendagri 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa arah kebijakan merupakan alat konkret untuk mengarahkan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ini memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih efektif dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan juga menjadi panduan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap.

RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045, sesuai dengan konsep tersebut, dibagi menjadi empat arah kebijakan umum. Setiap arah kebijakan mencakup periode lima tahun, dengan tujuan mencapai sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mengikuti arah kebijakan nasional, Kota Pasuruan sebagai wilayah administratif di bawah Provinsi Jawa Timur berusaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Secara rinci, empat arah kebijakan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 meliputi periode pertama (2025-2029), periode kedua (2030-2034), periode ketiga (2035-2039), dan periode keempat (2040-2045). Visi ini mencerminkan komitmen Kota Pasuruan untuk mengembangkan rencana pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan nasional, serta menggambarkan pandangan masa depan Kota Pasuruan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjangnya.



Gambar V. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045

Periode Pertama (2025-2029) fokus terhadap Pemantapan Landasan Pembangunan, Pada tahapan periode pertama RPJPD Kota Pasuruan (2025-2029), terdapat fokus yang ditekankan untuk memantapkan landasan pondasi pembangunan. Rincian fokus pada periode ini mencakup pemenuhan layanan dasar, penguatan modal sosial, pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata, serta penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan, termasuk transformasi tata kelola pemerintah.

Pertama, upaya pemenuhan layanan dasar dijadikan sebagai landasan utama pembangunan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi guna memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan masyarakat. Pemastian pelayanan dasar menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat Kota Pasuruan.

Kedua, fokus pada penguatan modal sosial menjadi landasan utama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ini melibatkan peningkatan kerjasama dan solidaritas antar warga, memperkuat jaringan sosial, serta mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi tantangan sosial. Modal sosial yang kuat akan memberikan fondasi yang solid untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur berkelanjutan terintegrasi dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Dalam periode ini, fokus diberikan pada pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk jaringan transportasi, energi, dan teknologi informasi. Integrasi infrastruktur ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor-sektor ekonomi utama.

Terakhir, penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan menjadi langkah krusial dalam transformasi tata kelola pemerintah. Upaya ini melibatkan penyusunan dan pembaruan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta perbaikan kelembagaan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transformasi tata kelola pemerintah menjadi landasan yang kokoh untuk mendukung semua aspek pembangunan Kota Pasuruan.

Dengan menjalankan rangkaian fokus pada periode pertama ini, diharapkan Kota Pasuruan dapat membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk mencapai cita-cita pembangunan jangka panjangnya.

Pada tahapan periode kedua RPJPD Kota Pasuruan (2030-2034), fokus utama tertuju pada percepatan lini pembangunan. Rincian fokus pada periode ini melibatkan percepatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana sosial dasar, penguatan promosi investasi, hilirisasi produk unggulan Kota Pasuruan, penguatan kualitas infrastruktur dasar penunjang perekonomian, serta mencapai reformasi birokrasi yang berdampak.

Pertama, percepatan kualitas SDM menjadi modal utama untuk pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Kualitas SDM yang unggul akan menjadi dasar utama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan ekonomi di masa depan.

Kedua, upaya percepatan pemenuhan sarana dan prasarana sosial dasar menjadi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, dan fasilitas umum lainnya dipercepat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, penguatan promosi investasi dan hilirisasi produk unggulan Kota Pasuruan menjadi strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan mendukung investasi, promosi produk unggulan, dan mengembangkan nilai tambah dalam produksi, Kota Pasuruan dapat memperluas pasar dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Hal tersebut tentunya sejalan dengan arah kebijakan dimana meningkatkan kualitas infrastruktur dasar juga merupakan sebuah upaya menarik minat investasi di Kota Pasuruan.

Terakhir, mencapai reformasi birokrasi yang berdampak menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintahan. Upaya reformasi birokrasi melibatkan penyederhanaan proses, penerapan teknologi informasi, dan perbaikan kelembagaan untuk meningkatkan responsivitas dan pelayanan publik. Dengan menjalankan rangkaian fokus pada periode kedua ini, diharapkan Kota Pasuruan dapat mencapai percepatan pembangunan yang signifikan, menjawab tuntutan perubahan global, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada tahapan periode ketiga RPJPD Kota Pasuruan (2035-2039), fokus utama ditekankan pada Peningkatan Daya Saing Daerah dalam segala lini. Rincian fokus pada periode ini melibatkan peningkatan karakter Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kearifan lokal untuk mencapai ketentraman sosial masyarakat, perluasan pasar dan sumber-sumber potensi ekonomi baru, integrasi pembangunan infrastruktur, serta akselerasi integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik.

Pertama, peningkatan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan dan pengembangan kualitas SDM yang berkarakter akan menciptakan tenaga kerja yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan tuntutan global yang semakin dinamis.

Kedua, penguatan kearifan lokal dijadikan landasan untuk mencapai ketentraman sosial masyarakat. Upaya ini melibatkan pelestarian dan pengembangan kearifan lokal, serta penguatan budaya daerah untuk menjaga identitas serta meningkatkan rasa solidaritas diantara warga. Kearifan lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap harmoni sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, perluasan pasar dan sumber-sumber potensi ekonomi baru menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan mengidentifikasi dan menggali potensi ekonomi yang belum tergarap, Kota Pasuruan dapat mengembangkan sektor ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan mendiversifikasi perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu

infrastruktur yang berkelanjutan didorong untuk terintegrasi pada seluruh lini.

Terakhir, akselerasi integrasi teknologi informasi menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Penerapan teknologi informasi di seluruh sektor pelayanan publik diharapkan dapat mempercepat proses, meningkatkan aksesibilitas, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan menggalang upaya pada rangkaian fokus pada periode ketiga ini, Kota Pasuruan diharapkan dapat memperkuat daya saingnya di tingkat regional dan nasional, menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahapan periode keempat RPJPD Kota Pasuruan (2040-2045), fokus utama tertuju pada mewujudkan Pasuruan Kota Maju, Harmoni, dan Berkelanjutan. Rincian fokus pada periode ini melibatkan SDM unggul berdaya saing, masyarakat yang berkarakter mandiri dan sejahtera, pondasi ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan, infrastruktur mantap lingkungan hidup lestari, serta birokrasi yang prima, kolaboratif, dan adaptif.

Pertama, peningkatan SDM unggul berdaya saing menjadi fokus kunci untuk memastikan Kota Pasuruan menjadi kota maju. Ini melibatkan upaya terus-menerus dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan mampu bersaing ditingkat global. SDM yang berdaya saing akan menjadi pilar utama dalam mendorong inovasi dan kemajuan di berbagai sektor.

Kedua, masyarakat yang berkarakter mandiri dan sejahtera menjadi landasan untuk mencapai harmoni dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program pengembangan keterampilan, peningkatan akses terhadap pekerjaan, dan pelibatan aktif dalam pembangunan lokal akan mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Selanjutnya, pondasi ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan terintegrasi dengan pembangunan sektor unggulan menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, seperti usaha mikro dan kecil, serta mengintegrasikan pembangunan sektor unggulan, Kota Pasuruan dapat menciptakan keberagaman ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Selain itu pembangunan ekonomi yang dibangun tidak hanya menargetkan tingginya pertumbuhan ekonomi melainkan juga infrastruktur mantap dan lingkungan hidup lestari.

Terakhir, birokrasi yang prima, kolaboratif, dan adaptif menjadi langkah krusial dalam menopang implementasi seluruh fokus pada periode keempat ini. Dengan mengoptimalkan kinerja birokrasi, membangun kolaborasi antar instansi, dan menjadikan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Kota Pasuruan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Melalui rangkaian fokus pada periode keempat ini, diharapkan Kota Pasuruan dapat mencapai status sebagai kota maju, harmonis, dan

berkelanjutan, yang diwarnai oleh SDM unggul, masyarakat sejahtera, ekonomi yang beragam, dan birokrasi yang responsif.

Berikut merupakan gambaran umum arah kebijakan Kota Pasuruan per periode pada RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045:

 KOTA PASURUAN 2025-2045	 2025-2029 Pemantapan Landasan Pembangunan	 2030-2034 Percepatan keseluruhan Lini Pembangunan	 2035-2039 Peningkatan Daya Saing Daerah	 2040-2045 Kota Pasuruan Maju, Harmoni dan Berkelanjutan
 Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter	Peningkatan layanan dasar sebagai landasan pembangunan	Percepatan kualitas SDM sebagai Modal Utama Pembangunan	Sumber Daya Manusia Berkarakter	SDM Unggul Berdaya Saing
 Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Menuju Kesejahteraan Sosial	Aksesibilitas Pelayanan Masyarakat Kesejahteraan Sosial	Penguatan Kesejahteraan Sosial berbasis Sumberdaya	Penguatan Layanan Sosial Masyarakat berbasis Kearifan Lokal	Masyarakat Mandiri dan Sejahtera
 Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan	Optimalisasi Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Penguatan Promosi Inovasi Berbasis Milik, Praktek, Unggulan, dan Berkeadilan	Perluasan Kapan-Cala Sumber-Sumber Potensial Ekonomi Baru	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Berbasis Inovasi
 Transformasi Birokrasi Adaptif Menuju Layanan Publik Prima	Renataas Regulasi dan Kabupaten Dasar Akseptabilitas Jasa Transformasi Tata Kelola Pemerintah	Akselerasi Reformasi Birokrasi yang Berdampak	Digitalisasi Layanan Publik Terintegrasi	Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif
 Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur Penunjang dan Dasar yang Merata	Penguatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Terintegrasi	Infrastruktur Mantap Lingkungan Hidup Sehat

Gambar V. 2 Arah Kebijakan RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045 berdasarkan Periodisasi

Sumber: Bappellitbangda Kota Pasuruan, 2024

5.1.1. Arah Kebijakan Misi I Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter

Dalam mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Berkarakter di Kota Pasuruan tidak lagi berkaitan dengan akses pendidikan dan kesehatan. Namun sudah fokus terhadap pemenuhan aspek kualitas dan daya saing. Dengan tipologi perkotaan yang mana jumlah masyarakat dan wilayah yang tidak terlalu besar tentunya persoalan terkait pembangunan SDM di Kota Pasuruan tidak sekompleks di kota-kota besar atau kabupaten.

Tahapan awal pembangunan SDM difokuskan terhadap pemenuhan layanan dasar pendidikan kesehatan sebagai landasan pembangunan SDM. Dimana periode ini memastikan bahwa masyarakat seluruhnya dapat memperoleh akses layanan dasar secara merata dan mudah. Kemudian baru pada tahapan selanjutnya fokus terhadap percepatan kualitas. Pada periode kedua tidak lagi melulu berbicara permasalahan akses, pada tahapan ini fokus utama harus berorientasikan kualitas. Tahapan selanjutnya ialah penguatan karakter SDM Masyarakat Kota Pasuruan itu sendiri. Pengembangan karakter tidak dapat dilepaskan, karena karakter berkaitan dengan identitas dan nilai budaya yang ditanamkan, dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Sehingga setelah tahapan tersebut dilalui harapannya pada periode keempat dapat terwujud SDM berdaya saing dan berkarakter.



Gambar V. 3 Arah Kebijakan Misi I
Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan uraian penahapan arah kebijakan misi membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter di atas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Pasuruan dalam 20 tahun ke depan yang tentunya mengacu terhadap arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur:

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap.
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Peningkatan kualitas layanan sarana prasarana dan SDM Kesehatan
4. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
5. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
6. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
8. Peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis keluarga berencana
9. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
10. Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman.
11. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
12. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
13. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
14. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana
15. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
16. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan

karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).

17. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
18. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
19. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
20. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
21. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
22. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas dan berbasis keunggulan wilayah
23. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
24. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
25. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI.

5.1.2. Arah Kebijakan Misi II Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Menciptakan masyarakat Kota Pasuruan yang mandiri dan sejahtera terfokus terhadap pengentasan kemiskinan serta menjaga kondusifitas sosial dan ketentraman ketertiban umum. Tahap pertama yakni fokus terhadap penguatan modal sosial yang menjadi landasan utama kesejahteraan sosial. Selanjutnya periode selanjutnya fokus terhadap pemenuhan sarana dan prasarana sosial. Poin ini sangat penting mengingat proyeksi demografi menunjukkan peningkatan proporsi lansia secara perlahan hingga tahun 2045. Selanjutnya ialah penguatan terhadap kearifan lokal dalam mewujudkan ketentraman sosial masyarakat. Penguatan kearifan lokal dengan menanamkan nilai-nilai budaya menjadi modal dasar. Terakhir harapannya akan dapat tercipta masyarakat berkarakter, mandiri, dan Sejahtera.



Gambar V. 4 Arah Kebijakan Misi II Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan uraian penahapan arah kebijakan misi menciptakan masyarakat berkarakter, mandiri, dan sejahtera, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Pasuruan dalam 20 tahun ke

depan yang tentunya mengacu terhadap arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.
2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
3. Perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial
4. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
5. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
6. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
7. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya
8. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
9. Penguatan kerja sama antar daerah dalam rangka penguatan kebijakan penguatan rantai pasok pangan (*Food Supply Chain*)
10. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia
11. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
12. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
13. Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan

5.1.3. Arah Kebijakan Misi III Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan. Tahapan pertama pembangunan ekonomi optimalisasi produktivitas sektor unggulan. Sektor unggulan Kota Pasuruan yang ada saat ini khususnya sektor perdagangan dan jasa dikembangkan. Pada periode selanjutnya penguatan promosi investasi dengan modal sektor unggulan yang telah kuat dan pada periode ini hilirisasi sektor unggulan lebih diupayakan lagi. Kemudian pada periode ke-3, akses pasar dibuka selebar-lebarnya dimana pada periode sebelumnya hilirisasi telah dioptimalkan. Terakhir maka harapannya pondasi ekonomi berbasis kerakyatan yang

terintegrasi pembangunan sektor unggulan Kota Pasuruan difokuskan pada tahun 2045.



Gambar V. 5 Arah Kebijakan Misi III
Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan uraian penahapan arah kebijakan misi ekonomi dan infrastruktur di atas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Pasuruan dalam 20 tahun ke depan yang tentunya mengacu terhadap arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur:

1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah guna memperluas kesempatan kerja
2. Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah melalui bertambahnya *demand*.
3. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan
5. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi
6. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi
7. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
8. Sinergitas dengan Pemerintah Daerah Sekitar khususnya dalam penguatan peran Kota Pasuruan sebagai kota perdagangan dan jasa.
9. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian dan perikanan terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, nelayan dan petambak
10. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan

11. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan untuk daya saing produk pertanian dan perikanan.
12. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, dan pariwisata.
13. Pengembangan *closed loop model* pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi
14. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan
15. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri
16. Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection*
17. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi
18. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal
19. Pengembangan kepariwisataan & ekosistem ekraf yg holistik dengan pemenuhan paripurna 6A (*atraksi, aksesibilitas, amenities, ancillary services, aktivitas, available packages*) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
20. Penataan dan penguatan daya tarik wisata alam, perkotaan, kultural, dan religi secara kolaboratif dan partisipatif.
21. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
22. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
23. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon.
24. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
25. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
26. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.
27. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
28. Standarisasi Produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing.

29. Sertifikasi Seniman, Budayawan agar mampu bersaing secara global.
30. Peningkatan produktivitas BUMD.
31. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
32. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
33. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

5.1.4. Arah Kebijakan Misi IV Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima

Mewujudkan birokrasi yang adaptif saat ini merupakan sebuah keharusan. Perkembangan zaman yang cukup pesat harus mampu diadaptasi oleh sektor pemerintah khususnya. Selain itu tentunya masyarakat akan terus menuntut layanan publik yang prima. Konteks prima ialah mudah, cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu untuk mewujudkan birokrasi adaptif mewujudkan layanan publik prima pada periode pertama diawali dengan penataan regulasi serta kebutuhan dasar kelembagaan dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Selanjutnya pada periode kedua ialah fokus mengarahkan reformasi birokrasi berdampak. Periode ketiga yakni akselerasi integrasi teknologi informasi dalam layanan publik dioptimalkan sehingga pada 2045 birokrasi prima, kolaboratif, dan adaptif dapat terwujud.



Gambar V. 6 Arah Kebijakan Misi IV Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan uraian penahapan arah kebijakan misi Transformasi tata kelola di atas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Pasuruan dalam 20 tahun ke depan yang tentunya mengacu terhadap arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur:

1. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
2. Penataan sarana prasarana kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

3. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN yang profesional dan bebas korupsi.
 4. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
 5. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
 6. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
 7. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
 8. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
 9. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
 10. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Daerah
 11. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
 12. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
- 5.1.5. Arah Kebijakan Misi V Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan dibangun sebagai landasan pembangunan untuk seluruh aspek di Kota Pasuruan, pada sisi lain hal tersebut tidak dapat kita pisahkan dari keseimbangan lingkungan yang seringkali dikesampingkan. Periode pertama pembangunan infrastruktur diarahkan guna infrastruktur dasar dan penunjang yang fokusnya pemerataan. Selanjutnya kualitas infrastruktur dasar dan titik beratnya diarahkan pada sektor perekonomian. Struktur perekonomian dan infrastruktur yang telah solid pada periode kedua pada periode ketiga menitikberatkan terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan, selain itu pada periode ini integrasi infrastruktur pada seluruh aspek menjadi poin utama. Sehingga periode terakhir ialah harapannya infrastruktur mantap dan lingkungan hidup lestari.



Gambar V. 7 Arah Kebijakan Misi V
Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan
Berwawasan Lingkungan

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Berdasarkan uraian penahapan arah kebijakan misi pembangunan sarana dan prasarana berkualitas dan berwawasan lingkungan di atas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Pasuruan dalam 20 tahun ke depan yang tentunya mengacu terhadap arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur:

1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah dalam kota
2. Percepatan pemerataan akses layanan dan pemenuhan air minum aman dan sanitasi aman
3. Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah
4. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau pembaruan kawasan perkotaan pada area yang mengalami kemunduran daya dukung dan daya tampung sehingga tidak layak huni
5. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, dan berketahanan
6. Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik
7. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal
8. Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dengan jaringan pengumpan (feeder) dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
9. Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan sistem transportasi publik massal
10. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terintegrasi
11. Peningkatan prasarana perkeretaapian terutama pada ruas Bangil-Pasuruan (pembangunan jalur ganda); dan Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi (pembangunan jalur ganda)
12. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti Banjir, Gempa Bumi, Tsunami Banjir Bandang, Cuaca Eks trim, Likuefaksi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
13. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam kota untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan di

sektor layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb

14. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
15. Peningkatan ketahanan bencana melalui *pendekatan hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.
16. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan mitigasi bencana
17. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.
18. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
19. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
20. Pengembangan *multi-infrastructure backbone* yang menginterkoneksi antar kawasan strategis dalam kota
21. Penguatan pengelolaan jalan perkotaan dan permukiman
22. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU)
23. Peningkatan infrastruktur yang mendukung jaringan perkeretaapian di area perkotaan
24. Pengembangan sarana dan prasarana kepelabuhanan sungai berbasis pariwisata
25. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
26. Pengembangan sarana, prasarana dan regulasi ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan kota mendukung kebijakan ketenagalistrikan pemerintah
27. Pengembangan sarana, prasarana dan regulasi elektrifikasi *co firing* dan energi terbarukan di rumah tangga dan transportasi
28. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital pada lingkup perkotaan yaitu peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)
29. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis termasuk menjaga proporsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau
30. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
31. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

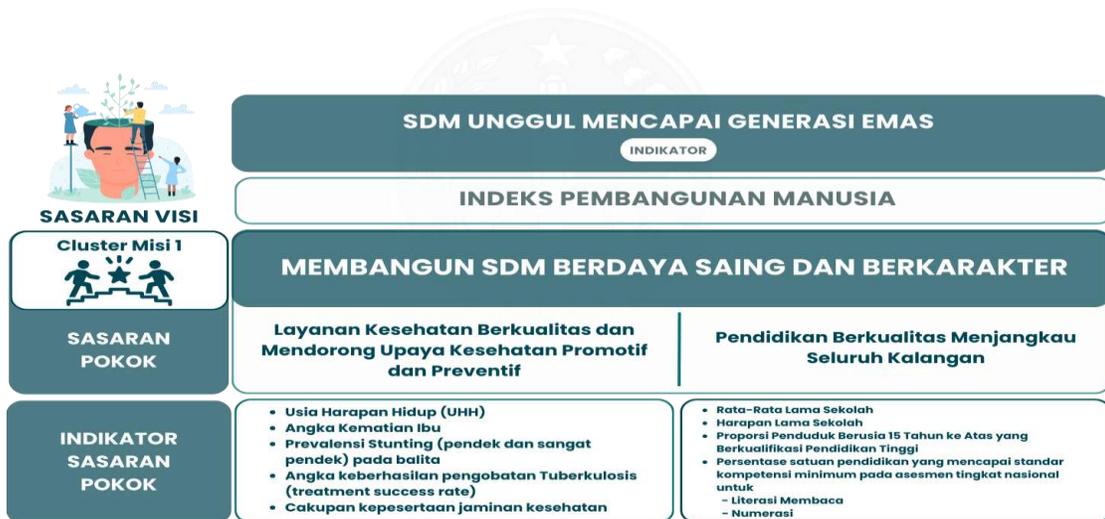
32. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, ruang terbuka hijau, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
33. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, *trust*, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
34. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
35. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
36. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi
37. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.

5.2. Sasaran Pokok Kota Pasuruan 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 mencakup rangkaian kinerja daerah yang menitikberatkan pada pencapaian pembangunan sejalan dengan realisasi Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yang diukur melalui indikator pada tingkat dampak dan bersifat progresif. Penyajian sasaran pokok RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 didasarkan pada misi, yang kemudian diuraikan berdasarkan sasaran visi. Selain itu, sasaran pokok tersebut dilengkapi dengan target yang spesifik pada setiap periode pembangunan untuk memastikan pencapaian yang optimal.

5.2.1. Sasaran Pokok Misi 1

Sasaran pokok Misi 1 dalam menciptakan Pembangunan SDM Berdaya Saing dan Berkarakter fokus terhadap 2 hal, yakni Layanan kesehatan berkualitas yang mendukung upaya kesehatan preventif serta pendidikan berkualitas yang inklusif. Berikut merupakan gambaran *Cascading* sasaran pokok Misi 1 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:



Gambar V. 8 Cascading Sasaran Pokok Misi 1 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045
 Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa kedua sasaran pokok Misi 1 RPJPD Kota Pasuruan dalam mewujudkan pembangunan SDM Berdaya Saing dan Berkarakter tentunya mendukung sasaran visi Kota Pasuruan yakni SDM Unggul Mencapai Generasi Emas yang memiliki indikator Indeks Modal Manusia. Gambaran *cascading* pencapaian sasaran visi yang *di breakdown* ke misi, sasaran pokok, serta indikatornya bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan hubungan pencapaian indikator terhadap indikator di atasnya.

5.2.2. Sasaran Pokok Misi 2

Sasaran pokok Misi 2 dalam menciptakan Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial fokus terhadap 3 hal, perluasan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, dan masyarakat berbudaya mewujudkan ketentraman dan keamanan sosial. Berikut merupakan gambaran *cascading* sasaran pokok Misi 2 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:



Gambar V. 9 Cascading Sasaran Pokok Misi 2 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045
 Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa ketiga sasaran pokok Misi 2 RPJPD Kota Pasuruan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat berdaya dan berbudaya tentunya mendukung sasaran visi Kota Pasuruan yakni penuntasan kemiskinan dan menekan ketimpangan yang memiliki indikator persentase kemiskinan dan indeks gini. Gambaran *cascading* pencapaian sasaran visi yang di *breakdown* ke misi, sasaran pokok, serta indikatornya bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan hubungan pencapaian indikator terhadap indikator di atasnya.

5.2.3. Sasaran Pokok Misi 3

Sasaran pokok Misi 3 dalam mewujudkan Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan fokus terhadap 3 hal, pengembangan potensi investasi dan optimalisasi Pasuruan sebagai kota jasa dan perdagangan. Berikut merupakan gambaran *cascading* sasaran pokok Misi 3 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:



Gambar V. 10 Cascading Sasaran Pokok Misi 3 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa kedua sasaran pokok Misi 3 RPJPD Kota Pasuruan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing tentunya mendukung sasaran visi Kota Pasuruan yakni ekonomi progresif dan pendapatan perkapita meningkat. Gambaran *cascading* pencapaian sasaran visi yang di *breakdown* ke misi, sasaran pokok, serta indikatornya bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan hubungan pencapaian indikator terhadap indikator di atasnya.

5.2.4. Sasaran Pokok Misi 4

Sasaran pokok Misi 4 dalam menciptakan Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima fokus terhadap 2 hal, layanan publik yang prima dan birokrasi lincah dan adaptif. Berikut merupakan gambaran *cascading* sasaran pokok Misi 4 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:



Gambar V. 11 Cascading Sasaran Pokok Misi 4 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa kedua sasaran pokok Misi 4 RPJPD Kota Pasuruan dalam menciptakan layanan publik prima tentunya mendukung sasaran visi Kota Pasuruan yakni mewujudkan birokrasi kelas dunia dengan indikator visi Indeks Profesionalisme ASN. Gambaran *cascading* pencapaian sasaran visi yang di *breakdown* ke misi, sasaran pokok, serta indikatornya bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan hubungan pencapaian indikator terhadap indikator di atasnya.

5.2.5. Sasaran Pokok Misi 5

Sasaran pokok Misi 5 dalam menciptakan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan fokus terhadap 2 hal, integrasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan lingkungan terhadap bencana. Berikut merupakan gambaran *cascading* sasaran pokok Misi 5 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045:



Gambar V. 12 Cascading Sasaran Pokok Misi 5 RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa kedua sasaran pokok Misi 5 RPJPD Kota Pasuruan dalam menciptakan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berwawasan lingkungan tentunya mendukung sasaran visi Kota Pasuruan yakni infrastruktur mantap lingkungan lestari dengan indikator visi IKLI dan Penurunan Intensitas Emisi GRK. Gambaran *cascading* pencapaian sasaran visi yang di *breakdown* ke misi, sasaran pokok, serta indikatornya bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan hubungan pencapaian indikator terhadap indikator di atasnya.

Tabel V. 1 Target Indikator Sasaran Pokok per Misi RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Target		
				Baseline	Target	
				2025	2045	
Misi 1: Membangun SDM Berdaya Saing dan Berkarakter	Layanan Kesehatan Berkualitas dan Mendorong Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.97	80.1	
		Angka Kematian Ibu	Jiwa per 100.000 kelahiran hidup	62.94	10.15	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,87 *	3,91 *	
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	91	100	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	%	99	100	
	Pendidikan Berkualitas Menjangkau Seluruh Kalangan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10.12	14.8	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14.91	18.02	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.69	14.01	
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk				
		Literasi Membaca	%	45,4	90,14	
		Numerasi	%	24,53	74,21	
	Misi 2: Masyarakat Berdaya dan Berbudaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Perluasan Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,19 - 4,51 *	3,17 - 2,00 *
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40.44	100
Kesetaraan Gender dan Keluarga Sejahtera		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Skor	72.29	77.5	
		Tingkat Kemiskinan	%	5,99 - 5,44 *	0,45 - 0,13 *	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68.68	75.05	
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,23 *	0,27 *	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,292 - 0,291 *	0,14 - 0,13	

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Target	
				Baseline	Target
				2025	2045
	Masyarakat Berbudaya dalam Mewujudkan Ketentraman dan Keamanan Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	78.35	85.52
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	57.61	70.49
Misi 3: Akselerasi Penguatan Daya Saing Ekonomi Berlandaskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Pengembangan Potensi Investasi Kota Pasuruan	ICOR	Skor	3,52	3,16
		Realisasi Investasi	Trilyun Rupiah	0.04	0.05
	Optimalisasi Kota Pasuruan Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Rasio PDRB Pariwisata	%	8,6	9,2
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,11 - 20,21	20,37 - 20,69
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,04 - 5,14	5,21 - 5,77
		Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan			
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	19,53 - 20,41	15,18 - 19,04
		PDRB sektor Perdagangan	Rp	3,311,962	5,780,036
Misi 4: Transformasi Birokrasi Adaptif Mewujudkan Layanan Publik Prima	Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,58	5
	Birokrasi Lincah dan Adaptif	Indeks SPBE	Indeks	4,12	5
		Indeks Integritas	Indeks	74,1	95,05
		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,73	0,88
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	59,05	61,50
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,38	80
Misi 5: Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan berwawasan Lingkungan	Integrasi Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,95	96 *
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	83 *	100 *
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	49,5	100
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Meningkat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	59.25	95
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,01	63,59
		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	30,55	100
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	79,32 *	67,55 - 57,45 *

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan, 2024

BAB VI PENUTUP

6.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045 berfungsi sebagai panduan untuk perencanaan dan implementasi pembangunan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama periode 2025 hingga 2045. Pasca berakhirnya masa berlaku RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045, diperlukan penyusunan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2045-2065 sebagai pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahun berikutnya.

Pada tahun 2045, masa transisi tersebut ditandai dengan evaluasi RPJPD, diikuti dengan penyusunan rancangan awal sesuai panduan yang berlaku. Evaluasi ini menjadi krusial untuk menilai pencapaian, menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta merinci langkah-langkah strategis yang relevan demi mendukung perkembangan Kota Pasuruan dalam periode 2045-2065. Sebagai instrumen perencanaan berkelanjutan, RPJPD Tahun 2045-2065 diharapkan mampu memberikan landasan yang solid bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Pentingnya penerapan kaidah pelaksanaan adalah untuk memastikan bahwa semua arah kebijakan dan tujuan pembangunan dapat berhasil dicapai dan dilaksanakan. Beberapa kaidah pelaksanaan ini mencakup hal-hal mulai dari penerapan rencana turunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, hingga proses peninjauan kembali. Beberapa skema yang dimaksudkan dalam kaidah pelaksanaan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Calon Kepala Daerah Kota Pasuruan wajib mempelajari dan memahami arah kebijakan dalam RPJPD Kota Pasuruan khususnya pada periode dia saat mencalonkan;
2. Tahap setelah diterbitkannya dokumen RPJPD ini, maka Langkah berikutnya yaitu setiap arah kebijakan sampai dengan target pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan harus mempertimbangkan target dalam dokumen ini. Disamping itu, setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada Dokumen RPJPD ini;
3. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang di masyarakat yang sesuai dengan target dan arah kebijakan RPJPD;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kota Pasuruan tahun 2025-2045;

5. Monitoring harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu dalam kurun waktu tahunan, untuk melihat pencapaian target di masing-masing tahunnya;
6. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap periode 5 (lima) tahunan, untuk mengetahui pencapaian target pembangunan, serta apakah diperlukan melakukan perbaikan pada dokumen RPJPD ini;
7. Pelaksanaan semua kebijakan sampai dengan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini harus dilaksanakan dengan melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor bisnis, media massa, organisasi kemasyarakatan, sampai dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Pasuruan.

6.3. Penutup

RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kota Pasuruan dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2045 serta bagi lembaga DPRD Kota Pasuruan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2045.

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan DPRD Kota Pasuruan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan Kota Pasuruan tahun 2025 hingga tahun 2045 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Plt. WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO